

LAPORAN TAHUNAN

KEMENTERIAN PERTANIAN
TAHUN

2018



BIRO PERENCANAAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
TAHUN 2019



Ringkasan Eksekutif

Tahun 2018 kinerja sektor pertanian memperlihatkan hasil cukup baik, Indikator Makro Pertanian Tahun 2018 menunjukkan angka pertumbuhan yang cukup tinggi bila dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Angka pertumbuhan PDB sektor pertanian 2018 tercatat mencapai 4,58% dan berkontribusi terhadap nasional sebanyak 10,50%. Selain itu, angka PDB sektor pertanian Tahun 2018, tertinggi selama kurun waktu tujuh tahun terakhir. Berdasarkan Sumber BPS RI (2019) dan masih merupakan angka sangat-sangat sementara bahwa sub sektor perkebunan merupakan kontributor terbesar menyumbang PDB sektor pertanian (26,24%), sedangkan sub tanaman pangan (25,79%), sub sektor peternakan (11,98%) dan hortikultura 11,54%) secara perlahan menunjukkan trend peningkatan yang signifikan.

Beberapa catatan keberhasilan sektor pertanian pada Kabinet Kerja sepanjang tahun 2018 di sektor pertanian diantaranya; produksi pangan strategis meningkat secara signifikan. Sub sektor tanaman pangan produksi padi 83,03 juta ton meningkat 100,65 % dari target 82,50 juta ton dan meningkat 2,33% dari produksi tahun 2017, produksi jagung tahun 2018 mencapai 30,06 juta ton, atau mencapai 100,19 % dari target 30,00 juta ton dan meningkat 3,91% dari produksi tahun 2017 dan produksi kedelai tahun 2018 mencapai 0,98 juta ton meningkat 81,48% dari tahun 2017 (ARAM I/Kementan dan BPS). Sub sektor hortikultura, produksi aneka cabai tahun 2018 mencapai 2,14 juta ton atau 95,14% dari target dan meningkat 5,95% dari tahun 2017, produksi bawang merah 1,42 juta ton atau 88,38% dari target dan meningkat 1,36% dari tahun 2017 (angka Prognosa). Sub sektor perkebunan, produksi karet tahun 2018 mencapai 3,77 juta ton meningkat 5,01% dari tahun 2017 dan produksi kelapa sawit tahun 2018 mencapai 40,57 juta ton meningkat 6,85% dari tahun 2017 (angka Sementara) serta produksi tebu tahun 2018 mencapai 2,17 juta ton meningkat 2,36% dari tahun 2017 (angka Sementara). Sub sektor peternakan, Produksi daging sapi/kerbau tahun 2018 mencapai 0,53 juta ton meningkat 1,92% dari tahun 2017 dan produksi ayam pedaging tahun 2018 mencapai 2,14 juta ton meningkat 4,39% dari tahun 2017 (angka Sementara).

Catatan pengakuan internasional terhadap kinerja pertanian Indonesia diantaranya; Ketahanan Pangan Indonesia berdasarkan hasil evaluasi *Economist Intelligence Unit/EIU* pada *Global Food Security Index (GFSI)* 2017 berada pada peringkat 69 dari 113 negara dan dari aspek Ketersediaan Pangan peringkat 64 dari peringkat 76 tahun 2014. Dari hasil evaluasi EIU terhadap *Food Sustainability Index*, Indonesia peringkat 21 dari 25 negara, dari aspek keberlanjutan pertanian peringkat 16 di atas Amerika Serikat, China dan India. Hal lainnya adalah, Indonesia sejak tahun 2016 tidak impor beras medium, cabai segar dan bawang merah, bahkan Indonesia mampu ekspor jagung 57.650 ton ke Filipina, bawang merah 7.750 Ton ke 6 negara (Thailand, Taiwan, Vietnam, Singapore, Malaysia, Timor Leste).

Kata Pengantar

Laporan Tahunan Kementerian Pertanian Tahun 2018 ini merupakan laporan pelaksanaan kegiatan dari 11 Program lingkup Kementerian Pertanian selama Tahun Anggaran 2018. Sebagian besar kegiatan Kementerian Pertanian pada Tahun 2018 dapat dilaksanakan dengan cukup baik, yaitu dengan terlaksananya berbagai kegiatan di masing-masing program (unit Eselon I) sesuai perencanaan yang ditetapkan. Pada masa mendatang, Kementerian Pertanian dituntut untuk terus meningkatkan bukan hanya kuantitas juga kualitas pelaksanaan kegiatan menjadi lebih baik dan terencana serta penuh tanggung jawab, karena tantangan yang dihadapi akan lebih berat dan lebih kompleks dalam mencapai sasaran, tujuan dan harapan pembangunan pertanian Tahun 2015-2019.

Laporan ini menginformasikan gambaran pelaksanaan kegiatan program lingkup Kementerian Pertanian. Pelaksanaan kegiatan program dimaksud berupa proses pencapaian hasil kinerja pembangunan pertanian kurun waktu tahun 2018 dengan sasaran peningkatan produksi serta berbagai aspek pendukung lainnya seperti pelaksanaan kinerja penyediaan sarana prasarana pertanian, pelaksanaan kinerja peningkatan sumberdaya manusia, penelitian dan pengembangan, peningkatan ketahanan pangan, serta perkarantinaan.

Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Laporan Tahunan Kementerian Pertanian Tahun 2018 ini, kami sampaikan ucapan terima kasih dan berharap kiranya kerjasama yang sudah terjalin baik selama ini dapat terus ditingkatkan. Kami menyadari bahwa laporan ini belum bisa memuat seluruh aspek pelaksanaan kegiatan pembangunan pertanian secara utuh, namun berbagai aspek penting pelaksanaan kegiatan pembangunan pertanian yang perlu untuk diketahui publik telah kami coba paparkan secara transparan.

Akhirnya kami berharap semoga laporan ini memberi manfaat bagi semua pihak.

Jakarta, Mei 2019



Syukur Iwantoro

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF.....	Hal i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR DAN GRAFIK.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Visi dan Misi	2
C. Tujuan dan Sasaran	3
D. Ruang Lingkup	3
E. Sasaran Strategi	4
F. Arah Kebijakan	5
BAB II. STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN PERTANIAN	7
BAB III. PELAKSANAAN PROGRAM KEMENTERIAN PERTANIAN TA. 2018	11
A. Pelaksanaan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian	11
B. Pelaksanaan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian	41
C. Pelaksanaan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	44
D. Pelaksanaan Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura	55
E. Pelaksanaan Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan.....	71
F. Pelaksanaan Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat.....	96
G. Pelaksanaan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	97
H. Pelaksanaan Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-Industri Berkelanjutan	103
I. Pelaksanaan Program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan serta Pendidikan Pertanian	124
J. Pelaksanaan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat.....	131
K. Pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati	147

BAB IV. PENGELOLAAN ANGGARAN DAN SUMBERDAYA MANUSIA	169
A. Realisasi Anggaran Kementerian Pertanian Tahun 2018.....	169
B. Keragaan SDM Kementerian Pertanian Tahun 2018.....	174
BAB V. PERMASALAHAN, TANTANGAN DAN SOLUSI TINDAKLANJUT	175
A. Masalah	175
B. Rekomendasi	182
C. Solusi dan Tindakanlanjutan	183
BAB VI. PENUTUP	189
LAMPIRAN	

Daftar Tabel

	Hal
Tabel 1. Hasil penghitungan Angka Prognosa, Angka Ramalan I dan Angka Ramalan II Produksi Cabai dan Bawang Merah Tahun 2018	22
Tabel 2. Realisasi Penerbitan Hak PVT Tahun 2017- 2018	27
Tabel 3. Perkembangan Pendaftaran Varietas Hortikultura dan Penerbitan Tanda Daftar Varietas Tahun 2011 s.d 2018	28
Tabel 4. Capaian Kinerja Pelayanan Perizinan Pupuk Tahun 2018	28
Tabel 5. Capaian Kinerja Pelayanan Perizinan Benih dan SDG Tanaman Tahun 2018 dan 2017	29
Tabel 6. Hasil Nilai IKM Tahun 2018	31
Tabel 7. Judul dan Pembicara Seminar Pembangunan Pertanian dan Perdesaan, 2018	40
Tabel 8. Laporan Unit Pengelola Gratifikasi Tahun 2017 dan 2019	41
Tabel 9. Capaian Produksi, Luas Panen, dan Produktivitas Padi Tahun 2018	44
Tabel 10. Perkembangan Produksi, Luas Panen, dan Produktivitas Padi Tahun 2014-2018	44
Tabel 11. Produksi dan Kebutuhan Beras Tahun 2018	45
Tabel 12. Capaian Produksi, Luas Panen, dan Produktivitas Jagung Tahun 2018	45
Tabel 13. Perkembangan Produksi, Luas Panen, dan Produktivitas Jagung Tahun 2014-2018	45
Tabel 14. Produksi dan Kebutuhan Jagung Tahun 2018	46
Tabel 15. Capaian Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Kedelai Tahun 2018	46
Tabel 16. Perkembangan Produksi, Luas Panen, dan Produktivitas Kedelai Tahun 2014-2018	46
Tabel 17. Perkembangan Produksi dan Kebutuhan Kedelai Tahun 2018	47
Tabel 18. Rekapitulasi Realisasi Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia Tahun 2018	48
Tabel 19. Realisasi Perbanyak Benih Sumber Tahun 2018	48
Tabel 20. Realisasi Bantuan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Tahun 2018..	51
Tabel 21. Realisasi Kegiatan Wilayah Perbatasan Tahun 2018	53
Tabel 22. Realisasi Kegiatan Desa Mandiri Benih	53
Tabel 23. Realisasi Perkembangan Kegiatan Pantauan KSP 2018	54
Tabel 24. Target dan Realisasi Komoditas Untuk Peningkatan Produksi, Komoditas Ekspor, dan Substitusi Impor Tahun 2018	55
Tabel 25. Perbandingan Luas Panen Komoditas Untuk Peningkatan Produksi, Komoditas Ekspor, dan Substitusi Impor Tahun 2018 dan 2017	56
Tabel 26. Kontribusi Subsektor Hortikultura dibanding Subsektor Lain Terhadap Sektor Pertanian Tahun 2018	57
Tabel 27. Ekspor dan Impor Komoditas Hortikultura Tahun 2017 dan 2018	58
Tabel 28. Hasil Pencapaian Kinerja Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat Tahun 2018	59

Tabel 29.	Perkembangan volume Ekspor Komoditas Strategis Perkebunan	73
Tabel 30.	Pertumbuhan volume Ekspor Komoditas Strategis Perkebunan	74
Tabel 31.	Analisis realisasi kinerja dan capaian produksi Gula tebu Tahun 2015-2018..	75
Tabel 32.	Capaian Populasi Produksi Benih dan Bibit Ternak Than 2018	76
Tabel 33.	Jumlah Sertifikasi Benih Dan Bibit Dari Tahun 2018	77
Tabel 34.	Pengembangan Padang Penggembalaan	78
Tabel 35.	Capaian kegiatan pemeliharaan padang penggembalaan	78
Tabel 36.	Capaian Kegiatan Pakan Konsentrat di UPT	79
Tabel 37.	Pembebasan PHMS Prioritas Tahun 2012-2018	81
Tabel 38.	Realisasi Penanganan Gangguan Reproduksi Dan Tindak Lanjut Penanganan Gangrep Tahun 2018 (data per 20 Desember 2018)	82
Tabel 39.	Realisasi penanggulangan gangrep per UPT Veteriner tahun 2018	82
Tabel 40.	Sebaran THL Dokter Hewan dan Paramedik Veteriner 2018	83
Tabel 41.	NSPK Kelembagaan dan Sumber Daya Kesehatan Hewan	84
Tabel 42.	Penerbitan Sertifikat dan SK Izin Usaha Obat Hewan	85
Tabel 43.	Penerbitan SK Nomor Pendaftaran Obat Hewan	85
Tabel 44.	Penilaian CPOHB dan Sertifikasi CPOHB	86
Tabel 45.	Data Ekspor Hatching Egg (Telur Tetas)	87
Tabel 46.	Data Ekspor Hewan Hidup Kambing Dan Domba	87
Tabel 47.	Data Ekspor Ayam Cemani Tahun 2018	87
Tabel 48.	Data Ekspor Luwak/Musang/Palm Civet Tahun 2018	88
Tabel 49.	Data Ekspor Berang-Berang/Beaver Small Claws (Aonyx Cinerea)	88
Tabel 50.	Target dan Realisasi NKV Tahun 2018	89
Tabel 51.	Target dan Realisasi Sampel 2018	90
Tabel 52.	Total Penerimaan dan Distribusi Semen Beku Tahun 2018	92
Tabel 53.	Realisasi Pengadaan dan Distribusi N2 Cair Tahun 2018	92
Tabel 54.	Stok nasional semen beku dan N2 Cair per tanggal 31 Desember 2018	92
Tabel 55.	Status Ketersediaan N2 Cair di Provinsi	93
Tabel 55.	Realisasi Distribusi Ayam/Itik, Pakan, Obat-obatan dan Vitamin.....	95
Tabel 56.	Realisasi Distribusi Ayam/Itik Kegiatan Bekerja Tahun 2018	95
Tabel 57.	Realisasi Distribusi Pakan Program Bekerja Tahun 2018	96
Tabel 58.	Realisasi Distribusi Obat dan Vitami Program Bekerja Tahun 2018	96
Tabel 59.	Capaian Indikator Kinerja, Sasaran Program Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2018	97
Tabel 60.	Fasilitasi Pembiayaan Pertanian	101
Tabel 61.	Target gen pada padi untuk mutasi menggunakan teknik CRISPR	115
Tabel 62.	Pengaruh Pemberian Amelioran Terhadap Tanaman Jagung	122
Tabel 63.	Target dan Realisasi Kegiatan Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian Tahun 2018	124
Tabel 64.	Target dan Realisasi Kegiatan Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian Tahun 2018	126
Tabel 65.	Target dan Realisasi Kegiatan Pendidikan Pertanian Tahun 2018	128
Tabel 67.	Target dan Realisasi Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan PPSDMP Tahun 2018	130
Tabel 68.	Tingkat Efisiensi Kegiatan Badan PPSDMP Tahun 2018	130
Tabel 69.	Perkembangan jumlah penduduk rawan pangan tahun 2014 – 2018 per provinsi	131

Tabel 70.	Pelaksanaan Kawasan Mandiri Pangan 2018	134
Tabel 71.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Tahun 2015 – 2018	136
Tabel 72.	Jumlah sampel per provinsi berdasarkan kapasitas penggilingan	137
Tabel 73.	Persentase jumlah laporan masuk per provinsi bulan Maret–Desember 2018	138
Tabel 74.	Perkembangan Harga dan Nilai Koefisien Variasi Harga Pangan Tingkat Produsen Th. 2018	140
Tabel 75.	Perkembangan Harga dan Nilai Koefisien Variasi Harga Pangan Tingkat Konsumen Tahun 2018	141
Tabel 76.	Target dan Realisasi Banper Kegiatan PUPM/TTI tahun 2018	142
Tabel 77.	Perkembangan Cadangan Beras Pemerintah Tahun 2015 – 2018	143
Tabel 78.	Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Provinsi Tahun 2016 – 2018.....	143
Tabel 79.	Pelaksanaan Kegiatan Laporan Data/Informasi Pasokan dan Harga Pangan Provinsi Tahun 2015-2018	145
Tabel 80.	Capaian Sertifikasi Prima tahun 2018	156
Tabel 81.	Rekapitulasi Persyaratan Teknis Pemasukan Benih	154
Tabel 82.	Kasus pelanggaran perkarantinaan	155
Tabel 83.	Nota Kesepahaman/MoU Badan Karantina Pertanian TA. 2018.....	157
Tabel 84.	Perjanjian Kerjasama Badan Karantina Pertanian TA. 2018	157
Tabel 85.	Draft Nota Kesepahaman/ MoU Badan Karantina Pertanian TA. 2018	157
Tabel 86.	Notifikasi Peraturan SPS	158
Tabel 87.	Pengembangan Metode Pengujian Laboratorium	160
Tabel 88.	Paremeter Uji pada penambahan ruang lingkup Akreditasi Laboratorium oleh KAN yang menjadi Sasaran Mutu tahun 2018	160
Tabel 89.	Pelatihan In house SMM di BBUSKP	161
Tabel 90.	Hasil Uji Banding Laboratorium Karantina Hewan BBUSKP	161
Tabel 91.	Hasil Uji Banding Laboratorium Karantina Tumbuhan BBUSKP	161
Tabel 92.	Hasil Uji Banding Laboratorium Keamanan Hayati Hewani BBUSKP	162
Tabel 93.	Hasil Uji Banding Laboratorium Kemanan Hayati Nabati BBUSKP	162
Tabel 94.	Partisipasi Uji Banding Laboratorium KH	162
Tabel 95.	Partisipasi Uji Profisiensi Laboratorium Karantina Hewan	162
Tabel 96.	Partisipasi Uji Profisiensi Laboratorium Karantina Tumbuhan	163
Tabel 97.	Partisipasi Uji Profisiensi Laboratorium Karantina Hewan	163
Tabel 98.	Frekuensi Layanan Pemeriksaan Sampel Uji Laboratorium	163
Tabel 99.	Daftar Pengadaan Barang di BBUS KP TA. 2018	164
Tabel 100.	Dukungan Aparatur Pegawai dan Layanan Perkantoran	166
Tabel 101.	Daftar Pengadaan Barang di BUTTMKP TA. 2018.....	166
Tabel 102.	Layanan Perkantoran di BUT TMKP TA. 2018	167
Tabel 103.	Pengadaan Barang di UPT KP	167

Daftar Gambar

	Hal
Gambar 1. Agenda Nawacita	5
Gambar 2. Peningkatan Kapasitas Bandwith Internet Kementan	32
Gambar 3. Permohonan Hak PVT Menurut Kelompok Tanaman Tahun 2018	35
Gambar 4. Perkembangan Permohonan Hak PVT Menurut kelompok Tanaman Tahun 2017-2018	35
Gambar 5. Permohonan Hak PVT Tahun 2018 Menurut Kelompok Pemohon	35
Gambar 3. Jumlah Pengguna Jaringan Komunikasi Data (Internet) Kementan	35
Gambar 4. Permohonan Hak PVT Menurut Kelompok Tanaman Tahun 2018	35
Gambar 5. Laporan Unit Pengelola Gratifikasi Tahun 2019	50
Gambar 6. Tenaga Hortikultura 2017 dan 2018	57
Gambar 7. Nilai Tukar Petani Hortikultura Tahun 2018	58
Gambar 8. Capaian Kegiatan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pakan Tahun 2015-2018	79
Gambar 9. Perkembangan Unit Puskesmas Kurun Waktu 10 Tahun	82
Gambar 10. Jumlah Puskesmas aktif tahun 2018	83
Gambar 12. Tabel sebaran dan penempatan THL Paramedik Hewan	84
Gambar 13. Pemotongan Betina Produktif Nasional Tahun Bulan Januari-November Tahun 2017 dan 2018	89
Gambar 14. Peta Ketersediaan Semen Beku	92
Gambar 15. Peta Ketersediaan N2 Cair	93
Gambar 16. Berbagai peta yang dihasilkan oleh BBSDLP	116
Gambar 17. Peta tanah semi detail skala 1:50.000 Kabupaten Gorontalo Utara	120
Gambar 18. Stok Setara Beras di Penggilingan Pada Bulan Maret – Desember 2018	121
Gambar 19. Stok setara beras di penggilingan kapasitas besar bulan Maret-Desember 2018	138
Gambar 20. Stok setara beras di penggilingan kapa-sitas sedang pada bulan Maret-Desember 2018	139
Gambar 21. Stok gabah dan beras di penggilingan kapasitas kecil bulan Maret-Desember 2018.....	139
Gambar 22. Presentase stok setara beras di penggilingan terhadap produksi beras bulan Maret Desember 2018	139
Gambar 23. Pengadaan Beras, Bawang Merah Per Bulan 2018	143

Daftar Lampiran

	Hal
Lampiran 1. Distribusi Menurut Golongan/Ruang, Jenis Kelamin Dan Pendidikan Berdasarkan Eselon I Kementerian Pertanian.....	193
Lampiran 2. Ringkasan hasil monitoring SOP dan hasil Evaluasi SOP	194
Lampiran 3. Capaian Hasil PMPRB Kementan Tahun 2018	196
Lampiran 4. Untuk Partisipasi dalam Kegiatan Pameran Tahun 2018	196
Lampiran 5. Rekapitulasi SK Penetapan Kantor Pusat dan Kantor Daerah tahun 2018	196
Lampiran 6. Kategori Eselon I	197
Lampiran 7. Kategori Eselon II	197
Lampiran 8. Kategori Eselon III	197
Lampiran 9. Atlas sebaran fase pertanaman padi sawah di Indonesia	197
Lampiran 10. Hibah BMN berupa Kendaraan Roda Dua / Sepeda Motor	198
Lampiran 11. Hibah BMN berupa Alat Ukur GPS	198
Lampiran 12. Target dan Realisasi Permohonan Hak PVT Tahun 2018	198
Lampiran 13. Capaian Kinerja Pelayanan Pendaftaran Varietas Lokal dan Hasil Pemuliaan Tahun. 2018 dan 2017	199
Lampiran 14. Target dan Realisasi Permohonan Pendaftaran Varietas Lokal Melalui Kerjasama Percepatan Pendaftaran Varietas Lokal Tahun 2018	199
Lampiran 15. Capaian Kinerja Pelayanan Perizinan Pestisida Tahun 2018 dan 2017	200
Lampiran 16. Capaian Kinerja Pelayanan Perizinan Peternakan Tahun 2018 dan 2017	200
Lampiran 17. Penilaian Maturitas SPI Unit Eselon I Kementerian Pertanian Tahun 2017-2018.....	201
Lampiran 18. Perkembangan Populasi Ternak Sapi Lokal Tahun 2018	201
Lampiran 19. Perkembangan Populasi Ternak Kerbau Lokal Tahun 2018	201
Lampiran 20. Perkembangan Populasi Ternak Kambing Lokal Tahun 2018.....	202
Lampiran 21. Wilayah Bebas Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) Sampai Tahun 2018.....	202
Lampiran 22. Wilayah Bebas Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) Sampai Tahun 2018.....	203
Lampiran 23. Data Ekspor Obat Hewan	203
Lampiran 24. Negara Tujuan ekspor Obat Hewan	204
Lampiran 25. Perusahaan eksportir Obat Hewan	205
Lampiran 26. Data Pematangan Betina Produktif Nasional Bulan Januari-November Tahun 2017 dan 2018	205
Lampiran 27. Status Akreditasi Laboratorium UPT Lingkup Badan Karantina Pertanian s/d Desember 2018	207
Lampiran 28. Frekuensi layanan sertifikasi Karantina Hewan per UPT Karantina Pertanian	209
Lampiran 29. Frekuensi Kegiatan Tindakan Karantina Impor, Ekspor Domestik Masuk dan Domestik Keluar (Karantina Hewan)	210
Lampiran 30. Frekuensi layanan sertifikasi Karantina Tumbuhan per UPT Karantina Pertanian	210
Lampiran 31. Frekuensi Kegiatan Tindakan Karantina Impor, Ekspor, Domestik Masuk dan Domestik Keluar (Karantina Tumbuhan)	211
Lampiran 32. Konsumsi per Kapita Buah dan Sayur dalam Rumah Tangga Tahun 2017	211

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan laporan kegiatan merupakan salah satu kewajiban bagi Kementerian/Lembaga sebagai amanat dari Hukum dan Perundang-undangan yang berlaku di suatu negara. Dengan disusunnya laporan kegiatan, maka Kementerian/Lembaga dapat merencanakan dengan lebih baik kegiatan yang akan dilaksanakan pada waktu ke depan. Dalam penyusunan laporan biasanya terklasifikasi berbagai aspek pelaksanaan kegiatan pada rentang waktu tertentu, sehingga para penentu kebijakan dapat merumuskan dan menentukan suatu kebijakan yang akan dilaksanakan pada rentang waktu ke depan. Tentunya laporan kegiatan harus dibuat dengan sebenar-benarnya dengan sumber-sumber yang dapat diakui kredibilitasnya.

Laporan Kegiatan Pembangunan Pertanian Tahun 2018 disusun atas dasar hukum dan perundang-undangan yang berlaku serta disusun dengan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Penyusunan Laporan Kegiatan Pembangunan Pertanian Tahun 2018 merupakan perwujudan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 Ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2010 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); Peraturan Menteri Pertanian No. 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.

Laporan Tahunan mengandung data dan informasi yang lengkap mencakup laporan pelaksanaan kegiatan fisik, laporan pelaksanaan pemanfaatan keuangan negara, serta manajemen monitoring dan evaluasi meliputi target, realisasi dan klasifikasi

permasalahan/kendala yang dihadapi serta tindaklanjut. Laporan yang dibuat merupakan bagian dari akuntabilitas suatu instansi bukan tuntutan dari instansi/lembaga tertentu

Laporan Tahunan merupakan salah satu keluaran dari kegiatan monitoring dan evaluasi seperti tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 (PP 39/2006) tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Kandungan di dalamnya meliputi :

1. Evaluasi yaitu rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standard;
2. Monitoring merupakan suatu kegiatan pengamatan secara seksama suatu keadaan atau kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu, dengan tujuan agar semua data masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam pengambilan keputusan tindakan selanjutnya yang diperlukan. Tujuannya adalah mengamati/mengetahui perkembangan dan kemajuan, identifikasi dan permasalahan serta antisipasi/upaya pemecahannya.;
3. Pengendalian yaitu serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai rencana yang ditetapkan.

B. Visi Dan Misi

1. Visi

Sejalan dengan visi pembangunan nasional era Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, yaitu "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong", maka dengan memperhatikan visi pemerintah tersebut, mempertimbangkan masalah dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan pertanian, Kementerian Pertanian memiliki visi "Terwujudnya Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani".

Kedaulatan Pangan merupakan hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang akan memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumberdaya lokal. Kesejahteraan petani merupakan kondisi hidup layak bagi petani dan keluarganya sebagai aktor utama pelaku usaha pertanian yang diperoleh dari kegiatan di lahan dan usaha yang digelutinya.

2. Misi

Berdasarkan pada tugas, fungsi dan wewenang dalam peraturan perundang-undangan dan penjabaran dari misi pembangunan nasional, maka misi Kementerian Pertanian adalah :

- a. Mewujudkan Ketahanan Pangan, adalah melaksanakan pembangunan dalam rangka meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan sebagai pemenuhan konsumsi pangan masyarakat;
- b. Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian, adalah mendorong komoditas pertanian memiliki keunggulan bersaing dan nilai yang lebih baik dari hasil produksi, penyimpanan, pengolahan dan distribusi;
- c. Mewujudkan Kesejahteraan Petani, adalah meningkatkan kesejahteraan petani dengan melakukan perlindungan dan pemberdayaan petani;
- d. Mewujudkan Kementerian Pertanian yang Transparan, Akuntabel, Profesional dan Berintegritas Tinggi, adalah meningkatkan tatakelola organisasi Kementerian Pertanian dalam mewujudkan organisasi yang transparan, akuntabel, professional dan berintegritas tinggi dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

C. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

Buku laporan ini disusun dengan tujuan dapat memberikan informasi atau gambaran terhadap Pelaksanaan Program kegiatan selama Tahun 2018 meliputi capaian kinerja Kementerian Pertanian, meliputi indikator makro, capaian produksi pertanian, realisasi output kegiatan dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi selama kurun waktu Tahun 2018.

2. Sasaran

Diharapkan laporan ini dapat menyajikan informasi kepada publik, petani dan pelaku agribisnis, perencana dan pelaksana pembangunan pertanian di pusat maupun daerah mengenai keberhasilan dan kendala yang dihadapi Kementerian Pertanian dalam mencapai sasaran. Selain itu diharapkan laporan ini dapat memberikan umpan balik dan perbaikan perencanaan bagi para pemangku kebijakan.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup laporan tahunan 2018 ini didasarkan pada kegiatan penerima APBN Tahun Anggaran 2018 yang mengacu pada Renstra 2015-2019 meliputi program :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian (018.01.01);
2. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian (018.02.03);
3. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan (018.03.06);
4. Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura (018.04.07);
5. Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan (018.05.08);
6. Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat (018.06.09);
7. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian (018.08.11);
8. Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-Industri Berkelanjutan (018.09.12);
9. Program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian (018.10.13);
10. Program Pendidikan Pertanian (018.10.16);
11. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat (018.11.14);
12. Program Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati (018.12.15);

Kegiatan penerima APBN Tahun Anggaran 2018 yang mengacu pada Renstra 2015-2019 meliputi kegiatan pusat (kegiatan pusat), daerah (kegiatan pusat yang di daerah/UPT lingkup Kementerian), dana dekonsentrasi (kegiatan pusat yang dilaksanakan oleh Pemda Provinsi dan dibiayai oleh APBN) dan dana tugas pembantuan (kegiatan pusat yang dilaksanakan oleh Pemda provinsi/kabupaten/kota dan dibiayai oleh APBN).

E. Sasaran Strategi

Sasaran strategis merupakan gambaran kondisi yang akan dicapai hingga tahun 2019. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam dalam periode 2015-2019 adalah :

1. Meningkatnya produksi padi, jagung, kedelai, daging dan gula
2. Terjaminnya distribusi pangan
3. Meningkatnya akses dan pemanfaatan pangan dan gizi
4. Meningkatnya konsumsi pangan lokal
5. Stabilitasnya produksi cabai dan bawang merah
6. Berkembangnya komoditas bernilai tambah dan berdaya saing
7. Tersedianya bahan baku bioindustri dan bioenergi
8. Meningkatnya kualitas sumberdaya insani petani

9. Meningkatnya pendapatan keluarga petani
10. Meningkatnya kualitas aparatur dan layanan kelembagaan Pertanian
11. Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian

E. Arah Kebijakan

Arah kebijakan dan strategi nasional diwujudkan dalam sembilan agenda prioritas yang di sebut Nawa Cita lima tahun pemerintahan yaitu :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara;
2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya,
3. Membangun indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia indonesia,
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa, dan
9. Memperteguh ke-bhinekaan dan memperkuat restorasi sosial indonesia.

AGENDA 7 NAWACITA

Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik

PENINGKATAN KEDAULATAN PANGAN

Kedaulatan pangan dicerminkan pada kekuatan untuk mengatur masalah pangan secara mandiri, yang perlu didukung dengan :

- a. Ketahanan pangan, terutama kemampuan mencukupi pangan dari produksi dalam negeri
- b. Pengaturan kebijakan pangan yang dinamis dan ditentukan oleh bangsa sendiri; dan
- c. Mampu melindungi dan menyejahterakan pelaku utama pangan, terutama petani dan nelayan

Sasaran :

1. Peningkatan ketersediaan pangan bersumber produksi dalam negeri:
 - Ketel: mencapai swasembada terutama memenuhi kebutuhan pengrajin dan kebutuhan konsumsi tahu tempe
 - Jagung: keragaman pangan dan pakan lokal
 - Daging sapi: untuk mengamankan konsumsi daging sapi di tingkat rumah tangga
 - Gula: untuk memenuhi konsumsi gula rumah tangga dan industri rumah tangga
2. Peningkatan distribusi dan aksesibilitas pangan:
 - Pengawasan distribusi pangan dan peningkatan Cadangan Beras Pemerintah untuk stabilitas harga
 - Pengembangan sistem logistik pangan, sistem logistik nasional (SLIN)
3. Peningkatan kualitas konsumsi pangan seimbang yang dicerminkan pada peningkatan Peta Pangan Harapan (PPH) 93,5 (2019)
4. Tersedianya Sarana dan Prasarana Irigasi:
 - Terbangunnya dan meningkatnya layanan Jaringan Irigasi 1 juta Ha
 - Terhabetasinya Jaringan Irigasi 3 juta Ha
 - Terbangunnya dan meningkatnya Jaringan Irigasi tambak 15 ribu Ha
 - Terbangunnya 50 waduk baru

Sekretariat Jenderal
Kementerian Pertanian

www.pertanian.go.id

Gambar 1. Agenda Nawacita Mendukung

Berdasarkan rincian dari sembilan agenda prioritas (nawa cita) tersebut, maka agenda prioritas yang terkait langsung dengan bidang pertanian yaitu :

1. Peningkatan agroindustri, dan
2. Peningkatan kedaulatan pangan.

Peningkatan agroindustri, sebagai bagian dari agenda visi nawa cita (meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional). Sasaran dari peningkatan agroindustri adalah:

1. Meningkatnya PDB industri pengolahan makanan dan minuman serta produksi komoditas andalan ekspor dan komoditas prospektif,
2. Meningkatnya jumlah sertifikasi untuk produk pertanian yang diekspor, dan arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan rencana strategis kementerian pertanian 2015-2019
3. Berkembangnya agroindustri terutama di perdesaan. Komoditi yang menjadi fokus dalam peningkatan agroindustri diantaranya kelapa sawit, karet, kakao, teh, kopi, kelapa, mangga, nenas, manggis, salak, kentang.

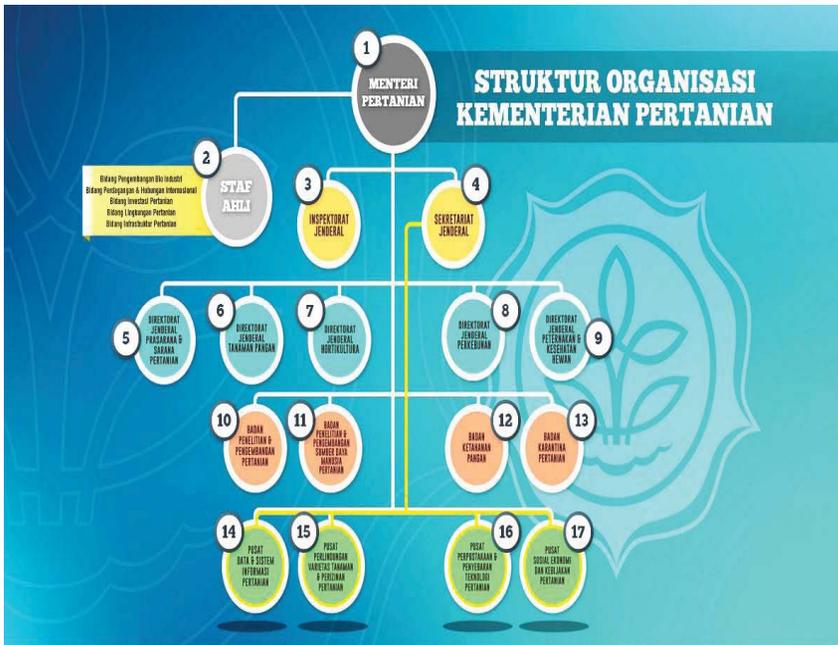
BAB II. STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN PERTANIAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, bahwa Kementerian Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di sektor pertanian untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian Pertanian dipimpin oleh seorang Menteri dan dalam menjalankan tugasnya, dibantu struktur di bawah Kementerian Pertanian meliputi: (1) Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, (2) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian; (3) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan; (4) Direktorat Jenderal Hortikultura; (5) Direktorat Jenderal Perkebunan; (6) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; (7) Inspektorat Jenderal; (8) Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian; (9) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian; (10) Badan Ketahanan Pangan; (11) Badan Karantina Pertanian; (12.a.) Staf Ahli Bidang Pengembangan Bio Industri; (12.b.) Staf Ahli Bidang Perdagangan dan Hubungan Internasional; (12.c.) Staf Ahli Bidang Investasi Pertanian; (12.d.) Staf Ahli Bidang Lingkungan Pertanian; (12.e.) Staf Ahli Bidang Infrastruktur Pertanian; (13) Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian; (14) Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian; (15) Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian; dan (16) Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.

Tugas dari struktur organisasi Kementerian Pertanian yaitu :

1. Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian;
2. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyediaan prasarana dan sarana di bidang pertanian;
3. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi padi, jagung, kedelai, dan tanaman pangan lainnya;

- Direktorat Jenderal Hortikultura mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi aneka cabai, bawang merah, aneka jeruk, dan tanaman hortikultura lainnya;



- Direktorat Jenderal Perkebunan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi tebu, dan tanaman perkebunan lainnya;
- Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan populasi dan produksi ternak serta kesehatan hewan;
- Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian;
- Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang pertanian;
- Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian;
- Badan Ketahanan Pangan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan diversifikasi dan pemantapan ketahanan pangan;

11. Badan Karantina Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan perkarantinaan pertaniandan pengawasan keamanan hayati;
12. Staf Ahli :
 - a. Staf Ahli Bidang Pengembangan Bio Industrimempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang pengembangan bio industri;
 - b. Staf Ahli Bidang Perdagangan dan Hubungan Internasional mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang perdagangan dan hubungan internasional;
 - c. Staf Ahli Bidang Investasi Pertanian mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang investasi pertanian;
 - d. Staf Ahli Bidang Lingkungan Pertanian mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang lingkungan pertanian;
 - e. Staf Ahli Bidang Infrastruktur Pertanian mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang infrastruktur pertanian.
13. Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengolahan, analisis, dan pengembangan sistem informasi pertanian, serta pelayanan dan publikasi data dan informasi pertanian;
14. Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perlindungan dan pendaftaran varietas tanaman, serta pelayanan perizinan dan rekomendasi teknis pertanian;
15. Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan penyebaran informasi ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian;
16. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian.

Dari struktur organisasi tersebut memiliki eselonisasi yang berbeda yaitu : a) Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau Jabatan Struktural Eselon I.a; b) Staf Ahli merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau Jabatan Struktural Eselon I.b; 3) Kepala Pusat merupakan



Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau Jabatan Struktural Eselon II.a. (termasuk di dalamnya Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama lainnya Kepala Biro, Sekretaris Direktorat Jenderal, Direktur, Sekretaris Inspektorat Jenderal, Inspektur, Sekretaris Badan).

BAB III.

PELAKSANAAN PROGRAM KEMENTERIAN PERTANIAN TA. 2018

A. Pelaksanaan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian/Sekretariat Jenderal

Untuk mewujudkan Visi dan Misi serta Tujuan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, maka telah dilaksanakan program dan kegiatan. Upaya-upaya yang telah dilaksanakan dan hasil yang telah dicapai lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian selama TA. 2018 adalah sebagai berikut :

1. Koordinasi dan Pembinaan Biro Perencanaan Kementerian Pertanian

Pelaksanaan program dan kegiatan fungsi perencanaan Tahun 2018 yang dilakukan oleh Biro Perencanaan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Biro Perencanaan melaksanakan kegiatan koordinasi, dan penyusunan rencana, kebijakan, program, anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan Kementerian Pertanian. Fungsi yang dilaksanakan Biro Perencanaan mencakup: (1) penyiapan koordinasi, dan penyusunan rencana pengembangan wilayah pertanian; (2) penyiapan koordinasi, dan penyusunan kebijakan dan program pembangunan pertanian; (3) penyiapan koordinasi, dan penyusunan anggaran pembangunan pertanian; (4) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program pembangunan pertanian; dan (5) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Perencanaan. Hasil pelaksanaan kegiatan Biro Perencanaan tahun 2018 berdasar fungsinya diuraikan sebagai berikut:

Pelaksanaan kegiatan pada Bagian Perencanaan Wilayah selama tahun 2018 meliputi:

- Penguatan basis data dan pemetaan kawasan tanaman pangan dan hortikultura, yaitu penyusunan peta kawasan cabai, bawang merah dan bawang putih skala 1:50.000.
- Sosialisasi dan Workshop Penyusunan Master Plan/Action Plan Pengembangan Kawasan Pertanian Wilayah Barat Tahun 2018, Focus Group Discussion (FGD) penetapan lokasi percontohan kawasan bawang merah.
- Revisi Permentan Nomor 56/2016 menjadi Permentan Nomor 18/Permentan/RC.040/4/2018 tanggal 18 April 2018; revisi Kepmentan Nomor 830 Tahun 2017 menjadi Kepmentan Nomor 472/Kpts/PL.310/6/2018 tanggal 28 Juni 2018.
- Tersusunnya peta potensi pengembangan kawasan perkebunan di 5 provinsi dengan skala 1:50.000.
- Terlaksananya FGD Pilot Project Pengembangan Kawasan kakao di Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Tersusunnya peta potensi pengembangan kawasan peternakan sapi potong sebagai komoditas strategis nasional pada skala 1:50.000 di 9 Kabupaten mencakup Kabupaten Bima, Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, Sigi, Donggala, Purwakarta, Majalengka, dan Sumedang.
- Rapat Koordinasi dan FGD Implementasi Pengembangan Bioindustri di Kawasan Pertanian
- Koordinasi Pembangunan Pertanian di Daerah Tertinggal dan Wilayah Khusus. Output kegiatan adalah Data rekapitulasi program dan kegiatan di 41 kawasan perbatasan, 122 daerah tertinggal dan kegiatan percepatan pembangunan di Papua dan Papua Barat serta progres hasil realisasi di ketiga kawasan tersebut.
- Koordinasi Perencanaan dan Implementasi Pengembangan Kawasan Peternakan,

diantaranya Sosialisasi dan Workshop Penyusunan Masterplan/Action plan Pengembangan Kawasan Pertanian Wilayah Timur Tahun 2018, dan penetapan lokasi percontohan kawasan Sapi Potong di Kabupaten Subang.

Pelaksanaan kegiatan pada Bagian Anggaran selama tahun 2018 meliputi:

- Koordinasi Penyusunan APBN-P 2018 Lingkup Kementerian Pertanian. Selesai roses refocusing Kementerian Pertanian TA 2018 yang ditandai dengan POK revisi TA 2018.
- Koordinasi dan Penelitian RKA-KL Kementan TA 2018. Penyusunan hasil penelitian RKA-KL Lingkup Kementan TA 2018 dari pagu anggaran dan alokasi anggaran serta penelitian RKAKL APBN TA 2019.
- Penyusunan Nota Keuangan 2019 Lingkup Kementerian Pertanian. Tersusunya Bahan Nota Keuangan 2019 Kementerian Pertanian yang berisikan Pelaksanaan program, kebijakan dan realisasi APBN 2015-2019.
- Identifikasi Hasil Revisi DIPA dan POK 2018. Koordinasi revisi DIPA dan POK, revisi DIPA dan POK 2018 pada satker lingkup Kementerian Pertanian tahun 2018.
- Workshop Penyusunan Anggaran Kementan Berbasis Kinerja TA 2019. Workshop penyusunan APBN 2019 diikuti oleh eselon I lingkup Kementerian Pertanian.
- Koordinasi dan Pembinaan Anggaran 201. Terlaksananya rapat-rapat koordinasi Pusat dan Daerah terkait perencanaan anggaran dan pembinaan teknis pengelolaan anggaran pembangunan pertanian di daerah.
- Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) Pembangunan Pertanian TA. 2018 dan Rakerus dilaksanakan pada Senin, 15 Januari 2018 bertempat di Hotel Bidakara Jakarta.
- Penyusunan Data Base Satker DIPA Kementerian Pertanian Tahun 2018. Data DIPA satker tahun 2018 sejumlah 630 DIPA satker berkurang 130 DIPA dari tahun 2017.
- Penyusunan Standar Biaya Keluaran Kementerian Pertanian Tahun 2019. Standar Biaya Keluaran Kementerian Pertanian mengusulkan 86 SBK dari 10 Eselon 1 lingkup Kementan.
- Penyusunan RAPBN 2019 Lingkup Kementerian Pertanian. Rancangan APBN 2019 Kementerian Pertanian yaitu : Pelaksanaan program, kebijakan dan realisasi APBN 2015 dan Rancangan APBN 2018.
- Sosialisasi Pedoman Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementan Tahun 2018 dan Penyusunan Pedoman Bantuan Pemerintah TA 2019.
- Koordinasi dan Identifikasi Anggaran Subsidi, Kredit Program dan Asuransi Pertanian. Koordinasi dilaksanakan di Provinsi Jawa Barat (Kab. Bandung, Garut dan Cirebon) pada bulan Juli – Oktober 2018.
- Workshop Regional Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian Tahun 2018. Dilaksanakan di Hotel Grand Pasundan - Bandung, pada tanggal 20 – 22 Maret 2018 dengan jumlah peserta ± 1.200 orang terdiri dari peserta daerah dan pusat.
- Penyusunan Data Teknis DAK Bidang Pertanian TA. 2018. Tersusunnya aplikasi KRISNA usulan kegiatan dan target output kegiatan dan validasi data teknis DAK Bidang Pertanian Tahun 2019.
- Penyusunan dan Sosialisasi Juknis Pemanfaatan DAK Bidang Pertanian Terbitnya Permentan No. 10.1/Permentan/RC.120/3/2018 tanggal 26 Maret 2018 dan Kepmentan Nomor 239.1/Kpts/RC/3/2018 tanggal 28 Maret 2018.
- Workshop Penelaahan RKA DAK Bidang Pertanian Tahun 2019. Dilaksanakan pada bulan Nopember 2018 dengan jumlah peserta ± 2.000 peserta dari Bappeda dan Dinas Pertanian Lingkup Prov/Kab/Kota.
- Penyelenggaraan Tata Usaha Biro Perencanaan. Terlaksananya kegiatan bersifat administratif dan fasilitatif meliputi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kearsipan dan

- rumah tangga Biro Perencanaan tahun 2018.
- Pelaksanaan Sistem Akutansi Instansi serta Pengujian dan Penerbitan Surat Perintah Membayar Satker Biro Perencanaan. Laporan Keuangan, Laporan Barang Milik Negara (BMN) dan Laporan PPSPM Triwulanan Biro Perencanaan tahun 2018.
 - Pengelolaan Administrasi Keuangan Satker Biro Perencanaan. Laporan Koordinasi Pengelolaan Administrasi Satker Biro dan Laporan Koordinasi Pengelolaan Administrasi Bagian Anggaran.

Pelaksanaan kegiatan pada Bagian Evaluasi dan Pelaporan selama tahun 2018 meliputi:

- Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Output : Lakin Biro Perencanaan Tahun 2017 (31 Januari 2018); Lakin Sekjen 2017 (15 Januari 2018) dan Lakin Kementan 2017 (28 Februari 2018).
- Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Pertanian Komoditas Strategis. Penyusunan buku Pemantauan Dan Evaluasi Pembangunan Pertanian, Pertemuan Evaluasi Nasional Pembangunan Pertanian 2018, dan Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Pertanian Untuk Komoditas Strategis (metode Sistem Dinamik)
- Workshop dan Monitoring Aplikasi Monev. Dilaksanakan di 3 lokasi yaitu untuk wilayah Sumatera (14-15 Maret 2018), wilayah Sulawesi dan Wilayah Kalimantan (27-28 Maret 2018), wilayah Jawa, Bali dan NTB (4-5 April 2018).
- Workshop e-Sakip Lingkup Kementerian Pertanian, realisasi kegiatan ini 0%.
- Penyusunan Laporan Capaian Rencana Aksi Kementerian Pertanian 2018, kegiatan ini dipantau oleh KSP.
- Workshop Evaluasi Kegiatan dan Anggaran Dekonsentrasi / Tugas Pembantuan (Dekon/TP) serta Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian Tahun 2018. Dilaksanakan skala nasional tanggal 7-8 Februari 2018 di Kota Surabaya yang dihadiri oleh sekitar 1200 peserta Perwakilan SKPD pertanian lingkup Provi/Kab/Kota.
- Workshop Regional Dekon TP dan DAK Bidang Pertanian Tahun 2018. Dilaksanakan tanggal 27-29 Maret 2018 di Makasar, dihadiri 700 orang peserta dari perwakilan dari SKPD pertanian lingkup Prov/Kab/Kota wilayah timur Indonesia.
- Penyusunan Bahan Pimpinan Kementerian Pertanian pada Rapat Pimpinan (Rapim), Rapat Koordinasi (Rakor), dan Sidang Kabinet (Sidkab) melibatkan Pejabat Eselon I dan II lingkup Kementan, serta dipimpin oleh Menteri Pertanian.
- Penyusunan Laporan Bahan Pimpinan Kementan Pada Raker Pimpinan Kementan dengan DPR RI dan DPD RI
- Penyiapan Bahan Pimpinan Dalam Pelaporan Pelaksanaan Upaya Khusus (UPSUS) Pangan

Pelaksanaan kegiatan pada Bagian Program dan Kebijakan selama tahun 2018 meliputi:

- Reviu dan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Pertanian Jangka Panjang Diarahkan pertanian Indonesia menjadi lumbung pangan dunia pada tahun 2045, meliputi Kebijakan Pengembangan komoditas subsektor, Konsumsi Pangan dan Pola Pangan Harapan (PPH); Penguatan Sumber Daya Manusia Pertanian di Era Industri 4.0; Rancang Bangun Inovasi, dan Teknologi Pertanian di Era Industri 4.0. FGD dilaksanakan pada bulan Agustus sampai dengan Desember 2018.
- Reviu dan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Pertanian Jangka Menengah Biro Perencanaan membangun serta terus menyempurnakan proses e-planning dengan melakukan telaah renstra berbasis elektronik.
- Kegiatan Koordinasi Pembangunan Pertanian Terpadu dan Lintas Sektoral Penyusunan buku-buku reviu kebijakan pembangunan pertanian terpadu dan lintas sectoral.

- Koordinasi Kegiatan Tematik, ditujukan untuk koordinasi terkait isu-isu pembangunan pertanian yang berdampak terhadap perubahan iklim, pengarus-utamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- Rapat Koordinasi Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) Tahun 2018 dilaksanakan pada tanggal 2 Februari 2018 di Bogor.
- Workshop E-Proposal Kementerian Pertanian untuk Perencanaan Tahun 2019 dilaksanakan pada bulan Januari-Februari 2018, dihadiri ± 300-400 peserta.
- Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Pertanian Tahun 2019. Diselenggarakan pada tanggal 20-21 Februari 2018 di Auditorium Kantor Kementerian Pertanian dengan tema “Penguatan Infrastruktur dan Korporasi Petani untuk Percepatan Pertumbuhan Sektor Pertanian Berkualitas”
- Rapat Persiapan Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Revisi Kementerian Pertanian 2018, dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2018 di Bogor, sedangkan Rapat penyusunan PK tahun 2019 di laksanakan pada tanggal 21 Desember 2018 di Bogor.
- Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pertanian Nasional Tahun 2018 diselenggarakan pada tanggal 23-25 Mei 2018 di IPB International Convention Center Bogor.
- Pengembangan Aplikasi Perjanjian Kinerja Elektronik (ePK) Kementerian Pertanian. Alamat link untuk membuka aplikasi ePK yaitu : <http://biroren.net/epk>.
- Pengembangan Aplikasi eMusrenbangtan 2018. Aplikasi ini terintegrasi dengan aplikasi eproposal dengan alamat link <http://agendaroren.net/emusrentan/>.
- Pengembangan Aplikasi eAgenda Biro Perencanaan. Aplikasi sudah berbasis android dan dapat diinstall melalui Play Store dengan nama “eAgenda Biro Perencanaan Kementerian Pertanian”.
- Pengembangan Website Biro Perencanaan. Sudah dapat diakses pada bulan Juli 2018 dengan alamat perencanaan.setjen.pertanian.go.id.
- Pengumpulan Data Perencanaan Pembangunan Pertanian. Sampai akhir tahun 2018 sudah disajikan data indikator makro periode Januari – Juli 2018, dapat diakses dan digunakan oleh masyarakat secara umum.
- Focus Group Discussion (FGD) Pertanian di Era Industri 4.0 dan Konsep Pengembangan Big Data

2. Koordinasi Dan Pembinaan Biro Organisasi Dan Kepegawaian Kementerian Pertanian

Tugas dan fungsi Biro Organisasi dan Kepegawaian adalah melaksanakan penyusunan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi, serta pengelolaan kepegawaian lingkup Kementerian Pertanian. Capaian kinerja kegiatan strategis tersebut adalah sebagai berikut :

- Penyusunan, evaluasi, dan penyempurnaan organisasi, serta pengembangan jabatan fungsional dan budaya kerja. Ringkasan hasil monitoring SOP dan hasil Evaluasi SOP (terlampir),
- Penyusunan Peta Sub Proses, Peta Relasi, Peta Lintas Fungsi, dan SOP Makro;
- Perancangan dan pengembangan sistem prosedur strategis berbasis teknologi informasi. Tahun 2018 telah dilakukan perancangan dan pengembangan sistem eKinerja dan eKehadiran Pegawai serta eProbis Proses Bisnis dan SOP Berbasis Teknologi Informasi;
- Penyusunan, evaluasi, penyempurnaan tata laksana, fasilitasi reformasi, urusan tata usaha dan rumah tangga birokrasi lingkup Kementerian Pertanian serta penyelenggaraan sistem

pengendalian internal lingkup Sekretariat Jenderal. Proses evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian tahun 2018 telah dilakukan oleh Tim Evaluasi Kemenpan RB, dari tanggal 26 November 2018 sampai dengan saat ini belum dilaksanakan exit meeting.

- Pelaksanaan perencanaan, pengembangan, dan penilaian kinerja pegawai
Finalisasi Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Pertanian;
 - a) Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Manajerial Kementerian Pertanian
 - b) Seleksi Terbuka dan Kompetitif Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas.
- Pelaksanaan mutasi pegawai
 - a) Penguatan dan Penataan Organisasi Pusat Kementerian Pertanian
 - b) Penguatan dan Penataan Organisasi UPT Kementerian Pertanian, penataan UPT Badan PPSDM Pertanian.
 - c) Peningkatan Efektifitas Kelembagaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Bidang Pertanian
 - d) Evaluasi Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Aparatur Kementerian Pertanian.

3. Koordinasi Dan Pembinaan Biro Hukum Kementerian Pertanian

Tahun anggaran 2018 Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian telah melaksanakan beberapa kegiatan antara lain: Kegiatan Focus Grup Discussion (FGP) RUU tentang Perubahan UU Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman. Komisi IV DPR RI berinisiasi mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 serta melakukan koordinasi, dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan advokasi hukum.

- Penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang pertanian. Pertemuan Prolegtan pada 26 s.d 28 Nopember 2018 di Yogyakarta menghasilkan :
 - a) Laporan Kegiatan Bimbingan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pertanian Tahun 2018;
 - b) Laporan Kegiatan Evaluasi Pencapaian Program Legislasi Pertanian.
- Pengembangan sistem dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum pertanian;
 - a) Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Perkebunan
 - b) Laporan Kegiatan Pemantauan Implementasi Perjanjian Pengalihan Material Lingkup Kementerian Pertanian
 - c) Laporan Kegiatan Pemantauan Izin Usaha Peternakan Tahun 2018
- Penyusunan naskah perjanjian, pemberian pertimbangan dan litigasi hukum;
 - a) Laporan Kegiatan Sosialisasi Tata Cara Penyusunan Naskah Perjanjian Bidang Pertanian Tahun 2018;
 - b) Laporan Kegiatan Rapat Koordinasi Penyelesaian Permasalahan BMN Lingkup Kementerian Pertanian;

- c) Laporan Kegiatan Forum Komunikasi Hukum Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2018.
4. Koordinasi Dan Pembinaan Biro Keuangan Dan Perlengkapan Kementerian Pertanian
- Penerbitan Sk Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan. Pada tahun 2018 ini, Biro Keuangan dan Perlengkapan telah menerbitkan 21 Surat Keputusan Menteri Pertanian tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan lingkup Kementerian Peretanian dan revisi SK sebanyak 45 SK, terkait seringnya terjadi mutasi dan alih tugas jabatan di 90 satker lingkup Kementerian Pertanian
 - Penatausahaan Target PNBP Kementerian Pertanian. Target PNBP pada Kementerian Pertanian hasil telaah bersama Direktorat PNBP, DJA, disepakati bahwa Target dan Pagu PNBP Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.271.909.253.000,00 dan Pagu PNBP sebesar Rp164.693.870.000,00 seluruh Eselon I lingkup Kementerian Pertanian.
 - Penyusunan Standar Biaya Keluaran (SBK). Dengan terbitnya PMK Nomor 69/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Keluaran TA.2019 maka untuk menghasilkan suatu Ouput kegiatan yang harus mengacu kepada PMK tersebut diatas. Usulan SBK lingkup Sekretariat Jenderal Tahun Anggaran 2018 sebanyak 7 SBK yang terdiri dari : a) Biro Hukum 3 SBK; b) Biro Keuangan dan Perlengkapan 1 SBK; c) Biro Organisasi dan Kepegawaian 1 SBK; d) Pusat Data dan Informasi Pertanian 2 SBK; dan e) Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian 1 SBK.
 - Penanganan Penyelesaian Kasus Kerugian Negara. Temuan baru kerugian negara di lingkup Kementerian Pertanian total Rp.74.492.623.060, masih dalam proses penyelesaian secara hukum. Data Piutang TP/TGR dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih lingkup Kementerian Pertanian Semester II Tahun 2017, bersumber LHP dan Non LHP sebesar Rp.28.803.091.349,69, dengan penyisihan piutang tidak tertagih sebesar Rp.20.343.633.349,33 sehingga Piutang TP/TGR Netto sebesar Rp.8.459.458.000,36. Hasil rekonsiliasi data kerugian negara lingkup Kementerian Pertanian triwulan III tahun 2018 telah dilakukan penyelesaian Rp.10.968.688.226,56, maka saldo triwulan III setelah terjadi penambahan sebesar Rp.153.748.383.041,04.
 - Pembayaran Gaji dan Tunjangan. Pembayaran tunjangan kinerja pegawai Kementerian Pertanian sampai bulan Desember 2018, adalah total anggaran sebesar Rp.1.150.236.150.000 dan jumlah pegawai penerima sebanyak 19.579 orang.
 - Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan BMN dan Pengelolaan Rumah Negara
 - a) Penetapan Status Penggunaan Kewenangan Pengguna Barang (Menteri Pertanian)
 - b) Penerusan Usul Penggunaan Kepada Pengelola Barang (Menteri Keuangan)
 - c) Penerusan Usul Pemanfaatan Kepada Pengelola Barang (Menteri Keuangan)
 - d) Sewa BMN
 - Sosialisasi Peraturan Pengelolaan BMN (Kep Mentan No. 788/ KPts/PL.310/ 11/2017) Memenuhi surat Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan Nomor 855/PL.210/A4/03/2018 tanggal 3 Maret 2018 hal Sosialisasi Kepmentan 788/Kpts/PL.310/11/2017, telah dilakukan sosialisasi pada tanggal 13 Maret 2018 bertempat di Bogor.
 - Penyusunan Laporan Barang Milik Negara (4Laporan) : Laporan Barang Milik Negara Tahunan TA 2017 (Unaudited), Laporan Barang Milik Negara Tahunan TA 2017 (Audited), Laporan Barang Milik Negara Semesteran Semester I TA 2018, Laporan Barang Milik Negara Triwulan III TA 2018.

- Penyusunan Buku Panduan Verifikasi Laporan Keuangan dibuat dalam 2 (dua) Tingkatan, yaitu Buku Panduan Verifikasi Laporan Keuangan Tingkat Satker dan Buku Panduan Verifikasi Laporan Keuangan Tingkat Eselon I.
- Monitoring Satker Inaktif Lingkup Kementerian Pertanian. Data lengkapnya tahun 2017; jumlah satker inaktif 363 satker, nilai aset Rp.195.483.052.535,00, sedang tahun 2018, jumlah satker inaktif 218 serta nilai aset rp. 32.074.830.626,00.
- Laporan Keuangan Tahun 2017 Unaudited
 - a) Laporan Keuangan BA 018
 - b) Laporan Keuangan BA 999.07
 - c) Laporan Keuangan BA 999.08
- Monitoring dan Evaluasi Laporan Keuangan
Kegiatan monitoring dan evaluasi laporan keuangan dilakukan dalam rangka mempercepat pelaksanaan program/kegiatan pertanian dan mendorong penyerapan anggaran secara optimal serta pengawasan realisasi anggaran pada Kementerian Pertanian Tahun 2018. Kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut, antara lain meliputi data OMSPAN; pelaksanaan anggaran dan permasalahan/kendala; rekonsiliasi internal jumlah satker dan pagu anggaran dan Pemberian honorarium kepada Tim TEPRAs (11 bulan).

5. Koordinasi Dan Pembinaan Biro Biro Umum Dan Pengadaan Kementerian Pertanian

- Pengawasan Kearsipan Internal. Pelaksanaannya adalah melaksanakan pengawasan internal terhadap beberapa Unit kerja yang masuk sebagai objek pengawasan Tahun 2018.
- Penyusunan Pedoman Kearsipan. Unit Kearsipan Kementerian Pertanian telah mempunyai JRA fungsi Fasilitatif dan di tahun 2018 telah diterima persetujuan JRA fungsi Substantif dari Kepala ANRI, untuk selanjutnya dalam satu kemasan bersama JRA Fasilitatif akan ditetapkan dalam bentuk Peraturan Menteri Pertanian.
- Pengembangan Aplikasi E-Arsip. Rencana pengembangan implementasi aplikasi SIM Arsip Inaktif secara online dan saat ini pada tahap dummy aplikasi e-arsip yaitu dengan nama SIAP (Sistem Informasi Arsip Pertanian) beralamat <https://arsip.pertanian.go.id/>.
- Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Kementerian Pertanian tahun 2018 yaitu peraih Penghargaan Instansi Pembina Terbaik Jabatan Fungsional Pengelola Barang atau Jasa dari LKPP; sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan/jasa Pemerintah (3 kali), Bimtek pembinaan SDM dan Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa.
- Pelayanan Rumah Tangga yaitu kegiatan bidang pelayanan kerumahtanggaan Kementerian Pertanian.
- Pendirian Tempat Penitipan Anak, merupakan sarana, pendidikan dan penitipan khusus anak karyawan Kementerian Pertanian, sementara orang tuanya tetap bekerja di lingkungan yang sama (kantor pusat Kementan).
- Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Padu Satu, Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Pusat PVTPP, unit Eselon I, Biro Umum dan Pengadaan serta Pusdatin membangun Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Padu-Satu) Kementerian Pertanian.

6. Koordinasi Dan Pembinaan Biro Kerjasama Luar Negeri Kementerian Pertanian

- Rangkaian Pertemuan The 4th ASEAN-India Ministerial Meeting on Agriculture and Forestry (AIMMAF), tanggal 11-12 Januari 2018 di New Delhi, India;

- The Third Indonesia-United Nations Coordination Forum (IUNCF), 1 Februari 2018, Jakarta. Pertemuan membahas dan menindaklanjuti hasil-hasil pertemuan Working Group (WG) I: Information Sharing and Cooperation Development dan WG II: Administration.
- Pertemuan RCEP-TNC ke-21 tanggal 3-6 Februari 2018 di Yogyakarta. Pertemuan membahas Revised ASEAN's Proposal on the way Forward Towards Final Tariff Modality yang diusulkan oleh Dirjen PPI, Kemdag selaku TNC Chair.
- Rapat Koordinasi Tim Teknis FGD KSST, 21-22 Februari 2018, Bogor, Indonesia;
- The First Meeting of Steering Committee for Country Programme Framework (CPF) FAO and the Government of Indonesia 2016-2020, 27-28 Februari 2018, Serpong. Pertemuan Komite Pengarah CPF FAO-Indonesia yang pertama ini merupakan bentuk komitmen Indonesia dalam meningkatkan pemanfaatan kerja sama Indonesia dengan FAO.
- APO Advanced Agribusiness Management Course, 5-9 Maret 2018, Bali. Workshop sebagai forum bertukar informasi peningkatan pengetahuan peserta dalam perkembangan terkini sektor agribisnis global dan regional pengembangan sektor UKM.
- Pertemuan Informal dengan Pemerintah Propinsi Santa Fe pada tanggal 14 Maret 2018 di San Nicolas, yaitu peninjauan kerja sama sister city dengan salah satu propinsi di Indonesia terutama kerjasama teknis dan perdagangan sektor pertanian.
- The 7th Joint Committee Meeting (JCM-7) General Review IJEP, 28– 30 Maret 2018, Bali. Ketua Sub Komite Perundingan Barang, dalam presentasinya bahwa total nilai perdagangan Indonesia tumbuh 115%, ekspor meningkat 101% , Impor meningkat 322.1%. dari data tersebut, Indonesia menyatakan seharusnya general review sebagai pijakan peningkatan akses pasar dengan spirit kerjasama saling menguntungkan, dan menekankan kesempatan area kerjasama yang berkeadilan (balance level of playing field).
- Pertemuan Senior Official Meeting (SOM) Trilateral Indonesia-Timor Leste-Australia (TIA), 11-13 April 2018, Labuan Bajo. Indonesia akan mendorong ekspor unggas ke timor leste dan pihak timor leste yakin dengan sistem kesehatan hewan Indonesia.
- The 30th International Tripartite Rubber Council (ITRC) Meetings and Related ITRC Committee Meeting, 4-6 Juni 2018, Bali, Indonesia. Pertemuan dihadiri perwakilan kementerian/lembaga terkait komoditi karet Indonesia, Thailand, Malaysia membahas konsumsi karet alam, melaksanakan, monitoring and evaluasi aktivitas dari program DPSC (Meeting of Demand Promotion Scheme Committee).
- Pertemuan Courtesy Call Duta Besar Rusia di Jakarta kepada Menteri Pertanian, 8 Juni 2018 di Kementerian Pertanian. Peninjauan keinginan Rusia untuk ekspor gandum dan barley membuka akses pasar untuk buah-buahan tropis
- Pihak Indonesia menyambut baik keinginan Rusia untuk ekspor gandum dan barley. Sedangkan Rusia telah membuka akses pasar untuk buah-buahan tropis, seperti mangga, salak, dan manggis. Rusia meningkatkan volume perdagangan CPO dan turunannya dari Indonesia, tidak melakukan black campaign seperti Uni Eropa serta impor komoditi lain seperti karet, kopi, teh, dan lainnya dari Indonesia.
- Koordinasi Penajaman Hasil Kerjasama Luar Negeri Bidang Pertanian, 15-16 dan 23 Agustus 2018 di Royal Padjadjaran Hotel, Bogor. Pertemuan membahas dan mengevaluasi hasil hasil kesepakatan kerjasama regional (APEC, RCEP, CAPSA, KESR BIMP-EAGA dan IMT-GT), serta evaluasi implementasi Pinjaman Hibah Luar Negeri, dan Administrasi Atase Pertanian.
- Rangkaian Pertemuan Special SOM AMAF-39, Special SOM AMAF+3 ke-17 dan ARSOMA ke-3, 27-30 Agustus 2018 di Pattaya, Thailand Pertemuan SSOM AMAF ke-39. Pertemuan menyetujui dan mendukung implementasi 6 (enam) Key Deliverables 2018 serta menyetujui

- usulan 5 (lima) Key Deliverables 2019 yang meliputi sektor: livestock, crop, fisheries, forestry dan ASEAN Guidelines for Certification of Halal Food drafted/developed.
- The 124th Session of IFAD Executive Board, 10-13 September 2018, Roma Italia. Ketua Delri Bapak Syukur Iwantoro (Sekjen Kemtan), selaku anggota Executive Board IFAD, didampingi KUI-KBRI Roma dan Kepala Biro KLN.
 - Sosialisasi Potensi Pertanian untuk Para Diplomatik RI yang akan ditempatkan di Negara Mitra phase ke-2 TA 2018, 22-23 Oktober 2018 di Hotel Santika, Banyuwangi. Melalui acara sosialisasi tersebut, Diplomat RI diharapkan dapat melakukan fasilitasi akses pasar komoditi pertanian Indonesia dan dapat membantu menjembatani penyelesaian hambatan akses pasar komoditi pertanian Indonesia seperti hambatan tarif maupun hambatan non-tarif di Negara Mitra.
 - The 3rd Joint Agriculture Working Group (JAWG) Indonesia – Denmark, 24-25 Oktober 2018 di Malang, Jawa Timur. Kedua pihak sepakat bahwa kegiatan the 4th Joint Agriculture Working Group Indonesia – Denmark akan dilaksanakan di Denmark pada tahun 2020.
 - Finalisasi Pembahasan Konsep Memorandum Saling Pengertian (MSP) Perpanjangan Kerja Sama Mercy-USA dengan Kementan RI, 30 Oktober 2018 di Bogor.
 - Seminar Hasil “Kajian Posisi Indonesia dalam Forum FAO: Analisis Harga Pangan Dunia, 8 November 2018, Bogor. Beberapa rekomendasi pertemuan yang diusulkan, yaitu (i) efisiensi supply chain; (ii) manajemen pertanian berbasis korporasi; dan (iii) perubahan Undang-Undang terkait penggilingan padi.
 - Lokakarya Nasional “Pilar Utama Peningkatan Kesejahteraan Petani: Reformasi Pertanian, Intensifikasi Produksi dan Peningkatan Akses Pasar”, 12 November 2018 di Kementerian Pertanian

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut sidang FAO Asia and the Pacific Regional Conference ke-34 di Fiji bulan April 2018 dan hasil sidang FAO Council 159 di Roma Italia bulan Juni 2018.

7. Koordinasi Dan Pembinaan Biro Hubungan Masyarakat Dan Informasi Publik Kementerian Pertanian

Sepanjang 2018, Biro Humas dan Informasi Publik telah melakukan 13 kali konferensi pers yang banyak mengangkat tentang kinerja Empat Tahun sektor pertanian Indonesia, November 2018 Biro Humas dan Informasi Publik kemudian membuat konsep konferensi pers yang lebih dinamis dalam bentuk “BAKPIA” (Bincang Asik Pertanian Indonesia) yang dilaksanakan dua kali dalam seminggu, dengan tema tematik dan narasumber yang berasal dari Pejabat Eselon I dan II lingkup Kementerian Pertanian beserta stakeholder yang terkait dengan tema pembahasan. Situs induk Kementerian Pertanian www.kemantan.go.id sampai Desember 2018 telah mengeluarkan 414 berita (dalam berbahasa Indonesia) seputar kegiatan pimpinan, program dan kebijakan pembangunan pertanian dengan rata rata perbulan 12.746 viewer.

Hubungan Masyarakat

- Media Cetak, tahun 2018 terbitkan sebanyak 1.353 berita, Kompas 1.316 berita, Investor Daily 1.031 berita, Rakyat Merdeka 992 berita, dan Pikiran Rakyat 967 berita.
- Media Online, sepanjang tahun 2018; Republika.co.id 1.727 berita, JPNN.com 1.288 berita, Detik.com 1.185 berita, Rmol.co 1.075 berita, dan beritarayaonline.com 1.007 berita.
- Media Televisi, sepanjang tahun 2018; Beritasatu TV 1.352 berita, TVRI 1.024 berita, CNN Indonesia TV 805 berita, Metro TV 782 berita, dan Kompas TV 741 berita.

- Untuk pemberitaan yang mengemuka di media terkait dengan komoditas sepanjang tahun 2018 adalah Dinamika harga beras dan polemik impor sebanyak 5.961 berita, sinergi pemerintah dalam stabilisasi pasokan dan harga pangan sebanyak 4.435 berita, dan produksi padi nasional sebanyak 2.386 berita.
- Untuk pemberitaan inisiatif Kementan selama tahun 2018 sebanyak 3.536 berita (media cetak), 27.349 berita (media online) dan 1.396 berita (media televisi).
- Peliputan kegiatan kunjungan kerja Menteri Pertanian sepanjang tahun 2018 sebanyak 135 kali
- News Letter Kementerian Pertanian bernama "Warta Pertani" berjumlah 8 terbit sebulan sekali Edisi Bulan Januari s.d Agustus 2018 yang di distribusikan ke seluruh unit kerja eselon I dan stakeholder.
- Penyiapan Bahan Publikasi dan Dokumentasi HPS (Hari Pangan Sedunia) Materi, data dan informasi yang didapatkan dari daerah dipergunakan sebagai bahan/referensi untuk penerbitan/publikasi pembangunan pertanian.
- Media Sosial , terdapat empat akun jejaring sosial yang dimiliki Kementerian Pertanian , yaitu facebook, twitter, instagram dan youtube.

Pengelolaan Informasi Publik

- Sepanjang tahun 2018 terdapat 68 permohonan informasi publik dengan 64 pemberitahuan, 1 perpanjangan, 6 penolakan serta 2 keberatan. Rapat Koordinasi PPID Lingkup Kementerian Pertanian.
- Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lingkup Kementerian Pertanian dilaksanakan pada tanggal 8 – 9 Mei 2018, di Auditorium Gedung F Kantor Pusat Kementerian Pertanian dengan tema "Peran PPID dalam Penderasan Informasi, Menyongsong Indonesia Lumbung Pangan Dunia Tahun 2045"
- Bimbingan Teknis Pengelolaan Informasi Publik. Bimtek Pengelolaan Informasi Publik dibagi dalam tiga wilayah yaitu wilayah Tengah, Barat dan Timur.
- Pemingkatan Keterbukaan Informasi Publik lingkup Kementerian Pertanian. Ada 230 unit kerja/unit pelaksana teknis yang dinilai dalam pemeringkatan ini.
- Workshop Website lingkup Kementerian Pertanian. Workshop Website dilaksanakan pada tanggal 3-4 Mei 2018 di Hotel Padjajaran Suites Bogor. Website menjadi salah satu alat bagi setiap badan publik untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat luas termasuk informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Workshop Video Jurnalistik. Workshop Video Jurnalistik dilaksanakan pada tanggal 12 – 14 Maret 2018 berlokasi di Balai Embrio Ternak Cipelang Bogor dan tanggal 29 November – 1 Desember 2018 di Hotel Desa Gumati Bogor.
- Penyempurnaan Modul Aplikasi Pendukung Informasi Publik (Portal PPID)
 - ✓ Pengelolaan Media Streaming (TV TANI Indonesia)
 - ✓ Pelaksanaan Parsipatif Pameran dan Promosi Pembangunan Pertanian
- Pengelolaan Sumberdaya Informasi Perpustakaan Sekretariat Jenderal. Penambahan koleksi (buku) di perpustakaan pada tahun 2018 berjumlah 459 eksemplar dalam 205 judul. Jumlah pengunjung perpustakaan tahun 2018 ini sebanyak 173 orang.
- Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Target dan Serapan Anggaran

Protokol dan Hubungan Antar Lembaga Pelaksanaan Rapat Pimpinan Terbatas (Menteri Pertanian dengan Pejabat Eselon 1)

Selama tahun 2018 telah dilaksanakan Rapat Pimpinan terbatas 11 kali dan 2 kali Rapim Terpadu dalam satu tahun. Adapun rincian pelaksanaan kegiatan Rapat Pimpinan seperti berikut ini :

- Pelaksanaan Kegiatan Pelantikan, Pelantikan Eselon I (26 Maret 2018), Pelantikan Eselon II (12 Maret 2018; 19 Maret 2018; 15 Mei 2018; 03 Juli 2018; dan 03 Agustus 2018), Pelantikan Eselon III dan IV Lingkup Sekretariat Jenderal (26 Januari 2018; 2 Mei 2018; 18 Mei 2018; 15 Oktober 2018 dan 10 Desember 2018), Pelantikan Pejabat Fungsional dan Sumpah Pegawai Lingkup Sekretariat Jenderal (25 September 2018).
- Kegiatan kunjungan kerja pimpinan ke daerah.
- Kegiatan Kementerian Lainnya adalah Rapat Terbatas Menteri Pertanian bersama Eselon I, Eselon II, Staf Khusus Menteri, Tenaga Ahli Menteri, Kementerian/Lembaga, TNI/Polri, SKPD Provinsi/Kabupaten, dan asosiasi lainnya dilaksanakan sebanyak 12 kali.

Kegiatan Antar Lembaga dengan Pemangku Kepentingan Pertemuan Antar Lembaga (Penyuluh/Petani/gapoktan berprestasi)

Apresiasi Kementerian Pertanian kepada petani/pelaku utama bidang pertanian salah satunya adalah dengan memberikan penghargaan Tingkat Nasional bagi Penyuluh, Petani, Gapoktan, Unit Balai, Unit Pengelola Pertanian dan lain-lain (\pm 77 orang peserta). Apresiasi juga dari DPR-RI/DPD-RI dengan mengundang para penerima penghargaan Tingkat Nasional hadir di gedung DPR-RI dan turut menyaksikan sidang bersama DPD-RI dan DPR-RI, mendengarkan pidato kenegaraan Presiden RI Tahun 2018 dalam rangka memperingati HUT Proklamasi Kemerdekaan RI yang ke 73 di Gedung DPR-RI, Senayan Jakarta.

Sinergi Aksi Informasi dan Komunikasi Publik (SAIK) dan Anugerah Media Humas (AMH) 2018

Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan Sinergi Aksi Informasi dan Komunikasi Publik (SAIK) dan AMH 2018 yang diselenggarakan oleh Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah. Kementerian Pertanian sebagai peserta kegiatan AMH dan peserta pameran 2018, dengan menampilkan produk pertanian dan informasi terkait pertanian. Acara dilaksanakan selama 4 hari (1-4 Desember 2018) dibuka oleh Menteri Komunikasi dan Informatika pada tanggal 1 Desember 2018 bertempat di Novotel Tangerang Banten.

8. Koordinasi Dan Pembinaan Pusat Data Dan Sistem Informasi Pertanian (Pusdatin)

Data komoditas pertanian merupakan data sektor pertanian yang cakupannya meliputi: 1) data tanaman pangan dan hortikultura (percepatan data tanaman pangan, Percepatan data cabai dan bawang merah, pengelolaan data tanaman pangan dan hortikultura, penyusunan metode ubinan padi jajar legowo/JARWO, publikasi statistik pertanian 2018) dan 2) data perkebunan dan peternakan (Pengelolaan data pemotongan ternak di RPH tahun 2018, percepatan data SIWAB, Pengelolaan data tebu nasional secara online tahun 2018, pengelolaan data peternakan dan perkebunan, outlook komoditas peternakan dan perkebunan)

- Data Tanaman Pangan dan Hortikultura. Percepatan data tanaman pangan merupakan kegiatan Prioritas Nasional (PN) yang di pantau oleh Bappenas setiap triwulan bekerjasama dengan BPS. Output yang dihasilkan adalah data padi dan palawija nasional di 17 provinsi sentra secara periodik bulanan dalam bentuk buletin di Kementerian.

➤ Percepatan data cabai dan bawang merah

Pengumpulan data cabai dan bawang dilakukan setiap bulan oleh Dinas Pertanian dan Ditjen Hortikultura serta dilaporkan oleh BPS secara berjenjang dari tingkat kecamatan-kabupaten-provinsi-pusat. Adapun output yang dihasilkan Raw Data xLuas Tanam, Luas Panen dan Produksi Komoditas Cabai Besar, Cabai Rawit, Bawang Merah dan Bawang Putih Bulan Januari – November Tahun 2018 periode bulanan sampai dengan level kabupaten/kota.

Tabel 1. Hasil penghitungan Angka Prognosa, Angka Ramalan I dan Angka Ramalan II Produksi Cabai dan Bawang Merah Tahun 2018.

No.	Komoditas	Produksi (Kuintal)		
		Angka Prognosa 2018	ARAM I 2018	ARAM II 2018
1.	Bawang Merah	15.673.985	15.376.200	15.349.275
2.	Cabai Besar	11.257.620	11.213.576	11.509.996
3.	Cabai Rawit	10.985.288	11.475.311	11.161.670

➤ Pengelolaan data tanaman pangan dan hortikultura.

Buku outlook komoditas tanaman pangan dan hortikultura tahun 2018 menyajikan informasi mengenai: Keragaan data indikator komoditas tanaman pangan baik secara nasional maupun global dan proyeksi luas panen, produktivitas, produksi, konsumsi yang pada akhirnya menghitung penawaran dan permintaan dalam negeri.

➤ Penyusunan metode ubinan padi jajar legowo/JARWO

Dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan bekerjasama dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian ditujukan untuk menduga produktivitas tanaman padi pola tanam Jajar Legowo. Dari kegiatan ini menghasilkan Buku Pedoman Survei Metode Ubinan Padi Jajar Legowo dan Hasil Survei Metode Ubinan Padi Jajar Legowo, yang menyajikan analisis hasil survei metode ubinan padi Jajar Legowo.

➤ Publikasi statistik pertanian

Merupakan kegiatan yang di SBK kan karena merupakan salah satu produk Pusdatin antara lain : Buku Statistik Pertanian 2018 sejumlah 285 , 40 Buku Saku Agricultural Statistics 2018, 400 CD Statistik Pertanian 2018

✓ Data Peternakan dan Perkebunan

- Pengelolaan data pemotongan ternak di RPH
- Percepatan data SIWAB
- Pengelolaan data tebu nasional secara online, yaitu hasil analisa data tebu dalam bentuk buletin per 4 bulanan, PG input dan akses pada website: <http://datatebu.pertanian.go.id/naisvi>.
- Pengelolaan data peternakan dan perkebunan Update data perkebunan dan peternakan level nasional/prov/kab.
- Outlook komoditas peternakan dan perkebunan. Buku outlook komoditas peternakan dan perkebunan tahun 2018 meliputi: daging sapi, daging ayam, daging kambing/domba, telur ayam ras, susu, kelapa sawit, kopi, tebu, pala dan karet.

✓ Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Bidang Data Non Komoditas

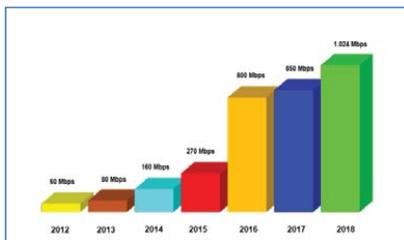
- Tingkat kepuasan terhadap layanan Bidang Data Non Komoditas menargetkan 3,04%,

- Rasio pemenuhan terhadap total permintaan data dan informasi non komoditas pertanian target 78,00% realisasi 95,34 %.
- Data Ekonomi Pertanian, Pengelolaan dan Analisis Data Indikator Makro Sektor Pertanian:
 - ✓ Buku Statistik Terkini Ekonomi Pertanian Bulanan (Bulan Januari s/d Desember 2018)
 - Buku Statist Makro Sektor Pertanian Triwulan I sampai dengan IV Tahun 2018, Buku Statistik Makro Sektor Pertanian Tahun 2018
 - ✓ Database Ekspor – Impor Komoditas Pertanian, PDB, PDRB dan NTP Database Ekspor Impor (database.pertanian.go.id/eksim 2012) Database PDB dan PDRB Database Nilai Tur Petani
- Pengelolaan dan Analisis Data Harga Komoditas Pertanian
Terkumpulnya data dan hasil analisis kinerja komoditas pertanian periode tahun 2018 dalam bentuk buku analisis kinerja perdagangan komoditas beras, jagung, kedelai bawang merah, bawang putih, gula, lada, daging sapi (semester I), ubi kayu, cabe merah, kelapa sawit, kakao, karet, daging ayam (semester II), serta update data harga eceran, harga konsumen pedesaan sd tahun 2017, harga produsen pedesaan-BPS sd tahun 2019, harga gabah sd november 2018
- Pengelolaan dan Analisis Data Harga Konsumsi Sektor Pertanian data yang dikelola dan analisis yaitu :
 - ✓ Komoditas semester I: beras, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, daging sapi, daging ayam dan gula
 - ✓ Komoditas semester II: kacang tanah, bawang putih, telur ayam, minyak goreng sawit, kopi, coklat dan lada
 - ✓ Sumber data: konsumsi dan pengeluaran dari Susenas-BPS, ketersediaan per kapita dari NBM-BKP, indikator kesejahteraan petani dari pengolahan data Susenas-BPS tahun 2013 – 2017
- Pengelolaan Data Ketahanan Pangan
 - ✓ Penyempurnaan metode pengumpulan data pasokan, penjualan dan harga beras di kabupaten/kota dan pengumpulan datanya (data stok beras di drive/sub drive januari – november 2018, buku panduan pengumpulan data basokan penjualan beras tahun 2018
 - ✓ Penyempurnaan sistem monitoring Ketahanan Pangan dan dapat diakses dengan alamat <https://app2.pertanian.go.id/pangan>
 - ✓ Analisis ketersediaan dan kebutuhan beras di kabupaten/kota sampel
- Pengelolaan Data Iklim, OPT dan DPI, data dipublikasikan dalam bentuk Buletin Triwulanan Data Iklim, OPT dan DPI (4 Triwulan), Buletin triwulanan Data Iklim, OPT dan DPI (4 triwulana), Database Iklim, OPT dan DPI terupdate (november 2018 Sistem Informasi Peringatan Dini dan Penanganan Dampak Perubahan Iklim Pada Sektor Pertanian (<http://sipetani.pertanian.go.id:8081/siperditan/>))
- Pengelolaan Data Sarana dan Prasarana Pertanian, penyusunan data terkini sarana pertanian (benih padi, jagung, kedelai dan pupuk) diterbitkan setiap bulan yang disajikan dalam publikasi Data Terkini Bulanan, triwulanan dan buku statistik tahunan serta dalam bentuk database.
- Tersedianya data sebaran fase komoditas pertanian dari citra satelit Landsat-8 yang diperoleh setiap 16 hari sekali dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa (LAPAN), diproses dalam format .tif (peta sebaran) dan .txt (tabel luasan).

Aplikasi Sistem Informasi Monitoring Pertanaman Padi, Aplikasi Sistem Informasi Monitoring Pertanaman Bawang Merah, Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pengembangan Sistem Informasi Pertanian

➤ **Layanan Infrastruktur Jaringan Komputer**

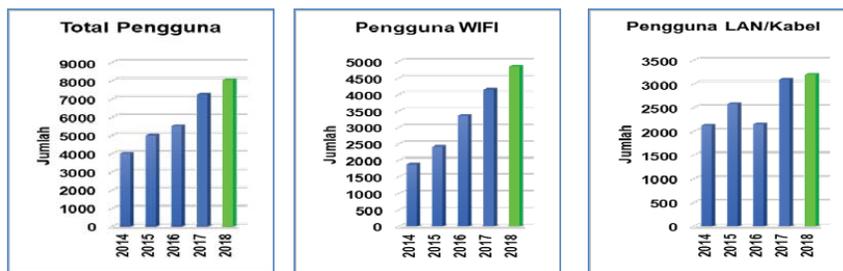
Penyediaan kapasitas bandwith internet lingkup Kantor Pusat Kementan per januari tahun 2018 telah ditingkatkan menjadi 1000 Mbps dari sebelumnya 850 Mbps atau meningkat sebesar 18% dibanding tahun 2017 lalu. Peningkatan bandwith tersebut dapat dilihat pada grafik 1.



Grafik 2. Peningkatan Kapasitas Bandwith Internet Kementan

Dari sisi jumlah pengguna jaringan komunikasi data /internet juga mengalami pertumbuhan yang mencapai 8.000 pengguna pada tahun 2018, terdiri dari 4.700 pengguna WIFI 4700 dan 3200 pengguna LAN/kabel (Grafik 2.). Pemakaian terbesar bandwith internet

berdasarkan Kantor Pusat Kementan tahun 2018 terdapat di Gd. A Kampus Ragunan.



Grafik 3. Jumlah Pengguna Jaringan Komunikasi Data (Internet) Kementan

- Pengembangan Aplikasi Administrasi, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja, transparansi serta aksesibilitas publik terhadap data/informasi berteknologi berbasis web sehingga pengembangan, pengelolaan dan operasionalnya aplikasi diharapkan dapat lebih mudah dan cepat.
 - ✓ Aplikasi Sistem Monitoring Kegiatan (SMK) Aplikasi SMK adalah integrasikan output database RKAKL melalui alamat akses <http://simonas.pertanian.go.id>.
 - ✓ Aplikasi SIM Kehadiran mengintegrasikan data absen seluruh unit kerja dan UPT lingkup Kementerian Pertanian dapat dipantau oleh pimpinan maupun pegawai secara online dengan alamat <http://ekinerja.pertanian.go.id/dashboard/>.
- Pengembangan Aplikasi Spesifik
 - ✓ Pengawasan aplikasi database yaitu Inventarisasi aplikasi database lingkup Kementerian Pertanian, Pengawasan aplikasi Database Harga, PDB, PDRB, Eksim, NTP, Konsumsi, BDSP.

- ✓ Integrasi Sistem Informasi Geospasial menerapkan teknik pengintegrasian data tekstual dalam bentuk tabular dan data spasial.
 - ✓ Monitoring Data harian Upsus padi, jagung dan kedelai (UPSUS PAJALE)
 - ✓ Hasil dari Pengelolaan monitoring SMS Center UPSUS adalah pengelolaan aplikasi yang digunakan untuk mengirimkan laporan perkembangan luas tambah tanam padi, jagung, kedelai wilayah kerja masing-masing (kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi).
- Pengembangan Aplikasi Multimedia
- Yang telah dihasilkan dari pengembangan aplikasi multimedia antara lain :
- ✓ Lomba Inovasi TIK
 - ✓ Pengawalan LPSE
 - ✓ Monitoring SMS center 2016

Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Bagian Umum

- Penyusunan program, rencana kegiatan dan perencanaan anggaran tahun 2018 satker pusat Data dan Informasi Kementerian Pertanian.
 - ✓ Penyempurnaan Renstra Pusdatin 2015-2019.
 - ✓ Penyusunan Kegiatan Pusdatin TA 2019.
- Evaluasi dan pelaporan dalam bentuk evaluasi triwulan; Monitoring kegiatan Pusdatin; Pelaksanaan SPI; Forum Komunikasi Statistik dan Sistem Informasi Pertanian. Dilaksanakan pada tanggal 18 – 20 April 2018 di Serpong, Banten.
- Kepegawaian Pusdatin merupakan koordinator fungsional statistisi dan pranata komputer lingkup Kementan. Workshop pembinaan jabatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 3-4 Mei 2018 di Bandung-Jawa Barat.
- Surat menyurat dan urusan rumahtangga tahun 2018 sebagian besar sudah diarahkan secara online sehingga dokumen dapat tersimpan dalam database.
- Perlengkapan/BMN di Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian pada tahun 2018 diantaranya penghapusan barang berkondisi Rusak Berat, lelang BMN dan hibahk BMN yang ada di provinsi (lampiran).
- Pelayanan Publikasi Data Pertanian, kegiatan ini diantaranya:
 - ✓ News Letter Pusdatin, media informasi kegiatan yang dilakukan oleh Pusat data dan Sistem Informasi Pertanian yang diterbitkan setiap bulan mendistribusikan newsletter tersebut ke eselon I dan eselon II lingkup Kementerian Pertanian serta ke dinas pertanian di 34 provinsi.
 - ✓ ISO dan review SOP. Sebagai amanat UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik, Pusdatin mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan sistem informasi pertanian dan pelayanan data dan informasi pertanian maka tahun 2018 telah dilakukan penerapan SNI ISO 9001 oleh Pusdatin dalam rangka pengelolaan pelayanan publik yang prima.

➤ Dashboard Data dan Informasi Pertanian (ADDIP)

ADDIP yang dikembangkan adalah merupakan sarana untuk menyajikan visualisasi data dan informasi sehingga setiap data informasi yang ditampilkan dapat dibaca dan dianalisis oleh setiap yang membaca data dan informasi tersebut. Tahun 2018 telah dilakukan pengembangan ADDIP menggunakan sumber database sebagai berikut:

- ✓ Basisdata Percepatan Penyediaan Data (Basisdata Harga Pasar Induk Beras Cipinang melalui <http://dss.pertanian.go.id/SASVisualAnalyticsDesigner>)
- ✓ Pelayanan data monitoring kunjungan kerja (kunker) merupakan data matrik bantuan Menteri Pertanian yang ditindaklanjuti oleh Eselon I sesuai dengan tupoksinya setiap bulan.
- ✓ Survei Kepuasan Pengguna Layanan Pusdatin Tahun 2018, penerapan Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2015 yang berorientasi kepada kepuasan pengguna layanan telah ditunjuk menjadi Unit Kerja Pelayanan Publik pada Kementerian Pertanian melalui situs (website) resmi Kementerian Pertanian, media cetak dan media elektronik, dan media publikasi lainnya. Kepuasan pengguna layanan Pusdatin adalah meningkatnya kepuasan pengguna layanan dengan target sebesar 3,02 persen. Survei dilakukan untuk memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan menggunakan indikator dan metodologi survei berdasar Permen PAN-RB No.14/2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik serta Permentan No.19/Permentan/OT.080/4/2018 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Pertanian dengan responden 126 orang dihasilkan hasil survei :

Nilai Indeks	3,22
Nilai Indeks Kepuasan Pengguna/Masyarakat (IKM)	80,57
Kinerja PUSDATIN	BAIK

Target kepuasan layanan sebesar 3,02 persen terealisasi sebesar 3,22 persen, sehingga dinilai kinerja Pusat Data dan Sistem Informasi “BAIK”

9. Koordinasi Dan Pembinaan Pusat Perlindungan Varietas Tanaman Dan Perizinan

Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian melaksanakan tugas teknis di bidang Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, meliputi : 1) Pelayanan Perlindungan Varietas Tanaman (PVT); 2) Pelayanan Pendaftaran Varietas Tanaman; 3) Pelayanan Perizinan Pertanian; dan Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Pusat PV/TPP.

Pelayanan Perlindungan Varietas Tanaman (PVT)

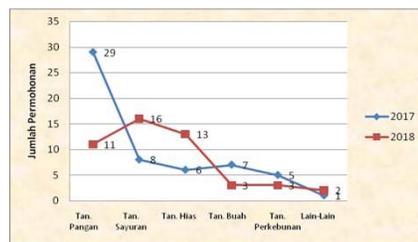
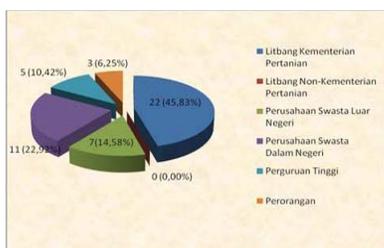
- Pelayanan Perlindungan Varietas Tanaman (PVT), Realisasi permohonan Hak PVT pada tahun 2018 tercapai 106,67% dari target 45 permohonan yaitu diterima 48 permohonan. Capaian ini menurun dibanding tahun 2017 mencapai realisasi 56 permohonan Hak PVT. Permohonan Hak PVT tahun 2018 didominasi pemohon dari perusahaan swasta dengan komoditas tanaman sayuran.



Grafik 3. Permohonan Hak PVT Menurut Kelompok Tanaman Tahun 2018

Grafik 4. Perkembangan Permohonan Hak PVT Menurut kelompok Tanaman Tahun 2017-2018

Grafik 5. Permohonan Hak PVT Tahun 2018 Menurut Kelompok Pemohon



Tahun 2018 berdasarkan kelompok pemohon, Lembaga Penelitian Kementerian Pertanian (Badan Litbang Pertanian) merupakan pemohon yang paling banyak mengajukan permohonan sebanyak 22 permohonan Hak PVT.

Tabel 2. Realisasi Penerbitan Hak PVT Tahun 2017- 2018

No.	Komoditas	Penerbitan Hak PVT Tahun 2017	Penerbitan Hak PVT Tahun 2018
1.	Tan. Pangan	8	15
2.	Tan. Sayuran	15	12
3.	Tan. Hias	2	0
4.	Tan. Buah	4	4
5.	Tan. Perkebunan/ Industri/Kehutanan	3	7
6.	Lain-Lain	0	0
TOTAL		32	38

Jumlah sertifikat Hak PVT tahun 2018 adalah 38 sertifikat naik 18,75% dari tahun 2017 yaitu 32 sertifikat(lampiran). Pendaftaran Varietas Lokal Dan Hasil Pemuliaan, tahun 2018 terealisasi 659 Tanda Daftar varietas (509 varietas lokal dan 150 varietas hasil pemuliaan) dari target 180 Tanda Daftar. Tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 201% dari tahun 2017 yaitu 343 Tanda Daftar(lampiran)

Pelayanan Pendaftaran Varietas Tanaman varietas lokal dan hasil pemuliaan Tahun 2018 :

- ✓ Percepatan Pendaftaran Varietas Lokal, maka tahun 2018 Pilot project kerjasama di 34 provinsi antara Pusat PVTP dengan BBP2TP sebagai koordinator dari BPTP di seluruh Indonesia, dengan target pendaftaran varietas lokal sebanyak 300 varietas dan terealisasi sebanyak 330 varietas (Lampiran).

- ✓ Pelatihan Petugas Penyusun Pendeskripsi Varietas Tanaman diikuti 34 peserta dilaksanakan pada tanggal 16-20 Juli 2018 di Stasiun Uji BUSS Manoko Lembang. Bertujuan menciptakan petugas SDG yang kompeten dalam melakukan karakterisasi dan menyusun deskripsi varietas tanaman di daerah.
- ✓ Pendaftaran Peredaran Varietas Tanaman Hortikultura tahun 2018 ditargetkan sebanyak 200 permohonan dan terealisasi 272 varietas atau 136% dari target.

Perkembangan permohonan dan penerbitan tanda daftar varietas tanaman hortikultura dalam rangka peredaran sebagaimana terlihat pada Tabel di bawah.

Tabel 3. Perkembangan Pendaftaran Varietas Hortikultura dan Penerbitan Tanda Daftar Varietas Tahun 2011 s.d 2018

URAIAN	TAHUN					TOTAL
	2011-2014	2015	2016	2017	2018	
Permohonan	744	310	251	205	272	1.782
Penerbitan Tanda Daftar	365	180	149	132	122	948

- Pelepasan Varietas Tanaman Secara Online. Sebagai tindak lanjut dari Permentan 117 tahun 2013, Pusat PVTTP telah membangun 2 (dua) jenis pelayanan online, yaitu 1) Pendaftaran Varietas Hortikultura, 2) pelayanan pendaftaran varietas lokal dan Hasil Pemuliaan. Untuk sosialisasi aplikasi pendaftaran varietas hortikultura telah dilaksanakan Workshop Pelepasan Varietas Tanaman Secara Online pada tanggal 22-23 Oktober 2018 bertempat di Hotel Royal Bogor.

Pelayanan Perizinan Pertanian

Bidang Pelayanan Perizinan Pertanian, sesuai dengan tugas dan fungsinya melayani perizinan pertanian sebagai berikut:

- Perizinan Pendaftaran Pupuk

Pelayanan perizinan pendaftaran pupuk An-Organik dan Organik pada tahun 2018 ditargetkan sebanyak 600 surat permohonan, diterima permohonan pendaftaran sebanyak 1417 permohonan (236% dari target), terdiri dari permohonan pupuk an-organik 1110 dan pupuk organik 307. Dari permohonan pendaftaran pupuk telah diterbitkan izin pendaftaran pupuk sebanyak 1580 Surat Izin, yang terdiri dari 1580 Surat Izin yang terdiri dari 1313 izin pupuk an organik dan 267 izin pupuk organik. Rincian permohonan dan realisasi pelayanan perizinan pupuk An Organik dan Organik sebagaimana terlihat pada Tabel 7.

Tabel 4. Capaian Kinerja Pelayanan Perizinan Pupuk Tahun 2018*)

No	Jenis Permohonan	Target 2018	2018	
			Permohonan	Penerbitan
A	Pupuk An-Organik			
	Pendaftaran baru dan ulang	250	314	432
	Layanan pupuk an organik lainnya	150	796	881
B	Pupuk Organik			
	Pendaftaran baru dan ulang	170	260	197
	Layanan pupuk an organik lainnya	30	47	70
	JUMLAH A+B	600	1417	1580

*) Data Per 15 Desember 2018

➤ Pendaftaran Pestisida

Target pelayanan permohonan pendaftaran pestisida tahun 2018 sebanyak 4.500 permohonan, sedangkan realisasi mencapai 10.347 permohonan atau 229,9% dari target. Jumlah izin pendaftaran pestisida yang sudah diterbitkan sebanyak 10.370. Realisasi permohonan perizinan pestisida dan layanan pestisida lainnya tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 12,13% dibandingkan tahun 2017, sedangkan realisasi penerbitan Surat Izin meningkat 9,65% (Lampiran).

- ✓ Sosialisasi Permentan No.36/Permentan/SR/10/2017 Tentang Pendaftaran Pupuk An-Organik, dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2018 di Hotel Salak Tower Bogor yang dihadiri oleh para pelaku usaha bidang pupuk dan stakeholder lainnya.
- ✓ Bimbingan Teknis Pendaftaran Pupuk Secara On-Line
- ✓ Optimalisasi Perizinan Pertanian secara Online serta Koordinasi Pengawasan Peredaran Pupuk dan Pestisida diselenggarakan pada hari Jum'at 29 September 2018 di Hotel Le Polonia Medan
- ✓ Workshop Layanan Perizinan Pestisida Online dilaksanakan di Ijen Suites Hotel Malang, pada tanggal 7 Desember 2018, dihadiri oleh 100 peserta.

➤ Pemasukan/Pengeluaran Benih dan SDG

Pelayanan perizinan pemasukan dan pengeluaran perbenihan tanaman tahun 2018 ditargetkan sebanyak 1.400 permohonan, meliputi perizinan pemasukan benih tanaman sebanyak 745 permohonan dan perizinan pengeluaran benih sebanyak 655 permohonan. Dari target tersebut terealisasi 1498 permohonan atau 107% dari target. Permohonan pemasukan benih mencapai 810 permohonan (108,7% dari target) dan pengeluaran sebanyak 688 atau (105% dari target). Secara keseluruhan permohonan yang diterima pada tahun 2018 mengalami penurunan 16,5% jika dibandingkan tahun 2017. Adapun realisasi penerbitan Surat Izin Pemasukan/Pengeluaran (SIP) pada tahun 2018 mencapai 1.379 SIP meliputi 745 Surat Izin Pemasukan Benih Tanaman dan 634 Surat Izin Pengeluaran Benih Tanaman, tahun 2018 mengalami penurunan 11,4 % dibandingkan tahun 2017. Realisasi pelayanan perizinan pemasukan dan pengeluaran benih tanaman tahun 2018 disajikan pada Tabel 9.

Tabel 5. Capaian Kinerja Pelayanan Perizinan Benih dan SDG Tanaman Tahun 2018 dan 2017

No	Jenis Perizinan	Target 2018	2018		2017	
			Permohonan	Penerbitan	Permohonan	Penerbitan
A	PEMASUKAN					
1	Benih Tan Hortikultura	350	308	258	376	303
2	Benih Tan Pangan	40	42	32	41	30
3	Benih Tan Perkebunan	45	40	52	61	48
4	Sumber Daya Genetik Tanaman	125	96	83	139	118
5	Benih Rumpuk Pakan Ternak	5	10	4	11	8
6	Rekomendasi Impor Produk Tanaman Pangan	180	314	316	381	294
	Jumlah A	745	810	745	1009	801
B	PENGELUARAN					
1	Benih Tan Hortikultura	550	501	489	695	680
2	Benih Tan Pangan	20	7	7	15	11
3	Benih Tan Perkebunan	30	56	37	30	27
4	Sumber Daya Genetik Tanaman	45	65	44	46	37
5	Benih Rumpuk Pakan Ternak	-	-	-	-	-
6	Rekomendasi Ekspor Beras	10	59	57	-	-
	Jumlah B	655	688	634	786	755
	TOTAL A+B	1400	1498	1379	1795	1556
	% Naik/Turun Permohonan		-16,5			
	% Naik/Turun Penerbitan Surat Izin		-11,4			

- **Perizinan Peternakan**

Pelayanan perizinan peternakan tahun 2018 ditargetkan 4400 permohonan, terdiri dari 4125 rekomendasi dan 275 surat izin. Pada tahun 2018 jumlah permohonan bidang peternakan yang diterima sebanyak 6038, terdiri dari 5127 permohonan rekomendasi (124,3% dari target) dan 911 permohonan surat izin (331,3% dari target.) Dari 6038 permohonan tersebut telah diterbitkan 4228 izin peternakan yang meliputi : 161 Tanda Daftar, 35 Izin Usaha dan 4032 RPP. Secara keseluruhan permohonan yang diterima pada tahun 2018 mengalami penurunan 4,1% jika dibandingkan tahun 2017 dan penerbitan Surat Izin dan Rekomendasi mengalami kenaikan 30,8% jika dibandingkan dengan tahun 2017 (Lampiran).
- **Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Pusat PVTTP**
 - ✓ Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kementerian Pertanian (Padu Satu), berdasar Perpres-No.91/2017 dan Permentan No.41/Permentan/TI.120/11/2017 tentang Pelayanan Perizinan Pertanian Secara Elektronik maka Pusat PVTTP mewujudkan pelayanan prima dengan dibangunnya ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Padu Satu).
 - ✓ ISO 9001 :2015, Sertifikasi Internasional. Sistem Manajemen Mutu ini merupakan upaya untuk perubahan perilaku dan cara kerja menjadi lebih baik dan sistematis dan memberikan pelayanan yang berstandar internasional.
 - ✓ Pembangunan Stasiun Pengujian BUSS Dataran Rendah. Pelaksanaan uji BUSS Permohonan Hak PVT, Pusat PVTTP telah memiliki satu unit Stasiun Pengujian BUSS Tanaman Dataran Tinggi yang berlokasi di Lembang, Jawa Barat. Untuk Uji BUSS tanaman dataran rendah masih dilakukan di lahan pemohon (Breeder's Testing) atau dengan meminjam lahan milik Balai Penelitian lingkup Badan Litbang Pertanian.
- **Kerjasama Antar Instansi tahun 2018, Pusat PVTTP melaksanakan dan terlibat dalam tiga perundingan perdagangan internasional untuk pasal terkait Perlindungan varietas tanaman:**
 - ✓ Indonesia-European Free Trade Association (EFTA) Comprehensive Economic Partnership Agreement (IE-CEPA) dilakukan perundingan pada tanggal 23 November 2018, kesepakatan ditandatangani pernyataan bersama (joint statement) di Jenewa, Swiss dan dokumen resmi perjanjian pada tanggal 16 Desember 2018 di Jakarta, Indonesia.
 - ✓ Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA) Perundingan Putaran ke-6 I-EU CEPA telah dilaksanakan di Palembang, Sumatra Selatan, pada 15-19 Oktober 2018.
 - ✓ Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), Intersession Meeting Working Group Intellectual Property Rights (IPR) di Bandung tanggal 18-20 September 2018, Pusat PVTTP turut membahas pasal tentang PVT.
- **Pelayanan Hukum PVTTP**

Implementasi peraturan perundang-undangan bidang PVT mengalami permasalahan dan kendala terutama terjadi perubahan organisasi bergabungnya Pusat Perizinan Pertanian menjadi satu institusi regulasi, sehingga perlu melakukan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait melalui pembahasan.
- **Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), hasil pengukuran tahun 2018 menunjukkan Nilai Indeks 3,20 dengan Nilai IKM setelah dikonversi menjadi 79.98 dengan Mutu Pelayanan B (kinerja nilai BAIK).**

Tabel 6 . Hasil Nilai IKM Tahun 2018

NO	UNSUR PELAYANAN		Nilai IKM	MUTU
1	U1	Persyaratan	3,20	B
2	U2	Sistem Mekanisme dan prosedur	3,12	B
3	U3	Waktu penyelesaian	3,06	B
4	U4	Biaya/Tarif	3,34	B
5	U5	Produk spesifikasi jenis pelayanan	3,11	B
6	U6	Kompetensi Pelaksana	3,23	B
7	U7	Perilaku Pelaksana	3,30	B
8	U8	Sarana dan Prasana	3,23	B
9	U9	Penanganan pengaduan dan masukan	3,49	B
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat			3,20	B
NILAI IKM SETELAH DIKONVERSI			79,98	B

10. Koordinasi Dan Pembinaan Pusat Perpustakaan Dan Penyebaran Teknologi Pertanian

Pada tanggal 17 Oktober 2018, Kementerian Pertanian menyelenggarakan Seminar Nasional bertepatan "Menggerakkan Generasi Muda Menuju Indonesia Lumbung Padi Dunia 2045" yang dihadiri oleh 500 peserta terdiri dari petani muda, pengusaha muda, penyuluh dan mahasiswa. Kegiatan didedikasikan untuk memotivasi kawula muda untuk terjun di bidang pertanian sebagai petani. Menjadi petani terutama generasi millennial saat ini merupakan profesi yang membanggakan terbukti dengan hadirnya petani muda sukses di berbagai daerah. Petani dan pengusaha sukses yang hadir sebagai narasumber dalam seminar nasional ini adalah Wahida Anisa Yusuf peneliti dari Kementerian Pertanian, Baskoro Tri Caroko dari PT. Sumber Unggas, serta Bambang Jasnanto petani hidroponik sukses. Selain itu ada Ulus Pirmawan, petani Sayuran Sukses, Slamet Wuryadi Peternak Puyuh Sukses, Maria Irene Tandean dari PT. Maxindo Karya Anugerah, Budiono petani jagung sukses. Kegiatan Seminar Nasional tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Hari Pangan Sedunia Tahun 2018 di Provinsi Kalimantan Selatan.

Kegiatan utama Pusat Perpustakaan Dan Penyebaran Teknologi Pertanian yang dilaksanakan pada tahun 2018 yaitu :

➤ Kementerian Pertanian Pacu Publikasi Ilmiah Populer

Menyelenggarakan Workshop Penulisan Ilmiah Populer kepada para pengelola publikasi dan pustakawan. Acara yang diselenggarakan pada tanggal 3-5 Oktober 2018 di Wisma Pertanian Cipayung, Bogor, Jawa Barat. Workshop dihadiri oleh 42 peserta dari 42 instansi di lingkungan Kementerian pertanian. Workshop ditujukan guna mengatasi kendala masyarakat dalam pemahaman pembacaan karya ilmiah yang dihasilkan oleh para peneliti, sehingga bahasa penelitian dapat dipahami oleh masyarakat awam.

➤ Selamatkan Buku Lama melalui Proses Preservasi dan Konservasi

Pusat Perpustakaan Dan Penyebaran Teknologi Pertanian juga menyelenggarakan Workshop Preservasi dan Konservasi Koleksi Perpustakaan pada tanggal 2 Oktober 2018 yang diselenggarakan sebanyak empat gelombang. Setiap gelombang terdiri dari 20 peserta yang diperuntukan untuk pengelola perpustakaan di instansi dan masyarakat umum.

Workshop bertujuan guna meningkatkan pengetahuan peserta dalam upaya pencegahan kerusakan terhadap buku-buku lama akibat faktor-faktor alam seperti kelembaban dan binatang (rayap).

➤ **Semarak Dunia Hortikultura dalam Spektra Horti 2018**

Pada tanggal 20-23 September 2018, Puslitbang Hortikultura menyelenggarakan Spektra Horti 2018 di Balai Penelitian Tanaman Sayuran (Balitsa) Lembang, Bandung Barat. Pada ajang kegiatan tersebut, Pusat Perpustakaan Dan Penyebaran Teknologi Pertanian berpartisipasi sebagai koordinator Horti award dimana penganunegaraan award bagi peneliti, petani dan pelaku usaha yang sudah berkontribusi dan berjasa dalam inovasi yang dihasilkan oleh Kementerian Pertanian juga berpartisipasi dalam pameran dengan menyajikan buku komoditas, leaflet brosur, komik dunia pertanian serta CD Video Teknologi.

➤ **Asah Kemampuan Pustakawan melalui Temu Teknis Literasi Informasi**

Pada tanggal 28-29 Agustus 2018, Pusat Perpustakaan Dan Penyebaran Teknologi Pertanian juga menyelenggarakan acara Temu Teknis Literasi Informasi di Pustaka. Acara dibuka secara resmi oleh Kepala Pustaka Gayatri K. Rana. Tujuan dari acara yaitu melahirkan instruktur-instruktur baru literasi informasi, minimal sebagai instruktur bidang tersebut di instansinya masing-masing.

➤ **Siapkan Sample Tanah Untuk Keberlangsungan Pembangunan Pertanian**

Pada tanggal 28-29 Agustus 2018, Pusat Perpustakaan Dan Penyebaran Teknologi Pertanian juga menyelenggarakan acara Bimtek Pembuatan makro monolith pada 25-27 Juli 2018 di Maros, Sulawesi Selatan. Acara dibuka secara resmi oleh Kepala Pustaka Gayatri K. Rana dan diikuti oleh 60 peserta dari Dinas Pertanian Kab/kota Seluruh Provinsi Sulawesi Selatan. Tujuan dari acara yaitu agar para peserta dari Kab/kota memiliki kemampuan untuk membuat Makro Monolith. Makro monolith adalah sampel tanah sebagai bahan atau acuan untuk mempelajari klasifikasi, morfologi dan kesuburan tanah.

➤ **Bangun Kreativitas Generasi Muda dengan Literasi Informasi**

Pada tanggal 19 Juli 2018, Pusat Perpustakaan Dan Penyebaran Teknologi Pertanian juga menyelenggarakan acara seminar nasional dengan tema Literasi Informasi Membangun Kreativitas Generasi Muda. Seminar dibuka oleh Kepala Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian Gayatri K Rana dan dihadiri oleh 100 orang peserta. Pada tanggal 7 Desember 2018, Pusat Perpustakaan Dan Penyebaran Teknologi Pertanian juga melakukan kunjungan ke Kota Malang Provinsi Jawa Timur guna mensosialisasikan 600 Teknologi Inovatif kepada para penyuluh. Acara bertempat di kantor BPTP Jawa Timur dan dibuka resmi oleh Kepala BPTP Jawa Timur, Chend Tafakresnanto.

11. Koordinasi Dan Pembinaan Pusat Penelitian/Analisis Sosial Ekonomi Dan Kebijakan Pertanian.

Kegiatan penelitian/analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian dilaksanakan oleh Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP). Pada tahun 2018, PSEKP melaksanakan kegiatan penelitian sosial ekonomi dan kebijakan pembangunan pertanian, dan kerjasama serta pendayagunaan hasil penelitian. Secara lebih rinci, uraian pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

Penelitian Sosial/Analisis Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Selama tahun 2018, PSEKP sudah melaksanakan 25 penelitian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian yang terdiri dari 12 (48%) judul penelitian regular dan 13 (52%) penelitian analisis kebijakan (anjak). Beberapa permasalahan yang dihadapi adalah: (1) Rekomendasi kebijakan dinilai masih terlalu umum, belum spesifik dan konkrit. Sedangkan stakeholder (Ditjen teknis) mengharapkan rekomendasi langsung operasional, (2) Kegiatan penelitian umumnya diselesaikan dalam waktu satu tahun kalender. Hal ini dinilai terlalu lama, sementara tuntutan kebutuhan kebijakan lebih cepat dari itu, (3) Rekomendasi kebijakan yang baik terkadang tidak cukup hanya dari dihasilkan penelitian, namun perlu diperkaya dari berbagai informasi lain atau akumulasi pengetahuan dan pengalaman peneliti, untuk itu perlu peningkatan kapasitas untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang baik, sehingga hasil penelitian tidak hanya sampai pada karya tulis ilmiah tetapi juga menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih operasional.

Beberapa langkah sudah dilakukan untuk menghasilkan kualitas hasil penelitian dan rekomendasi kebijakan yang lebih baik. Secara ringkas, sintesa hasil kegiatan penelitian sosial ekonomi pertanian, adalah sebagai berikut:

➤ Kaji Ulang Kebijakan Perbenihan dan Subsidi Benih Padi dan Jagung

Hasil penelitian memberikan rekomendasi bahwa subsidi benih perlu mempertimbangkan aspek dinamika pasar benih, aksesibilitas dan kebiasaan petani dalam penggunaan benih unggul berlabel. Dengan demikian perlu dibuka alternative subsidi benih yang tidak berlaku secara nasional atau bersifat regional. Untuk wilayah Pulau Jawa, subsidi benih nampaknya perlu dipertimbangkan lagi, untuk dilanjutkan atau tidak. Hal ini karena terdapatnya distorsi dalam pemasaran benih bagi para penangkar, termasuk Desa Mandiri Benih (DMB). Sebaliknya untuk wilayah luar Jawa, apalagi pada wilayah jauh, atau aksesibilitasnya sulit, subsidi benih berdampak positif dalam meningkatkan atau menciptakan pasar benih bagi penangkar termasuk pada DMB. Untuk program bantuan benih, implementasinya perlu memperhatikan kondisi/kemampuan wilayah dalam memproduksi benih, yaitu dengan melihat indikator perkembangan produsen dan penangkar benih yang eksis. Untuk mendukung perkembangan DMB, diperlukan penguatan kemampuan permodalan untuk membeli calon benih dari anggota DMB. Secara umum, keberhasilan DMB sangat dipengaruhi pengalaman pengurus DMB dalam memasarkan benih. Untuk itu, peningkatan kapasitas menjangkau kerjasama atau fasilitasi peluang kerjasama pemasaran benih dari DMB dengan berbagai pihak merupakan hal yang penting untuk meningkatkan perkembangan DMB.

➤ Desain dan Alternatif Kebijakan Mewujudkan Swasembada Kedelai

Sudah lebih dari 40 tahun Indonesia belum mampu mencapai target swasembada kedelai. Pada lain pihak konsumsi kedelai terus bertambah seiring pertumbuhan penduduk dan kebutuhan pakan ternak. Banyak program telah dilakukan, Kementan melaksanakan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi, Kementerian Perdagangan menetapkan HPP (harga dasar). Program Kementan dengan memberikan bantuan benih dan pupuk gratis belum mampu meningkatkan luas tanam dan luas panen, maupun produksi kedelai secara signifikan. Termasuk beberapa varietas unggul kedelai sudah dilepas dan disebarluaskan. Impor masih terus berlangsung mencapai hampir 70 persen dari kebutuhan nasional. Kebijakan tarif impor rendah, bahkan akhir-akhir ini bebas tarif, jelas mendukung upaya swasembada kedelai. HPP (Harga Pokok Pemerintah) untuk petani kedelai sudah berulang kali direvisi dan terakhir tahun 2017 ditetapkan sebesar Rp8.500/kg. HPP tidak efektif karena pada

kenyataannya rata-rata harga jual petani kedelai di bawah HPP, dan tidak tersedia dana khusus oleh BULOG untuk membeli kedelai petani. Alternatif yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan penetapan HPP dari keputusan menteri perdagangan menjadi keputusan presiden dengan diikuti pendanaan khusus untuk pembelian kedelai petani.

Selain itu hal yang lebih mendasar adalah diperlukan luasan areal budidaya kedelai yang memadahi, ketersediaan benih, dan petani. Peningkatan produksi kedelai harus didorong melalui peningkatan luas tanam, karena potensi peningkatan produktivitas kedelai lebih sulit dilakukan dan lebih rendah kontribusinya. Efektivitas HPP ini diharapkan dapat menarik petani menanam kedelai, karena selama ini usahatani kedelai tidak kompetitif dibandingkan dengan usahatani jagung, tebu, bahkan padi.

➤ **Desain, Implementasi, Respon Stakeholder Toko Tani Indonesia (TTI) dalam Pengendalian Harga Pangan Pokok dan Penting**

Pelaksanaan kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) dengan Pola kemitraan antara LUPM dan toko tani Indonesia (TTI) telah membentuk struktur pasar baru yang memberikan dampak kepada penyediaan pangan pokok dengan harga yang terjangkau, dan stabilisasi harga sekalipun dalam porsi yang masih sangat terbatas. Upaya memperpendek mata rantai pasok dalam rangka menciptakan harga yang wajar di tingkat konsumen sudah menunjukkan pada capaian jumlah dan margin yang diperoleh di masing-masing pelaku menjadi terstruktur. Sekalipun tidak secara langsung menjadi bagian dari instrumen stabilisasi harga karena volume pasokan masih terbatas, kegiatan PUPM melalui TTI telah memerankan fungsinya mempengaruhi psikologi pasar konsumen dan produsen, sehingga ada pilihan harga sebagai pembanding di pasar konsumen. Dua pilihan untuk mendorong psikologis pasar melalui kegiatan PUPM yang dilaksanakan oleh LUPM dan TTI sebagai mitra, diantaranya dengan menambah jumlah LUPM sebanding dengan jumlah TTI di seluruh Indonesia, berdasarkan kebutuhan pangan (permintaan/konsumsi) masyarakat di masing-masing daerah atau dengan meningkatkan jumlah dan kinerja pasokan dan sebaran TTI di beberapa lokasi strategis yang dapat diakses oleh masyarakat luas. Pengembangan program PUPM yang diimplementasikan melalui kegiatan LUPM dan TTI hendaknya tidak hanya mengejar target jumlah LUPM dan TTI semata tetapi juga diikuti dengan pembenahan mekanisme dan regulasi yang menjadi acuan pelaksanaan kegiatan ini di tingkat LUPM, TTI maupun pendamping.

➤ **Peningkatan Manfaat Infrastruktur Air untuk Pertanian Lahan Kering dalam Mendukung Ketahanan Pangan dan Pendapatan Petani**

Untuk jangka pendek – menengah, kebijakan dan program peningkatan manfaat infrastruktur air untuk pertanian lahan kering yang perlu ditempuh adalah mendorong petani untuk mengubah pola tanam dan produktivitas. Untuk itu yang sangat dirasakan urgensinya adalah meningkatkan kemudahan petani memperoleh benih/bibit yang lebih bermutu, perbaikan sistem pemasaran, dan penyuluhan budidaya yang lebih produktif dan adaptif terhadap kondisi iklim. Untuk jangka menengah – panjang, perubahan paradigma dalam pengembangan infrastruktur air untuk pertanian sangat diperlukan. Pertama, konsep pengembangan infrastruktur air harus diletakkan dalam konteks pemanenan air dan penggunaan secara hemat berbasis prinsip-prinsip sustainable water resource management. Terutama pada wilayah lahan kering, konteks pemanenan air mencakup pula moisture management melalui penerapan agroforestry, pertanian konservasi, pemeliharaan bahan organik tanah, dan pemanenan air skala mikro di sekitar rumah/pekarangan dan pertanian organik. Perlu ditekankan bahwa keberlanjutan manfaat infrastruktur air juga

sangat dipengaruhi oleh kinerja Daerah Aliran Sungai (Watershed). Terkait dengan itu, koordinasi lintas sektor makin menjadi hal yang penting untuk dilakukan.

➤ Strategi Pemanfaatan Sumber Kapital Desa dalam Peningkatan Produksi Pertanian dan Pendapatan Petani

Penelitian pemanfaatan sumber capital desa, difokuskan pada Dana Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyaluran Dana Desa di tingkat desa sudah mengikuti tahapan-tahapan yang telah ditentukan, dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Desa. Pengalokasian Dana Desa masih diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur, untuk pemberdayaan masyarakat (termasuk di dalamnya sektor pertanian) relatif kecil. Rencahnya pemanfaatan dana desa untuk sektor pertanian disebabkan kurang pahaman pihak desa atau pun para pendamping terhadap sektor pertanian. Selain itu, adanya tumpang tindih kegiatan dan belum ada kesamaan persepsi antara Kementerian PDPT dan Kementerian Pertanian. Dalam pemanfaatan dana desa, sektor pertanian belum mendapatkan perhatian walaupun Kementerian Desa telah menempatkan produk unggulan desa/produk unggulan kawasan desa, pembuatan embung, dan BUMDes sebagai skala prioritas. Terdapat kecenderungan Tim Pengelola Kegiatan lebih memilih pembangunan fisik (terutama infrastruktur jalan) dibandingkan pemberdayaan masyarakat dengan laporan pertanggungjawaban yang relatif terukur.

Peran pendamping desa dan pendamping lokal desa menjadi penting ketika dihadapkan pada kualitas sumber daya manusia yang mengelola dana desa relatif rendah. Dana Desa belum secara khusus memenuhi kebutuhan petani yang mendukung kegiatan usaha tani (sarana produksi, alsintan, dan permodalan). Untuk itu diperlukan beberapa strategi, dengan memasukan pembangunan infrastruktur pertanian dan program mendorong usaha pertanian kedalam agenda atau usulan pemanfaatan dana desa. Selain itu perlu peningkatan kapasitas pendamping dan local champion dibidang usaha pertanian tentang potensi pengembangan pertanian di wilayahnya.

➤ Strategi Antisipatif Pengelolaan Surplus Produksi Padi dan Jagung

Berdasarkan struktur hierarki strategi antisipatif pengelolaan surplus produksi padi, prioritas tujuan yang ingin dicapai dari strategi tersebut adalah penyerapan surplus produksi, selain stabilisasi harga dan peningkatan ekonomi industri pengolahan bahan pangan. Faktor utama yang mempengaruhi tujuan tersebut adalah kebijakan pemerintah terkait tata niaga/perdagangan pangan. Dalam hal ini Kementerian Pertanian merupakan aktor (pelaku) utama yang berperan dalam pencapaian tujuan, bersama-sama dengan Kementerian Perdagangan, Bulog, Pemerintah Daerah dan Asosiasi Pengusaha.

Strategi yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan menurut urutan besaran bobot adalah: (1) mengeksport beras kualitas khusus, baik beras organik, premium maupun beras varietas lokal yang memiliki keunggulan tekstur, rasa dan aroma yang digemari oleh negara pengimpor; (2) melakukan penetrasi pasar ekspor beras medium; (3) mengeksport beras medium ke pasar tradisional; (4) mengaktifkan program serap gabah untuk stok Bulog; (5) mengoptimalkan cadangan pangan Pemda; (6) mendorong pengembangan industri pengolahan beras; (7) mengoptimalkan cadangan pangan masyarakat; dan (8) mengoptimalkan program bantuan pangan luar negeri. Strategi untuk mengoptimalkan cadangan pangan masyarakat ditempuh melalui: (1) mengoptimalkan lumbung pangan masyarakat; (2) mengoptimalkan peran produsen padi; (3) mengoptimalkan peran penggilingan gabah; (4) mengoptimalkan peran pedagang beras; (5) mengoptimalkan peran

Horeka (hotel restaurant catering); dan (6) mengoptimalkan peran rumah tangga konsumen beras.

- Pengoptimalan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) Dalam Mendukung Swasembada Pangan, Pengembangan Model Proyeksi Permintaan dan Penawaran Komoditas Pangan Menuju 2045

Kebijakan penyediaan lahan oleh pemerintah melalui program reforma agraria dapat dibagi dalam dua bagian yaitu peningkatan akses dan peningkatan aset. Peningkatan akses masyarakat dilaksanakan melalui program Perhutanan Sosial yang memberi akses perusahaan hutan seluas 12,7 juta ha. Sedangkan peningkatan aset dilaksanakan melalui TORA, mencakup legalisasi 4,5 juta ha lahan yang akan disertifikasi termasuk lahan transmigrasi yang belum bersertifikat dengan redistribusi 4,5 juta ha lahan dari eks HGU/tanah terlantar dan tanah pelepasan kawasan hutan. Ketertutupan atau kelangkaan data tentang status lahan yang pernah dikonsesikan (eks HGU, terlantar dll) mempersulit proses penetapan lahan layak memenuhi sebagai objek TORA dan berpotensi menimbulkan konflik baik antara berbagai pihak khususnya eks pengusaha lahan dengan masyarakat petani.

Untuk mengaplikasi Permen ATR No. 7/2017 (setahun setelah HGU habis dan tidak diperpanjang lahan bisa diambil oleh negara, dan untuk setiap perpanjangan mengharuskan 20% lahan diberikan untuk TORA), perlu dilakukan: (1) Identifikasi secara menyeluruh lahan HGU yang akan habis masa izinnnya dan terlantar dengan melibatkan berbagai pihak secara terbuka; (2) BPN yang ada didaerah diberikan kewenangan penuh untuk menetapkan lahan-lahan HGU yang tidak digunakan sesuai peruntukan atau terlantar.

- Pengembangan Model Proyeksi Permintaan dan Penawaran Komoditas Pangan Menuju 2045

Berdasarkan kondisi tahun 2016, seluruh aspek yang diproyeksi menunjukkan peningkatan kecuali luas panen kedelai dan produktivitas tebu yang menurun berturut - turut sebesar 14,21 dan 20,10%. Sementara kenaikan tertinggi adalah produksi GKG yang mencapai 100% dibandingkan produksi tahun 2016. Untuk komoditas gula, konsumsi gula melonjak tajam hingga meningkat 221% pada tahun 2045 dibandingkan tahun 2016. Proyeksi 2017-2045 menunjukkan bahwa komoditas padi dan jagung akan mengalami surplus, sedangkan kedelai, gula dan daging sapi akan defisit. Konsistensi surplus padi dimulai tahun 2020 sementara surplus jagung mulai tahun 2038. Keadaan surplus dan defisit ini diproyeksi dengan asumsi keadaan standar atau tanpa tindakan atau intervensi khusus (business as usual).

Target produksi komoditas padi pada tahun 2045 adalah sebesar 100,03 juta ton GKG atau setara 61,06 juta ton beras (Sulaiman et al, 2017). Target ini, berdasarkan prediksi dalam kajian ini, akan terlewat karena hasil proyeksi menunjukkan produksi GKG pada tahun 2045 sebesar 158,9 juta ton. Target produksi komoditas jagung, kedelai, gula, dan daging sapi pada tahun 2045 berturut - turut adalah 63,16 juta ton, 7,7 juta ton, 16,19 juta ton dan 1,1 juta ton (Sulaiman et al, 2017). Target-target tersebut dalam kondisi business as usual tidak akan tercapai pada tahun 2045. Bahkan target produksi kedelai dan gula, sangat jauh dari proyeksi produksi.

- Kajian Dampak dan Kebijakan Sektor Pertanian dalam Kerjasama MEA dan RCEP

Indonesia berpeluang meningkatkan partisipasinya dalam kerjasama ekonomi MEA maupun RCEP jika dilakukan pembenahan secara komprehensif dan bersifat integratif dengan

memangkas berbagai kepentingan sub-sektor menjadi kerjasama yang kuat dengan konektivitas kegiatan ekonomi yang transparan. Produk pertanian Indonesia diperkirakan mampu menguasai pasar dalam negeri yang menjadi sasaran pasar pengekspor negara sekawasan ASEAN dan mitra ASEAN. Namun, perlu kebijakan peningkatan efisiensi dalam proses produksi, pengolahan, dan pemasaran diperkirakan dapat membantu mempercepat penguasaan pasar di dalam negeri dan sekaligus mendorong upaya menembus pasar global karena produk bermutu yang dapat bersaing dan menguntungkan.

✓ Peringatan untuk membenahan dalam berbagai aspek, khususnya untuk komoditas pangan dan peternakan, diungkapkan dalam kajian ini. Negara lain diperkirakan akan merebut pasar di dalam negeri (Indonesia) dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi negara lain tersebut karena kelebihanannya dalam kemampuannya bersaing. Negara lain ini diduga melakukan berbagai perbaikan atas komoditas/produk andalan mereka secara terus-menerus, sehingga perdagangan melalui kerjasama MEA dan RCEP dapat dilakukan secara berkesinambungan. Dengan demikian peningkatan efisiensi, kualitas, dan upaya lainnya yang mampu meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk harus terus dilakukan agar produk pertanian Indonesia dapat bersaing baik di pasar domestik maupun pasar global.

➤ Kajian Potensi Dampak Perubahan Lingkungan Strategis Global terhadap Kinerja Perdagangan Komoditas Pertanian

Meningkatnya defisit neraca perdagangan produk tanaman pangan, hortikultura dan peternakan, serta menurunnya surplus neraca perdagangan produk perkebunan harus segera diantisipasi jika peningkatan devisa ekspor ingin dicapai sebagai sumber pertumbuhan. Diperlukan kebijakan, berikut instrument dan insentif, yang secara berkelanjutan dapat mendorong dan memfasilitasi petani produsen untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi produksi, menekan biaya produksi, serta meningkatkan kualitas dan tampilan produk.

Secara umum, kemampuan untuk memenuhi persyaratan standar dan kualitas ekspor (SPS, TBT, ketertelusuran) merupakan komponen penting dalam upaya meningkatkan daya saing dan memenangkan persaingan di pasar ekspor. Sampai saat ini yang menjadi titik lemah Indonesia dalam memacu ekspor. Jika sektor pertanian Indonesia memiliki keunggulan diatas, maka perubahan lingkungan strategis global, apapun arah dan intensitasnya, tidak akan secara negatif mempengaruhi kinerja ekspor pertanian Indonesia.

➤ Review Kinerja Program Pembangunan Pertanian 2015-2019

Beberapa butir kesimpulan dari kajian ini adalah: (1) isi Renstra Kementan belum semua tertuang dalam renstra eselon-1; (2) K/L lain berpotensi besar mendukung pembangunan pertanian dan potensi tersebut dapat dilihat pada dokumen kegiatan prioritas nasional pemerintah dan Renstra K/L terkait; (3) kinerja produksi bawang merah dan cabai berhasil sangat baik, padi, jagung dan daging sapi baik, sedangkan tebu kedepan semakin terancam dan kedelai tidak mencapai target; dan (4) dampak makro dan mikro pembangunan pertanian menunjukkan hasil yang bervariasi, sedangkan ditingkat petani sedikit membaik. Beberapa rekomendasi kebijakan, diantaranya: (1) penyusunan Renstra Kementan sebaiknya melibatkan berbagai pihak, memperhatikan lingkungan strategis lima tahun kedepan, dan terbagi habis dengan eselon di bawahnya; (2) Kementan menggali potensi kerjasama dengan K/L, dan perlu mengefektifkan penggunaan dana Dekon, TP, DAK dan APBD; (3) tanaman kedelai tidak dikembangkan di seluruh kawasan, tetapi pada daerah yang mendukung saja; tanaman tebu perlu perhatian khusus agar keberadaan tidak

terancam; untuk lima komoditas strategis lainnya bisa dikembangkan lebih lanjut; dan (4) Untuk meningkatkan indek kinerja pembangunan pertanian kebijakan mendorong dan mempermudah investasi baik PMDN maupun PMLN perlu mendapat perhatian. Pada tingkat rumah tangga petani, akses petani terhadap lahan sebaiknya dapat ditingkatkan dengan menerapkan Program LP2B dan pemanfaatan lahan BUMN Perhutani dan PTPN.

➤ Panel Petani Nasional (PATANAS): Dinamika Indikator Pembangunan Pertanian dan Perdesaan di Wilayah Agroekosistem Lahan Kering Berbasis komoditas Perkebunan

Penelitian Patanas 2018 merupakan resurvei ke-3 untuk di wilayah agroekosistem Lahan Kering Berbasis Komoditas Perkebunan, sebelumnya telah dilakukan survei pada agroekosistem yang sama tahun 2009 dan 2012. Secara umum tingkat kemiskinan menurun pada periode (2009-2012) dan meningkat pada periode (2012-2018).

Analisis Kebijakan pertanian berdasarkan isu-isu aktual yang terjadi selama tahun 2018, dan juga berdasarkan permintaan langsung dari pimpinan Kementan. Selama tahun 2018 ada sebanyak 13 penelitian Anjak yang dilakukan, yaitu:

- ✓ Rancang Bangun Program Bedah Kemiskinan Sejahtera Berbasis Pertanian
- ✓ Kajian Rendemen dan Rantai Pasok Komoditas Beras
- ✓ Penetapan Prioritas Substitusi Impor dan Sasaran Pengembangan Komoditas Pertanian 2019-2023
- ✓ Analisis Tingkat Tarif Beberapa Komoditas Pertanian Strategis
- ✓ Reviu Kebijakan Harga Pangan (Murah) dan Dampaknya terhadap Produksi dan Ketersediaan Pangan
- ✓ Kajian Kebijakan HPP dan Harga Eceran Tertinggi Gabah dan Beras
- ✓ Reviu Regulasi yang Menghambat Investasi dan Ekspor Pertanian
- ✓ Model Asuransi Usahatani Kedelai
- ✓ Evaluasi Kebijakan Wajib Tanam Lima Persen Bagi Impor Bawang Putih
- ✓ Optimalisasi Pemanfaatan Bantuan Alat Mesin Pertanian dan Dampaknya terhadap Peningkatan Produksi
- ✓ Reviu Fluktuasi Harga Telur dan Daging Ayam di Tengah Surplus Produksi
- ✓ Peluang-peluang Positif dalam Rangka Kerjasama RCEP
- ✓ Kajian Efektifitas Kelembagaan Fungsional Peneliti Penyuluh dalam Mendukung Program Akselerasi Inovasi Pertanian.

KERJA SAMA DAN PENDAYAGUNAAN HASIL PENELITIAN

Pada tahun 2018 PSEKP melakukan tiga kegiatan kerja sama penelitian dengan lembaga penelitian internasional, yaitu Food Agriculture Organization (FAO), dan the Australian Centre for International Agriculture Research (ACIAR).

- Analysis and Mapping of Impacts under Climate Change for Adaptation and Food Security through South-South Cooperation (AMICAF-SSC)-Component 2

Kegiatan penelitian ini merupakan kerja sama antara Badan Litbang Pertanian, Kementerian Pertanian, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), dan Food Agriculture Organization (FAO). Unit kerja Badan Litbang Kementerian Pertanian yang terlibat dalam kegiatan ini adalah PSEKP dan Balai Besar Sumber Daya Lahan Pertanian (BBSDLP). Kontrak kerja sama penelitian ini dilakukan mulai Juni 2016 berakhir pada tanggal 30 Juli 2018. Secara umum tujuan penelitian ini adalah memetakan dampak perubahan iklim dalam rangka ketahanan pangan di Indonesia.

- Improving Milk Supply Competitiveness a Livelihoods in Smallholder Dairy Chains in Indonesia (IndoDairy)

Kegiatan penelitian ini merupakan kerja sama antara Badan Litbang Pertanian, Kementerian Pertanian, Institut Pertanian Bogor (IPB), dan Australian Centre for International Agricultural Research (ACIAR). Periode pelaksanaan kegiatan mulai tahun 2016 hingga 2019. Tujuan umum penelitian ini adalah meningkatkan produktivitas dan kualitas susu sapi perah di Indonesia. Lokasi baseline survey mencakup Kabupaten Bandung Barat, Garut, Cianjur, dan Bogor. Jumlah responden seluruhnya sebanyak 600 rumah tangga. Data primer yang dikumpulkan pada tahun 2017, selanjutnya diolah dan dianalisis pada tahun 2018. Data hasil baseline survey lebih lanjut digunakan sebagai bahan untuk IndoDairy policy workshop yang dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober 2018 di Bogor.

- Agricultural policy research to support natural resource management in Indonesia's upland landscapes (IndoGreen)

Kegiatan penelitian ini merupakan kerjasama antara PSEKP, Puslitbang Sosial Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Internasional Center for Agro-Forestry (ICRAF), dan University of Adelaide dan University of New England, Australia. Kontrak kegiatan IndoGreen telah ditandatangani oleh Kepala Balitbang Pertanian pada tanggal 26 Maret 2018. Hingga bulan September 2018 telah dilakukan dua kali workshop, yaitu Planning Workshop pada tanggal 31 Januari 2018 di PSEKP, Bogor dan Workshop on Methodology pada tanggal 3-4 September 2018 di Hotel Santika, Bogor. Selain dihadiri Tim IndoGreen gabungan PSEKP (Kementan) dan P3SEKPI (KemenKLH), workshop tersebut juga dihadiri oleh peserta dari WWF, ICRAF, dan University of Adelaide, Australia.

- Development of area-wide management approaches for fruit flies in mango for Indonesia, Philippines, Australia and the Asia-Pacific region (IndoWAM)

Kegiatan penelitian ini merupakan kerja sama penelitian antara PSEKP, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura (Puslitbanghorti, Badan Litbang Pertanian, Kementerian Pertanian), Universitas Gajah Mada, dan ACIAR. Kontrak telah ditandatangani oleh PSEKP, Puslitbanghorti, UGM dan ACIAR pada Bulan November 2018. Dalam rangka persiapan pelaksanaan kegiatan, pihak donor melaksanakan inception meeting yang diselenggarakan di Cirebon pada tanggal 3-7 Desember 2018. Implementasi kegiatan penelitian efektif akan dilaksanakan mulai awal tahun 2019.

- Workshop internasional bertema "Agricultural risk and dryland development for poverty alleviation"

Workshop internasional dilaksanakan pada tanggal 8-9 Mei 2018 di Salak Tower Hotel, Bogor. Narasumber berasal dari beberapa negara, antara lain Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Srilanka. Peserta workshop terdiri dari beberapa lembaga internasional, peneliti, penyuluh dan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian di beberapa provinsi di

Indonesia. Pendayagunaan Hasil Penelitian PSEKP yang telah dilaksanakan selama tahun 2018, diantaranya Seminar Rutin di Kementan telah dilaksanakan 8 kali seminar rutin, sebagai berikut:

Tabel 7. Judul dan Pembicara Seminar Pembangunan Pertanian dan Perdesaan, 2018

No	Tanggal Pelaksanaan	Judul	Pembicara
1.	17 Jan 2018	Kajian Kinerja Investasi dan Dampak Pengetatan Investasi Asing di Sektor Pertanian	Dr. Erwidodo
2.	21 Feb 2018	Transformasi Perberasan di Asia dan Implikasi bagi Indonesia	Prof. Dr. Tahlim Sudaryanto
3.	28 Mar 2018	Subsidi Benih Padi: Sudah Tepat Sasaran	Dr. Bambang Sayaka
4.	2 Mei 2018	Dampak Perubahan Iklim terhadap Ketahanan Pangan Rumah Tangga Petani Padi Indonesia	Dr. Sumaryanto
5.	5 Juni 2018	Pengembangan Model dan Dukungan Kebijakan untuk Mobilisasi dan Optimalisasi Penyuluhan Pertanian Swadaya dan Swasta	Dr. Syahyuti
6.	25 Juli 2018	Kajian Kinerja Investasi dan Perdagangan Produk Pertanian: Meningkatkan Daya Saing dan Ekspor Produk Pertanian	Dr. Erwidodo
7.	28 Agust 2018	Asuransi Usata Tani Cabai dan Bawang Merah	Dr. Sahat Pasaribu
8.	14 Nov 2018	Dinamika Kemitraan Usaha Perunggasan dalam Rangka Stabilisasi Harga	Dr. Saptana

B. Pelaksanaan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian

Penguatan Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian

Inspektorat Jenderal selama tahun 2018 telah melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap 669 obyek pengawasan (satker) atau 99,85% dari total 670 satker lingkup Kementerian Pertanian. Kegiatan Audit Kinerja telah dilaksanakan terhadap 483 satker atau 72,08% dari total satker Kementerian Pertanian dengan anggaran yang diaudit sebesar Rp18.205.949.802.000 atau 76,43% dari anggaran Kementerian Pertanian tahun 2018 sebesar Rp23.820.762.303.000. Selain melaksanakan kegiatan Audit Kinerja, Inspektorat juga melaksanakan kegiatan pengawalan sebanyak 186 pengawalan yang terdiri dari pengawalan Bawang Merah dan Bawang Putih sebanyak 28 obyek pengawalan, pengawalan penerimaan CPNS sebanyak 31 obyek pengawalan, pengawalan terhadap program #BEKERJA sebanyak 34 obyek pengawalan, pengawalan SPIP terhadap 55 obyek pengawalan, pengawalan pelayanan karantina sebanyak 29 obyek pengawalan, pengawalan pengadaan barang/jasa sebanyak 9 obyek pengawalan.

Nilai temuan hasil Audit Kinerja tahun 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp84.228.476.216,98. Hal ini menunjukkan bahwa Inspektorat Jenderal mampu menekan terjadinya inefisiensi pelaksanaan program/kegiatan sebesar 0,46%. Terhadap temuan tersebut telah dilakukan tindak lanjut sebesar Rp66.610.381.515,17 atau 79,08%.

Dibandingkan dengan tahun 2017, jumlah nilai temuan sebesar Rp6.538.768.944,08 dari jumlah anggaran yang diaudit sebesar Rp18.958.983.055.238 sehingga dapat ditekan terjadinya inefisiensi sebesar 0,03%.

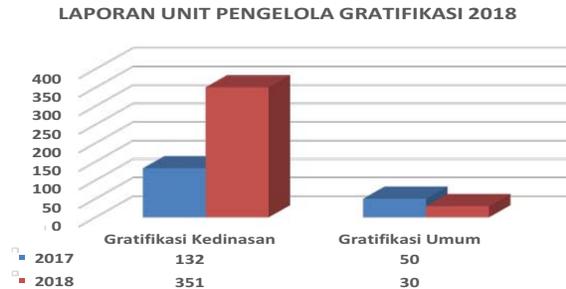
Inspektorat Jenderal juga melaksanakan Audit Investigasi dan Audit Tujuan Tertentu. Jenis materi pengaduan yang ditindaklanjuti melalui audit investigasi dan tujuan tertentu pada tahun 2018 yaitu kepemimpinan, Penyimpangan pelaksanaan kegiatan, penggunaan anggaran. Tahun 2018, Inspektorat Jenderal melaksanakan 139 Audit Tujuan Tertentu dan 8 Audit Investigasi dengan jumlah kerugian negara hasil audit investigatif dan tujuan tertentu senilai Rp9.768.591.763,3 dan telah ditindaklanjuti senilai Rp777.193.829,93 (7,96%).

Dalam rangka mendukung program pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui kegiatan pembudayaan dan pemasyarakatan kesadaran anti korupsi dan menekan tindakan KKN di lingkungan Kementerian Pertanian, telah diterbitkan Permentan No.97/OT.210/7/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Gratifikasi dan Unit Pengelola Gratifikasi (UPG) Kementerian Pertanian.

No	Jenis Laporan	2017		2018	
		Jumlah Kejadian	%	Jumlah Kejadian	%
1	Gratifikasi Kedinasan (honor narasumber, perjalanan dinas, honor kegiatan lainnya)	132	72,53	351	92,13
2	Gratifikasi Umum (uang, barang, makanan)	50	27,47	30	7,87
	Jumlah Gratifikasi	182		381	

Tabel 8. Laporan Unit Pengelola Gratifikasi Tahun 2017 dan 2019

Inspektorat Investigasi selaku Sekretariat UPG Kementerian Pertanian secara rutin telah melaporkan perkembangan penerimaan laporan gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setiap bulan dan triwulan. Laporan UPG Tahun 2018 sebanyak 381 laporan yang terdiri dari laporan Gratifikasi Kedinasan sebanyak 351 laporan (92,13%) dan Gratifikasi Umum sebanyak 30 laporan (7,87%).



Grafik 4. Tabel 8. Laporan Unit Pengelola Gratifikasi Tahun 2017 dan 2019

Prestasi yang diperoleh Ijen tahun 2018 adalah Kementerian Dengan Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik Tahun 2018 dengan diluncurkan secara online aplikasi pelayanan gratifikasi online di <http://sigap-upg.pertanian.go.id>, sebagai bentuk komitmen dalam menginisiasi seluruh pegawai lingkup Kementerian Pertanian dalam mewujudkan nilai-nilai KKPID (Komitmen, Keteladanan, Profesionalisme, Integritas, dan Disiplin) bagi ASN Kementerian Pertanian.

Inspektorat Jenderal selaku institusi yang memiliki wewenang dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian, tentunya senantiasa melakukan upaya-upaya strategis guna mendorong dan mengawal program dan kegiatan unit eselon I agar berada pada track (jalur) yang benar, demi terwujudnya Indonesia sebagai Lumbung Pangan Dunia.

Inspektorat Jenderal telah melakukan penilaian mandiri (self assessment) maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern (SPI) sejak tahun 2009 guna menumbuhkan kompetisi positif antar unit kerja di lingkungan Kementerian Pertanian dalam menerapkan SPI. Hasil penilaian digunakan sebagai dasar pemberian penghargaan (SPI Award) kepada unit kerja lingkup Kementerian Pertanian yang dinyatakan lulus passing grade yang ditetapkan. Sejalan dengan dikeluarkan Peraturan Kepala (Perka) BPKP Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Pengembangan Maturitas Penyelenggaraan SPI di instansi pemerintah, Inspektorat Jenderal dalam melakukan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPI lingkup Kementerian Pertanian mengadopsi kriteria yang telah ditetapkan dalam perka tersebut. Maturitas penyelenggaraan SPI merupakan ukuran kualitas bagi kementerian/lembaga dalam mengimplementasikan SPI dalam unit kerja/program/kegiatan. Semakin tinggi level maturitasnya, sebagai representasi bagi instansi dalam melakukan pengendalian risiko dan tatakelolanya serta menunjukkan tingkat kematangan penyelenggaraan SPI yang terstruktur dan berkelanjutan, sehingga hasil penilaian maturitas dapat digunakan bagi pimpinan untuk melakukan pengembangan strategi pengembangannya terhadap area of improvement (AOI) yang harus diperbaiki.

Penghargaan Maturitas SPIP Kementan Tahun 2018

Berdasarkan hasil penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2018 oleh BPKP dituangkan dalam Laporan Hasil Quality Assurance Atas Penilaian Mandiri Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP Pada Kementerian Pertanian Tahun 2018 Nomor LHV-331/D102/2/2018 Tanggal 27 Desember 2018, Kementerian Pertanian Tahun 2018 berada pada level 3 atau kategori "Terdefinisi" dengan nilai 3,037.

Dalam hal pembinaan unit kerja lingkup Kementerian Pertanian menuju Zona Integritas WBK/WBBM telah dilakukan penilaian unit kerja WBK tahun 2018 didasarkan atas Peraturan Menteri PAN dan RB No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Penilaian WBK-WBBM tahun 2018 dilaksanakan pada 61 unit kerja pusat dan daerah. Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan pada 11 unit Eselon I lingkup Kementerian Pertanian, seluruhnya atau 100% dinyatakan dengan predikat WBK sedangkan dari 53 Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Kementerian Pertanian yang dinilai, sebanyak 50 UPT atau 94,33% dinyatakan dengan predikat WBK.

Sebagai hasil atas Pembinaan Integritas Program dan Layanan lingkup Kementerian Pertanian terhadap seluruh Satuan Kerja/UPT lingkup Kementerian Pertanian, pada tahun 2018, Kementerian PAN dan RB telah menetapkan 1 unit pelaksana teknis (UPT) Kementerian Pertanian sebagai unit kerja berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), yaitu Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) Singosari dan menetapkan 3 unit pelaksana teknis (UPT) Kementerian Pertanian sebagai unit kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Nasional, yaitu Balai Besar Karantina Pertanian Makasar, Balai Besar Veteriner Denpasar dan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya.

Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dituntut mampu menjadi katalisator dalam mewujudkan good government dan clean governance serta mampu mendeteksi secara dini berbagai upaya praktik-praktik korupsi. Untuk mengukur kemampuan/ kapabilitas pengawasan di sektor publik dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut, Institute of Internal Auditor (IIA) Research Foundation mengembangkan model pengukuran kapabilitas pengawasan intern dengan IACM (Internal Audit Capability Model). Inspektorat Jenderal selaku APIP di Kementerian Pertanian telah melakukan penilaian Mandiri (Self Assesment) untuk menilai infrastruktur yang telah dibangun atas tata kelola pengawasan dalam melaksanakan peran dan layanan, pengelolaan SDM, praktik profesional, Akuntabilitas dan manajemen kinerja, Budaya dan Hubungan Organisasi serta struktur tata kelola.

Berdasarkan hasil penilaian Kapabilitas Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2018 dengan pendekatan Internal Audit Capability Model (IACM) oleh BPKP dituangkan dalam Laporan Hasil Penilaian Kapabilitas Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2018 Nomor: LAP-296/D102/2/2018 tanggal 20 Desember 2018 Inspektorat Jenderal berada pada level 3 (integrated).

C. Pelaksanaan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan

Produksi padi tahun 2018 berdasarkan Angka Ramalan 2018 mencapai 83,037 juta ton gabah kering giling (GKG), luas panen 15,994 juta ha, dan produktivitas 51,92 ku/ha. Bila dibandingkan dengan capaian produksi tahun 2017, mengalami kenaikan 1,889 juta ton (2,33%). Peningkatan produksi padi tahun 2018 terjadi di 25 provinsi, sedangkan 9 provinsi lainnya mengalami penurunan. Provinsi yang mengalami peningkatan produksi padi diatas 150 ribu ton antara lain Provinsi Sumatera Utara, Lampung, Jawa Barat, dan Kalimantan Barat. Bila dibandingkan terhadap target tahun 2018 sebesar 82,500 juta ton, capaian produksi padi pada tahun 2018 telah melampaui target (100,65%). Luas panen juga mengalami peningkatan 2,20% dibanding tahun 2017.

Tabel 9. Capaian Produksi, Luas Panen, dan Produktivitas Padi Tahun 2018

No.	Uraian	ATAP 2017	Sasaran 2018	ARAM I 2018 *)	Perbandingan ARAM I 2018 Thd			
					ATAP 2017		Sasaran 2018	
					(%)	Selisih	(%)	Selisih
1.	Produksi (000 Ton)	81.149	82.500	83.037	102,33	1.889	100,65	537
2.	Luas Panen (000 Ha)	15.712	15.650	15.995	101,80	282	102,20	345
3.	Produktivitas (Ku/Ha)	51,65	52,72	51,92	100,52	0,27	98,48	(0,80)

*) Produksi tahun 2018 = Angka ARAM I Tahun 2018

Jika diperhatikan perkembangan selama periode tahun 2014-2018 menunjukkan trend pertumbuhan yang positif. Produksi padi tahun 2014 sebesar 70,846 juta ton meningkat menjadi 83,037 juta ton GKG tahun 2018 atau rata-rata tumbuh 4,07% per tahun. Pertumbuhan tersebut disebabkan oleh peningkatan luas panen dari 13,797 juta ha tahun 2014 menjadi 15,995 juta ha tahun 2018, dan pertumbuhan peningkatan produktivitas sebesar 0,30% per tahun sejak tahun 2014 sampai tahun 2018.

Tabel 10. Perkembangan Produksi, Luas Panen, dan Produktivitas Padi Tahun 2014-2018

No.	Uraian	Tahun					Rerata 2014-2018	Pertumbuhan (%)
		2014	2015	2016	2017	2018*)		
1.	Produksi (000 Ton)	70.846	75.398	79.355	81.149	83.037	77.957	4,07
2.	Luas Panen (000 Ha)	13.797	14.117	15.156	15.712	15.995	14.955	3,79
3.	Produktivitas (Ku/Ha)	51,35	53,41	52,36	51,55	51,92	52,12	0,30

*) Produksi tahun 2018 = Angka ARAM I Tahun 2018

Bila dibandingkan terhadap kebutuhan beras, produksi tahun ini surplus 18,722 juta ton beras. Produksi padi tahun 2018 sebesar 83,037 juta ton GKG tersebut setara dengan 48,294 juta ton beras tersedia. Berdasarkan perhitungan dengan konsumsi beras perkapita/tahun 111,58 kg, dan proyeksi jumlah penduduk 265,015 juta jiwa, maka kebutuhan beras mencapai 29,572 juta ton untuk konsumsi langsung tingkat rumah tangga. Produksi padi yang terus meningkat sejak tahun 2015 sampai dengan 2017 menjadikan pasokan beras untuk kebutuhan dalam negeri bisa terpenuhi dan bisa swasembada beras.

Tabel 11. Produksi dan Kebutuhan Beras Tahun 2018

No	Uraian	Neraca Tahun 2018*)
1	Produksi Padi (000 Ton GKG)*	83.037
2	Beras Tersedia (000 Ton)	48.294
3	Konsumsi Beras (000 Ton)**	29.572
4	Surplus/Defisit (000 Ton)	18.722

*) Produksi tahun 2018 = Angka ARAM I Tahun 2018

**) Angka Konsumsi Beras dari Badan Pusat Statistik (BPS)

Produksi jagung berdasarkan Angka Ramalan I tahun 2018 mencapai 30,056 juta ton pipilan kering (PK), luas panen 5,734 juta ha, dan produktivitas 52,41 ku/ha. Bila dibandingkan dengan capaian produksi tahun 2017, mengalami peningkatan 1,132 juta ton (3,91%). Kenaikan tersebut karena peningkatan luas panen seluas 201,289 ribu ha (3,64%). Sebanyak 27 provinsi mengalami kenaikan produksi dan hanya 7 provinsi yang produksinya turun dibanding tahun 2017, provinsi yang mengalami kenaikan signifikan diatas 100 ribu ton adalah Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Kalimantan Tengah dan Maluku Utara.

Tabel 12. Capaian Produksi, Luas Panen, dan Produktivitas Jagung Tahun 2018

No.	Uraian	ATAP 2017	Sasaran 2018	Angka ARAM I 2018*)	Capaian Angka ARAM I 2018 Thd			
					ATAP 2017		Sasaran 2018	
					(%)	Selisih	(%)	Selisih
1.	Produksi (000 Ton)	28.924	30.000	30.056	103,91	1.132	100,19	56
2.	Luas Panen (000 Ha)	5.533	5.780	5.734	103,64	201	99,21	(46)
3.	Produktivitas (Ku/Ha)	52,27	51,90	52,41	100,27	0,14	100,98	0,51

*) Produksi tahun 2018 = Angka ARAM I Tahun 2018

Perkembangan produksi jagung periode 2014-2018 menunjukkan pertumbuhan yang positif dengan rata-rata pertumbuhan produksi 12,36%, dari 19,127 juta ton pada tahun 2014 menjadi 30,056 juta ton tahun 2018. Pertumbuhan positif tersebut karena peningkatan luas panen sebesar 10,80% selama periode tersebut, dari 3,880 juta ha tahun 2014 menjadi 5,734 juta ha tahun 2018. Disamping itu, peningkatan produksi juga didukung oleh pertumbuhan positif rata-rata produktivitas dari 49,29 ku/ha tahun 2014 menjadi 52,41 ku/ha tahun 2018 dengan rata-rata pertumbuhan produktivitas 1,57% per tahun selama periode 2014-2018.

Tabel 13. Perkembangan Produksi, Luas Panen, dan Produktivitas Jagung Tahun 2014-2018

No.	Uraian	Tahun					Rerata 2014-2018	Pertumbuhan (%)
		2014	2015	2016	2017	2018*)		
1.	Produksi (000 Ton)	19.127	19.612	23.165	28.924	30.056	24.177	12,36
2.	Luas Panen (000 Ha)	3.880	3.787	4.385	5.533	5.734	4.664	10,80
3.	Produktivitas (Ku/Ha)	49,29	51,78	52,83	52,28	52,41	51,72	1,57

*) Produksi tahun 2018 = Angka ARAM I Tahun 2018

Bila dibandingkan dengan total kebutuhan jagung nasional tahun 2018 sebesar 17,060 juta ton PK (termasuk untuk benih, pakan, industri dan tercecer), produksi jagung masih surplus 12,995 juta ton PK. Dengan peningkatan produksi jagung yang cukup signifikan tersebut, sejak tahun 2017 tidak ada lagi impor jagung dan sejak tahun 2018 produksi jagung terus meningkat.

Tabel 14. Produksi dan Kebutuhan Jagung Tahun 2018

No	Uraian	Neraca Tahun 2018*)
1	Produksi (000 Ton PK)	30.056
2	Kebutuhan (000 Ton) **)	17.060
3	Surplus/Defisit (000 Ton)	12.995

*) Produksi tahun 2018 = Angka ARAM I Tahun 2018

**) Angka Kebutuhan dari Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementan

Produksi kedelai tahun 2018 berdasarkan ARAM I 2018 mencapai 983 ribu ton biji kering (BK), luas panen 680 ribu ha, dan produktivitas 14,44 ku/ha. Bila dibandingkan dengan produksi tahun 2017 sebesar 539 ribu ton, terjadi kenaikan 443,87 ribu ton (82,39%). Peningkatan produksi kedelai dibanding tahun 2017, disebabkan karena bertambahnya luas panen 324,57 ribu ha (91,22%). Peningkatan produksi kedelai terjadi di 25 provinsi, propinsi dengan peningkatan produksi signifikan diatas 20 ribu ton antara lain Provinsi Sumatera Utara, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah.

Tabel 15. Capaian Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Kedelai Tahun 2018

No.	Uraian	ATAP 2017	Sasaran 2018	Angka ARAM I 2018*)	Capaian ARAM I 2018 Thd			
					ATAP 2017		Sasaran 2018	
					(%)	Selisih	(%)	Selisih
1.	Produksi (000 Ton)	539	2.200	983	182,39	443,87	44,66	(1.217)
2.	Luas Panen (000 Ha)	356	1.000	680	191,22	324,57	68,04	(320)
3.	Produktivitas (Ku/Ha)	15,14	15,41	14,44	95,38	(0,70)	93,72	(0,97)

*) Produksi tahun 2018 = Angka ARAM I Tahun 2018

Bila dibandingkan terhadap target tahun 2018 sebesar 2,2 juta ton BK, capaian produksi kedelai pada tahun 2018 hanya mencapai 44,66%. Belum tercapainya target produksi kedelai tahun 2018, disebabkan luas panen yang masih kurang 320 ribu ha dari target 1 juta ha. Kondisi capaian kedelai yang kurang memuaskan disebabkan harga yang kurang memberi keuntungan bagi petani, sehingga menyebabkan petani lebih memilih menanam padi atau jagung, dan komoditas lain yang lebih menguntungkan dibanding menanam kedelai.

Tabel 16. Perkembangan Produksi, Luas Panen, dan Produktivitas Kedelai Tahun 2014-2018

No.	Uraian	Tahun				Rerata 2014-2018	Pertumbuhan (%)	
		2014	2015	2016	2017			
1.	Produksi (000 Ton)	921	963	886	539	983	858	9,95
2.	Luas Panen (000 Ha)	612	614	588	356	680	570	11,94
3.	Produktivitas (Ku/Ha)	15,06	15,68	15,06	15,15	14,46	15,08	(0,95)

*) Produksi tahun 2018 = Angka ARAM I Tahun 2018

Produksi kedelai selama periode tahun 2014-2018 cenderung fluktuatif, tetapi bila dirata-ratakan pertumbuhannya positif sampai dengan tahun 2018. Tahun 2018 merupakan capaian produksi tertinggi pada periode ini setelah tahun 2016 dan 2017 produksi kedelai mengalami penurunan produksi dibanding tahun 2015. Demikian juga dengan luas panen, tahun 2018 merupakan capaian luas panen tertinggi pada periode ini yaitu 680 ha. Sedangkan produktivitas terus berfluktuasi dari tahun ke tahun selama periode 2014-2018.

Bila dibandingkan dengan kebutuhan, produksi kedelai tahun 2018 belum bisa memenuhi kebutuhan kedelai nasional sebesar 2,924 juta ton BK (termasuk untuk benih, industri dan tercecer), sehingga masih defisit 1,941 juta ton BK.

Tabel 17. Perkembangan Produksi dan Kebutuhan Kedelai Tahun 2018

No	Uraian	Neraca Tahun 2018*)
1	Produksi (000 Ton BK)*	983
2	Kebutuhan (000 Ton)**	2.924
3	Surplus/Defisit (000 Ton)	(1.941)

*) Produksi tahun 2018 = Angka ARAM I Tahun 2018

**) Angka Kebutuhan dari Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementan

Kinerja produksi tanaman pangan tahun 2018 masih diukur berdasarkan sampling ubinan yang dilaporkan petugas statistik kecamatan. Tahun 2018 BPS mengeluarkan data luas baku lahan sawah dengan menggunakan metode pengukuran berdasarkan Kerangka Sampel Area (KSA), KSA dilakukan dengan memanfaatkan teknologi citra satelit untuk mendata sebaran sawah dan menentukan titik koordinat sebagai sampel sawah. Adanya perbedaan luas baku lahan sawah antara SP BPS 2016 dan KSA, saat ini daerah masih melakukan klarifikasi luas baku lahan sawah agar sesuai dengan kondisi lapangan.

➤ Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi

Fasilitas Penerapan Budidaya Kedelai

Tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan Fasilitas Penerapan Budidaya Kedelai adalah tercapainya peningkatan produktivitas, penambahan luas areal tanam kedelai dan peningkatan produksi.

Alokasi kegiatan fasilitas penerapan budidaya kedelai tahun 2019 seluas 546.586 ha. Realisasi kegiatan sampai dengan bulan Desember 2018 mencapai 543.473 ha (99,43%).

➤ Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia

✓ Fasilitas Penerapan Budidaya Padi

Tujuan kegiatan adalah meningkatkan produktivitas dan produksi baik padi sawah maupun padi lahan kering disamping mendorong dan mempercepat penerapan berbagai teknologi budidaya padi. Kegiatan fasilitas penerapan budidaya padi difokuskan pada pengembangan budidaya padi di lahan kering, padi inbrida sawah dan padi sub optimal spesifik lokasi, disamping itu terdapat kegiatan pendukung berupa bantuan fasilitas Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO) yang bertujuan untuk menyediakan fasilitas yang menjadi pendukung sub sektor tanaman pangan. Realisasi kegiatan penerapan budidaya padi sampai Desember 2018, Padi Lahan Kering seluas 833.058 ha atau 83,31% dari target 1.000.000 ha, Padi Inbrida Sawah 164.800 ha atau 97,23 ha dari

taget 169.500 ha realisasi bantuan fasilitas UPPO 940 unit atau 94,01% dari target 1.000 unit.

✓ Fasilitas Penerapan Budidaya Jagung

Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan produksi jagung melalui Penambahan Luas Tanam Baru Jagung (PATB) dan Penambahan Luas Tanam Jagung (PLTJ). Realisasi kegiatan sampai akhir Desember 2018 mencapai 2.479.690 ha (88,38%) dari sasaran seluas 2.805.800 ha. Beberapa faktor yang menjadi kendala dalam melaksanakan kegiatan fasilitas penerapan budidaya jagung antara lain: 1) Adanya perubahan struktur organisasi di daerah yang berakibat pada keterlambatan pelaksanaan kegiatan utama yang mendukung peningkatan produksi jagung 2) Kekeringan yang hampir merata di seluruh provinsi, 3) Revisi DIPA ke-VI dan perubahan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Utama, 4) Benih tidak berkualitas dan keterlambatan distribusi.

Menyikapi kondisi permasalahan tersebut, upaya tindak lanjut yang dilakukan antara lain: 1) Koordinasi dengan Dinas terkait untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan utama yang mendukung peningkatan produksi padi, 2) Koordinasi dengan Dinas terkait untuk melakukan identifikasi dan penanganan masalah kekeringan, 3) Mereview kembali desain perencanaan dan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Utama agar lebih operasional dilaksanakan di lapangan, 4) Meningkatkan pengawalan dan pengawasan penangkar benih dan meningkatkan kemandirian penyedia benih lokal.

Tabel 18. Rekapitulasi Realisasi Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia Tahun 2018

No.	Uraian	Rencana (Ha)	Realisasi	
			(Ha)	(%)
1	Budidaya Padi Lahan Kering	1.000.000	833.058	83,31
2	Budidaya Padi Inbrida Sawah	169.500	164.800	97,23
3	Penerapan Budidaya Jagung	2.805.800	2.479.690	88,38
4	UPPO	1.000	940	94,00

Ket : Posisi laporan: s.d Desember 2018

Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih

✓ Perbanyak Benih Sumber

Kegiatan bertujuan menjamin ketersediaan benih sumber bermutu dan bersertifikat padi, jagung dan kedelai. Kegiatan perbanyak benih sumber tahun 2018 berfokus pada penyediaan benih padi, jagung dan kedelai. Sampai dengan akhir Desember 2018 perkembangan realisasi kegiatan perbanyak benih sumber sebesar 329 ha (55,57%)

Tabel 19. Realisasi Perbanyak Benih Sumber Tahun 2018

No.	Komoditas	Target (Ha)	Realisasi (Ha)	%
1	Padi	294	294	100,00
2	Jagung	93	88	94,62
3	Kedelai	205	156	76,10
Jumlah		592	538	90,88

Ket : Posisi laporan: s.d Desember 2018

✓ Bantuan Benih Pusat

Dalam rangka meningkatkan penggunaan benih unggul bersertifikat khusus untuk komoditas padi inbrida, tahun 2018 Kementerian Pertanian memberikan bantuan benih padi inbrida melalui DIPA Satker Pusat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, penyaluran dilakukan melalui mekanisme transfer uang dan transfer barang, dengan target seluas 1.149.340 ha. Sampai dengan 31 Desember 2018 terealisasi 1.101.472 (95,84%).

➤ Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI)

✓ Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PPHT)

Tujuan PPHT adalah menumbuhkan prakarsa, motivasi dan kemampuan petani/kelompok tani dalam mengelola agroekosistem dan melaksanakan gerakan pengendalian OPT sesuai prinsip PHT secara bersama-sama antar petani/kelompok tani satu hamparan, mengimplementasikan prinsip PHT skala luas (hamparan) dalam upaya pengamanan pertanaman dari serangan OPT untuk mendukung peningkatan produksi tanaman pangan. Realisasi kegiatan Tahun 2018 untuk PPHT Padi 8.500 ha atau 99,71% dari target 8.525 ha, PPHT Jagung 1.530 ha atau 98,08% dari target 1.560 ha, PPHT Kedelai 760 ha atau 100%. Hasil dari kegiatan PPHT tahun 2018 adalah (a) menurunnya penggunaan pestisida kimia sintetis, meningkatnya perkembangan musuh alami dan meningkatnya penggunaan pengendali ramah lingkungan (b) tersosialisasinya PPHT kepada masyarakat di sekitar hamparan dan (c) ditetapkannya Rencana Tindak Lanjut (RTL) untuk Musim Tanam (MT) berikutnya.

✓ Penguatan Agroekosistem Padi, Jagung dan Kedelai

Kegiatan ini bertujuan untuk mengelola populasi OPT dalam rangka mengoptimalkan peran Agens Pengendali Hayati (APH) dapat berperan optimal membantu mengamankan produksi tanaman pangan dari gangguan OPT. Sasaran utama kegiatan penguatan agroekosistem adalah penerapan strategi preemtif dan responsif untuk mengoptimalkan peran/jasa/layanan fisiologis komponen-komponen biotik (keanekaragaman hayati, ketahanan genetik, populasi OPT, musuh alami dan agens pengendali hama lainnya, serta mikroorganisme tanah dan air yang berguna di dalam agroekosistem.

Realisasi kegiatan untuk penguatan agroekosistem padi adalah 2.075 ha (95,40%) dari target 2.175 ha, jagung 330 ha (91,67%) dari target 360 ha, kedelai 140 ha (87,50%) dari target 160 ha.

Beberapa daerah tidak dapat mencapai target pelaksanaan kegiatan agroekosistem padi dan jagung karena kendala teknis dan non teknis, sedangkan pada penguatan agroekosistem kedelai karena lahan yang sesuai kriteria terbatas.

✓ Gerakan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Padi, Jagung dan Kedelai

Tujuan gerakan ini adalah: 1) memberikan informasi tentang tahapan gerakan pengendalian OPT tanaman pangan, 2) memberikan pemahaman kepada petugas agar pelaksanaan gerakan pengendalian OPT Tanaman Pangan terarah dan sesuai dengan anggaran yang tersedia, 3) memudahkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan gerakan

pengendalian OPT Tanaman, sehingga kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik, efektif, efisien dan akuntabel.

Realisasi kegiatan Gerakan Pengendalian OPT Padi telah 628 kali (91,55%) dari target 686 kali, Jagung 104 kali (92,86%) dari target 112 kali, kedelai 62 kali (95,38%) dari target 65 kali. Secara garis besar tidak ada permasalahan pada kegiatan ini, hanya masih perlu peningkatan teknik (cara) pengendalian secara enam tepat.

✓ Dem Area Budidaya Tanaman Sehat

Kegiatan Dem area ini dilaksanakan dengan mengadopsi teknologi praktek budidaya tanaman sehat, melalui penggunaan input produksi pupuk organik dan kapur pertanian/dolomit yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan tanah lahan pertanaman dan teknologi pengendalian OPT dengan teknik pengelolaan agroekosistem yang memberdayakan peran musuh alami OPT. Realisasi kegiatan seluas 34.000 ha (100%). Berdasarkan evaluasi, terjadi kenaikan produktivitas di lokasi dem area dibanding musim sebelumnya.

➤ Dukungan Manajemen Teknis Lainnya

✓ Gaji dan Tunjangan Pegawai

Realisasi gaji dan tunjangan yang diberikan kepada 636 pegawai, sampai dengan Desember 2018 mencapai 88,27% atau Rp.38.072.991.166,- dari pagu Rp.43.551.876.000,-

✓ Insentif Mantri Tani

Pemberian insentif kepada Mantri Tani dimaksudkan untuk biaya operasional Mantri Tani/Kepala Cabang Dinas (KCD) yang melaksanakan pengumpulan data statistik pertanian kecamatan di wilayah kerjanya, yang harus didata dan dilaporkan setiap bulan. Data yang harus dikumpulkan yaitu data luas tanam, luas panen, dan produktivitas (ubinan bersama Koordinator Statistik Kecamatan/KSK). Tahun 2018 Ditjen Tanaman Pangan mengalokasikan pemberian insentif bagi 5.207 Mantri Tani di 509 kabupaten/kota seluruh Indonesia. Realisasi sampai dengan Desember 2018 mencapai 100%.

✓ Administrasi Pelaksanaan Kegiatan Manajemen Tanaman Pangan

Administrasi pelaksanaan kegiatan manajemen tanaman pangan dilaksanakan di 70 Satker yang terdiri dari 3 satker pusat, 66 satker dekonsentrasi dan tugas pembantuan provinsi, dan 1 satker kabupaten, kegiatan meliputi penyusunan rencana anggaran/kegiatan, pelaporan kegiatan dan penyediaan fasilitas/alat perkantoran.

➤ Pengembangan Metode/Validasi/Verifikasi Metode

Kegiatan pengembangan metode/validasi/verifikasi yang dilaksanakan oleh Balai Besar PPMB-TPH merupakan visualisasi dari salah satu fungsi Balai Besar PPMB-TPH dan mendukung program Direktorat Jenderal Tanaman Pangan yakni Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Hasil Tanaman Pangan.

Pada TA. 2018 Balai Besar melaksanakan kegiatan pengembangan/validasi/ verifikasi dalam rangka memecahkan permasalahan, kendala maupun harmonisasi perkembangan teknologi di bidang mutu benih. Kegiatan ini terdiri dari 10 judul pengembangan/validasi/validasi metode, yaitu: 1) Verifikasi Pengujian Nematoda *Aphelenchoides besseyi* Terbawa Benih Padi, 2) Validasi Metode Identifikasi Cendawan *Pyricularia oryzae* Penyebab Penyakit Blast pada Benih Padi, 3) Validasi Metode Identifikasi

Bakteri *Xanthomonas oryzae* pv. *oryzae* Penyebab Penyakit Hawar Daun Bakteri Pada Benih Padi 4) Verifikasi Uji Penetapan Kadar Air Menggunakan Moisture Meter di Beberapa Laboratorium Penguji Benih Daerah, 5) Verifikasi Uji Tetrazolium Dalam Rangka Percepatan Pengujian Mutu Benih Padi, 6) Verifikasi Penggunaan Metode Pematangan Dormansi Pada Benih Padi (*Oryza sativa*), 7) Korelasi Metode Pengujian Radicle Emergence (RE) terhadap Mutu Benih Jagung (*Zea mays*), 8) Korelasi Metode Pengujian Radicle Emergence (RE) Terhadap Mutu Benih Padi (*Oryza sativa*), 9) Korelasi Metode Pengujian Radicle Emergence (RE) Terhadap Mutu Benih Kedelai (*Glycine Max L.*), 10) Pengujian Kemurnian Genetik Benih Jagung Hibrida Secar molekuler Menggunakan Penanda Simple Sequence Repeats (SSR).

Realisasi kegiatan pada tahun 2018 telah 100% dari target 10 judul pengembangan/validasi/validasi metode. Hasil yang diperoleh yaitu metode yang aplikatif dalam pengujian mutu benih dan telah dimanfaatkan oleh laboratorium daerah/BPSBTPH sebanyak 13 laboratorium yaitu BPSBTPH 1) Lampung, 2) Sumatera Selatan, 3) Yogyakarta, 4) Jawa Tengah, 5) Jawa Timur, 6) Nusa Tenggara Barat, 7) Kalimantan Barat, 8) Kalimantan Tengah, 9) Jambi, 10) Sulawesi Selatan, 11) Sulawesi Tengah, 12) Sulawesi Tenggara, dan 13) Jawa Barat. Pengembangan metode dan validasi tahun 2018 sebanyak 10 judul pengembangan metode sudah dilaksanakan sesuai dengan target.

➤ Pengembangan Peramalan Serangan OPT

Sasaran kegiatan adalah tersedianya informasi dan model peramalan OPT dengan target kegiatan terlaksananya teknologi pengamatan, peramalan dan pengendalian OPT (P3OPT). Output Model Peramalan OPT adalah jumlah model peramalan OPT dengan realisasi 100% dari target 15 model teknologi pengamatan, peramalan dan pengendalian OPT yang terdiri dari 9 model pada tanaman padi, 3 model pada jagung dan 3 model pada kedelai.

➤ Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan

Tujuan dari kegiatan ini adalah menurunkan tingkat susut hasil produksi tanaman pangan, dengan penerima manfaat kelompok tani atau gabungan kelompok tani.

Alokasi bantuan sarana pascapanen dan pengolahan hasil tahun 2018 sebanyak 12.968 unit. Sampai dengan Desember 2018 realisasi bantuan sarana pascapanen dan pengolahan hasil tanaman pangan mencapai 12.364 unit (95,34%).

Tabel 20. Realisasi Bantuan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Tahun 2018

No.	Alsin Pascapanen dan Pengolahan Hasil	Satuan	Target	Realisasi	%
I.	Padi	Unit	7.612	7.013	92,13
1	Combine Harvester	Unit	1.421	1.405	98,87
2	Power Thresher	Unit	3.525	3.525	100,00
3	RMU	Unit	361	246	68,14
4	Dryer/Vertical Dryer	Unit	945	794	84,02
5	Bangunan dan Instalasi Listrik	Unit	364	355	97,53
6	Sarana Lainnya	Unit	996	688	69,08
II.	Jagung	Unit	2.961	2.957	99,86
1	Corn Combine Harvester	Unit	585	585	100,00
2	Corn Sheller	Unit	2.275	2.275	100,00
3	Dryer/Vertical Dryer Jagung	Unit	66	65	98,48
4	UPH Jagung	Unit	35	32	91,43
III.	Kedelai	Unit	2.395	2.391	99,83
1	Power Thresher Multiguna	Unit	2.284	2.284	100,00
2	UPH Kedelai	Unit	51	47	92,16
3	Sarana Lainnya	Unit	60	60	100,00
	Total	Unit	12.968	12.364	95,34

Ket : Posisi laporan: s.d Desember 2018

➤ Pengarusutamaan Gender (PUG)

Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengurangi dan menghilangkan kesenjangan gender antara laki-laki dan perempuan, sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional. Untuk menindaklanjuti Inpres tersebut Ditjen Tanaman membentuk Tim Pokja PUG sesuai dengan SK Dirjen Tanaman Pangan Nomor 20/HK.310/C/2/2015 tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.

Kegiatan tanaman pangan yang responsif gender adalah adanya kesamaan peran antara laki-laki dan perempuan. Kegiatan PUG tanaman pangan yang telah dilaksanakan adalah Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PPHT), kegiatan PPHT yang ada di beberapa daerah, kegiatan pembuatan agens pengendali hayati, pembuatan kompos jerami, tanam jajar legowo dan pengamatan agro ekosistem yang melibatkan peran perempuan.

Disamping kegiatan tersebut Ditjen Tanaman Pangan turut serta aktif mengikuti kegiatan yang diadakan Tim Pokja PUG Kementerian Pertanian maupun instansi lainnya seperti Forum Pokja Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender K/L yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). Kegiatan-kegiatan tersebut bertujuan untuk: a) Meningkatkan kualitas pemahaman Tim Gender lingkup Kementan, b) Mempertahankan penghargaan yang telah didapat (Anugerah Parahita Ekapraya/APE) oleh Kementerian Pertanian. Program tahun 2019 direncanakan setiap Eselon I menyusun alokasi kegiatan dan anggaran yang khusus mendukung Pengarusutamaan Gender (PUG).

➤ Kegiatan di Wilayah Perbatasan

Salah satu latar belakang kegiatan di wilayah perbatasan adalah lambannya pertumbuhan ekonomi dan minimnya pelayanan sosial dasar di wilayah tersebut, sedangkan potensi sektor pertanian, perkebunan dan perikanan yang cukup menjanjikan dimiliki daerah-daerah di wilayah perbatasan.

Pada tahun 2018 kegiatan tanaman pangan di wilayah perbatasan dilaksanakan di 40 Kabupaten yang berbatasan langsung baik daratan dan lautan dengan negara tetangga di 13 Provinsi yaitu Aceh (pulau terluar berbatasan laut dengan Thailand dan Malaysia), Riau (berbatasan dengan Singapura, Malaysia dan Vietnam), Sumatera Utara (berbatasan laut dengan Thailand, India dan Malaysia), Kepulauan Riau (berbatasan dengan Singapura, Malaysia) Kalimantan Barat (berbatasan dengan Malaysia), Kalimantan Timur (berbatasan dengan Malaysia dan Filipina), Kalimantan Utara, Sulawesi Utara (berbatasan dengan Filipina), Nusa Tenggara Timur (berbatasan dengan Timor Leste, Australia), Maluku (Berbatasan dengan Australia dan Timor Leste), Maluku Utara (Pulau terluar berbatasan dengan negara Palau), Papua (berbatasan darat dengan Papua New Guinea) dan Papua Barat (pulau terluar berbatasan dengan negara Palau). Kegiatan yang dialokasikan di wilayah perbatasan tahun 2018 diantaranya: kegiatan fasilitas budidaya padi 150.414 ha, fasilitas budidaya jagung 129.417 ha, fasilitas budidaya kedelai 8.136 ha, bantuan sarana alat mesin pascapanen 116 unit. Sampai dengan akhir tahun 2018 realisasi kegiatan di wilayah perbatasan disampaikan sebagai berikut:

Tabel 21. Realisasi Kegiatan Wilayah Perbatasan Tahun 2018

No.	Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	
				Fisik	%
1.	Fasilitas Budidaya Padi	ha	150.414	124.632	82,86
2.	Fasilitas Budidaya Jagung	ha	129.417	113.887	88,00
3.	Fasilitas Budidaya Kedelai	ha	8.136	7.827	96,20
4.	Bantuan Sarana Pascapanen	unit	116	106	91,38

Ket : Posisi laporan: s.d 31 Desember 2018

➤ Kegiatan Nawacita

✓ Desa Mandiri Benih (DMB)

Kegiatan DMB dirancang sebagai salah satu kegiatan berbasis padat karya dengan memberdayakan petani melalui kelompok tani atau kelompok penangkar atau gabungan kelompok tani dengan penangkar, sehingga akan diperoleh nilai manfaat dan dampak berganda dari kegiatan DMB yang mampu meningkatkan sektor ekonomi tingkat desa. Kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkembangkan produsen benih yang mampu menyediakan benih jagung hibrida dan kedelai untuk memenuhi kebutuhan benih di wilayahnya. Disamping itu juga, kegiatan DMB diarahkan untuk mendukung peningkatan produksi komoditas Jagung dan Kedelai. Realisasi kegiatan DMB sampai dengan Desember 2018 untuk DMB Jagung sejumlah 8 unit atau 100%, sedangkan DMB Kedelai 193 unit atau 96,50% dari target 200 Unit. Realisasi kegiatan tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 22. Realisasi Kegiatan Desa Mandiri Benih

No.	Kegiatan	Rencana		Realisasi		
		Unit	Luas Tanam (Ha)	Unit	Luas Tanam (Ha)	(%)
1	DMB Jagung	8	80	8	80	100
2	DMB Kedelai	200	2.000	193	1.930	96,50
	Jumlah	208	2.080	201	2.010	96,63

Ket : Posisi laporan: s.d Desember 2018

✓ Pengembangan Desa Pertanian Organik Padi

Tujuan kegiatan pengembangan desa pertanian organik adalah untuk menciptakan dan mengembangkan desa yang mampu menyediakan produk-produk pertanian yang aman bagi kesehatan pelaku usahatani dan konsumen, serta ramah bagi lingkungan hidup dan bisa memenuhi kebutuhan di desa itu sendiri maupun daerah lain di sekitarnya. Manfaat pertanian organik, yaitu : 1) produk yang dihasilkan bebas dari residu atau sisa-sisa pestisida dan bahan kimia lainnya, 2) tanaman yang dihasilkan lebih sehat, 3) tanaman yang dibudidayakan mampu menjaga kelestarian dan keseimbangan alam.

Ditjen Tanaman Pangan mengalokasikan kegiatan pengembangan desa pertanian organik padi tahun 2018 seluas 10.000 ha di 13 provinsi. Sampai dengan akhir Desember 2018 realisasi kegiatan telah mencapai 7.073 ha (70,73%). Kegiatan tidak

bisa terealisasi seluruhnya karena adanya ketidaksiapan atau ketidakmampuan calon petani pelaksana maupun daerah pelaksana, seperti di Kalimantan Barat tidak bisa dilaksanakan karena mereka memerlukan pendampingan dan pelatihan khusus untuk petani mengenai budidaya padi organik. Untuk mengatasi masalah ketidaksiapan calon petani pelaksana pada kegiatan yang akan datang, maka perlu dilakukan sosialisasi dan konfirmasi ulang CPCL antara Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten dan petani calon pelaksana kegiatan sebelum CPCL disahkan dan menyediakan alokasi anggaran untuk pelatihan khusus budidaya padi organik.

✓ Penerapan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI)

Tujuan kegiatan ini adalah: 1) memberdayakan petani untuk menerapkan upaya antisipasi kerusakan tanaman akibat dampak perubahan iklim (banjir dan kekeringan) di lahan usaha taninya sesuai dengan iklim setempat terutama pada daerah rawan terkena banjir dan kekeringan, 2) memberdayakan petani untuk melakukan mitigasi sederhana akibat DPI pada lahan usaha taninya, 3) mengurangi risiko kehilangan hasil akibat dampak perubahan iklim (banjir dan kekeringan), 4) meningkatkan pengamanan produksi tanaman padi dari dampak perubahan iklim (banjir dan kekeringan).

Realisasi kegiatan Penerapan Penanganan DPI tahun 2018 seluas 400 ha atau 100%. Faktor yang mendukung keberhasilan kegiatan PPDPI adalah: 1) pelaksanaan kegiatan di daerah sesuai dengan Petunjuk Teknis, 2) adanya kerjasama yang baik antara kelompok tani dengan petugas pendamping kegiatan serta antar petugas (POPT-PHP dengan PPL), 3) adanya dukungan, pengawalan dan pendampingan yang dilakukan oleh instansi terkait (pusat dan daerah). Hasil (outcome) dari kegiatan PPDPI tahun 2018 yaitu 1) terwujudnya penerapan upaya antisipasi dan adaptasi DPI sesuai dengan spesifik lokasi, 2) terwujudnya penurunan kerusakan tanaman akibat dampak perubahan iklim, 3) diterapkannya budidaya tanaman sehat sesuai iklim setempat pada 36 unit/kelompok tani dan 4) mampu mengamankan 75% produksi tanaman padi.

✓ Kegiatan Prioritas Pantauan Kantor Staf Presiden (KSP)

Sesuai amanat Perpres 26 Tahun 2015, KSP memantau kegiatan prioritas yang menjadi janji Presiden dalam periode pemerintahan 2015-2019. Kegiatan Prioritas yang menjadi Pantauan KSP di Ditjen Tanaman Pangan diantaranya Bantuan Vertical Dryer dan Rice Milling Unit (RMU). Tujuan pemberian bantuan adalah untuk meningkatkan kualitas hasil pascapanen tanaman pangan khususnya padi dan jagung, dengan penanganan pascapanen yang baik dapat meningkatkan pendapatan petani serta efektivitas dan efisiensi usaha tani.

Tabel 23. Realisasi Perkembangan Kegiatan Pantauan KSP 2018

No.	Jenis Alsin	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Revitalisasi RMU	Unit	211	137	64,93
2	Bantuan Sarana RMU	Unit	146	105	71,92
3	Fasilitas Dryer Kapasitas 6 Ton	Unit	242	236	97,52
4	Fasilitas Dryer Kapasitas 10 Ton	Unit	491	470	95,72
5	Fasilitas Dryer Kapasitas 30 Ton	Unit	3	3	100,00

D. Pelaksanaan Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura

➤ Produksi

Produksi komoditas hortikultura tahun 2018 didasarkan pada angka sangat sementara yang bersumber dari Direktorat Jenderal Hortikultura dan Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (BPS RI) sedangkan target berdasarkan Renstra Kementerian Pertanian Revisi II (lampiran 1). Untuk lebih jelasnya, rincian komoditas untuk peningkatan produksi, komoditas ekspor dan substitusi impor disajikan pada tabel 1 berikut.

Tabel 24. Target dan Realisasi Komoditas Untuk Peningkatan Produksi, Komoditas Ekspor, dan Substitusi Impor Tahun 2018

No.	Sasaran program	Target	Realisasi*	%
1.	Terpenuhinya kebutuhan pangan strategis			
	a. Produksi cabai	2.245.440	2.136.288	95,14
	b. Produksi bawang merah	1.608.766	1.421.787	88,38
2.	Tanaman buah dan florikultura untuk ekspor dan substitusi impor (ton)			
	a. Mangga (ton)	1.991.004	1.799.824	90,40
	b. Nenas (ton)	1.481.131	1.150.291	77,66
	c. Manggis (ton)	175.136	131.965	75,35
	d. Salak (ton)	778.779	503.802	64,69
	e. Pisang (ton)	7.105.914	4.510.642	63,48
	f. Jeruk (substitusi impor/ton)	2.301.651	1.718.512	74,66
	g. Krisan (tangkai)	441.367.161	408.854.189	92,63
	h. Bunga tabur (ton)	41.516	21.850	5,26
3	Tanaman sayuran dan tanaman obat untuk ekspor dan substitusi impor			
	a. Kentang (ton)	1.471.828	1.067.205	72,51
	b. Jamur (ton)	40.176	29.108	72,45
	c. Jahe (ton)	343.753	24.389	7,09
	d. Bawang putih (substitusi impor/ton)	109.494	38.444	35,11

Sumber : Ditjen Hortikultura dan BPS RI, 2019

Keterangan : *) Angka Sangat Sementara

➤ Luas Panen

Kegiatan ekstensifikasi melalui pengembangan kawasan dilakukan di daerah sentra produksi dan daerah potensi. Hal ini untuk menjaga stabilitas produksi dan harga di seluruh daerah di Indonesia. Berdasarkan angka sangat sementara, luas panen komoditas untuk peningkatan produksi, komoditas ekspor dan substitusi impor disajikan pada Tabel 2 berikut.

Tabel 25. Perbandingan Luas Panen Komoditas Untuk Peningkatan Produksi, Komoditas Ekspor, dan Substitusi Impor Tahun 2018 dan 2017.

No.	Komoditas	Luas Panen (Ha)		Pertumbuhan (%)
		2018 *	2017	
1.	Peningkatan produksi			
	a. Cabai	257.346	310.147	-17,02
	b. Bawang merah	147.269	158.172	-6,89
2.	Tanaman buah dan florikultura untuk ekspor dan substitusi impor			
	a. Mangga	138.505	201.080	63,05
	b. Nenas	7.675	21.274	-2,64
	c. Manggis	19.346	18.058	66,95
	d. Salak	18.265	23.887	89,23
	e. Pisang	76.217	89.615	132,64
	f. Jeruk (substitusi impor)	43.608	56.758	123,52
	g. Krisan	708	1.164	-39,17
3	Tanaman sayuran dan tanaman obat untuk ekspor dan substitusi impor			
	a. Kentang	55.713	75.611	-26,32
	b. Jamur	368	475	-22,53
	c. Jahe	28.022	10.556	65,46
	d. Bawang putih (substitusi impor)	4.883	2.146	127,54

Sumber : Ditjen Hortikultura dan BPS RI, 2019

Keterangan: *) Angka Sangat Sementara

Berdasarkan tabel di atas untuk peningkatan produksi yang menurun luas panennya adalah cabai sebesar 17,02 % dan bawang merah sebesar 6,89%, Komoditas promosi ekspor yang mengalami penurunan luas panen adalah nenas sebesar 2,64%, krisan sebesar 39,17%, kentang sebesar 26,32% dan jamur sebesar 22,53%, sedangkan komoditas substitusi impor pertumbuhan luas panennya meningkat sebesar 123,52% untuk jeruk dan 127,54% untuk bawang putih.

➤ Produk Domestik Bruto (PDB)

Produk Domestik Bruto yang digunakan disini adalah Produk Domestik Bruto Subsektor Hortikultura. Produk Domestik Bruto dibagi dua yaitu Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Data Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) berdasarkan angka sangat sangat sementara. Untuk melihat kontribusi subsektor hortikultura dibanding subsektor lain terhadap sektor pertanian Tahun 2018 dapat dilihat pada table di bawah ini..

Tabel 26. Kontribusi Subsektor Hortikultura dibanding Subsektor Lain Terhadap Sektor Pertanian Tahun 2018

No.	Subsektor	Miliar (Rp)*	Kontribusi (%)
1	Tanaman Pangan	377.625	25,79
2	Tanaman Hortikultura	169.009	11,54
3	Tanaman Perkebunan	384.224	26,24
4	Peternakan	175.472	11,98
5	Kehutanan	72.289	4,94
6	Perikanan	285.813	19,52
Sektor Pertanian		1.464.432	100,00

Sumber : BPS RI, 2019

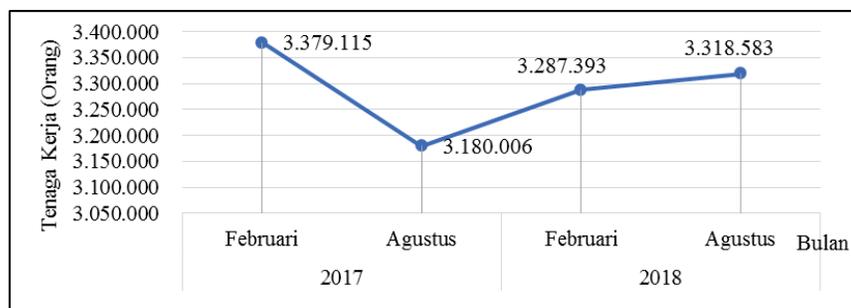
Keterangan: *) Angka Sangat Sangat Sementara

Masih rendahnya kontribusi subsektor tanaman hortikultura disebabkan oleh masih kurangnya promosi untuk komoditas ekspor sehingga berdampak pada rendahnya pendapatan di subsektor hortikultura. Selain itu, yang tak kalah pentingnya untuk meningkatkan PDB subsektor hortikultura adalah dengan mengurangi impor.

➤ Tenaga Kerja

Untuk data tenaga kerja, BPS RI setiap tahun melakukan dua kali pencatatan yaitu bulan Februari dan Agustus. Khusus tahun 2018, penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja di sektor pertanian (sub sektor hortikultura) pada bulan Agustus 2018 sebesar 3.318.583 orang dibanding bulan Februari 2018 sebesar 3.287.393 orang atau mengalami pertumbuhan sebesar 0,95%. Apabila dibandingkan secara *year to year* bulan Februari 2018 terhadap bulan Februari 2017 mengalami pertumbuhan sebesar -2,71%. Tetapi, bulan Agustus 2018 terhadap bulan Agustus 2017 mengalami kenaikan pertumbuhan sebesar 4,36%. Rincian lengkapnya bisa dilihat pada gambar berikut.

Gambar 6. Tenaga Hortikultura 2017 dan 2018



Sumber: BPS RI, 2019

➤ Ekspor dan Impor Komoditas Pertanian

Ekspor dan impor komoditas subsektor hortikultura mencakup produk segar dan olahan. Data ekspor dan impor menggunakan kode *Harmonized System* (HS) sampai dengan bulan Desember 2018 dengan komoditas ekspor utama yaitu mangga, manggis, nenas, pisang,

salak, kentang, jamur, jahe dan krisan. Untuk melihat volume dan nilai ekspor dan impor komoditas sub sektor hortikultura tahun 2017 dan 2018 dapat dilihat pada table di bawah ini.

Tabel 27. Ekspor dan Impor Komoditas Hortikultura Tahun 2017 dan 2018

No.	Komoditas	2017		2018*		Pertumbuhan (%)	
		Volume (Ton)	Nilai (US\$)	Volume (Ton)	Nilai (US\$)	Volume (Ton)	Nilai
Ekspor							
1	Krisan	61	866.553	57	780.716	-6,65	-9,91
2	Kentang	5.210	4.342.693	4.746	4.278.523	-8,91	-1,48
3	Jamur dan Cendawan	3.029	6.181.318	3.872	6.722.803	27,84	8,76
4	Pisang	18.193	8.878.504	26.935	13.228.502	48,05	48,99
5	Nenas	210.026	241.988.457	211.316	178.362.986	0,61	-26,29
6	Mangga	2.655	2.045.833	2.518	2.511.095	-5,16	22,74
7	Manggis	9.190	4.035.901	32.170	27.953.516	250,07	592,62
8	Salak	966	1.546.533	1.148	1.306.071	18,83	-15,55
9	Jahe	24.359	13.954.416	3.071	3.361.783	-87,39	-75,91
Impor							
1	Jeruk	120.355	175.358.956	95.967	153.310.740	-20,26	-12,57
2	Bawang Putih	559.728	596.005.423	587.942	507.701.456	5,04	-14,82

Sumber : BPS RI, 2019 Keterangan: *) Angka Sementara

Dari Tabel di atas menunjukkan bahwa komoditas yang mengalami penurunan pertumbuhan volume ekspor adalah krisan (6,65%), kentang (1,48%), nenas (26,29%), salak (15,55%) dan jahe (75,91%). Sementara komoditas substitusi impor yang menurun pertumbuhan volume impornya adalah jeruk (20,26%). Menurunnya volume dan nilai ekspor komoditas hortikultura antara lain dipengaruhi oleh nilai tukar, pertumbuhan ekonomi dunia, harga komoditas dunia dan kebijakan perdagangan suatu negara. Namun, menurunnya nilai tukar tidak langsung dapat meningkatkan nilai ekspor jika kualitas produk tidak dapat ditingkatkan sesuai dengan permintaan pasar ekspor.

➤ Nilai Tukar Petani

Gambar 7. Nilai Tukar Petani Hortikultura Tahun 2018



Sumber : BPS RI 2019, diolah

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator untuk dapat mengukur tingkat kesejahteraan petani. NTP adalah rasio antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan indeks yang dibayarkan petani (Ib) dalam persentase. Secara konseptual, NTP adalah pengukur kemampuan tukar barang-barang (produk) pertanian yang dihasilkan

petani dengan barang/jasa yang diperlukan untuk konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam memproduksi produk pertanian. Nilai tukar petani dari bulan Januari sampai Desember 2018 cenderung meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan petani meningkat seiring dengan meningkatnya nilai tukar petani hortikultura.

➤ Konsumsi

Konsumsi komoditas hortikultura yang dimaksud adalah konsumsi per kapita buah dan sayur dalam rumah tangga setahun. Data konsumsi diperoleh dari BPS melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS). Berhubung data tahun 2018 belum tersedia, maka ditampilkan data tahun 2017 (Lampiran).

➤ Rumah Tangga Hortikultura

Rumah Tangga Hortikultura adalah rumah tangga petani yang membudidayakan tanaman hortikultura dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya dijual/tukar atau memperoleh pendapatan/keuntungan atas resiko usaha. Petani yang membudidayakan tanaman hortikultura dimaksud adalah pada periode sampai dengan setahun yang lalu. Tanaman hortikultura meliputi buah, sayur, tanaman obat dan tanaman hias. Berhubung data rumah tangga hortikultura belum tersedia, sehingga tidak dapat disajikan dalam laporan ini.

Capaian Pelaksanaan Kegiatan Ditjen Hortikultura Tahun 2018

➤ Capaian Kegiatan Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat

Pengukuran realisasi indikator kinerja Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 28. Hasil Pencapaian Kinerja Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat Tahun 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (Ha)	Realisasi (Ha)	Perse-ntase (%)
1. Terpenuhinya kebutuhan konsumsi aneka cabai, bawang merah, sayuran lainnya	1. Kawasan Aneka Cabai (Cabai Besar 6.125 Ha, Cabai Rawit Merah 7.375 Ha)	13.055	13.005	99,62
	2. Kawasan Bawang Merah (Benih Umbi 5.800 Ha, Benih Biji 200 Ha)	5.493	4.530	82,47
2.	3. Kawasan Sayuran Lainnya			
	a. Bawang Putih	5.949	3.036	51,03
	b. #Bekerja	4.120	3.370	81,79
	Kawasan Sayuran dan Tanaman Obat di Wilayah Perbatasan	25	25	100

Sumber : Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat Tahun 2018

✓ Pengembangan Kawasan Aneka Cabai

Pengembangan kawasan aneka cabai tahun 2018 terdapat pada 33 (tiga puluh tiga) Satker Provinsi dan 34 (tiga puluh empat) Satker Kabupaten (lampiran 2). Target pengembangan kawasan aneka cabai pada tahun 2018 adalah 13.055 Ha dan realisasinya mencapai 13.005 Ha. Beberapa kegiatan yang mendukung pengembangan kawasan aneka cabai yang dilaksanakan oleh Pusat adalah :

- a) Koordinasi Peningkatan Produksi Kawasan Aneka Cabai, dilaksanakan pada tanggal 6-9 Februari 2018 di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat.
- b) Koordinasi Ketersediaan Cabai Menjelang Hari Besar Keagamaan, dilaksanakan pada tanggal 1-2 November 2018 di Kota Yogyakarta, DI.Yogyakarta
- ✓ Pengembangan Kawasan Bawang Merah

Target pengembangan kawasan bawang merah pada tahun 2018 sebanyak 5.493 ha, sedangkan realisasinya mencapai 82,47%. Persentase output capaian kinerja pada tahun ini lebih rendah daripada tahun lalu yang mencapai 97%.

Pengembangan bawang merah biji melalui program kawasan bawang merah biji (TSS) telah dilaksanakan di 22 provinsi, 63 kabupaten dengan total luasan sebanyak 199 ha (lampiran 3). Lokasi terbesar adalah di Kabupaten Belu dan Grobogan dengan total luasan 70 Ha.
- ✓ Pengembangan Kawasan Sayuran Lainnya

Berdasarkan Tabel Hasil Pencapaian Kinerja diketahui bahwa target pengembangan kawasan sayuran lainnya sebesar 7.713 Ha. Program pengembangan kawasan sayuran lainnya terdiri dari program pengembangan kawasan bawang putih dan program #Bekerja. Realisasi kawasan bawang putih mencapai 3.036 Ha atau 51,03%.
- ✓ Bawang Putih

Pelaksanaan kegiatan pengembangan kawasan bawang putih terkendala ketersediaan benih dan tingginya harga benih. Sehingga di beberapa satker dilakukan lelang ulang. Adanya benih oplosan yang terjadi di Cilacap, Donggala, dan Bener Meriah membuat tingkat kehati-hatian Dinas Pertanian menjadi lebih tinggi. Selain itu, lewatnya musim tanam menyebabkan beberapa daerah mengembalikan anggarannya.
- ✓ Program #Bekerja (Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera)

Dalam rangka pengentasan kemiskinan nasional, dilakukan upaya peningkatan pendapatan masyarakat di bidang pertanian, termasuk komoditas hortikultura. Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pengembangan kawasan yang bertujuan untuk peningkatan produksi tanaman hortikultura. Sasaran yang ingin dicapai adalah terlaksananya pengembangan buah-buahan berupa mangga, manggis, pisang, duku, dan pepaya, serta sayuran berupa kangkung, bayam, sawi hijau, mentimun, gambas, paria, kacang panjang, buncis, dan/atau jagung manis melalui pemberian bantuan kepada RTM-P. Target pengembangannya seluas 4.120 Ha untuk komoditas sayuran dan buah (190.000 RTM) di 10 Provinsi (22 Kabupaten) seperti terlampir. Khusus untuk komoditas sayuran target pengembangannya adalah seluas 1.764 Ha
- ✓ Kawasan Sayuran dan Tanaman Obat di Wilayah Perbatasan

Kegiatan sayuran dan tanaman obat di Wilayah Perbatasan bertujuan untuk pengembangan komoditas sayuran baik sayuran daun, buah maupun sayuran dataran rendah untuk mendukung daerah perbatasan dan dilaksanakan di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Upaya untuk pengembangan pertanian di daerah perbatasan merupakan bagian dari fokus kegiatan utama Kementerian Pertanian Tahun 2018. Target pengembangan kawasan sayuran dan tanaman obat di wilayah perbatasan semula adalah seluas 500 Ha di 6 Provinsi. Namun pada bulan Juli dilakukan *refocusing* anggaran dimana anggaran untuk Kawasan Sayuran dan Tanaman Obat di Wilayah

Perbatasan diubah menjadi Program #Bekerja sehingga target yang semula 500 Ha turun menjadi 25 Ha di 1 Provinsi.

✓ Fasilitas Teknis Dukungan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat

Kegiatan fasilitasi teknis dukungan produksi sayuran dan tanaman obat antara lain bertujuan: 1) Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan peningkatan produksi dan produktivitas sayuran dan tanaman obat dalam berbagai aspek kepada para pelaku usaha sayuran dan tanaman obat, 2) Meningkatkan kapabilitas petugas yang menangani pengembangan sayuran dan tanaman obat melalui TOT serta Apresiasi Petugas, 3) Menyiapkan petugas yang mampu mendampingi petani dalam menerapkan GAP/SOP sayuran dan tanaman obat, 4) Memberdayakan kelembagaan petani sayuran dan tanaman obat di kawasan pengembangan sayuran dan tanaman obat, agar mampu membangun kemandirian secara ekonomi. Target kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan pembinaan, pendampingan, monitoring dan evaluasi teknologi produksi sayuran dan tanaman obat serta kegiatan pemberdayaan petugas dan petani di 33 Propinsi.

✓ Capaian Kegiatan Direktorat Buah dan Florikultura

a) Pengembangan Kawasan Jeruk

Tujuan kegiatan adalah meningkatkan ketersediaan benih bermutu jeruk dari varietas unggul untuk meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu produk tanaman jeruk. Target output jumlah benih jeruk yang tersedia yang ditetapkan dalam PK revisi tahun 2018 adalah sebesar 640.300 batang yang meliputi pengadaan di satker pusat dan 18 satker provinsi. Realisasi pengadaan di satker pusat adalah 15.000 batang (100%) dan di daerah sebanyak 635.300 batang (101,56%). Kabupaten penerima bantuan yakni Kabupaten Bone. Varietas jeruk yang diperbantukan untuk Kabupaten Bone yakni Jeruk varietas Pamele Nambangan, adapun kelompok penerima lainnya tersebar di Provinsi Aceh; Sumatera Utara; Sumatera Barat; Lampung; Bengkulu; Kepulauan Bangka; Belitung; Jawa Barat; Jawa Tengah; Jawa Timur; Kalimantan Barat; Bali; Nusa Tenggara Barat; Sulawesi Utara; Sulawesi Tenggara; Maluku Utara; Gorontalo serta Papua dengan kategori berhasil.

b) Mangga

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, pencapaian kinerja Direktorat Buah dan Florikultura untuk pengembangan kawasan mangga dapat dikatakan cukup berhasil. Hanya di Kabupaten Cirebon dan Indramayu tidak dapat dilaksanakan 100%, dimana kedua kegiatan tersebut merupakan program Bekerja akibat adanya keterbatasan lahan dan keterbatasan warga rumah tangga miskin (RTM).

Mangga juga merupakan salah satu komoditas yang berpotensi untuk diekspor. Dengan adanya pengembangan kawasan mangga tahun 2018, diharapkan pengembangan kawasan mangga dapat terbentuk dan semakin berkembang luas. Dengan terbentuknya kawasan mangga, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan lokal dan meningkatkan ekspor. Kawasan tersebut tersebar di Provinsi Jawa Barat; Jawa Tengah; Jawa Timur; DIY; Bali; NTT; Sulawesi Tengah; Sulawesi Selatan; Kalimantan Selatan; Papua; Papua Barat.

c) Manggis

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, pencapaian kinerja Direktorat Buah dan Florikultura khususnya dalam pengembangan kawasan manggis dapat dikatakan berhasil. Salah satu Kabupaten yang tidak dapat merealisasikan seluruh luas area kawasan adalah Kabupaten Garut, dimana hanya terealisasi sebanyak 340 ha dari target 497 ha (68,41%) karena ketinggian wilayah lebih dari 1.000 meter dpl sehingga hanya terdapat 340 ha yang sesuai untuk pengembangan manggis.

Salah satu negara yang menjadi peluang tujuan ekspor manggis terbesar adalah Tiongkok (Cina) dengan mempersyaratkan manggis yang diekspor berasal dari kebun yang telah teregistrasi GAP. Hasil dari penandatanganan protokol impor tahun 2017 adalah diekspornya manggis Indonesia ke Cina/Tiongkok pada awal tahun 2018 dimana peresmian launching ekspornya dilaksanakan di bandara Soekarno Hatta. Diawali dengan manggis Purwakarta dan Subang kemudian disusul oleh manggis dari Tabanan (Bali) dan Lima Puluh Kota (Sumatera Barat), diharapkan manggis-manggis dari daerah lain dapat mengikuti manggis unggulan tersebut untuk diekspor. Dalam rangka mendukung dan mempersiapkan ekspor manggis ke Tiongkok, dimulai dari tahun 2016 sampai dengan sekarang Direktorat Buah dan Florikultura bersama Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten sentra manggis melakukan registrasi kebun manggis dan surveillance kebun-kebun manggis yang telah habis masa berlakunya. Kawasan manggis tersebar di Provinsi Jawa Barat; Jawa Timur; Sumatera Barat; Lampung; Bali dan Banten.

d) Pisang

Pengembangan kawasan pisang Tahun 2018 terdiri dari pengembangan kawasan regular seluas 140 Ha dan Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (#BEKERJA) Berbasis Hortikultura seluas 276 Ha. Bantuan bantuan Program #Bekerja dialokasikan kepada rumah tangga miskin-petani (RTMP). Pengembangan kawasan pisang regular seluas 20 Ha di Provinsi Lampung merupakan lanjutan pemeliharaan kebun komersial yang diinisiasi mulai tahun 2016 dan dibiayai hingga tahun 2019. Pengembangan kawasan pisang yang tidak terealisasi adalah pengembangan kawasan pisang program #Bekerja di Kabupaten Bone, Brebes dan Banyumas. Hal tersebut disebabkan oleh gagalnya pengadaan kegiatan #Bekerja khususnya untuk pengadaan benih pisang bersertifikat. Beberapa kondisi seperti waktu pengadaan untuk benih pisang bersertifikat yang terlalu singkat serta tidak adanya pihak ketiga yang mengikuti lelang menyebabkan terjadinya gagal lelang.

Perluasan kawasan guna menyediakan suplai buah sepanjang tahun; peningkatan mutu dan produktivitas melalui upaya intensifikasi dan penerapan budidaya yang benar (GAP); serta upaya mendorong pelaksanaan registrasi kebun oleh dinas pertanian provinsi dilakukan oleh pemerintah pusat. Pada tahun 2018, jumlah kebun pisang teregistrasi sebanyak 128 kebun. Dengan mendukung peningkatan produksi, mutu serta produktivitas pisang diharapkan Indonesia dapat membuka akses pasarnya ke pasar internasional.

Kawasan pisang tersebar di Provinsi Jawa Barat; Sulawesi Selatan; Sulawesi Utara; Jawa Tengah; Sulawesi Tengah; Sumatera Utara dan Lampung.

e) Pengembangan Kawasan Buah Lainnya

Pengembangan kawasan buah lainnya meliputi durian, salak, duku, lengkung, srikaya, sukun, nenas, dan pepaya. Berikut rincian per komoditas untuk pengembangan kawasan buah lainnya.

Durian dianggap sebagai *king of tropical fruit* dan merupakan salah satu kekayaan alam tropis Indonesia dengan beragam varietas lokal yang tersebar di seluruh Indonesia, seperti Bawor, Petruk, Bokor, Tembaga, dsb. Tahun 2018, alokasi pengembangan durian hanya untuk 2 kabupaten, yaitu Kebumen dan Trenggalek dengan total luas kawasan 20 ha.

Salak, merupakan salah satu komoditas ekspor unggulan Indonesia dimana negara tujuan ekspor salak Indonesia terbesar adalah Tiongkok, Singapura, Hong Kong, Timur Tengah (Uni Emirat Arab) dan Kamboja. Permintaan yang besar terutama adalah salak pondoh yang sentranya ada di Kabupaten Magelang dan Sleman. Tahun 2018 alokasi pengembangan salak untuk Kabupaten Magelang seluas 25 ha. Pencapaian kinerja dalam pengembangan kawasan salak mencapai 0% dan dapat dikatakan **kurang berhasil**. Permasalahan yang menyebabkan target output dalam kegiatan pengembangan kawasan salak di Kabupaten Magelang tidak dapat terealisasi karena tidak tersedianya benih salak bersertifikat. Pengadaan benih tidak dapat dilakukan karena penangkar yang ada belum terdaftar di BPSB.

Duku, merupakan tanaman tropis Indonesia, dan hanya tumbuh di beberapa daerah. Sentra duku terutama di Sumatera Selatan yaitu di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Pengembangan komoditas ini kurang berhasil karena tidak tersedianya benih bersertifikat. Kasusnya sama dengan komoditas salak.

Lengkeng, Dalam rangka mengurangi lengkung impor, pada tahun 2018 Ditjen Hortikultura telah mengeluarkan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) dengan mengatur jadwal masuknya lengkung yaitu selain bulan Juli dan Agustus, hal ini berdasarkan hasil identifikasi di lapangan bahwa musim panen lengkung di sentra-sentra produksi terjadi pada bulan Juli-Agustus. Lengkeng akan menjadi salah satu prioritas dalam pengembangan buah masa depan, dengan mengurangi komoditas-komoditas yang sudah mulai surplus neraca perdagangannya seperti mangga dan manggis. Pengembangan kawasan lengkung dari dana APBN tahun 2011 hingga 2018 baru mencapai 313 Ha, namun demikian berdasarkan hasil identifikasi di lapangan, pengembangan lengkung secara swadaya telah mencapai 300.000 pohon atau setara dengan 1.500 Ha. Kawasan pengembangan lengkung berada di Kabupaten Jepara; Wonogiri; Blora; dan Tuban dengan total luas 50 ha.

Srikaya, merupakan buah tropis yang sudah mulai langka, namun adanya pengembangan teknologi, terutama dalam aspek pemuliaan, saat ini sudah mulai dikembangkan srikaya tanpa biji. Oleh karena itu buah srikaya sangat berpotensi untuk dikembangkan. Pada tahun 2018 kegiatan pengembangan srikaya berhasil di Kabupaten Gresik seluas 10 ha.

Sukun, banyak dikembangkan di daerah Papua dan Papua Barat, sebagai sumber pangan masyarakat. Pada Tahun 2018, alokasi anggaran untuk pengembangan sukun di Kota Sorong dialihkan ke Kabupaten Sorong dengan total luas 20 ha.

Nenas, merupakan buah tropik dan Indonesia merupakan produsen terbesar di Asia, tentunya memiliki peluang besar untuk memenuhi permintaan pasar ekspor nenas. Beberapa negara seperti Amerika juga sudah mulai melirik akan mengimpor nenas dari Indonesia. Pada Tahun 2018, pengembangan kawasan nenas fokus dialokasikan untuk kabupaten Prabumulih seluas 25 ha.

Pepaya, Pengembangan kawasan pepaya TA. 2018 dilaksanakan di 4 (empat) provinsi yaitu Provinsi Lampung Selatan, Banten, Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat di 5 (lima) kabupaten yaitu Lampung Selatan, Pandeglang, Cirebon, Tasikmalaya dan Lombok Tengah, dengan target luasan seluruhnya 100 ha.

f) Kawasan Florikultura

Pada Tahun 2018, pengembangan kawasan florikultura dialokasikan untuk 10 kabupaten di 6 Provinsi, dengan komoditas yang memiliki potensi ekspor seperti krisan, anggrek, dracaena, melati serta tanaman pot dan lanskap untuk memenuhi kebutuhan di pasar domestik. Target dan realisasi pengembangan kawasan florikultura pada tahun 2018 dikemukakan pada tabel berikut :

Krisan, Pengembangan kawasan krisan terdapat di Kabupaten Cianjur; Bandung Barat; Batu; Gowa; Bantaeng dan Kota Tomohon dengan total pengembangan 7.600 m².

Florikultura Lainnya, terdiri dari Kabupaten Sukabumi pengembangan Dracaena; Kabupaten Batang komoditas Melati; Kabupaten Tangerang Selatan dengan Anggrek; dan Kota Makassar dengan pengembangan Tanaman Pot dan Lanskap. Total pengembangan 1,45 ha.

✓ Capaian Kegiatan Direktorat Perbenihan Hortikultura

a) Capaian Output Benih Jeruk

Tujuan kegiatan adalah meningkatkan ketersediaan benih bermutu jeruk dari varietas unggul untuk meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu produk tanaman jeruk. Sasaran kegiatan adalah meningkatnya ketersediaan benih bermutu jeruk untuk mendukung peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk tanaman jeruk.

Target output produksi benih jeruk yang ditetapkan dalam PK revisi tahun 2018 adalah sebesar 640.300 batang yang meliputi pengadaan di satker di pusat dan 18 satker provinsi. Realisasi sebesar 644.300 batang atau mencapai 100,62 % dari target benih jeruk. Namun demikian, apabila dibanding dengan volume pada target dalam DIPA/POK revisi sebesar 657.300 batang, maka realisasi capaian dari output benih jeruk hanya sebesar 98.02%.

Kegiatan fasilitasi bantuan benih Jeruk yang dilaksanakan di pusat sebesar 15.000 batang sebagai pelaksana kegiatan Direktorat Perbenihan Hortikultura dapat terealisasi 100%. Kabupaten penerima bantuan yakni Kabupaten Bone. Varietas jeruk yang diperbantukan untuk Kabupaten Bone yakni Jeruk varietas Pamele Nambangan, yaitu KT Padaelo, Ds Maddanreng Pulu, Kec. Patimpeng, KT Campalagia Ds Massila, Kec. Patimpeng; KT Samarennu, Ds. Madanreng Pulu, Kec. Patimpeng; KT Bulie II, Ds. Bulie, Kec. Sibulue; KT Batu Jongae 2, Ds. Gattareng, Kec. Salomekko; KT Beringin, Ds. Gatarreng, Kec. Salomekko; KT Atakkae Ds Gattareng Kec. Salomekko; dan KT Lempongeng, Ds Bulie, Kec. Sibulue.

b) Capaian Output Benih Buah Lainnya

Target total output produksi benih buah lainnya yang ditetapkan tahun 2018 sebesar 1.524.663 batang, terdiri dari benih mangga 607.502 batang, benih manggis 245.000 batang, benih pisang 340.000 batang, dan benih buah lainnya sebanyak 332.161 batang. Adapun benih Mangga, dengan rincian di pusat yakni 45.000 batang dan di daerah sebanyak 562.502 batang. Benih Manggis dengan rincian di pusat yakni 36.000 batang dan di daerah sebanyak 209.000 batang, total 245.000 batang. Benih Pisang di pusat sebanyak 12.000 batang dan di daerah sebanyak 328.000 batang, total 340.000 batang. Benih buah lainnya yang terdiri dari durian, salak, sukun dan kelengkeng dengan rincian kegiatan di pusat 81.000 batang dan daerah sebanyak 251.161 batang, dengan total 332.161 batang. Pengadaan benih dilaksanakan di 28 satker provinsi, dan terealisasi sebesar 1.399.663 batang atau sekitar 91,80 %. Rendahnya realisasi tersebut disebabkan beberapa faktor, yakni adanya kelompok penerima yang menolak varietas buah tertentu, dikarenakan tidak sesuai dengan kondisi agroklimatnya. Selain itu, karena adanya Kabupaten yang tidak melaksanakan lelang, dikarenakan tidak cukup waktunya untuk lelang.

c) Capaian Output Benih Bawang Merah

Produksi benih bawang merah dilaksanakan oleh BBH di 19 propinsi melalui dana dekonsentrasi. Perbanyak benih bawang merah dapat dilakukan bekerja sama dengan penangkar benih setempat yang kompeten dengan kesepakatan secara tertulis dan BBH tetap memenuhi target output yang telah ditetapkan. Target output produksi benih bawang merah yang ditetapkan 597.000 kg, terealisasi sebesar 502.182 kg atau sekitar 84,11%. Perbanyak benih bawang merah tidak dapat mencapai target karena keterbatasan waktu pelaksanaan akibat koordinasi internal di Satker daerah yang terlambat dalam proses penyediaan dokumen seperti yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah. Juga masih rendahnya penguasaan teknologi dan kompetensi SDM perbanyak benih bawang merah serta kurang tersedianya fasilitas penyimpanan benih bawang merah di daerah penerima seperti yang terjadi di Kalimantan Tengah. Sementara di Provinsi Sumatera Utara terkendala cuaca, bencana alam berupa gempa bumi, tsunami dan liquifaksi seperti yang terjadi di Sulawesi Tengah.

d) Capaian Output Benih Cabai

Tujuan dari kegiatan ini adalah memasyarakatkan penggunaan benih cabai bermutu dari varietas unggul. Sasaran yang akan dicapai adalah meningkatnya penggunaan benih cabai bermutu dari varietas unggul dalam mendukung peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk tanaman cabai. Pengadaan atau penanaman benih cabai dalam polybag/wadah harus dari varietas yang telah dilepas/didaftar oleh Menteri Pertanian.

Produksi benih cabai dilaksanakan oleh BBH di 32 propinsi melalui dana Tugas Pembantuan dan dua provinsi gagal melaksanakan yaitu Provinsi Banten, Kalbar dan Sulawesi Utara. Target output produksi benih cabai ditetapkan tahun 2018 sebesar 1.000.000 batang terealisasi sebesar 960.000 batang atau sekitar 96,00%

e) Capaian Output Benih Sayuran Lainnya

Tujuan kegiatan adalah meningkatkan ketersediaan benih benih sayuran lainnya, khususnya dalam hal ini benih bawang putih. Sasaran kegiatan adalah meningkatnya

ketersediaan benih bawang putih untuk mendukung peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk bawang putih. Kegiatan dilaksanakan di dua provinsi dan 5 kabupaten/kota melalui dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Target output produksi benih bawang putih dalam PK Revisi terakhir tahun 2018 sebesar 190.000 kg dan terealisasi sebesar 103.000 kg atau sekitar 54,21%.

Satker provinsi yang tidak mencapai realisasi target Provinsi Jawa Tengah, Sulawesi Selatan dan Kabupaten Solok.

f) Capaian Output Sertifikasi Benih Hortikultura

Benih bermutu hortikultura merupakan salah satu dari kunci keberhasilan budidaya hortikultura. Dalam Permentan nomor 48 tahun 2012 tentang Sertifikasi, Produksi dan Pengawasan Mutu Benih disebutkan bahwa benih bermutu diperoleh melalui proses sertifikasi :

- Pengawasan pertanaman dan pasca panen oleh BPSB;
- Sistem Manajemen Mutu (SMM) oleh LSSM terakreditasi KAN dengan ruang lingkup perbenihan; dan
- Terhadap produk benih oleh LSPro terakreditasi KAN.
- Kegiatan sertifikasi dalam PK revisi terakhir tahun 2018 ditargetkan sebanyak 1.680 unit sertifikasi dan realisasi capaian sertifikasi sampai akhir tahun 2018 mencapai 5.233 unit sertifikasi atau sebesar 311,49 % dari yang telah ditargetkan untuk tahun 2018. Provinsi yang memiliki capaian sertifikasi tertinggi yaitu Provinsi Jawa Tengah dengan realisasi sertifikasi sebesar 1.124 unit sertifikasi, capaian ini jauh lebih tinggi dari target sertifikasinya yang hanya sebesar 100 unit sertifikasi.

g) Capaian Output Sarana dan Prasarana Benih Hortikultura

Peran Balai Benih Hortikultura (BBH) sebagai ujung tombak dalam penyediaan benih bermutu sangat penting sehingga upaya peningkatan keterampilan dan kemampuannya perlu dilakukan. Untuk memperkuat peranan produsen benih baik milik pemerintah maupun swasta dalam memproduksi benih bermutu, pemerintah memfasilitasi sarana prasarana produksi benih hortikultura yang memadai.

Target output sarana dan prasarana Perbenihan Hortikultura yang ditetapkan dalam PK Revisi terakhir tahun 2018 sebesar 61 unit, terealisasi sebesar 46 Unit atau sekitar 75,41 %. Realisasi output sarana dan prasarana benih terendah yaitu Satker Provinsi Jawa tengah. Di Provinsi ini sejumlah sarana dan prasarana diantara berupa screen house yang direncanakan di Kabupaten Banjarnegara dan Wonosobo tidak terealisasi karena adanya ketakutan dan koordinasi internal yang kurang optimal.

h) Capaian Output Fasilitasi Teknis dukungan perbenihan hortikultura

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 43/Permentan/OT.010/8/2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Direktorat Perbenihan Hortikultura mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peningkatan penyediaan benih hortikultura. Untuk mendukung kinerja Direktorat Perbenihan Hortikultura dalam melaksanakan Koordinasi dan sinkronisasi di Direktorat Perbenihan Hortikultura (Pusat), Balai Benih Hortikultura (BBH), Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPSBTPH), dan TP Kabupaten/kota.

i) Capaian Kegiatan Direktorat Perlindungan Hortikultura
Gerakan Pengendalian OPT

Gerakan pengendalian OPT antara lain dilaksanakan dengan penyediaan sarana prasarana pengendalian OPT, pembinaan teknis, monitoring dan pelaporan, dilaksanakan oleh jajaran UPTD BTPH di 33 propinsi. Pelaksanaan gerakan pengendalian OPT hortikultura di lapang, diarahkan pada daerah serangan endemis, daerah sumber infeksi, daerah serangan baru, dan daerah ekspansi dengan melibatkan petani/kelompok tani/PPAH dan Klinik PHT binaan Lab. PHP / Lab. Agens Hayati secara langsung sebagai upaya pengelolaan OPT agar tidak menimbulkan kerugian secara nyata.

j) Capaian Output Desa Pertanian Organik

Tahun 2018 output Desa Pertanian Organik bidang hortikultura merupakan tahun pertama pelaksanaan oleh Direktorat Perlindungan Hortikultura dengan target 250 desa dan merupakan kelanjutan dari pelaksanaan 2016 baik lokasi maupun kelompok taninya. Alokasi anggaran DPO pada Tahun 2018 untuk 250 desa di 24 propinsi sebesar Rp. 12.500.000.000 dengan capaian realisasi Rp. 12.055.290.209 (96,44%). Hal ini karena tidak terlaksananya kegiatan DPO di Propinsi Kepulauan Riau, yang disebabkan oleh keterbatasan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM). Ada tiga komponen pada kegiatan DPO yaitu :

- Identifikasi

Hasil re-identifikasi calon petani dan calon lokasi pelaksanaan Kegiatan Desa Pertanian Organik (DPO) tahun 2018, menunjukkan bahwa sejumlah 142 desa merupakan kelompok tani/desa baru, dan 102 desa merupakan desa lama sesuai dengan alokasi kegiatan pada tahun 2016.

- Fasilitasi Bantuan

Fasilitasi bantuan yang disalurkan bernilai Rp. 50.000.000 per desa dengan komponen bantuan berupa bahan input yang sudah bersertifikat organik dan atau bahan input yang dihasilkan oleh LPHP/LAH/Klinik PHT dengan justifikasi penyedia bahwa bahan baku tidak mengandung unsur kimia. Selain itu, komponen bantuan juga disediakan berupa sarana atau peralatan sederhana untuk memproduksi bahan input organik. Realisasi bantuan yang telah dialokasikan sebanyak 248 Desa (99,22%), karena terdapat 2 (dua) desa yang tidak tereliasasi penyalurannya. Hal ini disebabkan keterbatasan manajemen SDM.

- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Monitoring, evaluasi dan pelaporan telah dilakukan ke 250 Desa di 24 Propinsi lokasi DPO, yang dalam pelaksanaannya, sekaligus memberikan bimbingan teknis secara periodik oleh tenaga petugas pendamping/fasilitator. Selain itu petugas UPTD BTPH dan LPHP juga melakukan pengawalan dan pemantauan, yang mengacu pada Standar Sistem Pertanian Organik, sampai kelompok tani siap didaftarkan untuk disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Organik (LSO). Namun demikian dari hasil laporan pelaksanaan, Propinsi Kepulauan Riau tidak dapat merealisasikan komponen monitoring, evaluasi dan pelaporan karena keterbatasan SDM.

k) Dukungan Gerakan Pengendalian OPT Lainnya

- Penguatan Kelembagaan OPT

Kelembagaan Perlindungan Hortikultura merupakan garda terdepan penerapan budidaya ramah lingkungan sesuai prinsip PHT dalam mendukung pengamanan produksi komoditas strategis hortikultura. Pendampingan penguatan kelembagaan dilakukan pada LPHP/LAH pada sentra produksi pengembangan kawasan hortikultura yang pada tahun 2018 dilaksanakan pada 150 LPHP/LAH dan Klinik PHT di 31 UPTD BPTPH. Untuk meningkatkan pelayanan sistem manajemen mutu LPHP, maka tahun 2018 telah dilakukan penguatan kelembagaannya sesuai ISO 9001 : 2015, melalui sertifikasi LPHP/LAH di 11 LPHP/LAH.

l) Capaian Kegiatan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura

Sertifikasi Standar, Mutu dan Pemasaran Hortikultura

Kegiatan sertifikasi standar, mutu dan pemasaran hortikultura pada tahun 2018 sebanyak 100 unit, dialokasikan pada 22 Provinsi yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Bengkulu dan Banten.

Berdasarkan pengukuran kinerja sertifikasi standar, mutu dan pemasaran hortikultura Tahun 2018, dari target output sebanyak 100 unit, dapat dicapai 85 unit (100%).

m) Fasilitas Pascapanen dan Pengolahan Cabai dan Bawang Merah

Target sarana prasarana pascapanen berjumlah 186 unit, yang terdiri dari Provinsi Jawa Barat (3 unit), Kab. Temanggung (4 unit), Provinsi Jawa Tengah (4 unit), Kab. Malang (2 unit), Kab. Nganjuk (10 unit), Provinsi Bali (1 unit), Kab. Bima (1 unit), Kab. Lombok Timur (1 unit) dan pengadaan di pusat yang dialokasikan ke daerah sebanyak 160 unit.

n) Fasilitas Pascapanen dan Pengolahan Hortikultura Lainnya

Target sarana prasarana pengolahan adalah sebanyak 99 unit yang dialokasikan ke Provinsi Jawa Barat (2 unit), Kab. Cianjur (1 unit), Kab. Bandung (1 unit), Kab. Sumedang (1 unit), Kab. Tasikmalaya (2 unit), Kab. Kuningan (1 unit), Kab. Grobogan (1 unit), Kab. Temanggung (1 unit), Provinsi Jawa Tengah (2 unit), Kab. Magelang (1 unit), Kab. Sragen (1 unit), Kab. Banjarnegara (1 unit), Provinsi DIY (2 unit), Provinsi Jawa Timur (2 unit), Kab. Malang (7 unit), Kab. Nganjuk (2 unit), Provinsi Aceh (5 unit), Provinsi Sumatera Utara (2 unit), Kab. Agam (2 unit), Kab. Solok (4 unit), Provinsi Riau (3 unit), Provinsi Jambi (3 unit), Kab. Kerinci (1 unit), Provinsi Sumatera Selatan (4 unit), Provinsi Lampung (3 unit), Provinsi Kalimantan Barat (3 unit), Provinsi Kalimantan Selatan (6 unit), Kab. Tapin (1 unit), Provinsi Kalimantan Timur (2 unit), Kota Palu (3 unit), Provinsi Sulawesi Tengah (1 unit), Kab. Pinrang (1 unit), Kab. Jeneponto (2 unit), Kab. Enrekang (2 unit), Provinsi Sulawesi Selatan (3 unit), Kab. Bantaeng (1 unit), Kab. Maros (1 unit), Kab. Sinjai (1 unit), Provinsi Sulawesi Tenggara (2 unit), Provinsi Nusa Tenggara Barat (3 unit), Kab. Lombok Timur (2 unit), Provinsi Nusa Tenggara Timur (6 unit), Provinsi Bengkulu (2 unit) dan Provinsi Banten (2 unit).

o) Fasilitasi Teknis Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura

Target bimbingan teknis peningkatan nilai tambah dan daya saing hortikultura adalah sebanyak 21 kali yang dialokasikan untuk Provinsi DKI Jakarta (1 kali), Provinsi Jawa Barat (2 kali), Provinsi DI Yogyakarta (1 kali), Provinsi Jawa Timur (1 kali), Provinsi Aceh (1 kali), Provinsi Sumatera Utara (1 kali), Provinsi Sumatera Barat (1 kali), Provinsi Jambi (1 kali), Provinsi Sumatera Selatan (1 kali), Provinsi Lampung (1 kali), Provinsi Kalimantan Tengah (1 kali), Provinsi Kalimantan Selatan (1 kali), Provinsi Sulawesi Selatan (1 kali), Provinsi Bali (1 kali), Provinsi Nusa Tenggara Barat (1 kali), Provinsi Bengkulu (1 kali) dan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura (4 kali).

Pencapaian Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun 2018 secara ringkas dapat dilihat pada Tabel berikut:

p) Capaian Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura

Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Hortikultura.

Sasaran Evaluasi yang diharapkan adalah Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian yang berisi rekomendasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki manajemen kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja khususnya kinerja pelayanan publik di unit kerja Direktorat Jenderal Hortikultura. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2018, ditetapkan target indikator kinerja nilai AKIP Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2018 berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal adalah 82,50%. Namun demikian, realisasi implementasi SAKIP 2018 belum dapat diukur nilainya karena karena evaluasi Inspektorat Jenderal baru akan dilakukan sekitar bulan Juli atau Agustus 2019. Namun demikian rata-rata peningkatan nilai SAKIP 3 tahun terakhir adalah sebesar 3,77%. Hal ini menunjukkan komitmen Direktorat Jenderal Hortikultura untuk terus memperbaiki dan meningkatkan kinerja dari tahun ke tahun.

Nilai Kinerja (NK) (berdasarkan PMK 214 Tahun 2017 merupakan indikator kedua yang menggambarkan terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan tampilan dashboard kinerja pada aplikasi SMART diketahui bahwa Direktorat Jenderal Hortikultura mendapatkan nilai kinerja sebesar 77,73 sehingga dapat termasuk kategori penilaian "baik".

Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Yang Akuntabel Di Lingkungan Direktorat Jenderal Hortikultura

Pengelolaan keuangan yang akuntabel digambarkan ke dalam dua indikator yaitu 1) rasio rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi yang diberikan dan 2) Rasio tindaklanjut kejadian atas temuan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian di lingkungan Direktorat Jenderal Hortikultura terhadap total kejadian atas temuan.

Pada tahun 2018 terdapat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK (cq), Direktorat Jenderal Hortikultura mendapatkan rekomendasi sebanyak 19 rekomendasi. Berdasarkan hasil rekonsiliasi dengan BPK, sampai dengan 31 Desember 2018 sebanyak 18 rekomendasi dari 19 rekomendasi yang disampaikan BPK telah ditindaklanjuti, sedangkan 1 rekomendasi atau 1 temuan masih dalam proses tindak lanjut yaitu terkait penghapusan/hibah aset tetap. Dengan demikian dapat diperoleh rasio tindak lanjut rekomendasi BPK sebesar 94,74%.

Untuk indicator kedua merupakan rasio tindaklanjut kejadian atas temuan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. Pada tahun 2017 terdapat 136 Laporan Hasil Pengawasan dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dengan total kejadian sebanyak 640 kejadian/temuan. Dari 640 kejadian/temuan, telah ditindaklanjuti sebanyak 513 kejadian, sehingga diperoleh rasio tindaklanjut kejadian atas temuan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian di lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura sebesar 80,16%. Sisa kejadian sebanyak 127 kejadian akan ditindaklanjuti pada tahun 2019.

E. Pelaksanaan Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan

1. Realisasi Output Kegiatan Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar

Capaian fisik kegiatan pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar yaitu:

- a. Pengembangan Tanaman Kopi dengan capaian fisik 88,73%.
- b. Pengembangan Tanaman Kakao dengan capaian fisik 93,12%.
- c. Pengembangan Tanaman Karet dengan capaian fisik sebesar 100,00%.
- d. Pengembangan Tanaman Kelapa dengan capaian fisik sebesar 94,95%.
- e. Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar Lainnya dengan capaian fisik 90,19%.
- f. Pengembangan Perkebunan di Daerah Perbatasan capaian fisik sebesar 100,00%.
- g. Fasilitasi teknis dukungan pengembangan tanaman tahunan dan penyegar dengan realisasi fisik sebesar 88,71%.

2. Dukungan Perlindungan Perkebunan

Capaian fisik kegiatan dukungan perlindungan perkebunan antara lain yaitu:

- a. Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan dengan capaian fisik 100,00%.
- b. Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun dengan capaian fisik 100,00%.
- c. Pengembangan Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan dengan capaian fisik 100,00%.
- d. Fasilitasi teknis dukungan perlindungan perkebunan dengan capaian fisik 95,70%.
- e. Penanganan Gangguan dan Konflik Usaha Perkebunan dengan capaian fisik 95,70%.
- f. Dukungan Perlindungan Perkebunan dengan capaian fisik 100,00%.

3. Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih Serta Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan

Realisasi fisik kegiatan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih Serta Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan yaitu:

- a. Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Tanaman Perkebunan dengan capaian fisik 100,00%;
- b. Pengembangan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan dengan capaian fisik 100,00%;
- c. Fasilitasi Teknis Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih serta Penyiapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan dengan capaian fisik 75,27%;
- d. Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dengan capaian fisik 93,31%.
- e. Layanan Internal (Overhead) dengan capaian fisik 97,74%;
- f. Layanan Perkantoran dengan capaian fisik 93,71%.

4. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya

Capaian fisik kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya yaitu:

- a. Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dengan capaian fisik 80,15%.
- b. Layanan Internal dengan capaian fisik 88,78%.
- c. Layanan Perkantoran dengan capaian fisik 85,54%.

5. Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah

Capaian fisik kegiatan Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah yaitu:

- a. Pengembangan Tanaman tebu dengan capaian fisik 82,04%;
- b. Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah Lainnya dengan capaian fisik 97,34%;
- c. Fasilitasi Teknis Dukungan Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah dengan capaian fisik 93,54%.

6. Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan

Capaian fisik kegiatan Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan yaitu:

- a. Fasilitasi pasca panen tanaman perkebunan dengan capaian fisik 100,00%;
- b. Fasilitasi Teknis Dukungan Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan dengan capaian fisik 96,21%;
- c. Fasilitasi Pengolahan Hasil Perkebunan dengan capaian fisik 100,00%;
- d. Pengembangan Penerapan Standarisasi Mutu dan Pembinaan Usaha Perkebunan dengan capaian fisik 100,00%;
- e. Pengembangan Pemasaran Hasil Perkebunan dengan capaian fisik 100,00%;

7. Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan

Capaian fisik kegiatan Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan yaitu:

- Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan dengan capaian fisik 82,58%;
- Fasilitasi Teknis Dukungan Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan dengan capaian fisik 88,96%.

8. Perkembangan Ekspor Komoditas Perkebunan pada tahun 2018

Realisasi volumen ekspor komoditas perkebunan pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 29. Perkembangan volume Ekspor Komoditas Strategis Perkebunan

No	KOMODITAS STRATEGIS PERKEBUNAN	REALISASI VOLUME EKSPOR KOMODITAS PERKEBUNAN/TAHUN/KOMODITAS (TON)					Rerata Pertumbuhan (%)
		2014	2015	2016	2017	2018	
1	Cengkeh	9,136	12,889	12,754	9,079	20,249	33.30
2	Gambir	14,174	14,020	15,446	15,215	18,016	8.81
3	Kacang Mete	60,842	104,655	70,326	62,811	58,358	(6.85)
4	Kakao	333,679	355,321	330,029	354,752	380,747	1.63
5	Karet	2,623,471	2,630,313	2,578,791	2,991,909	2,811,954	1.58
6	Kelapa	1,711,603	1,826,310	1,564,260	1,878,834	1,981,087	0.29
7	Kelapa Sawit	28,026,621	32,543,312	28,493,069	33,519,211	34,597,004	2.58
8	Kopi	384,828	502,021	414,651	467,790	279,961	(8.84)
9	Lada	34,733	58,075	53,100	42,691	47,614	10.30
10	Pala	14,712	17,027	15,842	19,936	20,203	7.12
11	Panili	247	355	606	295	204	18.44
12	T e h	66,399	61,915	51,319	54,187	49,030	(12.11)
13	Tembakau	35,009	30,675	28,005	29,134	32,310	(3.92)
14	Nilam	1,178	927	1,233	1,260	1,671	17.83
15	Serai Wangi	1,978	2,181	28,562	939	1,768	325.92
	TOTAL/RATA-RATA	33,318,609	38,159,996	33,657,994	39,448,045	40,300,175	26.41

Pertumbuhan volume ekspor komoditas perkebunan meningkat rata-rata 13,90% atau mencapai 304,13% dari target Tahun 2018 sebesar 4,57%. Kenaikan tertinggi pada komoditas cengkeh (123,04%), serah wangi (88,33%), nilam 32,62%, lada (11,53%), tembakau (10,90%), kakao (7,33%), kelapa (5,44%), kelapa sawit (3,22%) dan pala (1,34%). Sedangkan komoditas yang mengalami penurunan ekspor yaitu karet (-6,01%), kacang mete (-7,09%), the (-9,52%), panili (-30,89%) dan kopi (-40,15%).

Tabel 30. Pertumbuhan volume Ekspor Komoditas Strategis Perkebunan

No	KOMODITAS STRATEGIS	PERTUMBUHAAN (%)		
		2017	2018	2018/2017
1	Cengkeh	9,079	20,249	123.04
2	Serai Wangi	939	1,768	88.33
3	Nilam	1,260	1,671	32.62
4	Gambir	15,215	18,016	18.40
5	Lada	42,691	47,614	11.53
6	Tembakau	29,134	32,310	10.90
7	Kakao	354,752	380,747	7.33
8	Kelapa	1,878,834	1,981,087	5.44
9	Kelapa Sawit	33,519,211	34,597,004	3.22
10	Pala	19,936	20,203	1.34
11	Karet	2,991,909	2,811,954	(6.01)
12	Kacang Mete	62,811	58,358	(7.09)
13	T e h	54,187	49,030	(9.52)
14	Panili	295	204	(30.89)
15	Kopi	467,790	279,961	(40.15)
	TOTAL/RATA-RATA	39,448,045	40,300,175	13.90
	TARGET PK			4.57
	CAPAIAN KINERJA			304.13

Sumber: Direktorat Jenderal Perkebunan, 2019 (Diolah)

9. Produksi Gula Tebu

Gula tebu merupakan salah satu komoditas strategis Kementerian Pertanian. Sebagai salah satu indikator capaian kinerja Ditjen Perkebunan gula berbasis tebu mendapat perhatian khusus lingkup Ditjen Perkebunan. Produksi gula tebu merupakan IKSP dari sasaran kinerja terpenuhinya kebutuhan pangan strategis perkebunan. Data produksi gula yang digunakan bersumber dari BPS dan atau data statistik komoditas perkebunan yang dikelola oleh Ditjen Perkebunan. Formula yang digunakan dalam menghitung produksi gula tebu adalah produktivitas gula tebu dikalikan dengan luas panen gula tebu. (*produksi gula tebu diperoleh dari produktivitas tebu dikalikan rendemen*).

Evaluasi dan analisis realisasi kinerja dan capaian produksi Gula tebu dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 31. Analisis realisasi kinerja dan capaian produksi Gula tebu Tahun 2015-2018

IK-1	Terpenuhinya kebutuhan pangan strategis perkebunan				
	Produksi gula tebu			2018 Dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan 2019 (%)	
Tahun	Target (Ton)	Realisasi (Ton)	Capaian (%)	Realisasi	Capaian
2015	2,972,000	2,497,997	84.05	87.05	92.39
2016	3,270,000	2,204,619	67.42	98.63	115.18
2017	2,400,000	2,121,671	88.40	102.49	87.84
2018	2,800,000	2,174,400	77.66	100.00	100.00
2019	3,000,000	-	-	72.48	-

Sumber: Direktorat Jenderal Perkebunan, 2019 (Diolah)

10. Target dan realisasi kinerja tahun ini

Realisasi Kinerja produksi gula tebu Tahun 2018 adalah sebesar 2.174.400 ton atau mencapai 77,66% dari target sebesar 2.800.000 ton dan masuk dalam katagori kurang berhasil. Berdasarkan analisis capaian indikator kinerja dinyatakan bahwa produksi gula tebu Tahun 2018 masuk dalam kakatgori kurang berhasil. Permasalahan tidak tercapainya produksi gula tebu diantaranya perubahan iklim atau anomali iklim, Inovasi teknologi budidaya terbaru belum optimal, terbatasnya varietas unggul baru yang adaptif di lahan kering, dukungan pengolahan belum optimal, petani meragukan transparansi rendemen, dukungan Kebijakan dan regulasi belum tepat, distabilitas Harga petani, minimnya kuantitas dan kualitas SDM perkebunan, Sumber Daya Alam (SDA) terbatas untuk tebu, Minimnya investasi terhadap industri gula berbasis tebu (Klasifikasi Permasalahan Bab V).

F. Pelaksanaan Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat

PENINGKATAN KUANTITAS DAN KUALITAS BENIH DAN BIBIT

Permentan Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit ternak serta produksi ternak (ruminansia potong, ruminansia perah, serta unggas dan aneka ternak)

➤ Penyediaan Benih dan Bibit Ternak Unggul

Pembibitan Ternak Pemerintah dilaksanakan oleh UPT Pusat dan UPT Daerah. Khususnya UPT Pusat penyediaan benih dilakukan oleh BBIB Singosari, BIB Lembang dan BET Cipelang. BBIB memproduksi semen beku, sedangkan BET memproduksi embrio. Kegiatan peningkatan produksi bibit ternak dilaksanakan di 7 UPT, yaitu BBPTU-HPT Baturraden, BPTU-HPT Indrapuri, BPTU-HPT Padang Mangatas, BPTU-HPT Sembawa, BPTU-HPT Denpasar, BPTU-HPT Sidorongborong, dan BPTU-HPT Pelaihari. Capaian populasi dan produksi benih dan bibit dapat dilihat pada table berikut .

Tabel 32. Capaian Populasi Produksi Benih dan Bibit Ternak Than 2018

No	Produksi Benih/Bibit	Satuan	Target	Realisasi	Keterangan
A	Produksi Benih	Dosis	4.576.700	4.964.257	859 embrio
B	Produksi Bibit				
1	Sapi/Kerbau	Ekor	5.807	7.693	
2	Kambing/Domba	Ekor	1.050	1.307	
3	Babi	Ekor	730	448	
4	Unggas	Ekor	574.794	858.233	

➤ Pengembangan Ternak Ruminansia Potong

Salah satu sasaran utama prioritas nasional di bidang pangan dalam RPJMN Tahun 2015-2019 adalah produksi daging sapi untuk mengamankan konsumsi di tingkat rumah tangga. Upaya tersebut perlu adanya jaminan ketersediaan Sapi Idukan melalui penambahan proses impor. Impor dilaksanakan di 3 (tiga) UPT Ditjen PKH. Sedangkan kegiatan pengembangan ruminansia potong dilaksanakan dengan penambahan idukan impor dan pengembangan populasi ternak local. Capaian realisasi sapi potong lokal dengan target 1.860 ekor adalah 1.600 ekor (86%), realisasi ternak kerbau yaitu 30%, realisasi pengadaan kambing lokal yaitu 99% (Kambing Gembrong di Dinas Bali target 10 ekor, realisasi 7 ekor akibat ketersediaan kambing gembrong yang sangat terbatas).

➤ Pengembangan Unggas dan Aneka Ternak

Pemeliharaan unggas serta ternak lainnya (kelinci dan babi) umumnya dilakukan oleh masyarakat. Secara umum tidak melakukan Good Farming Practice/Good Breeding Practice. Khusus untuk ternak babi, pemerintah berusaha meningkatkan kualitas daging babi agar dapat menembus ekspor ke luar negeri. Sedangkan unggas dan kelinci lebih diutamakan untuk konsumsi dalam negeri (daging dan telur). Pembinaan dilakukan pemerintah diantaranya memberikan bantuan modal usaha kepada kelompok-kelompok peternak kelinci dan membentuk kawasan-kawasan agribisnis kelinci. Harapannya kegiatan yang dilakukan tidak hanya sebagai sampingan tetapi menjadi kegiatan utama.

➤ Sertifikasi Benih dan Bibit Ternak

Lembaga Sertifikasi Produk Benih dan Bibit Ternak pada tahun 2018, pengajuan sertifikasi mencapai 19 klien baik dari UPT PKH dan pelaku unggas. (terlampir data sertifikasi). Peningkatan kompetensi manajemen dilakukan berupa Pemahaman Reproduksi di BET Cipelang pada bulan Juni 2018. Dalam pelaksanaannya beberpa permasalahan yang dihadapi adalah belum seluruh pelaku usaha mengajukan sertifikasi dan Kedudukan LSPro yang masih diperlukan justifikasi kepada KAN.

Tabel 33. Jumlah Sertifikasi Benih Dan Bibit Dari Tahun 2018

No	Jumlah	Setara	Komoditi	Produsen	Masa Berlaku Sppt Sni	Ket
1	80 Bull	3,600,000	Semen Beku	BIB Lembang	2018 - 2021	
2	13 Ekor	-	Sapi PO	UPTD Tuban Jatim	2018 - 2019	
3	13 Ekor	-	Sapi Sumba Ongol	PT. Karya Anugerah Rumpin	2018 - 2019	
4	657 Embrio	-	Embrio Sapi	BET Cipelang	2018 - 2021	
5	73 Ekor	-	Kambing PE	BPTU-HPT Pelaihari	2018 - 2019	
6	94 Bull	4,230,000	Semen Beku	BBIB Singosari	2018 - 2021	
7	2 Komoditi	-	DOC PS dan FS Pedaging	PT. Japfa Comfeed Indoensia	2018 - 2021	Seluruh Indonesia
8	2 Komoditi	-	DOC-FS Pedaging&Petelur	PT. Satwa Borneo	2018 - 2019	
9	1 Komoditi	-	DOC FS Pedaging	PT. Charoen Pokphan	2018 - 2021	Jatim, NTT dan Bali
10	4 Komoditi	-	DOC PS dan FS Pedaging & Petelur	CV. Missouri	2018 - 2021	
11	1 Komoditi	-	DOC FS Pedaging	PT. Panca Patriot	2018 - 2021	
12	1 Komoditi	-	DOC FS Pedaging	PT. Janu Putera	2018 - 2021	
13	1 Komoditi	-	DOC FS Pedaging	PT. Dinamika	2018 - 2021	
14	1 Komoditi	-	DOC PS Pedaging	PT. CJ PIA	2018 - 2021	
15	19 Bull	855,000	Semen Beku	BIB Kalsel	2018 - 2021	
16	4 Bull	180,000	Semen Beku	BIBD Bengkulu	2018 - 2021	
17	40 Ekor	-	Sapi Aceh	BPTU-HPT Indrapuri	2018 - 2019	
18	1 komoditi	-	DOC FS Pedaging	PT Kerta Mulya Sejahtera	2018-2021	
19	1 Komoditi	-	DOC FS Pedaging	PT Ayam Unggul	2018-2021	

PENINGKATAN PRODUKSI PAKAN TERNAK

Berdasarkan Permentan Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 Direktorat Pakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi pakan.

➤ Penanaman dan Pengembangan Tanaman Pakan Berkualitas (Gerbang Patas)

UPSUS SIWAB merupakan kegiatan terintegrasi melalui Sistem Manajemen Reproduksi termasuk didalamnya penerapan aspek pemenuhan hijauan pakan ternak (HPT) berkualitas (Gerbang Patas). Outputnya dalam rangka mendukung UPSUS SIWAB Tahun 2018 adalah tertanam dan dikembangkannya tanaman pakan berkualitas pada lokasi UPSUS SIWAB seluas 338,5 Ha di 11 Provinsi. Setelah refocusing anggaran kegiatan #Bekerja maka Gerbang Patas menjadi 300,5 Ha di 11 Provinsi, seperti pada tabel berikut :

Tabel 34. Pengembangan Padang Pengembalaan

No.	Provinsi	Target (Ha)	Realisasi	
			(Ha)	(%)
1.	Aceh	25	25	100
2.	Kepulauan Riau	10	10	100
3.	Sumatera Selatan	10	10	100
4.	Lampung	50	50	100
5.	Jawa Barat	50	15	30
6.	Jawa Tengah	50	50	100
7.	DIY	20	20	100
8.	Jawa Timur	20	20	100
9.	Bali	30	30	100
10.	Kalimantan Selatan	13.5	6,75	50
11.	Sulawesi Selatan	22	14.5	65,90
Jumlah		300.5	251.25	83,61

➤ Pengembangan Padang Pengembalaan

Dilaksanakan guna perbaikan kualitas pakan di kawasan padang pengembalaan pada lokasi kegiatan pengembangan padang pengembalaan. Pelaksanaan kegiatan pada 2 (dua) provinsi yaitu, Provinsi Sulawesi Tenggara (Kab. Konawe Selatan), Provinsi Sulawesi Tengah (Kab. Poso). Realisasi fisik kegiatan mencapai 100%.

Realisasi fisik kegiatan pengembangan padang pengembalaan sebagai berikut :

No.	Provinsi	Target lahan (ha)	Realisasi	
			(ha)	(%)
1.	Sulawesi Tenggara	100	100	100
2.	Sulawesi Tengah	100	100	100
Jumlah		200	200	100

➤ Pemeliharaan Padang Pengembalaan

Dilaksanakan guna adanya perbaikan produksi HPT di padang pengembalaan pada lokasi kegiatan. Kegiatan ini difasilitasi melalui dana TP APBN pada 5 (lima) Provinsi yaitu, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Papua Barat, dengan target pemeliharaan HPT pada lahan padang pengembalaan seluas 600 Ha. Realisasi fisik dari kegiatan ini seluas 600 Ha atau 100%. Capaian kegiatan pemeliharaan pada kegiatan pemeliharaan padang pengembalaan :

Tabel 35. Capaian kegiatan pemeliharaan padang pengembalaan

No	Provinsi	Lokasi	Target (Ha)	Realisasi	
				(Ha)	(%)
1	Sulawesi Tengah	Poso	25	25	100
		Morowali Utara	75	75	100
2	Sulawesi Tenggara	Kolaka	100	100	100
3	Nusa Tenggara Barat	Dompu	100	100	100
4	Jawa Tengah	Brebes	100	100	100
5	Papua Barat	Fak-Fak	100	100	100
		Sorong	100	100	100
TOTAL			600	500	100

➤ Penguatan Pakan Konsentrat Di UPT

Pelaksanaan pemenuhan pakan konsentrat di 10 (sepuluh) UPT pusat, ditujukan untuk meningkatkan performans ternak-ternak di UPT dan menjadikan UPT sebagai centre of excellence. Capaian dua tahun terakhir tersaji dalam Tabel berikut :

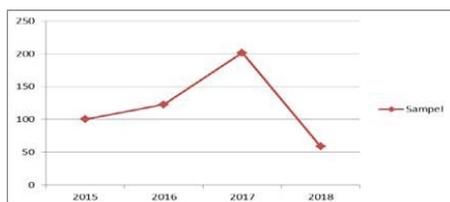
Tabel 36. Capaian Kegiatan Pakan Konsentrat di UPT

No.	Satker	2017		2018*)	
		Fisik (Ton)	Keuangan (Rp)	Fisik (Ton)	Keuangan (Rp)
1	BIB Lembang	272,90	1.467.861.369	180,00	1.126.344.600
2	BET Cipelang	898,10	3.821.774.850	641,00	2.649.439.542
3	BPTU HPT Baturaden	2.169,00	8.190.686.000	1.644,00	6.521.950.300
4	BBIB Singosari	352,00	2.240.425.000	227,50	1.686.100.000
5	BPTU HPT Indrapuri	601,00	2.637.266.000	462,00	1.994.938.500
6	BPTU HPT Siborong-Borong	521,43	3.163.784.000	178,95	1.325.192.500
7	BPTU HPT Padang Mangatas	421,40	1.678.112.000	329,43	1.346.730.000
8	BPTU HPT Sembawa	1.288,03	6.474.673.015	1.029,87	5.170.246.531
9	BPTU HPT Pelaihari	764,00	5.109.814.600	518,50	3.431.098.900
10	BPTU HPT Denpasar	675,25	3.582.120.500	832,85	4.219.020.000
TOTAL		7.963,10	38.366.517.334	6.044,10	29.471.60.873

Keterangan: *) data sementara sd. bulan oktober 2018

➤ Pengawasan Mutu dan Keamanan Pakan

Diselenggarakan pengawasan mutu guna keamanan pakan yang beredar serta memastikan pakan yang beredar telah memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) maupun Persyaratan Teknis Minimal (PTM). Kegiatan pengawasan mutu dan keamanan pakan pada tahun 2019 dilaksanakan pada 24 provinsi dengan target 1.650 sampel. Sampai dengan November 2018 telah terealisasi sebesar 969 sampel (58,73%). Capaian terendah tahun 2018 karena terjadi refocusing anggaran selengkapnyanya disampaikan pada Gambar berikut.



Gambar 8. Capaian Kegiatan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pakan Tahun 2015-2018

➤ Pengembangan Laboratorium Pakan

Peran laboratorium pakan menjadi semakin penting sejalan meningkatnya kesadaran masyarakat atas jaminan mutu dan keamanan pakan. Balai Pengujian Mutu Sertifikasi pakan (BPMSM) di Bekasi merupakan laboratorium pakan nasional perlu didukung oleh laboratorium pakan daerah yang kompeten dan terakreditasi (ada delapan laboratorium di 6 provinsi), sehingga semakin tinggi kinerja pakan dalam pemberian jaminan mutu dan keamanan melalui kecepatan dan akurasi hasil pengujian. dapat dilihat pada gambar berikut. Target pengembangan laboratorium pakan tahun 2018 sebesar 1.400 sampel, telah terealisasi 4.465 sampel atau 318,93%.



PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT HEWAN MENULAR STRATEGIS DAN PENYAKIT ZONOSIS

Berdasarkan Permentan Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 Direktorat Kesehatan Hewan mempunyai tugas yaitu penyiapan perumusan kebijakan; pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standard prosedur, dan kriteria; pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan juga urusan ketatausahaan bidang pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan serta pengawasan obat hewan. Status kesehatan hewan dilakukan melalui kegiatan pemberantasan Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis (PHMSZ). Status kesehatan hewan tahun 2018 dengan 79% dengan capaian yang dihitung secara nasional setelah pengitungan faktor pendukung status kesehatan hewan yang dicapai pada tahun 2018 selesai.

➤ Jumlah Wilayah Bebas Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)

Penetapan daerah Wilayah Bebas Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) pada tahun 2018 terdapat realisasi yang dicapai antara lain :

- ✓ Penetapan Pulau Tarakan, Nunukan dan Sebatik, Provinsi Kalimantan Utara sebagai wilayah bebas rabies (Keputusan Menteri Pertanian Nomor 776/Kpts/PK.320/11/2018 tanggal 6 November 2018);
- ✓ Penetapan Pulau Tabuan, Provinsi Lampung bebas rabies (Keputusan Menteri Pertanian Nomor 783/Kpts/PK.320/11/2018 tanggal 12 November 2018);
- ✓ Rekomendasi penetapan bebas rabies Provinsi Papua untuk kemudian diproses dalam bentuk Keputusan Menteri Pertanian;
- ✓ Rekomendasi penetapan bebas rabies di Pulau Makalehi, Buhias, Pahepa, Tagullandang, Ruang dan Biaro, Provinsi Sulawesi Utara untuk kemudian diproses dalam bentuk Keputusan Menteri Pertanian.
- ✓ Penetapan BBPTU-HPT Baturraden sebagai kompartemen bebas brucellosis (Keputusan Menteri Pertanian Nomor 311/Kpts/PK.400/4/2018 tanggal 27 April 2018);
- ✓ Rekomendasi penetapan bebas brucellosis di Provinsi Banten untuk kemudian diproses dalam bentuk Keputusan Menteri Pertanian;
- ✓ Rekomendasi penetapan bebas brucellosis di Pulau Simeulue, Provinsi Aceh untuk kemudian diproses dalam bentuk Keputusan Menteri Pertanian

• Rabies

Rabies masih merupakan salah satu penyakit yang mendapatkan prioritas di dalam pengendaliannya di Indonesia. Target pembebasan rabies di seluruh Indonesia telah di sinkronkan dengan target yang ditetapkan oleh WHO, FAO dan OIE yaitu pada tahun 2030. Hingga tahun 2018, wilayah bebas rabies di Indonesia mencapai 163 kabupaten/kota/pulau.

• Brucellosis

Brucellosis atau penyakit keluron merupakan salah satu tantangan yang ada dalam upaya peningkatan populasi ternak di Indonesia. Target bebas brucellosis di Indonesia adalah tahun 2025. Kegiatan pengendalian brucellosis yang dilakukan

antara lain alokasi vaksin brucellosis sebanyak 54.350 dosis pada 7 provinsi. Untuk surveilans yang dilakukan, telah dialokasikan sebanyak 51.780 sampel.

- Hog Cholera

Pengendalian dan penanggulangan hog cholera yang dilaksanakan adalah vaksinasi di daerah endemis dan pengobatan hewan sakit. Tahun 2018 wilayah bebas Hog Cholera sebanyak 19 kabupaten/kota (Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2014). Pada tahun 2017 dan 2018 Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan vaksinasi secara massal. Tahun 2018 telah dilakukan vaksinasi sebanyak 45.000 dosis dari anggaran TP dan 30.000 dosis alokasi dari pusat. Adapun kegiatan surveilans hog cholera yang dilakukan sebanyak 10.889 sampel.

- Anthraks

Anthraks adalah penyakit secara epidemiologis sangat sulit untuk dibebaskan apabila suatu wilayah telah tertular, mengingat sifat bakteri penyebabnya dapat membentuk spora dan bertahan hidup dalam tanah hingga puluhan tahun. Tahun 2018, ditemukan kasus anthrax kulit pada manusia di Pacitan pada bulan Agustus namun tidak ditemukan kasus pada ternak. Pada tahun 2018, dialokasikan vaksin melalui anggaran TP sebanyak 320.000 dosis pada 8 provinsi endemis, serta surveilans sebanyak 7.543 sampel. Namun dengan adanya refocusing terkait program bekerja, terdapat perubahan alokasi terkait pengendalian anthrax pada tahun 2018.

- Avian Influenza (AI)

Wilayah kompartemen bebas AI dalam hal ini peternakan (Breeding Farm) (Grand Parent Stock farm, Parent Stock farm), Final Stock Farm dan Hatchery, tahun 2018 sebanyak 165 Unit Kompartemen Bebas AI di 10 provinsi.

Keberhasilan pengendalian dan penanggulangan serta pembebasan PHMS prioritas selengkapnya disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 37. Pembebasan PHMS Prioritas Tahun 2012-2018

No	Penyakit	Jumlah Kabupaten/Kota						
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Brucellosis	169	169	169	177	205	210	-
2	Anthrak	-	-	-	-	-	-	-
2	Rabies	163	170	173	190	192	192	-
3	Avian Influenza	-	-	-	9	21	50	-
4	Hog Cholera	-	-	18	18	-	18	-
TOTAL			332	339	360	394	470	

➤ Penanggulangan Gangguan Reproduksi

Kegiatan penanggulangan gangguan reproduksi tahun 2018 dilaksanakan oleh 8 Satker UPT Veteriner yaitu BVet Medan, BVet Bukittinggi, BVet Lampung, BVet Subang, BBVet Wates, BBVet Denpasar, BBVet Maros dan BVet Banjarbaru dengan total wilayah UPT di 27 Provinsi dengan target refocusing anggaran di bulan Juli 2018 sejumlah 190.623 ekor. Realisasi sampai dengan tanggal 20 Desember 2018 sebanyak 189.034 ekor (99,2%). Tingkat kesembuhan mencapai 74,2%, tindak lanjut kesembuhan 10.973 ekor (63,9%) dan telah dilaporkan bunting 2.066 ekor (30%) dan lahir (34,5%).

Tabel 38. Realisasi penanganan gangguan reproduksi dan tindak lanjut penanganan gangrep tahun 2018 (data per 20 Desember 2018)

No	UPT	Penanganan (ekor)	Kesembuhan (ekor)	IB (ekor)	Bunting (ekor)	Lahir (ekor)
1	BVET BANDAR LAMPUNG	9.851	5.913	2.798	629	126
2	BBVET MAROS	9.315	6.902	1.912	382	173
3	BBVET DENPASAR	11.406	9.383	6.216	2.324	845
4	BVET MEDAN	6.303	5.913	2.798	629	126
5	BVET SUBANG	2.682	1.027	736	196	148
6	BVET BUKITTINGGI	6.396	4.307	2.431	429	369
7	BBVET WATES	140.734	103.627	71.437	20.797	7.282
8	BVET BANJARBARU	2.347	835	383	140	103
	Total	189.034	137.907	88.711	25.526	9.172
	%	99,2	73,0	64,3	28,8	35,9

Tabel 39. Realisasi anggaran penanggulangan gangrep per UPT Veteriner tahun 2018 (realisasi per 30 November 2018)

No	UPT	Pagu (Rp)	Realisasi(Rp)	%	Target Output (ekor)	Realisasi (ekor)	%
1	BVET BANDAR LAMPUNG	2.857.403.000	2.060.233.789	72,1	9.000	9.851	109,5
2	BBVET MAROS	6.067.927.000	4.157.881.051	68,5	10.699	9.315	87,1
3	BBVET DENPASAR	4.369.483.000	3.350.297.156	76,7	12.450	11.406	91,6
4	BVET MEDAN	2.663.234.000	2.604.138.809	97,8	6.080	6.303	103,7
5	BVET SUBANG	882.496.000	611.106.070	69,2	2.734	2.682	98,1
6	BVET BUKITTINGGI	1.603.200.000	1.266.985.443	79,0	6.860	6.396	93,2
7	BBVET WATES	36.279.108.000	35.610.919.330	98,2	141.600	140.734	99,4
8	BVET BANJARBARU	661.900.000	622.107.170	94,0	1.200	2.347	195,6
	Total	55.384.751.000	50.283.668.818	90,8	190.623	189.034	99,2

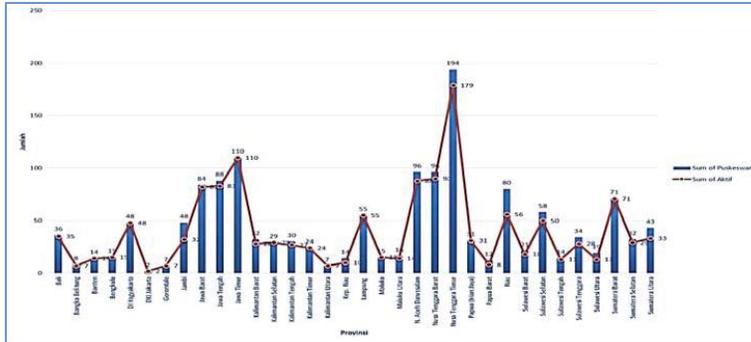
➤ Kelembagaan Puskeswan

Puskeswan merupakan pelaksana pelayanan kesehatan hewan di tingkat lapangan yang langsung melakukan pelayanan kepada masyarakat berupa tindakan pencegahan, pengobatan dan rehabilitasi medik. Jumlah Puskeswan sampai tahun 2018 sebanyak 1.603 unit Puskeswan.



Gambar 9. Perkembangan Unit Puskeswan Kurun Waktu 10 Tahun

Jumlah Puskesmas aktif hingga tahun 2018 sebanyak 1.351 unit. Dana DAK tahun 2018 alokasi Fasilitas Puskesmas sebanyak 54 unit berupa pembangunan Puskesmas dan rehabilitasi di 26 Provinsi.



Gambar 10. Jumlah Puskesmas aktif tahun 2018

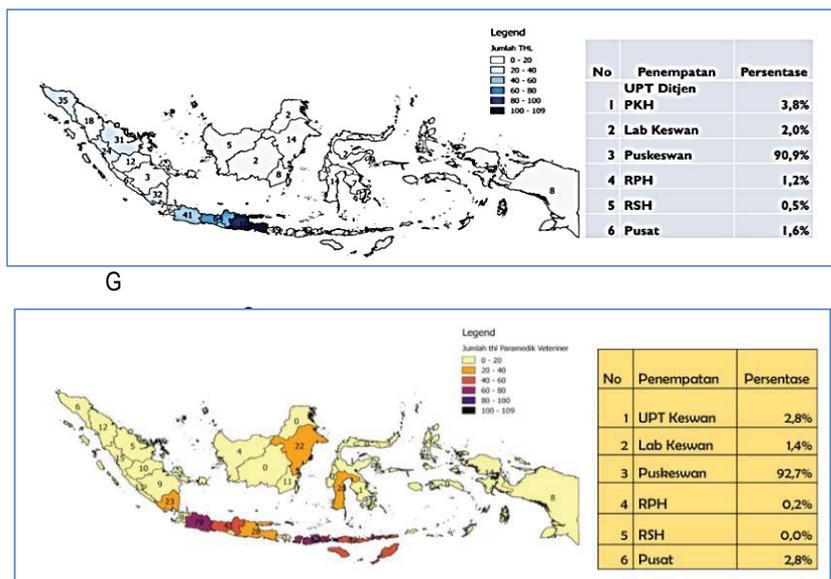
➤ Tenaga Harian Lepas (THL) Dokter Hewan dan Paramedik Veteriner

Tahun 2018 jumlah rekrutmen Tenaga Harian Lepas sebanyak 1.098 orang, terdiri dari 612 dokter hewan dan 486 paramedik veteriner mencakup 34 Provinsi.

Tabel 40. Sebaran THL Dokter Hewan dan Paramedik Veteriner 2018

NO.	PROVINSI	DOKTER HEWAN	PARAMEDIK VET	TOTAL
1	ACEH	35	6	41
2	SUMATERA BARAT	24	15	39
3	SUMATERA SELATAN	3	9	12
4	SUMATERA UTARA	18	12	30
5	BENGKULU	6	13	19
6	RIAU	31	5	36
7	JAMBI	12	10	22
8	KEPRI	1	3	4
9	LAMPUNG	33	23	56
10	BABEL	1	2	3
11	BANTEN	6	8	14
12	DKI	12	12	24
13	JAWA BARAT	41	79	120
14	JAWA TENGAH	64	41	105
15	JAWA TIMUR	109	28	137
16	DIY	47	17	64
17	BALI	39	0	39
18	NTB	34	68	102
19	NTT	21	42	63
20	GORONTALO	6	0	6
21	KALBAR	4	4	8
22	KALSEL	8	11	19
23	KALTIM	14	22	36
24	KALTENG	2	0	2
25	KALTARA	1	0	1
26	MALUKU UTARA	2	0	2
27	MALUKU	0	1	1
28	PAPUA	8	8	16
29	PAPUA BARAT	2	14	16
30	SULAWESI SELATAN	14	28	42
31	SULAWESI BARAT	3	0	3
32	SULAWESI UTARA	2	3	5
33	SULAWESI TENGAH	2	1	3
34	SULAWESI TENGGARA	7	1	8
		612	486	1098

Penempatan THL Dokter Hewan tahun 2018 sebanyak 90,9% di Puskesmas, sedangkan THL Paramedik Veteriner sebanyak 92,7% di Puskesmas.



Gambar 12. Tabel sebaran dan penempatan THL Paramedik Hewan

➤ Penyusunan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) Bidang Obat Hewan

- ✓ Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 09111/KPTS/PK.350/F/09/2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Obat Hewan Dalam Pakan Untuk Tujuan Terapi.
- ✓ Draf SNI (Standar Nasional Indonesia) tentang Persyaratan Minimum Pengujian Mutu Obat Alami Untuk Hewan.
- ✓ Draf Peraturan Menteri Pertanian tentang Pendaftaran Obat Hewan.
- ✓ Draf Peraturan Menteri Pertanian tentang Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan.
- ✓ Draf Pedoman Prosedur Tetap Pendaftaran Obat Hewan.
- ✓ Draf Pedoman Onsite Review Bidang Obat Hewan.

Tabel 41. NSPK Kelembagaan dan Sumber Daya Kesehatan Hewan

No	Regulasi	Posisi Terakhir			
		Ditkeswan	Sesditjen PKH	Biro Hukum Kementan	Kemenku mham
1.	Peraturan Menteri Pertanian tentang Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang				√
2.	Peraturan Menteri Pertanian tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner				√
3.	Peraturan Menteri Pertanian tentang Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya antar Kabupaten/kota atau Provinsi Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia		√		
4.	Pedoman Praktik Kedokteran Hewan	√			

➤ Penerbitan Sertifikat dan SK Izin Usaha Obat Hewan

Penilaian kelayakan izin usaha obat hewan pada tahun anggaran 2018, telah dilaksanakan terhadap 30 perusahaan obat hewan yang terdiri dari 6 produsen (5 izin usaha baru dan 1 izin usaha perubahan), 20 importir (18 izin usaha baru dan 2 izin usaha perubahan) dan 4 eksportir (4 izin usaha baru dan 0 izin usaha perubahan).

Tabel 42. Penerbitan Sertifikat dan SK Izin Usaha Obat Hewan

No.	Jenis Usaha	Total	Tahun 2018	
			Baru	Perubahan
1.	Produsen Obat Hewan	95	5	1
2.	Importir Obat Hewan	224	18	2
3.	Eksportir Obat Hewan	33	4	0
Total		348	27	3

➤ Pendaftaran Obat Hewan

- ✓ Pelaksanaan rapat Penilai Pendaftaran Obat Hewan (PPOH) sebanyak 27 kegiatan dan menilai sebanyak 796 dokumen obat hewan.
- ✓ Pelaksanaan rapat Komisi Obat Hewan (KOH) sebanyak 7 (tujuh) kegiatan dan mengkaji sebanyak 88 (delapan puluh delapan) sediaan obat hewan yang diajukan oleh 56 (lima puluh enam) perusahaan obat hewan.

➤ Penerbitan SK Nomor Pendaftaran Obat Hewan

- ✓ Penerbitan SK Pendaftaran Tetap Obat Hewan sebanyak 352 obat hewan yaitu 180 sediaan farmasetik, 145 sediaan premiks, 25 sediaan biologik, dan 2 sediaan obat alami.
- ✓ Penerbitan SK Pendaftaran Ulang Obat Hewan sebanyak 215 sediaan obat hewan terdiri dari 130 sediaan farmasetik, 41 sediaan premiks, 38 sediaan biologik dan 6 sediaan bahan baku.

Tabel 43. Penerbitan SK Nomor Pendaftaran Obat Hewan

No.	Jenis Sediaan	Pendaftaran Baru	Pendaftaran Ulang
1.	Farmasetik	180	130
2.	Premiks	145	41
3.	Biologik	25	38
4.	Alami	2	-
5.	Bahan baku	-	6
Total		352	215

➤ Penerbitan Surat Keterangan Pemasukan dan Pengeluaran Obat Hewan

- ✓ Penerbitan Surat Keterangan Pemasukan Obat Hewan sebanyak 7.514 surat kepada 100 perusahaan importir obat hewan. Surat Keterangan Pemasukan yang diterbitkan terdiri dari 990 sediaan biologik, 2.407 sediaan farmasetik, 5.653 sediaan premiks, 18 sediaan obat alami, 147 alkeswan, 127 bahan baku dan 8 sediaan obat hewan khusus.
- ✓ Penerbitan Surat Keterangan Pengeluaran Obat Hewan sebanyak 1.744 surat, diberikan kepada 7 perusahaan eksportir obat hewan. Surat Keterangan Pengeluaran yang diterbitkan yaitu 27 sediaan biologik, 17 sediaan farmasetik dan 1.700 sediaan premiks.

➤ Volume Ekspor Obat Hewan

Volume ekspor obat hewan pada tahun 2018 terdiri dari sediaan farmasetik 29.687 (ton), 208.421 premiks (ton) dan biologik (vaksin) 2.513.159.100 (dosis). Adapun data ekspor obat hewan yang telah dilakukan pada tahun 2018 ini yang memiliki nilai peningkatan cukup signifikan dibanding tahun 2017. Jenis obat hewan yang diekspor Indonesia ke di Afrika, Eropa, Amerika, Asia dan Australia adalah sebagai berikut :

- ✓ Vaksin : ND, IB, IBD, ILT, Coryza, EDS, Fowl Fox.
- ✓ Farmasetik : Antelmentika, Antidefisiensi, Antibakteria, Antiprotozoa, Antiseptika dan Desinfektansia.
- ✓ Premiks : Asam amino (L-Threonine, Lysine Monohydrochloride, Lysine Sulphate, L-Tryptophan), L-Arginine.

➤ Penilaian CPOHB dan Sertifikasi CPOHB

Pelaksanaan rapat Cara Pembuatan Obat Hewan Yang Baik (CPOHB) sebanyak 7 (tujuh) kegiatan menilai sebanyak 56 (lima puluh enam) pembahasan dokumen sertifikasi/resertifikasi/CAPA CPOHB produsen obat hewan. Jumlah Produsen Obat Hewan di Indonesia saat ini adalah sebanyak 95 perusahaan, sebanyak 56 diantaranya telah menerapkan CPOHB dalam proses produksinya dan telah disertifikasi, sebanyak 20 belum bersertifikat CPOHB dan sebanyak 19 perusahaan tahap proses sertifikasi.

Tabel 44. Penilaian CPOHB dan Sertifikasi CPOHB

No.	CPOHB	Total	Tahun 2018	
			Baru	Resertifikasi
1.	Bersertifikat CPOHB	56	7	6
2.	Belum Bersertifikat CPOHB	39	19	20
	Total	95		

➤ Upaya Update Perkembangan Jenis Vaksin AI

Surat Edaran Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan No. 22017/Pk.350/F/06/2018 tentang Perubahan Strain Tantang AI H5N1 Dan Penetapan Master Seed Vaksin AI H9N2.

- ✓ Penetapan strainantang baru dalam pembuatan vaksin AI H5N1
 - ✚ A/Chicken/Barru/BBVM/41-13/2013 (H5N1 Clade 2.1.3.2)
 - ✚ A/Chicken/Semarang/04141225-07/2014 (H5N1 Clade 2.3.2.1c)
- ✓ Penetapan master seed vaksin AI H9N2
 - ✚ A/Chicken/Sidrap/07170094-44O/2017
 - ✚ A/Chicken/SouthSulawesi/712P2/2017
 - ✚ A/Chicken/WestJava/BBLitvet-RI/2017

➤ Layanan Online

- ✓ Pendaftaran Obat Hewan secara online baru dilakukan secara total pada tahun 2018 dengan alamat <http://obathewan.ditjennak.pertanian.go.id>.
- ✓ Pelaporan pengawasan obat hewan secara online melalui aplikasi SIPOHOLON.
- ✓ Penerapan Standar Pelayanan Publik

➤ Proses Eksportasi

Proses eksportasi dilakukan melalui mekanisme Government to Government (G to G) antara negara pengekspor (Indonesia) dan negara pengimpor (tujuan). Pada tahun 2014 – 2018 Kementerian Pertanian telah menerbitkan 141 sertifikat kompartemen bebas Avian Influenza (AI) pada 141 unit usaha perunggasan dari 17 perusahaan perunggasan.

➤ Data Ekspor dan Hatching Egg (Telur Tetas)

Ekspor telur tetas (Hatching Egg) tahun 2018 menurun dibanding tahun 2017, data dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 45. Data Ekspor Hatching Egg (Telur Tetas)

No.	Tahun	Komoditi	Negara Tujuan	Jumlah	Satuan	Nilai Ekspor (EUR)	Estimasi Konversi Dlm Rp
1	2015	HE	Myanmar	132.500	PCE	119.000,01	2.039.065.209,90
2	2016	HE	Myanmar	4.714.794	PCE	2.657.076,67	45.529.008.756,07
3	2017	HE	Myanmar	5.449.264	PCE	3.402.930,87	58.309.220.542,33
4	2018	HE	Myanmar	186.234	PCE	217.209,04	3.721.876.900,40
TOTAL				10.482.792		6.396.216,60	109.599.171.408,70

➤ Data Ekspor Hewan Hidup Kambing dan Domba tahun 2018 ke Timor Leste, Brunei Darussalam, dan Malaysia. Data dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 46. Data Ekspor Hewan Hidup Kambing Dan Domba

No	Tahun	Komoditi	Negara Tujuan	Jumlah	Satuan	Nilai Ekspor (USD)	Estimasi Konversi Dlm Rp.
1	2014	Kambing PE	Timor Leste	110	PCE	32.117	440.000.000
3	2017	Kambing Potong	Brunei Darussalam	210	PCE	61.314	840.000.000
4	2018	Domba Potong	Malaysia	2.900	PCE	552.392	7.567.770.400
TOTAL				3.720		791.808	10.847.770.400

➤ Data Eksportasi Hewan Peliharaan dan Satwa Liar

Eksportasi Hewan Peliharaan dan Satwa Liar pada tahun 2018 salah satunya komoditas Ayam Cemani, dan Kelompok Burung ke beberapa Negara. Data ekspor ayam cemani bulan Januari-Juli 2018 sebanyak 203 ekor ke Kamboja, Belgia, Taiwan, Katar dan Korea Selatan. Data dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 47. Data Ekspor Ayam Cemani Tahun 2018

No	Nama Perusahaan	Negara Tujuan	Jumlah (Ekor)	Total Nilai Ekspor (US\$)	Estimasi Konversi dlm Rp.
1	CV. Cemani Farm	Kamboja	40	1.400	19.600.000
2	CV. Cemani Farm	Belgia	40	920	12.880.000
3	CV. Cemani Farm	Taiwan	20	700	9.800.000
4	CV. Cemani Farm	Katar	20	380	5.320.000
5	CV. Cemani Farm	Korea Selatan	40	1.080	15.120.000
6	CV. Cemani Farm	Kamboja	43	17.700	247.800.000
Total			203	22.180	310.502.000

Eksportasi burung tahun 2018 hingga bulan Juli sebanyak 410 ekor ke Malaysia, Qatar dan Bangladesh. Eksportasi hewan Luwak (Palm Civet) bulan Maret-Juni 2018 sebanyak 18 ekor. Data dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 48. Data Ekspor Luwak/Musang/Palm Civet Tahun 2018

No	Nama Perusahaan	Negara Tujuan	Jumlah (Ekor)	Total Nilai Ekspor (US\$)	Estimasi Konversi dlm Rp.
1	PT. Bunga Wangsa Sedjati (Jawa Timur Park)	Animal Source Czechia s.r.o., Czech Republic	4	413	5.988.500
2	PT. Bunga Wangsa Sedjati (Jawa Timur Park)	Sosto Zoo, Hungary	6	620	8.990.000
3	PT. Bunga Wangsa Sedjati (Jawa Timur Park)	Singapore Zoological Gardens, Singapore	8	827	11.991.500
TOTAL			18	1.860	26.970.000

Untuk ekspor hewan berang-berang/beaver small claws/Aonyx Cinerea tahun 2018 dari bulan April-Juni sebanyak 10 ekor, seperti pada tabel berikut.

Tabel 49. Data Ekspor Berang-Berang/Beaver Small Claws (Aonyx Cinerea)

No	Nama Perusahaan	Negara Tujuan	Jumlah (Ekor)	Total Nilai Ekspor (US\$)	Estimasi Konversi dlm Rp.
1	PT Kayu Alam Jaya, Jawa Timur	MAI-KO Co. Ltd, Jepang	10	620	8.990.000
2	PT Kayu Alam Jaya, Jawa Timur	MAI-KO Co. Ltd, Jepang	12	744	10.788.000
3	PT Kayu Alam Jaya, Jawa Timur	MAI-KO Co. Ltd, Jepang	10	620	8.990.000
TOTAL			32	1.984	28.768.000

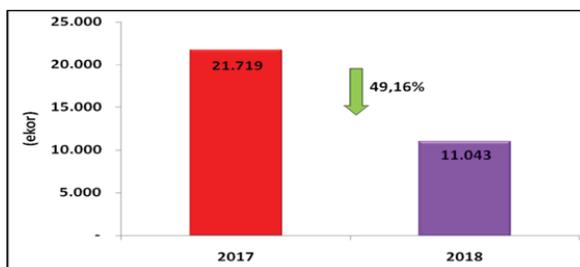
➤ Pengakuan Zona Bebas Penyakit Kuda Secara Internasional

Indonesia mendapatkan pengakuan zona bebas penyakit kuda secara internasional sebagai bentuk dukungan penyelenggaraan pertandingan cabang olahraga berkuda (Equestrian) pada Asian Games XVIII tahun 2018 di Indonesia. Pengakuan oleh Badan Kesehatan Hewan Dunia (OIE) yang telah dipublikasikan pada tanggal 20 Juli 2018 di situs resmi OIE. EDFZ Jakarta juga telah diakui oleh Uni Eropa yang tertuang dalam Commission Implementing Decision (EU) 2018, 518 pada tanggal 26 Maret 2018 dan dipublikasikan pada jurnal resmi Uni Eropa.

KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

➤ Pengendalian Betina Produktif

Kegiatan pengendalian betina produktif tahun 2018 meliputi Pertemuan dan Sosialisasi di tingkat pusat, provinsi, kab/kota, penyusunan Pedoman Kerjasama sebagai tindak lanjut dari MoU Ditjen PKH dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Baharkam Polri) serta Pengawasan dan Pengendalian Pemotongan Betina Produktif oleh Tim Terpadu di tingkat Pusat, Provinsi dan Kab/Kota. Dari kegiatan tersebut maka tahun 2019 pengendalian betina produktif ditargetkan 80 lokasi kab/kota di 32 provinsi. Pemotongan sapi dan kerbau betina produktif secara Nasional pada periode Januari sampai November 2018 sebanyak 11.043 ekor. Jumlah pemotongan tersebut menurun 49,16% dibandingkan tahun 2017 dengan rentang waktu yang sama.



Gambar 13. Pemotongan Betina Produktif Nasional Tahun Bulan Januari – November Tahun 2017 dan 2018

➤ Pembinaan Persyaratan Teknis Kesmavet pada Unit Usaha

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk menjamin ketenteraman batin masyarakat dalam mengkonsumsi produk yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH) yang dibuktikan dengan sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV). Sehubungan dengan upaya penjaminan tersebut, maka pelaksanaan pengawasan menjadi hal yang sangat penting dilakukan oleh Pemerintah. Sasaran kegiatan ini adalah sertifikasi NKV pada 134 unit usaha produk hewan di 20 provinsi meliputi Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Bali, Papua, Banten, Bengkulu dan Kepulauan Riau. Sampai dengan September 2018, dari target 134 unit usaha yang mendapatkan sertifikasi NKV telah terealisasi sebanyak 165 unit usaha (123,13%)

Tabel 50. Target dan Realisasi NKV Tahun 2018

No	Provinsi	Target Pembinaan Provinsi			Target NKV	Realisasi sd September 2018
		RPH	Unit Usaha PH	Total		
1	Sumatera Barat	2	6	8	6	0
2	Lampung	2	8	10	6	7
3	Banten	3	14	17	12	30
4	Jawa Barat	6	14	20	12	12
5	Jawa Tengah	7	13	20	12	8
6	DI Yogyakarta	2	15	17	8	3
7	Jawa Timur	3	17	20	12	16
8	Bali	1	11	12	9	8
9	Kalimantan Selatan	1	2	3	2	1
10	Kalimantan Barat			0	6	6
11	Kalimantan Timur		15	15	6	6
12	Sulawesi Selatan	2	3	5	3	4
13	Sulawesi Utara	1	9	10	6	3
14	Gorontalo			0	2	0
15	Papua	1	6	7	3	1
16	Bengkulu	2	3	5	3	3
17	Sumatera Utara		10	10	6	0
18	Sumatera Selatan		3	3	2	2
19	Kep. Riau	1	10	11	6	7
20	DKI Jakarta		20	20	12	48
	Total	34	179	213	134	165

- Pengawasan Keamanan Produk Hewan
(Pengawasan unit usaha produk hewan dan produk hewan)

Pengawasan keamanan produk hewan telah dilakukan dan dikoordinasikan Direktorat Kesmavet. Dan secara terpadu dilaksanakan bersama Badan Karantina Pertanian, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama, LPPOM MUI, Kepolisian serta Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di Provinsi/Kabupaten/Kota.

- Produk hewan yang memenuhi persyaratan keamanan pangan

Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan terkait dengan pengujian keamanan dan mutu produk hewan guna melindungi kesehatan konsumen dari bahaya cemaran mikroba dan/atau residu di dalam produk hewan (daging, susu, telur serta produk olahannya) sehingga konsumen memperoleh kualitas produk yang sesuai dengan syarat mutu. Realisasi sampel tahun 2018 adalah 23.640 sampel yang telah dikoleksi dan diuji oleh UPT dan Provinsi (Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, Bali, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sumatra Utara, Kepulauan Riau, Aceh) .

Tabel 51. Target dan Realisasi Sampel 2018

No	Nama Satker	Target Sampel	Realisasi sampel
1	BPMSPH	10.185	12.393
2	BBVET Maros	3.150	886
3	BBVET Wates	835	894
4	BBVET Denpasar	1.900	1.724
5	Bvet Bukittinggi	870	1.196
6	Bvet Banjarbaru	412	443
7	Bvet Subang	1.600	2.382
8	Bvet Lampung	370	623
9	Bvet Medan	1.600	457
10	Provinsi	2.640	2.640
	Total	23.562	23.638

- Pemantauan Hewan Kurban

Upaya penjaminan keamanan dan kelayakan daging kurban pada Hari Raya Idul Adha Tahun 2018/1439 H, dilakukan penerapan kesejahteraan hewan oleh Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai Pelaksana Kegiatan pengawasan pelaksanaan hewan Kurban. Kegiatan yang dilaksanakan:

- ✓ Peningkatan kewaspadaan zoonosis terhadap hewan/ternak serta pengawasan pelaksanaan pemantauan kurban 1439 H di 34 Provinsi. ;
- ✓ membantu pemantauan hewan kurban di daerah oleh Balai Besar Veteriner dan Balai Veteriner serta BPMSPH berkoordinasi dengan dinas peternakan dan kesehatan hewan di wilayah kerja masing-masing.
- ✓ Rapat koordinasi pemantauan hewan kurban 1439 H yang dilaksanakan pada Rabu, 1 Agustus 2018 dalam rangka memperoleh informasi kesiapan masing-masing wilayah;
- ✓ Pelaksanaan Kurban tahun 1439 H/tahun 2018 di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten akan diturunkan sebanyak 2.698 Petugas.
- ✓ Sosialisasi Pemotongan Hewan Kurban, Jumat, 1 Agustus 2018 di lokasi model pemotongan hewan kurban Yayasan Pesantren Al-Azhar Sentra Primer, Jakarta Timur.

➤ Pengendalian Resistensi antimikroba

Pengakuan regional dan internasional kepada Pemerintah Indonesia dalam upaya pengendalian Resistensi Antimikroba (AMR) di sub sektor peternakan dan kesehatan hewan diberikan oleh Third World Network(TWN) dalam acara Regional Workshop Antibimicrobial Resistance (AMR) Asia Tenggara di Penang-Malaysia tanggal 26-28 Maret 2018. Program yang dijalankan adalah surveilans resistensi antimikroba dilaksanakan melalui isolasi bakteri dari hewan dan produk hewan secara nasional.

➤ Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan

Kesejahteraan hewan di Indonesia masuk dalam ranah hukum pidana sejak zaman kolonial dan dituangkan dalam perundangan RI. Upaya yang dilaksanakan yaitu, Edukasi penerapan kesejahteraan hewan pada kegiatan Indonesian Rare Disorders (IRD) 2018 dan World Rabies Day 2018; Edukasi pemeliharaan hewan kesayangan pada Indopet Expo dan Agrivaganza 2018; Advokasi penerapan kesejahteraan hewan pada peternakan, perdagangan daging anjing, penerapan kesejahteraan hewan pada hewan laboratorium.

EKSPOR PRODUK HEWAN

Penyusunan Peraturan Perundangan dan Kebijakan Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner:

- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 23/Permentan/P.K.210/5/2018pd.410/8/201 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34/Permentan/Pk.210/7/2016 Tentang Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, Dan/Atau Olahannya Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
- Rancangan Peraturan Menteri Pertanian Tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV)
- Rancangan Peraturan Menteri Pertanian Tentang Registrasi Produk Hewan.
- Rancangan Permentan tentang Pedoman Penerapan Kesejahteraan Ternak Ruminansia
- Kaji ulang Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 4971/Kpts/Ot.140/12/2013 tentang Penetapan Zoonosis Prioritas
- Rancangan Peraturan Menteri Pertanian Tentang Pemasukan Dan Pengeluaran Produk Hewan Dari Dan Ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia

PENGEMBANGAN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL TERNAK

➤ Penyediaan dan Distribusi Semen Beku, N₂ Cair dan Kontainer

Salah satu faktor pendukung keberhasilan UPSUS Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting (Upsus Siwab) adalah terjaminnya distribusi dan ketersediaan semen beku dan N₂ cair di lapangan. Data kumulatif tahun 2018 dari Dinas Peternakan Provinsi hingga tanggal 31 Desember 2018, jumlah distribusi semen beku yang telah diterima oleh provinsi dari Balai Inseminasi Nasional dan Daerah adalah sebanyak 4.795.440 dosis atau 95,397% dari target hibah 5.027.278 dosis. Jumlah semen beku yang telah didistribusikan oleh provinsi ke kabupaten/kota sebanyak 4.916.299 dosis atau 96,20% dari target distribusi 5.110.401 dosis, dan jumlah pengadaan N₂ cair yang telah terealisasi adalah sebanyak 1.376.029 liter atau 100,15% dari target pengadaan 1.373.943 liter. Jumlah N₂ cair yang telah didistribusikan oleh provinsi ke kabupaten/kota sebanyak 1.390.750 liter atau 94,13% dari target distribusi 1.477.436 liter. Data dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 52. Total Penerimaan dan Distribusi Semen Beku Tahun 2018*)

Uraian	Target	Realisasi	Persentase
APBN			
Penerimaan (Dosis)	5.027.278	4.795.440	95,39%
Distribusi (Dosis)	5.110.401	4.916.299	96,20%
APBD			
Distribusi (Dosis)	53.31	23.643	43,97%

Keterangan:

- ✓ Realisasi penerimaan adalah jumlah semen beku yang telah diterima oleh Provinsi dari Balai Inseminasi Nasional/Daerah.
- ✓ Target Distribusi adalah target semen beku yang akan didistribusikan oleh Dinas Provinsi ke Kabupaten/Kota yang berasal dari hibah tahun 2018 dan sisa pengadaan tahun 2017.
- ✓ Realisasi Distribusi adalah jumlah semen beku yang telah didistribusikan oleh Dinas Provinsi ke Kabupaten/Kota yang berasal dari hibah tahun 2018 dan sisa pengadaan tahun 2017.

Tabel 53. Realisasi Pengadaan dan Distribusi N2 Cair Tahun 2018 *)

Uraian	Target	Realisasi	Persentase
APBN			
Pengadaan (Liter)	1.373.943	1.376.029	100,15%
Distribusi (Liter)	1.477.436	1.390.750	94,13%
APBD			
Distribusi (Liter)	91.100	54.148	59,44%

Keterangan:

- ✓ Target pengadaan merupakan jumlah target pengadaan N2 cair oleh Dinas Provinsi.
- ✓ Target Distribusi adalah target N2 cair yang akan didistribusikan oleh Dinas Provinsi ke Kabupaten/Kota yang berasal dari hibah tahun 2018 dan sisa pengadaan tahun 2017
- ✓ Realisasi Distribusi adalah jumlah N2 cair yang telah didistribusikan oleh Dinas Provinsi ke Kabupaten/Kota yang berasal dari hibah tahun 2018 dan sisa pengadaan tahun 2017.

Stok semen beku hingga tanggal 31 Desember 2018 adalah 1.750.765 dosis dan stok N2 cair adalah sebanyak 517.807 liter. Sebagian besar status ketersediaan semen beku di provinsi berlebih. Hal ini terlihat dari peta ketersediaan semen beku yang hampir seluruhnya berwarna hijau, hanya Provinsi Lampung yang masih cukup namun harus segera order (kuning) dan Bali dan Maluku yang ketersediaannya kurang (pink).

Tabel 54. Stok nasional semen beku dan N2 Cair per tanggal 31 Desember 2018)

Jumlah	Stok APBN	Stok APBD	Stok Nasional (APBN+APBD)
Semen Beku (Dosis)	1.710.265	40.500	1.750.765
N2 Cair (Liter)	490.571	27.236	517.807

Gambar 14. Peta Ketersediaan Semen Beku

Status ketersediaan N₂ cair per tanggal 31 Desember 2018, 61,76 % aman, dan 38,24% dalam keadaan kurang (tabel berikut):



Tabel 55. Status Ketersediaan N2 Cair di Provinsi

No	Status	Persentase	Provinsi
1	Berlebih (hijau)	61,76 %	Aceh, Banten, DI. Yogyakarta, Jambi, JABAR, JATENG, JATIM, KALSEL, KALTENG, NTB, SULBAR, SULTRA, SUMBAR, SUMUT, SUMSEL, KALTIM, Lampung, Maluku, Papua, SULSEL,
3	Kurang (pink)	38,24%	Riau, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Bengkulu, DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur,



Gambar 15. Peta Ketersediaan N2 Cair

CAPAIAN UPSUS SIWAB

Program Upsus Siwab tahun 2018 merupakan lanjutan dari program Upsus Siwab tahun 2017 yang sudah berjalan dengan baik dan mencapai target yang sudah ditetapkan. Pada tahun 2018 program Upsus Siwab ditargetkan dapat melayani ineminasi buatan 3 juta akseptor dengan tingkat kebuntingan 70% dari akseptor yang di IB dan kelahiran 80% dari akseptor yang bunting. Untuk memantau capaian kinerja Upsus Siwab, pelaporan dilakukan melalui iSIKHNAS.

➤ Pelaksanaan Pelayanan Inseminasi Buatan

Sepuluh besar provinsi dengan target akseptor tertinggi adalah Jawa Timur, Jawa Tengah, Lampung, Jawa Barat, Sumatera Utara, DI Yogyakarta, NTB, Sumatera Barat, Bali dan Sulawesi Selatan. Daerah tersebut merupakan daerah sentra peternakan dengan sistem pemiliharaan intensif dan semi intensif. Berdasarkan regional maka target akseptor tersebar terdapat di Pulau Jawa 71% dari target nasional, selanjutnya Sumatera 16%, Bali Nusra 6%, Sulawesi 5%, Kalimantan 2% dan Maluku Papua 0,32%.

➤ Akseptor dan Pelayanan IB

Kinerja IB sampai dengan Desember tahun 2018 mencapai 4.350.206 ekor akseptor terlayani atau 145,01 % dari target 3.000.000 ekor akseptor

➤ Realisasi Kebuntingan

Realisasi kebuntingan di UPSUS SIWAB 2018 mencapai 2.050.490 ekor dari target 2.100.000 (97.64 %).

➤ Realisasi Kelahiran

Realisasi kelahiran UPSUS SIWAB tahun 2018 mencapai 1.828.082 ekor dari target 1.680.000 ekor (108,81 %).

CAPAIAN BEKERJA

Untuk meningkatkan efektifitas upaya penanggulangan kemiskinan, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, yang bertujuan untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan. Implementasinya dengan tugas fungsi dan kewenangan di Kementerian Pertanian yaitu Permentan No.27/PERMENTAN/RC.120/5/2018 tentang Pedoman Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (Bekerja) Berbasis Pertanian, terdapat empat intervensi kegiatan yang ditetapkan yaitu:

- a) Padat karya (cash for work).
- b) Penanganan Stunting.
- c) Pengentasan daerah rentan rawan pangan.
- d) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Rastra.

Pelaksanaan Bantuan Pemerintah program Bekerja berbasis pertanian Tahun Anggaran 2018 mencakup empat tahapan: penetapan penerima bantuan, pengadaan, penyaluran, dan pendampingan.

Lokasi Program Bekerja Kementerian Pertanian tahun 2018 mengacu pada kabupaten sasaran Rumah Tangga Miskin (RTM) penerima manfaat berdasar pada Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin yang telah. Lokasi kegiatan Bekerja tahun 2018 meliputi 10 provinsi, 21 kabupaten, 60 kecamatan/cluster dengan target penerima manfaat sebanyak 200.000 RTM target, di mana masing-masing RTM mendapatkan 50 ekor ayam/itik, pakan dan obat dan vitamin.

Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan melaksanakan kegiatan Bekerja melalui bantuan ternak dan pendampingan di 6 Provinsi, 14 kabupaten, 38 kecamatan dan 524 desa dengan target 120.000 RTM dan jumlah bantuan ayam/itik 6 juta ekor dengan lokasi sebagai berikut :

Kegiatan Bekerja Tahun 2018

No	Provinsi	Kabupaten	RTM	Alokasi Ayam (Ekor)
1	Jawa Tengah	Brebes	28.460	1.423.000
		Purbalingga	9.500	475.000
		Banyumas	9.300	465.000
2	Jawa Timur	Bondowoso	12.915	645.750
		Lumajang	14.000	700.000
		Jember	20.000	1.000.000
3	Banten	Pandeglang	1.700	85.000
4	Sulawesi Selatan	Tana Toraja	3.800	190.000
		Toraja Utara	1.400	70.000
		Bone	4.300	215.000
		Takalar	2.500	125.000
		Soppeng	4.500	225.000
5	Sumatera Selatan	Oki	5.932	296.600
6	Kalimantan Selatan	HSU	1.693	84.650
TOTAL			120.000	6.000.000

Tabel 55. Realisasi Distribusi Ayam/Itik, Pakan, Obat-obatan dan Vitamin sampai dengan 30 Desember 2018, sebagai berikut :

Tabel 56. Realisasi Distribusi Ayam/Itik Kegiatan Bekerja Tahun 2018

No	Provinsi	Kabupaten/Kecamatan Distribusi Kegiatan	Target Berdasarkan Hasil Verifikasi RTM	Realisasi Distribusi Ayam/Itik	Persentase (%)
1	Jawa Tengah	Purbalingga	440.300	440.300	100,00
		Banyumas	462.500	462.500	100,00
		Brebes	1.423.000	1.423.000	100,00
2	Banten	Pandeglang	85.000	85.000	100,00
3	Kalimantan Selatan	HSU	78.550	78.550	100,00
4	Sumatera Selatan	OKI (Kec.Teluk Gelam)	92.750	92.750	100,00
		OKI (Kec.Lempuing Jaya)	196.600	196.600	100,00
5	Jawa Timur	Bondowoso	568.250	568.250	100,00
		Lumajang	553.350	553.350	100,00
		Jember	633.000	633.000	100,00
6	Sulawesi Selatan	Toraja Utara	70.000	70.000	100,00
		Tana Toraja	190.000	189.550	99,76
		Takalar	125.000	104.951	83,96
		Soppeng	225.000	175.450	77,98
15		Bone	215.000	104.950	48,81
TOTAL			5.358.300	5.277.700	98,49

Tabel 57. Realisasi Distribusi Pakan Program Bekerja Tahun 2018

No	Provinsi	Kabupaten/Kecamatan Distribusi Kegiatan	Target Distribusi Pakan (Hasil Lelang)	Realisasi Distribusi Pakan	Persentase (%)
1	Jawa Tengah	Kab. Purbalingga	2.641.800	2.641.800	100,00
		Kab. Banyumas	2.775.000	2.775.000	100,00
		Kab. Brebes	7.115.000	7.115.000	100,00
2	Banten	Kab. Pandeglang	510.000	510.000	100,00
3	Kalimantan Selatan	Kab. Hsu	397.000	397.000	100,00
4	Sumatera Selatan	Kab. Oki (Kec. Teluk Gelam)	494.500	494.500	100,00
		Kab. Oki (Kec. Lempuing Jaya)	1.572.800	1.572.800	100,00
5	Jawa Timur	Kab. Bondowoso	3.409.500	3.409.500	100,00
		Kab. Lumajang	3.320.100	3.320.100	100,00
		Kab. Jember	2.532.000	2.532.000	100,00
6	Sulawesi Selatan	Kab. Toraja Utara	420.000	420.000	100,00
		Kab. Takalar	750.000	750.000	100,00
		Kab. Tana Toraja	1.140.000	1.031.900	90,52
		Kab. Bone	1.290.000	838.300	64,98
		Kab. Soppeng	1.350.000	415.900	30,81
Total			29.717.700	28.223.800	94,97

Tabel 58. Realisasi Distribusi Obat dan Vitami Program Bekerja Tahun 2018

No	Provinsi	Kabupaten/Kecamatan Distribusi Kegiatan	Target Distribusi Obat Dan Vitamin (Hasil Lelang)	Realisasi Distribusi Obat Dan Vitamin	Persentase (%)
1	Jawa Tengah	Kab. Purbalingga	8.806	8.806	100,00
		Kab. Banyumas	9.250	9.250	100,00
		Kab. Brebes	28.460	28.460	100,00
2	Banten	Kab. Pandeglang	1.700	1.700	100,00
3	Kalimantan Selatan	Kab. Hsu	1.571	1.571	100,00
4	Sumatera Selatan	Kab. Oki (Kec. Teluk Gelam)	1.635	1.635	100,00
		Kab. Oki (Kec. Lempuing Jaya)	3.932	3.932	100,00
5	Jawa Timur	Kab. Bondowoso	11.365	11.365	100,00
		Kab. Lumajang	11.067	11.067	100,00
		Kab. Jember	12.660	12.660	100,00
6	Sulawesi Selatan	Kab. Toraja Utara	1.400	1.400	100,00
		Kab. Takalar	2.500	2.500	100,00
		Kab. Tana Toraja	3.800	3.798	99,95
		Kab. Bone	4.300	3.880	90,23
		Kab. Soppeng	4.500	3.074	68,31
Total			106.946	105.098	98,27

G. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Dan Sarana Pertanian

Dukungan Program “Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian” Tahun 2018 dilakukan melalui kegiatan strategis, di antaranya : (1) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier, (2) Pengembangan Sumber Air, (3) Pembangunan Embung Pertanian, (4) Cetak Sawah, (5) Optimalisasi Lahan, (6) Bantuan Alat dan Mesin Pertanian (TR2, TR4, Pompa Air, Rice Transplanter, Grain Seeder, Excavator, Corn Planter, Cultivator), dan (7) Asuransi Usaha Tani (Asuransi Usaha Tani Padi/AUTP dan Asuransi Usaha Ternak Sapi/AUTS). Pencapaian sasaran strategis program tahun 2018 yang ditetapkan adalah meningkatnya produktivitas pertanian melalui terlaksananya penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian. Dukungan program tersebut tertuang dalam Kontrak Perjanjian Kinerja Ditjen PSP dengan Menteri Pertanian. Capaian indikatornya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 59. Capaian Indikator Kinerja, Sasaran Program Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2018

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Kategori		
1	Tersedianya infrastruktur pertanian yang sesuai dengan kebutuhan	1 Rasio rehabilitasi jaringan irigasi tersier terhadap total irigasi tersier yang dibutuhkan	33.00	%	126.68	%	Sangat Berhasil
		2 Rasio areal pertanian yang mendapat supply air terhadap total luas areal pertanian	1.55	%	92.62	%	Berhasil
		3 Rasio ketersediaan alat dan mesin pertanian (Alsintan) pra panen berdasarkan kebutuhan	62.00	%	111.18	%	Sangat Berhasil
		4 Rasio luas baku lahan pertanian yang tersedia terhadap kebutuhan	97.67	%	107.43	%	Sangat Berhasil
2	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan pupuk bersubsidi dalam memenuhi kebutuhan pangan strategis nasional	5 Rasio ketersediaan pupuk bersubsidi terhadap total kebutuhan pupuk nasional untuk meningkatkan produktivitas pangan strategis nasional	67.00	%	97.27	%	Berhasil
3	Meningkatnya dukungan pembiayaan pertanian dalam mendukung penerapan pengelolaan pertanian terpadu di pedesaan	6 Rasio pelaku usaha pertanian binaan yang mendapat pembiayaan terhadap total pelaku usaha pertanian binaan	80.00	%	217.50	%	Sangat Berhasil
4	Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	7 Nilai AKIP Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian	83.00	nilai	101.22	%	Sangat Berhasil
		8 Nilai Kinerja (NK) berdasarkan PMK 249 tahun 2011	80.00	nilai	93.96	%	Berhasil

Dari tabel pengukuran tabel tersebut telah memenuhi target sasaran yang telah ditetapkan.

Program yang telah dilaksanakan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian difokuskan untuk mendukung pembangunan empat sub sector komoditas pertanian, yaitu tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Dampak program PSP ini dapat dilihat pada peningkatan produktivitas dan peningkatan Indeks Pertanaman (IP), sehingga diharapkan mampu memberikan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan bagi petani.

Dukungan yang diberikan berupa pengembangan dan pengelolaan air secara efektif dan efisien untuk kegiatan pertanian berkelanjutan serta pengembangan sistem pembiayaan usaha pertanian yang fleksibel dan sederhana.

Selain itu, Direktorat Jenderal PSP juga mendukung pengembangan sistem mekanisasi pertanian melalui kebijakan pengembangan, pengawasan dan kelembagaan alat dan mesin

pertanian yang sesuai dengan arah pembangunan pertanian, dan pengembangan pemanfaatan lahan rawa melalui kegiatan optimasi lahan rawa dan rawa pasang surut.

➤ **Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian**

Ketersediaan air irigasi untuk proses produksi pertanian secara berkelanjutan diupayakan melalui pengelolaan secara partisipatif oleh kelembagaan kelompok tani/gapoktan dan P3A/GP3A baik secara langsung maupun tidak langsung yang diharapkan akan berdampak positif terhadap kinerja sistem produksi pertanian. Upaya menjamin ketersediaan air irigasi untuk pertanian dalam jangka panjang dan berkelanjutan harus dilakukan melalui strategi pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana irigasi pertanian ditingkat usaha tani secara terintegrasi dengan sumber air dari jaringan primer dan sekunder.

Dukungan anggaran APBN Tahun 2018 sebagian besar dialokasikan untuk Bantuan Pemerintah (Banper) melalui Dana Tugas Pembantuan di Daerah untuk pembangunan Infrastruktur Air Irigasi yaitu Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier, Pengembangan Irigasi Perpompaaan/Irigasi Perpompaaan, Pengembangan Irigasi Rawa, dan Pengembangan Embung/Dam Parit/Long Storage.

✓ **Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT)**

Rehabilitasi Jaringan irigasi Tersier meningkatkan Intensitas Pertanaman (IP), tahun 2018 kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi tersier melalui dana tugas pembantuan dilaksanakan di 28 Provinsi dan 237 Kabupaten mencapai sebesar 134.561 ha atau 99,90 % dari target 134.700 ha.

✓ **Pengembangan Irigasi Perpompaaan/ Perpompaaan**

Kegiatan Pengembangan Irigasi Perpompaaan/Perpompaaan dimaksudkan untuk meningkatkan intensitas pertanaman (IP) sebesar 0,5 pada lahan sawah serta meningkatkan ketersediaan air sebagai suplesi pada lahan pertanian. Tahun 2018, jumlah bangunan dan peralatan pelengkap nya pemanfaatan sumber air yang dibangun melalui kegiatan Pengembangan Irigasi Perpompaaan/Perpompaaan dilaksanakan di 29 Provinsi dan 275 Kabupaten sebanyak 1.064 unit atau 99,34 % dari target 1.071 unit. Target renstra 2015-2019 kegiatan Pengembangan perpompaaan/perpompaaan sebesar 4.195 unit, telah dilaksanakan kegiatan Pengembangan Perpompaaan/Perpompaaan pada tahun 2016-2018 sebanyak 3.098 unit atau mencapai 73,85%.

✓ **Pengembangan Embung/Dam Parit/Long Storage**

Kegiatan bangunan Konservasi air dan antisipasi anomali iklim dilaksanakan dalam bentuk kegiatan fisik berupa kegiatan Embung, Dam Parit dan Long Storage. Tahun 2018 kegiatan Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim melaksanakan kegiatan Embung/Dam Parit/Long Storage di seluruh Indonesia sebanyak 400 unit dengan realisasi sebanyak 399 unit atau 99,75%, dilaksanakan di 266 kabupaten pada 32 propinsi.

➤ **Perluasan Dan Perlindungan Lahan Pertanian**

Ketersediaan lahan merupakan salah satu faktor utama dan strategis dalam pembangunan pertanian dalam rangka mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional, serta meningkatkan produksi pertanian (pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan).

- ✓ Kegiatan Perluasan dan Perlindungan Lahan sampai akhir tahun 2018 seluas 9.472 ha dari target seluas 12.000 ha (78,94%). Sedangkan realisasi saprodi setara dengan 9.865 Ha, capaian ini termasuk kategori “berhasil”
- ✓ Kegiatan Optimasi Lahan Rawa, terbagi menjadi tiga kegiatan, yakni optimasi lahan rawa, pilot percontohan model pertanian terpadu HPS 2018, dan optimasi lahan menuju organik. Alokasi kegiatan optimasi lahan rawa totalnya yaitu 43.500 ha yang tersebar di 8 provinsi dan 31 kabupaten, kegiatannya telah terealisasi secara fisik sebesar 32.790 Ha (75,38%). Pilot Percontohan Model Pertanian Terpadu dalam rangka Hari Pangan Sedunia Kabupaten Barito Kuala TA. 2018 seluas 750 ha yang bertempat di 1 provinsi 1 kabupaten, telah terealisasi sebesar 750 Ha (100%). Kegiatan optimasi lahan sawah menuju organik totalnya yaitu 40.000 ha yang bertempat di 1 provinsi dan 12 kabupaten, terealisasi secara fisik kegiatannya sebesar 36.107 Ha (90,27%). Realisasi kegiatan per 31 Desember 2018 adalah 69.647 ha (82,67%) dari target 84.250 ha, capaian ini termasuk kategori “berhasil”

➤ Pupuk Dan Pestisida

Pengembangan dan penyediaan prasarana dan sarana pertanian pada aspek pupuk dan pestisida adalah :

- a) Memfasilitasi penyediaan pupuk bersubsidi dan pestisida sesuai azas 6 (enam) tepat (jenis, jumlah, tempat, waktu, mutu dan harga).
- b) Meningkatkan pengawasan atas penyediaan, penyimpanan, dan penggunaan pupuk dan pestisida.
- c) Meningkatkan pelayanan pendaftaran pupuk dan pestisida.
- d) Mendorong peran serta masyarakat dan stakeholder terkait dalam penyediaan dan pengawasan pupuk dan pestisida.

Kegiatan berkaitan Pupuk dan Pestisida tahun 2018 meliputi :

- ✓ Penyaluran Pupuk Bersubsidi
Pada tahun 2018 pemerintah mengalokasikan pupuk bersubsidi sebanyak 9.550.000 ton sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/SR.310.310/12/2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2018 yang direvisi dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/SR.310/11/2018 tanggal 30 November 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/SR.310/12/2017 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2018.

Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani yang telah bergabung dalam kelompok tani yang telah menyusun RDKK, yaitu : petani yang melakukan usaha tani pada sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dengan luasan maksimal 2 (dua) hektar setiap musim tanam, dan petambak (sub sektor perikanan budidaya) dengan total luasan maksimal 1 (satu) hektar setiap musim tanam. Realisasi pupuk bersubsidi sampai tanggal 31 Desember 2018 sebesar 9.351.563 ton atau mencapai 97,92%.

- ✓ Implementasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Menggunakan Kartu Tani
Sebagai upaya menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani dan menindaklanjuti rekomendasi Litbang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), maka dilakukan uji coba penerapan kartu tani sebagai alat penebusan pupuk bersubsidi oleh petani di pengecer resmi. Sehingga diharapkan penyaluran pupuk bersubsidi akan lebih terjamin

dan tepat sasaran bagi para petani yang berhak menerima. Tahun 2018 uji coba di 10 Provinsi yaitu : Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Aceh, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tengah. Sasaran akan ditingkatkan pada tahun 2019 yaitu akan dilakukan di 19 Provinsi lainnya. Program kartu tani ini melibatkan beberapa instansi terkait, yaitu : Kementerian Koordinator Perekonomian; Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Badan Usaha Milik Negara; Kementerian Perdagangan; Kementerian Keuangan; Kementerian Pertanian, Gubernur dan Bupati/Wali Kota.

➤ Alat Dan Mesin Pertanian

Untuk mendukung pengembangan mekanisasi pertanian, Ditjen PSP mengalokasikan APBN Tahun 2018 guna penyediaan alsintan traktor roda 2 dan traktor roda 4 untuk tanaman pangan beserta kelengkapannya; alsintan berupa pompa air dan mini excavator untuk mendukung ketersediaan air irigasi; alsintan untuk mempercepat proses penanaman berupa rice transplanter beserta kelengkapannya; alsintan untuk mendukung pengolahan tanah komoditas hortikultura berupa cultivator serta alat untuk pengendalian OPT berupa hand sprayer.

Realisasi fisik bersumber DIPA Ditjen PSPPusat untuk tahun 2018, target sebanyak 170.893 unit dengan realisasi sebanyak 142.693 unit (83,50%) dan realisasi penyaluran alsintan sebanyak 140.987 unit (98,8 %) dari kontrak yang telah disepakati. Sedangkan yang bersumber DIPA Ditjen PSP alokasi dana Dekon (DK)/Tugas Pembantuan (TP) Daerah, sebanyak 65.098 unit, sampai dengan akhir Desember 2018 realisasi kontrak alsintan sebanyak 65.077 unit (99,97%).

Untuk kelancaran kegiatan APBN bantuan alat dan mesin pertanian ditetapkan nama UPJA/Poktan/Gapoktan penerima bantuan alsintan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota.

➤ Pembiayaan Pertanian

Sektor pertanian memiliki potensi yang besar dalam memberikan kontribusi pembangunan nasional. Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, diperlukan adanya dukungan aspek pembiayaan yang berasal dari beberapa sumber permodalan/pembiayaan sehingga tercapai tujuan pembangunan pertanian yang tepat sasaran dan berkelanjutan. Permasalahan utama yang dihadapi petani dalam melaksanakan usaha taninya adalah kesulitan dalam akses terhadap sumber-sumber atau fasilitasi pembiayaan serta keterbatasan lembaga sosial ekonomi yang mampu menyediakan modal dan mendorong pertumbuhan ekonomi petani.

✓ Fasilitasi Pembiayaan Pertanian TA. 2018

Tahun 2018, Direktorat Pembiayaan Pertanian mendapat dukungan anggaran dalam fasilitasi pembiayaan sebesar Rp 197.686.850.000,00 terdiri dari Asuransi Usaha Tanaman Padi senilai Rp 145.862.000.000,00, Asuransi Usaha ternak Sapi senilai Rp.21.146.500.000,00, dan Layanan dan pembinaan Kegiatan Pembiayaan pertaniannya senilai Rp.30.678.350.000,00. Untuk realisasi fisik kegiatan fasilitasi pembiayaan pertanian, baik Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) maupun Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS), masing-masing telah terealisasi sebesar 806.199,6 Ha dengan target 1.000.000 Ha dan 88.673 ekor dengan target 12.000 ekor. Persentase keberhasilan pelaksanaan kegiatan AUTP Tahun 2018 adalah 80,62% dan AUTS Tahun 2018 adalah 73,89%.

Fasilitasi Pembiayaan Pertanian			
Kegiatan	Target	Realisasi	%
AUTP *)	145.862.000.000	117.718.019.619	80,71
AUTS**)	21.146.500.000	15.519.120.175	73,39
Fasilitasi Teknis dan Dukungan Kegiatan Lingkup Pembiayaan Pertanian***)	30.678.350.000	25.856.911.705	84,28
Total	197.686.850.000	159.094.051.499	80,48

Tabel 60. Fasilitas Pembiayaan Pertanian

✓ Fasilitasi Pembiayaan Petani Swadaya (FPPS)

Fasilitator Pembiayaan Petani Swadaya (FPPS) adalah tenaga swadaya yang mendampingi petani/ kelompok tani/gapoktan/pelaku usaha pertanian untuk bisa akses pelayanan perbankan/ lembaga keuangan.FPPS ini menjadi salahsatu kegiatan yang dilaksanakan oleh Ditjen Prasarana dan Sarana.Dari pelaksanaan kegiatan FPPS di lapangan telah tercapai akselerasi penyaluran KUR di 20 propinsi dengan pelaku usaha pertanian binaan. Akses kredit program melalui KUR sebanyak 1.095 pelaku usaha dari target 800 pelaku usaha (136.88%). Adapun total kredit yang dicairkan senilai ± Rp.44.62 Milyar. Pelaksanaan kegiatan FPPS ini memberikan kontribusi terhadap percepatan penyaluran KUR sektor pertanian kepada 1.095 pelaku usaha tani binaan sehingga membantu penyediaan modal bagi usaha tani.

➤ Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya

Dalam rangka mencapai swasembada padi, jagung dan kedelai, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian memberikan dukungan manajemen dan dukungan teknis pada kegiatan-kegiatan yang telah diprogramkan. Pendampingan dan dukungan manajemen diperlukan untuk mengatur dan mengarahkan agar penggunaan segala sumber daya berjalan secara efisien dan efektif. yang pelaksanaannya meliputi mulai dari proses perencanaan hingga implementasi kegiatan.

Uraian kegiatan yang berada dalam lingkup satker pusat terkait dukungan manajemen dan dukungan teknis yang mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Ditjen PSP antara lain percontohan pembangunan dam parit/long storage, padat karya produktif infrastruktur, pilot project optimalisasi lahan responsive gender, kegiatan penyediaan sarana pemberdayaan masyarakat berbasis pertanian pada fasilitasi penyediaan sarana pendukung program bekerja, dan fasilitasi kegiatan Ditjen PSP mendukung swasembada pangan.

✓ Percontohan Pengembangan Dam Parit/Long Storage

Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Pusat kegiatan pengembangan dam parit/long storage tahun 2018 kepada kelompok tani sebagai penerima manfaat sebanyak 268 kelompok pada 56 kabupaten yang tersebar di 17 propinsi dengan persentase keberhasilan pelaksanaan kegiatan 87,09%.

✓ Padat Karya Produktif Infrastruktur

Arah pembangunan pertanian ke depan sesuai agenda prioritas kabinet kerja yang tertuang dalam Nawa Cita adalah mewujudkan kedaulatan pangan.

Dalam pencapaian Nawa Cita, Ditjen PSP diluar program regularnyamelakukan Kegiatan Padat Karya Produktif Infrastruktur/Prasarana dan Sarana Pertanian, diantaranya pekerjaan pengelolaan air irigasi, pengelolaan dan perluasan lahan, penyediaan alat dan mesin pertanian, fasilitasi pupuk dan pestisida, serta fasilitasi pembiayaan pertanian dan telah dilaksanakan berhasil di 14 propinsi antara lain : Aceh, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Gorontalo sebagai banper Pilot Percontohan Padat Karya Prasarana dan Sarana Pertanian.

- ✓ Pilot Project Optimalisasi Lahan Responsive Gender
kegiatan Pilot Project Optimalisasi Lahan Responsive Gender di Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian sampai dengan akhir bulan Desember sudah terealisasi 100%. Kegiatan ini termasuk kedalam aspek kegiatan Pengarustamaan Gender (PUG) melalui pengintegrasian ternak itik dan kambing dengan areal tanaman pangan/hortikultura dengan perincian bantuan ternak itik. Tahun 2018, kegiatan dilaksanakan di Provinsi Sumatera Utara (Kab. Tanah Karo), Jawa Barat (Kab. Bandung, Kab. Ciamis, Kab. Kuningan, Kab. Cirebon), Jawa Tengah (Kab. Banjarnegara, Kab. Banyumas, Kab. Klaten, Kab. Semarang, Kab. Kebumen) dan Nusa Tenggara Barat (Kab. Sumbawa).
- ✓ Kegiatan Penyediaan Sarana Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pertanian pada Fasilitasi Penyediaan Sarana Pendukung Program Bekerja
Program #BEKERJA dilaksanakan untuk memastikan pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan berbasis pertanian selaras dengan Nawacita ke-5, yaitu peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia. Tahun 2018 dalam rangka mendukung program #BEKERJA, Ditjen PSP memberikan bantuan penyediaan sarana kandang ayam/itik di lokasi penerima bantuan. Hasil verifikasi Tim Bekerja Ditjen PSP dengan Dinas Pertanian yang membidangi Peternakan Jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) sebanyak 169.131 RTM, terbagi menjadi 1.997 UPKK.

H. Pelaksanaan Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-Industri Berkelanjutan

Penelitian Dan Pengembangan Tanaman Pangan

Kegiatan penelitian dan pengembangan tanaman pangan pada TA 2018 dilaksanakan di Puslitbangtan Bogor, BBPadi Sukamandi, Balitkabi Malang, serta Balitsereal Maros dan Lolit Tungro Lanrang yang keduanya berlokasi di Sulawesi Selatan. Masing-masing memiliki tugas dan fungsi spesifik sesuai Satuan Kerja.

- Varietas Unggul Baru Padi Purwa
Dirilis dengan SK Mentan No: 324/Kpts/TP.010/5/2018. Varietas purwa merupakan padi ketan dengan potensi hasil 6,7 ton/ha dan rata-rata hasil 4,9 ton/ha.
- CVUB Kedelai Derek 1
Calon Varietas Unggul Baru (CVUB) kedelai Derek 1 telah disidangkan pada sidang pelepasan varietas di depan Tim TP2V pada tanggal 3 Oktober 2018. Derek 1 merupakan hasil seleksi persilangan Tanggamus dengan Anjasmoro, yang memiliki keunggulan: potensi hasil 3,56 t/ha dengan rata-rata hasil 2,61 t/ha.
- CVUB Jagung Komposit Sinhas 1
CVUB jagung Sinhas 1 berumur sedang 101 hari, dengan hasil tinggi pada kondisi lingkungan dan pemeliharaan optimum potensi hasil 10,71 ton/ha.
- Perakitan paket teknologi budidaya padi sawah produksi tinggi ramah lingkungan (Isabela)
Teknologi ini dikembangkan dalam demfarm seluas 56 hektar di Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Tujuan utama demfarm tersebut untuk mempercepat proses diseminasi sekaligus memperkenalkan teknologi budidaya padi produksi tinggi, spesifik agro-ekosistem (Tepat-Sae) untuk peningkatan produksi padi di lahan sawah tadah hujan dengan teknologi intensifikasi sebar benih langsung (Isabela). Hasil panen ubinan Inpari 42 Agritan GSR 7,2 t/ha GKP lebih tinggi dengan rata-rata produksi wilayah tersebut 5,1 t/ha.
- Susu beras fortifikasi
Susu beras adalah minuman yang dibuat dari ekstrak beras, produk samping produksi beras kelas mutu premium yaitu beras patah dan menir sebagai bahan bakunya. Susu beras fortifikasi BB Padi ini sudah didaftarkan untuk mendapatkan hak paten.
- Optimalisasi Produktivitas Padi Rawa Mendukung Kedaulatan Pangan dan Swasembada Beras Nasional
Hasil kegiatan Optimalisasi Produktivitas Padi Rawa Mendukung Kedaulatan Pangan dan Swasembada Beras Nasional telah menghasilkan teknologi sistem produksi padi sawah pasang surut intensif, super dan aktual (RAISA).
- Kondisi pertanaman di Sumatera Selatan
Tanam telah dilakukan pada bulan Juli 2018 menggunakan alat tanam amator modifikasi. Pendekatan metode dari hambur menuju mekanisasi baik tegel maupun legowo 2:1. Varietas yang digunakan: Inpari 22 (tahan blas), Inpara 2, 3, dan 8. Biotara, kapur

Kelas Benih	Target (Ton)	Realisasi (Ton)
S	15	16,12
FS	20	59,48
SS	45	42,67
Total	80	118,27

dan dosis pemupukan sesuai rekomendasi PUTR diterapkan dalam denfarm ini untuk seluruh petani.

Sampai dengan akhir tahun 2018 telah diproduksi benih sumber padi, sereal dan tanaman aneka kacang dan ubi sebanyak 175,78 ton atau 108,50% dari target 162 ton untuk mendukung kebutuhan benih sumber di 34 provinsi di Indonesia. Selain hal tersebut telah diproduksi benih sumber padi FS tahan penyakit tungro sebanyak 30,31 ton untuk penyediaan dan penyebarluasan benih sumber padi tahan tungro khususnya daerah-daerah yang merupakan endemik tungro.

- Benih Sumber Sereal
Puslitbangtan melalui UPBS Balitsereal tahun 2018 telah memproduksi benih sumber jagung dan sereal lainnya kelas BS dan FS terdiri dari Jagung/BS; Jagung/FS; dan Sorgum/BS sebanyak 28,19 ton.
- Benih Sumber Aneka Kacang Dan Umbi
Produksi benih yang dilakukan oleh UPBS Balitkabi dengan total produksi 29,469 ton meliputi :
 - ✓ Benih Inti NS : Kedelai : (Gepak Kuning, Devon 1, Devon 2, Dena 1, Detap 1, Derap 1); Kacang tanah (Hypoma 1, Hypoma 2, Hypoma 3, Takar 2, Tala 1, Talam 1, Katana 1, dan Katana 2); Kacang hijau (Vima 2, Vima 3, Vima 4 dan Vima 5); Total Benih Inti NS 3,184 ton dari target 2,0 ton.
 - ✓ Benih Penjenis (BS) Kedelai : (Anjasmoro, Dega 1, Dena 1, Devon 1, Grobogan, Deja 1, Deja 2, Demas 1, Detap 1, Devon 2, dan Gepak Kuning); Kacang tanah : (Hypoma 1, Hypoma 2, Tuban, Talam 1, Kancil, Takar 2, Tala 1 dan Tala 2); Kacang hijau : (Kutilang, Vima 1, Vima 2, Vima 3, Sampeong, Vima 4 dan Vima 5); Ubi kayu : (Darul Hidayah, Adira 1, Agritan 2, Malang 1); Ubi jalar : (Beta 1, Beta 2, Beta 3, Kidal, Papua Solossa, Sawentar, Antin 1, Antin 2, Antin 3, dan Sari); Total Benih Penjenis (BS) adalah 58.165 stek dari target 50 stek;
 - ✓ Benih dasar (FS) : Kedelai : (Anjasmoro, Dega 1, Dena 1, Dering 1, Devon 1, Devon 2, Deja 1, Deja 2, Argomulyo, Detap 1, dan Grobogan); Kacang tanah : (Kancil, Tuban, Hypoma 1, Hypoma 2, Takar 2, Talam 1, Tala 1, dan Tala 2); Kacang hijau : (Vima 1, Vima 2, Vima 3, dan Kutilang); Total Benih dasar 17,079 ton dari target 16,00 ton.

Penelitian Dan Pengembangan Tanaman Hortikultura

Kegiatan Puslitbang Hortikultura pada TA. 2018 telah mencapai kemajuan pelaksanaan kegiatan penelitian dan penunjang lainnya hingga triwulan 4, diuraikan sebagai berikut :

Jumlah varietas unggul baru tanaman hortikultura 31 VUB dari target 25 VUB dengan ketercapaian (163,16%) dengan realisasi keuangan sebesar 3,373,178,151 (98,57%). Status ke 31 VUB hortikultura tersebut adalah sebagai berikut: (a) VUB tanaman sayuran dengan target tiga VUB telah tercapai (100) (b) VUB tanaman buah tropika dari target dua VUB, capaian realisasi sebesar tiga VUB (150); (c) VUB tanaman hias telah terealisasi melebihi target, yaitu berjumlah 16 VUB (123,08%).

Beberapa VUB unggulan yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

- a) VUB bawang merah dengan nama Ambassador Agrihorti
- b) VUB mangga Agrimania
- c) Krisan Arshanti Agrihorti

- d) Jeruk keprok Topazindo Agrihorti
- Teknologi perbenihan bawang merah melalui biji botani (TSS)
Kegiatan Teknologi perbenihan bawang merah melalui biji botani;
 - Pengendalian kutu putih dan penyakit antraknosa mangga menggunakan pestisida nabati yang efektif, efisien dan ramah lingkungan
Proses penyemprotan dengan pestisida nabati pada teknologi pengendalian kutu putih dan penyakit antraknosa
 - Teknologi percepatan produksi benih anggrek *Dendrobium* melalui peningkatan laju proliferasi kalus/plb
Teknologi perbanyak klonal ini efektif dan efisien untuk perbanyak massal anggrek *Dendrobium* melalui peningkatan laju proliferasi kalus/plb airlift bioreactor, sehingga dapat memenuhi kebutuhan benih bermutu (sehat, vigor, dan seragam) dalam jumlah besar secara berkelanjutan mendukung pengembangan dan kemajuan agribisnis.
 - Uji PUKAP JESTRO-TBM pada Tanaman Jeruk Siam SITARA Tahun II dan Perakitan
Aplikasi PUKAP JESTRO-TBM dapat menghemat pupuk sebesar 25 %. formula tersebut sudah dibuat prototipenya dan selanjutnya disebut "PUKAP JESTRO-TM" (Gambar 5). Prototipe PUKAP JESTRO-TM sudah diuji coba untuk diproduksi di pabrik PT. MTI di Mojokerto, Jawa Timur dan di kaanalisis di laboratorium Tanah, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPT) Jawa Timur.

Dari kegiatan produksi benih sumber tanaman buah tropika telah dihasilkan 42.530 batang benih, yang terdiri dari 26.705 batang durian, 9.000 batang mangga, 3.000 batang manggis, 875 batang pisang, 50 batang salak, dan 2.900 batang alpukat. Pada kegiatan ini produksi benih melebihi target, yaitu dari target 40.650 batang menjadi 42.530 batang. Komoditas yang melebihi target produksi, antara lain durian, dari target 25.000 batang dihasilkan 26.705 batang, alpukat dari target 2.300 batang diperoleh 2.900 batang. Namun demikian masih terdapat kekurangan target produksi pada komoditas manggis, dari target 3.500 batang diperoleh 3.000 batang. Hal ini disebabkan oleh benih banyak mengalami kematian karena banjir dan hujan yang tinggi.

Produksi benih sumber tanaman hias tahun 2018 sebanyak 256.000 (stek/planlet) dari target 254.000 (stek/planlet) atau sebesar 100,79%. Kegiatan ini telah menghasilkan 250.000 stek (100,81%) benih sumber krisan dari target 248.000 stek; serta 6.000 planlet (100,00%) benih sumber anggrek dari target 6.000 planlet dan tanaman hias lain yang terdiri atas 530 planlet anggrek *dendrobium*, 10 planlet anggrek *phalaenopsis*, 4.650 planlet krisan, 470 planlet *anthurium*, dan 340 planlet lili.

Jumlah benih sumber tanaman jeruk dan buah subtropika yang sejumlah 9.444 batang melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 5000 batang. Benih sumber telah didistribusikan sesuai dengan pemesanan yang berasal dari instansi pemerintah maupun swasta.

Penelitian Dan Pengembangan Tanaman Perkebunan Inovasi Varietas Unggul Dan Perbenihan Perkebunan (Vub, Peta Sebaran Benih/Bibit, Teknologi Produksi Benih)

Pada Tahun Anggaran 2018, Puslitbang Perkebunan telah berhasil melepas VUB tanaman tebu, kapas, jarak keypar, tembakau, kelapa, aren, pinang, kopi, pala, lada dan *Indigofera*

- **Tebu Varietas PSMLG 1 AGRIBUN**
Varietas unggul baru tebu PSMLG 1 Agribun adalah hasil persilangan PS 951 X IRK 67-1 (Introduksi dari Jepang). VUB PSMLG 1 Agribun ini mempunyai warna batang kuning-kemerahan, tinggi tanaman mencapai 310 cm, dengan keunggulan sifat pelepah daun mudah lepas, masuk tipe kemasakan awal – tengah, daya kepras baik, kadar sabut 14,8%, dengan potensi produksi tebu 94 - 140 ton/ha, rendemen 7,5 – 10,6 %, dan produksi hablur gula 8,0 – 10,6 ton/ha.
- **Tebu Varietas PSMLG 2 AGRIBUN**
Varietas unggul baru tebu PSMLG 2 Agribun adalah hasil persilangan V M C 8 7 - 599 polycross. VUB PSMLG 2 Agribun ini mempunyai karakter warna batang kuning-kecoklatan, warna daun hijau kehijauan, tinggi tanaman mencapai 325 cm, dengan keunggulan sifat pelepah daun mudah lepas, masuk tipe kemasakan awal – tengah, daya kepras baik, kadar sabut 14,5%, dengan potensi produksi tebu 97 - 127 ton/ha, rendemen 7,2 – 10,9 %, dan produksi hablur gula 8,9 – 11,8 ton/ha.
- **Kapas Varietas Bronesia 1**
Varietas unggul baru kapas Bronesia 1 adalah hasil persilangan tunggal Kanesia 7 x RLBL dan dilanjutkan dengan pedigree. VUB ini mempunyai keunggulan percabangan kompak, warna serat Cokelat muda, potensi produksi : 1.359,7 – 2.534,6 kg kapas berbiji/ha tanpa pengendalian hama; kandungan serat 33,6 %, mutu kehalusan serat 5,7 mikroner, kekuatan serat 22,4 g/tex, panjang serat 23,9 mm, keseragaman serat 84,7 %, mulur serat 6,9 %.
- **Kapas Varietas Bronesia 2**
Varietas unggul baru kapas Bronesia 2 adalah hasil persilangan tunggal Kanesia 8 x RLBL dan dilanjutkan dengan pedigree. VUB ini mempunyai keunggulan percabangan menyebar, warna serat Cokelat muda terang (Munsell : 6,0 YR 7/6 RHS : Greyed Orange Group 165D), potensi produksi : 1.287,0 – 2.492,5 kg kapas berbiji/ha tanpa pengendalian hama; kandungan serat 34,5 %, mutu kehalusan serat 4,0 mikroner, kekuatan serat 23,7 g/tex, panjang serat 25,7 mm, keseragaman serat 84,9 %, mulur serat 5,9 %.
- **Kapas Varietas Bronesia 3**
Varietas unggul baru kapas Bronesia 3 adalah hasil persilangan tunggal Kanesia 8 x 73814 dan dilanjutkan dengan pedigree. VUB ini mempunyai keunggulan percabangan menyebar, warna serat Cokelat tua (Munsel : 5,0 YR 6/10, RHS : Greyed Orange Group 164A), potensi produksi : 1.231,3 – 2.288,3 kg kapas berbiji/ha tanpa pengendalian hama; kandungan serat 33,1 %, mutu kehalusan serat 4,1 mikroner, kekuatan serat 21,2 g/tex, panjang serat 23,2 mm, keseragaman serat 83,6 %, mulur serat 8,8 %.
- **Jarak Kepyar Varietas Asembagus 119 Agribun**
Varietas unggul baru (VUB) Jarak Kepyar Asembagus 119 Agribun memiliki rata-rata produktivitas 2.494,5 kg/ha meningkat 30,16 % dibandingkan dengan varietas Asb.81, dapat beradaptasi luas dan kadar minyak 47,89%.
- **Jarak Kepyar Varietas Asembagus 175 Agribun**
Varietas unggul baru (VUB) Jarak Kepyar Asembagus 175 Agribun memiliki rata-rata produktivitas 2.362,1kg/ha, meningkat 23,25 % dibandingkan dengan varietas Asb.81, dapat beradaptasi luas, memiliki kadar minyak 46,62%.
- **Kopi Varietas Korolla 1**
Varietas unggul baru kopi Korolla 1 memiliki warna buah muda kuning setelah tua/masak memiliki warna buah merah dan memiliki potensi produksi 2,09 kg biji/pha/thn setara 2,87

- ton biji/ha/thn dengan populasi 1.400 tanaman. Varietas ini agak tahan penyakit karat daun dan PBKo, dapat beradaptasi cukup luas 240 – 1100 dpl.
- **Kopi Varietas Korolla 2**
Varietas unggul baru kopi Korolla 2 berasal dari Tugu Jaya memiliki potensi produksi rata-rata 2,37 kg biji/phn/thn setara 3,34 ton biji/ha/thn dengan populasi 1.400 tanaman, agak tahan penyakit karat daun dan PBKo dan dapat beradaptasi cukup luas 240 -1100 m dpl.
 - **Kopi Varietas Korolla 3**
Varietas unggul baru kopi Korolla 3 berasal dari Tugu Jaya memiliki potensi produksi rata-rata 1,69 kg biji/phn/thn setara 2,36 ton biji/ha/thn dengan populasi 1400 tanaman, agak tahan penyakit karat daun dan PBKo dan dapat beradaptasi cukup luas 240 – 1100 m dpl.
 - **Kopi Varietas Korolla 4**
Varietas unggul baru kopi Korolla 4 berasal dari Tugu Jaya memiliki potensi produksi rata-rata 1,39 kg biji/phn/thn setara 1,89 ton biji/ha/thn dengan populasi 1400 tanaman, agak tahan penyakit karat daun dan PBKo dan dapat beradaptasi cukup luas 240 – 1100 m dpl.
 - **Lada Varietas Bangka**
Sesuai dikembangkan di lokasi dengan jenis tanah Podsolik merah-kuning, berpasir dengan kandungan bahan organik tinggi, Rata-rata produksi buah $8,34 \pm 46,43$ kg/pohon, rata-rata produksi lada putih $2,01 \pm 0,11$ kg/pohon dengan estimasi produksi lada putih (ton/ha) 6,03 (jarak tanam 1,8 x 1,8 m; populasi 3000 tanaman/ha; Tajar mati tinggi 3 m) sedangkan untuk kadar minyak atsiri sebanyak 2,10 % dan kadar piperin 3,15%
 - **Pala Varietas Bogor**
Asal varietas adalah seleksi populasi nama asal pala bogor dengan usulan nama Nurpakuan Agribun, dengan ketahanan terhadap penyakit agak tahan. Bentuk buah bulat, bulat oval warna kulit buah tua hijau kekuningan (YGG 152 D) warna daging buah putih dengan panjang $50,80 \pm 5,27$ mm, diameter buah $44,58 \pm 4,25$ mm tebal daging $10,56 \pm 1,82$ mm, rasa pedas dengan aroma tajam.
 - **Kelapa Dalam Varietas Ujung Kubu**
Varietas Kelapa dalam baru dengan batang pendek, jarak antar bekas daun rapat, Cepat berbuah (4 tahun mulai berbunga), Kadar minyak dan asam laurat tinggi dan spesifik lahan pasang surut, cocok sebagai bahan baku industri kelapa parut kering, santan, tepung kelapa dan VCO. Daerah sebaran di propinsi Sumatera Utara.
 - **Kelapa Dalam Varietas Odeska Lobu**
Varietas Kelapa dalam baru dengan Produksi tinggi, Kadar minyak dan protein tinggi, Buah besar dan daging buah tebal cocok sebagai sumber benih untuk pengembangan kelapa di lahan kering iklim basah dan sebagai bahan baku industri kelapa parut kering, santan, tepung kelapa dan VCO. Sebaran di Provinsi Sulawesi Utara.
 - **Kelapa Genjah Pandan Wangi**
Varietas Kelapa Genjah dengan ciri – ciri batang kecil tanpa bol, daun yang kaku, ukuran buah besar dan warna buah hijau muda dengan keunggulan aroma dan rasa pandan pada air dan daging buah, kadar kemanisan air buah juga bervariasi antara 6- 8 Brix, umur tanaman Genjah, pertambahan tinggi batang lambat dan produksi buah tinggi dengan daerah sebaran Desa Pantai Cermin Kanan, Kecamatan Pantai Cermin , Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara.

- Kelapa Genjah Entog
Varietas Kelapa Genjah dengan ciri – ciri batang kecil tanpa bol, daun yang kaku, ukuran buah besar dan warna buah hijau muda dengan keunggulan berbunga cepat, pertumbuhan tinggi batang lambat, ukuran buah yang besar, kandungan gizi daging buah yang relatif tinggi dan kadar kemanisan air buah 6 brix dengan kegunaan buah muda untuk konsumsi kelapa muda, buah tua untuk produksi santan dan benih untuk perbanyak tanaman. Penyebaran tanaman Kecamatan Alian, Kebumen, Ambal dan Mirit, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah dan Jawa Timur.
- Aren Varietas Parasi
Varietas ini dirilis pada Bulan Oktober 2018 dengan SK. Pelepasan dari Kementan Nomor. 910/Kpts/KB.310/2012/2018 tanggal 31 Desember 2018 dengan keunggulan Batang pendek, Lebih cepat berbuah dari rata - rata Aren Dalam (6 – 8 tahun). Kegunaan sebagai sumber benih tanaman dengan batang pendek dan cepat berproduksi, sebagai bahan baku pembuatan gula dan alkohol teknis dengan peta sebaran di Propinsi Banten.
- Aren Varietas Smulen ST-1
Aren Smulen ST-1 sebagai varietas unggul asal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu memiliki ciri sebagai berikut : Batang ukuran sedang, kurun tanaman relatif pendek, Cepat berproduksi umur tanaman semi genjah dengan produksi nira >15,4 liter/hari dengan lamanya waktu penyadapan >2,5 bulan/mayang
- Pinang Emas
Varietas ini mempunyai karakteristik batang pendek, jarak antar nodus/bekas daun sangat rapat (14 bekas daun per 1.5 meter batang), cepat berbunga (4-5 tahun) dan produksi tinggi mencapai 5 ton biji kering/ha/tahun. Kegunaan : sebagai sumber benih untuk pinang tipe genjah (cepat berbunga) dan berbatang pendek, sebagai tetua untuk merakit tanaman pinang hibrida dengan peta sebaran tanaman di Kota Kotamobagu, Propinsi Sulawesi Utara.
- Varietas tembakau lokal Jinten Pakpie
Varietas ini mempunyai keunggulan potensi produksi tembakau rajangan kering 1,49-2,06 ton/ha, indeks mutu 70,08-78,17, indeks tanaman 105,26-147,20, kadar nikotin 3,49-4,47% serta moderat tahan baik terhadap penyakit lanas (*P. nicotianae*) maupun terhadap penyakit layu bakteri (*R. solanacearum*). VUB tembakau lokal Jinten Pakpie ini sangat sesuai untuk lahan sawah dan tegal di Kabupaten Jombang, Lamongan dan Mojokerto.
- Varietas tembakau lokal Manilo
Varietas ini mempunyai keunggulan potensi produksi tembakau rajangan kering 1,43-2,04 ton/ha, indeks mutu 70,21-78,67, indeks tanaman 97,55-139,05, kadar nikotin 3,79-4,62%, moderat tahan terhadap penyakit lanas (*P. nicotianae*) dan tahan terhadap penyakit layu bakteri (*R. solanacearum*). VUB tembakau lokal Manilo ini sangat sesuai untuk lahan sawah dan tegal di Kabupaten Jombang.
- Varietas unggul baru tembakau lokal Tegar A1
mempunyai potensi jumlah daun 23-27 lembar dengan keunggulan potensi produksi tembakau rajangan kering 1-1,5 ton/ha, indeks mutu 212,91, indeks tanaman 97,55-139,05, kadar nikotin 5,2 %, moderat tahan terhadap penyakit lanas (*P. nicotianae*) dan penyakit layu bakteri (*R. solanacearum*). VUB tembakau lokal Tegar A1 ini sangat sesuai untuk lahan sawah dan tegal di Kabupaten Garut.

- Varietas unggul baru tembakau lokal Tegar A2 mempunyai potensi jumlah daun 23-27 lembar dengan keunggulan potensi produksi tembakau rajangan kering 1-1,55 ton/ha, indeks mutu 143, indeks tanaman 212,3, kadar nikotin 5,35 %, tahan terhadap penyakit lanas (*P. nicotianae*) dan penyakit layu bakteri (*R. solanacearum*). VUB tembakau lokal Tegar A2 ini sangat sesuai untuk lahan sawah dan tegal di Kabupaten Garut.
- Varietas unggul baru tembakau lokal Tegar D1 mempunyai potensi jumlah daun 20-22 lembar dengan keunggulan potensi produksi tembakau rajangan kering 0,8-1,4 ton/ha, indeks mutu 144,8, indeks tanaman 212,65, kadar nikotin 4,89 %, moderat tahan terhadap penyakit lanas (*P. nicotianae*) dan rentan terhadap penyakit layu bakteri (*R. solanacearum*). VUB tembakau lokal Tegar D1 ini sangat sesuai untuk lahan sawah dan tegal di Kabupaten Garut.
- Varietas unggul baru tembakau lokal Tegar D2 mempunyai potensi jumlah daun 22-23 lembar dengan keunggulan potensi produksi tembakau rajangan kering 0,8 - 1,45 ton/ha, indeks mutu 138,9, indeks tanaman 209,51, kadar nikotin 5,5 %, tahan terhadap penyakit lanas (*P. nicotianae*) dan penyakit layu bakteri (*R. solanacearum*). VUB tembakau lokal Tegar D2 ini sangat sesuai untuk lahan sawah dan tegal di Kabupaten Garut.
- Varietas unggul baru tembakau lokal Tegar J mempunyai potensi jumlah daun 21-23 lembar dengan keunggulan potensi produksi tembakau rajangan kering 0,8 - 1,4 ton/ha, indeks mutu 135,42, indeks tanaman 233,68, kadar nikotin 5,13 %, tahan terhadap penyakit lanas (*P. nicotianae*) dan penyakit layu bakteri (*R. solanacearum*). VUB tembakau lokal Tegar J ini sangat sesuai untuk lahan sawah dan tegal di Kabupaten Garut.
- Varietas unggul baru tembakau lokal Temangi mempunyai potensi jumlah daun 20-26 lembar dengan keunggulan potensi produksi tembakau rajangan kering 0,93 - 1,2 ton/ha, indeks mutu 235,35, indeks tanaman 212,85, kadar nikotin 3,9 %, rentan terhadap penyakit lanas (*P. nicotianae*) dan moderat tahan terhadap penyakit layu bakteri (*R. solanacearum*). VUB tembakau lokal Temangi ini sangat sesuai untuk lahan sawah dan tegal di Kabupaten Sumedang.
- Varietas unggul baru tembakau lokal Hanjuang mempunyai potensi jumlah daun 19-26 lembar dengan keunggulan potensi produksi tembakau rajangan kering 0,65 – 1,1 ton/ha, indeks mutu 215,54, indeks tanaman 128,16, kadar nikotin 3,5 %, rentan terhadap penyakit lanas (*P. nicotianae*) dan moderat tahan terhadap penyakit layu bakteri (*R. solanacearum*). VUB tembakau lokal Hanjuang ini sangat sesuai untuk lahan sawah dan tegal di Kabupaten Sumedang.
- Varietas unggul baru tembakau lokal Kenceh mempunyai potensi jumlah daun 20-22 lembar dengan keunggulan potensi produksi tembakau rajangan kering 0,62 – 1,2 ton/ha, indeks mutu 248,8, indeks tanaman 166,92, kadar nikotin 4,7 %, moderat tahan terhadap penyakit lanas (*P. nicotianae*) dan penyakit layu bakteri (*R. solanacearum*). VUB tembakau lokal Kenceh ini sangat sesuai untuk lahan sawah dan tegal di Kabupaten Sumedang.
- Varietas unggul baru tembakau lokal Sigalih mempunyai potensi jumlah daun 20-22 lembar dengan keunggulan potensi produksi tembakau rajangan kering 0,4 – 0,8 ton/ha, indeks mutu 176,02, indeks tanaman 117,8,

kadar nikotin 1,72 %, moderat tahan terhadap penyakit lanas (*P. nicotianae*) dan penyakit layu bakteri (*R. solanacearum*). VUB tembakau lokal Sigalih ini sangat sesuai untuk lahan sawah dan tegal di Kabupaten Majalengka.

- Varietas unggul baru tembakau lokal Citrasari
Mempunyai potensi jumlah daun 20-22 lembar dengan keunggulan potensi produksi tembakau rajangan kering 0,43 – 0,8 ton/ha, indeks mutu 172,65, indeks tanaman 71,6, kadar nikotin 2,55 %, moderat tahan terhadap penyakit lanas (*P. nicotianae*) dan penyakit layu bakteri (*R. solanacearum*). VUB tembakau lokal Citrasari ini sangat sesuai untuk lahan sawah dan tegal di Kabupaten Majalengka
- Varietas unggul baru tembakau lokal Kubangsari
Mempunyai potensi jumlah daun 20-22 lembar dengan keunggulan potensi produksi tembakau rajangan kering 0,43 – 0,8 ton/ha, indeks mutu 172,65, indeks tanaman 71,6, kadar nikotin 2,55 %, moderat tahan terhadap penyakit lanas (*P. nicotianae*) dan penyakit layu bakteri (*R. solanacearum*). VUB tembakau lokal Kubangsari ini sangat sesuai untuk lahan sawah dan tegal di Kabupaten Majalengka.

Teknologi Biopori Mendukung Pertumbuhan Tanaman Kemiri Sunan (*Reutealis trisperma* (Blanco) Airy shaw)

Prinsip kerja teknologi biopori adalah sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan yaitu mekanisme dekomposisi bahan organik oleh jasad renik yang bisa menyediakan hara bagi tanaman. Proses pengambilan hara tanaman oleh akar dimulai dari difusi, intersepsi akar dan aliran masa. Mineralisasi bahan organik dalam biopori dapat menghasilkan asam humat. Asam humat merupakan zat organik yang memiliki struktur molekul kompleks dengan berat molekul tinggi (makro molekul atau polimer organik) yang mengandung gugus aktif. Disamping itu asam organik memiliki kemampuan untuk menstimulir dan mengaktifkan proses biologi dan fisiologi pada organisme hidup. Teknologi biopori dapat digunakan untuk pembenahan tanah, sehingga pemakaian pupuk anorganik bisa dihemat terutama untuk memacu pertumbuhan dan produksi kemiri sunan. Pada percobaan penggunaan teknologi Biopori perlakuan yang diberi cacing dari jenis Afrika Crown satu lubang paralon diberi 1 ons cacing atau sebanyak 100 ekor membantu proses mineralisasi bahan organik lebih cepat karena daun kemiri sunan dimakan oleh cacing cacing tersebut. Keunggulan : Pemanfaatan daun kemiri sunan yang sudah rontok di tanah sebagai sumber bahan organik, mengais air dan pembenah tanah baik secara kimia, fisika maupun biologi tanah melalui teknologi biopori.

Teknologi produksi benih tebu G0 dengan kultur jaringan

Teknologi produksi benih tebu G0 dengan kultur jaringan ini telah dituangkan dan menjadi Instruksi Kerja Produksi Benih Sumber Tebu nomor IK.BALITTAS.UB.2.01.02 (Prosedur kerja 12 hal.). Instruksi kerja ini bertujuan agar pelaksanaan perbanyakan benih dapat dilakukan secara efektif, sehingga memenuhi persyaratan standart ISO 9001 : 2015 dan diperoleh benih tebu dengan mutu benih sesuai SNI dan keinginan pelanggan serta jumlah benih sesuai target yang ditetapkan.

Pemanfaatan Limbah Kulit Kakao sebagai Bahan Baku Pektin

Pemanfaatan tanaman kakao selama ini masih terbatas yaitu pada bijinya, sedangkan bagian lainnya seperti kulit buah dan pulp belum banyak dimanfaatkan. Kulit buah kakao merupakan salah satu sumber pektin dengan kandungan mencapai 6-12%. Pemanfaatan kulit kakao sebagai bahan baku pektin dapat mengurangi ketergantungan impor pektin dari luar negeri. Proses mengolah kulit kakao menjadi pektin melalui tahapan persiapan, ekstraksi, isolasi dan pengeringan. Dari penelitian ini didapatkan hasil rendemen yang terbaik sebesar 6,31% dengan karakter kadar air 11.96%, kadar abu 11.57%, berat ekuivalen 2.7 mg, kadar metoksil 0.57%, kadar galakturonat 39.16% dan derajat ekuivalen 258%. Keunggulan pektin dari kulit kakao ini adalah memiliki karakter berat ekuivalen yang rendah dibanding pektin komersial. Namun dilihat dari segi warna, pektin dari kulit kakao ini memiliki warna lebih gelap dibanding pektin komersial dikarenakan adanya reaksi pencokelatan pada proses persiapan bahan baku.

Pestisida Nabati Berbahan Aktif Asap Cair untuk Pengendalian PBK

Formula insektisida nabati campuran asap cair dan serai wangi dengan konsentrasi 15% (ACS15%) lebih mampu melindungi buah kakao dari serangan penggerek buah. Nilai persentase serangan penggerek buah dapat ditekan sebesar 28,68%, kerusakan di dalam biji hanya mencapai 5,68%, dengan kehilangan hasil sekitar 3,04%. Penyemprotan dilakukan tiap 2 minggu sekali. Konsentrasi 5 ml per liter. Volume semprot sekitar 250 ml/pohon. Penyemprotan dilakukan sejak buah berukuran panjang sekitar 10-15 cm sampai menjelang panen.

Insektisida nabati *Derris eliptica* terhadap hama *Brontispa*

Dari hasil penelitian ini ternyata akar tuba *Derris eliptica* sangat efektif mengendalikan larva dan imago *Brontispa longissima*. Aplikasi konsentrasi akar tuba 1,25% - 5% dengan bahan pelarut metanol dapat menyebabkan mortalitas larva dan imago mencapai 100%. Mortalitas larva dan imago mulai terjadi 1 hari setelah aplikasi. Akar tuba dengan pelarut air dapat menyebabkan mortalitas larva sampai 100%. Dari hasil pengujian, laboratorium ternyata insektisida nabati akar tuba *Derris eliptica* dengan pelarut metanol lebih efektif dibandingkan dengan pelarut air. Hasil pengujian ini perlu dilakukan pengujian lebih lanjut di lapangan untuk memastikan efektivitasnya terhadap hama *Brontispa longissima* di lapangan.

Kegiatan Bekerja Di Kabupaten Garut Tahun 2018

Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (BEKERJA) berbasis pertanian yang diluncurkan oleh Kementerian Pertanian merupakan upaya untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat miskin guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan melalui kegiatan pertanian yang terintegrasi. Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan dalam hal ini berperan sebagai Penanggung Jawab Kegiatan Program BEKERJA di Kabupaten Garut Jawa Barat yang terdiri dari 4 kecamatan (Pakenjeng, Sukaresmi, Leles dan Malangbong) di bawah koordinasi Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan selaku Penanggung Jawab kegiatan BEKERJA Provinsi Jawa Barat. Adapun bentuk bantuan yang diberikan kepada masyarakat dalam program ini adalah Ayam Kampung Unggul Balitbangtan (KUB) yang berumur 1 hari sebanyak 50 ekor beserta kandang, obat vaksin dan pakan selama 6 bulan, benih kopi, manggis, dan lain-lain untuk setiap Rumah Tangga Miskin (RTM).

Kegiatan Pendampingan Program BEKERJA dilakukan dengan mengirim Tim Pendamping dari 8 UK/UPT lingkup Balitbangtan ke wilayah tugas yang diberikan kepada Puslitbang Perkebunan yaitu Kabupaten Garut. Adapun 8 UK/UPT yang membantu dalam proses pendampingan ialah, Puslitbangtan, Puslitbanghorti, Balittri, Balitro, Balitnak, Balitklimat, dan Balitsa serta BPTP Jawa Barat selaku koordinator lapangan kegiatan di Kabupaten Garut.

Kegiatan diawali dengan melakukan verifikasi data RTM yang diterima dari Kementerian Sosial tahun 2015 untuk divalidasi kelayakannya dalam menerima bantuan di bulan Juli tahun 2018. Sebanyak 11.381 dari total 12.376 data RTM di Kabupaten Garut dinyatakan layak untuk menerima bantuan, dan 995 data RTM dinyatakan tidak layak menerima bantuan berdasarkan keadaan mereka yang sudah sejahtera dan kesiapan lahan tinggal mereka untuk menerima bantuan.

Setelah mendapatkan jumlah data RTM yang layak menerima bantuan, kemudian dilaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis mengenai pendistribusian bantuan dan pendampingan Program BEKERJA untuk seluruh UK/UPT Pendamping, tenaga teknis tingkat kecamatan dan desa, serta para RTM penerima bantuan mengenai cara merawat ayam hingga menghasilkan telur. Kegiatan bimtek tersebut dilaksanakan beriringan dengan proses distribusi bantuan selama 58 kali yang dimulai pada bulan Agustus hingga bulan Desember 2018 di 48 Desa.

Penelitian Dan Pengembangan Peternakan

Pelepasan galur sapi POGASI (sapi PO Grati hasil seleksi)

Dari target 100 jenis isolat mikroba veteriner yang terkarakteristik dan terkonservasi, sampai dengan triwulan IV telah dikonservasi 100 isolat mikroba.

Kegiatan penelitian meliputi 42 Kegiatan Peternakan dan veteriner terdiri dari 22 Kegiatan Peternakan dan 20 Kegiatan Veteriner. Sampai dengan Triwulan IV kegiatan penelitian mencapai realisasi fisik 98,75.

Bibit sumber ternak semula memiliki target sebanyak 99.827 ekor berupa 300 bibit unggul Sapi, 300 bibit unggul kambing, 98.500 bibit unggul ayam dan sisanya aneka ternak, namun adanya refocusing menjadi 65.246 ekor. Sampai dengan triwulan IV realisasi fisik 92,50% dengan realisasi anggaran 88,20 %. Penyeleksian bibit unggul terus dilakukan dengan memperhatikan manajemen pemeliharaan kandang, pakan dan kesehatan serta meningkatkan produktifitas.

Penyerahan DOC pada Program BEKERJA

Rekomendasi kebijakan pengembangan peternakan dan veteriner dengan target output semula sebanyak 7 rekomendasi menjadi 5 rekomendasi. Pada triwulan IV telah menghasilkan 5 rekomendasi yaitu mencakup (1) saran kebijakan tentang investasi pembangunan pulau karantina sapi, (2) saran kebijakan dalam program bedah kemiskinan rakyat sejahtera (Bekerja) berbasis pertanian, (3) Rancangan Undang-Undang Sistem budidaya Pertanian Berkelanjutan ditinjau dari komoditas peternakan, (4) Petunjuk Teknis Persyaratan KESWAN ternak ayam untuk mendukung program BEKERJA dengan judul Petunjuk Teknis Aspek Kesehatan Hewan ternak Ayam Mendukung Program Perbibitan Ternak Balitbangtan dan Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (#Bekerja) di Balitbangtan; dan (5) rekomendasi kebijakan mengenai penanganan antimicrobial resistance (AMR) pada ayam pedaging di Indonesia. dengan realisasi fisik sebesar 100%. Dalam upaya mendukung tahun perbibitan, Puslitbangnak membangun infrastruktur perbibitan sebanyak 75 unit menjadi 57 unit yang tersebar di UPT lingkup Puslitbangnak, sampai Triwulan IV terealisasi sebesar 97,25 %.

Sebagian besar dialokasikan untuk penyediaan bibit ternak, sarana dan prasarana di KP Balitnak, lokit Sapi dan lolit Kambing. Untuk menghasilkan bibit yang akan disebar kepada masyarakat, pada TA 2018 Puslitbangnak mempunyai target output 126.893 ekor bibit ternak berupa 126.883 ekor ayam KUB dan 100 ekor sapi potong, terealisasi fisik senilai 95,67%, sampai dengan triwulan IV, sudah dilakukan penyebaran bibit kambing Boerka di kabupaten Ponorogo, ayam KUB ke Sumatera Selatan, NTB, Jawa Barat serta Itik Mojomaster ke Lampung Selatan.

Penelitian/Perekayasaan Dan Pengembangan Mekanisasi Pertanian Rekayasa Mesin Pembuat Guludan, Galengan dan Panen Bawang Merah

Produksi bawang merah akan semakin cepat apabila penyiapan lahan cepat dilakukan. Selama ini penyiapan lahan untuk pengolahan tanah pertama (pengangkatan dan pembalikan tanah) dan pengolahan tanah kedua (penghancuran tanah) sudah dilakukan dengan traktor. Tetapi pembuatan guludan, saluran air (got) dan galengan masih dilakukan secara manual. Dalam produksi sayuran, tenaga kerja dan waktu merupakan faktor yang sangat menentukan. Untuk mensiasati hal tersebut, diperlukan mesin panen bawang merah untuk meningkatkan efisiensi waktu dan tenaga kerja juga dapat menekan biaya panen.

➤ Alsin Pembuat Guludan

Alsin penggulud yang akan dikembangkan merupakan modifikasi dari rotary dengan penambahan bagian untuk pengarah dan pemadat tanah sehingga dapat terbentuk guludan. Namun demikian dalam penggunaannya nanti, lahan harus terolah sempurna.

Prototipe alsin pembuat guludan sudah di uji pada beberapa lokasi yaitu di Serpong (Banten), Lembang (Jawa Barat) dan Klaten (Jawa Tengah). Hasil guludan sangat dipengaruhi oleh kondisi tanah yang harus terolah sempurna.

➤ Uji Lapang Alsin Pembuat Guludan

Hasil uji lapang menunjukkan bahwa kapasitas lapang penggunaan alsin penggulud ini adalah 5,02 jam/ha dengan lebar guludan dapat diatur 80 – 100 cm, dengan kedalaman guludan 30,19 cm dan lebar alur 43,8 cm.

➤ Alsin Pembuat Pematang

Adapun desain alsin pembuat pematang yang dikembangkan dapat dilihat pada gambar 4. Pada prinsipnya alat ini terdiri dari pisau rotari untuk memopong dan melempar tanah, bagian untuk membentuk alur dan bagian penekan berbentuk roller untuk meratakan dan memadatkan pematang yang sudah terbentuk.

Hasil uji lapang menunjukkan bahwa kapasitas maupun kualitas pematang yang dihasilkan sangat bervariasi tergantung jenis dan kondisi tanah, seperti kadar air dan tingkat kegemburan tanah (kualitas hasil pengolahan tanah).

➤ Alsin Pemanen Bawang

Alsin pemanen bawang yang dikembangkan merupakan alsin pemanen bawang untuk lahan kering. Untuk lahan sawah belum bisa digunakan karena guludannya masih terlalu tinggi (1-1,3 m), sehingga tidak memungkinkan untuk beroperasinya traktor. Lebar kerja pemanenan alsin ini sekitar 80 – 100 cm, dengan kecepatan sekitar 1,5 – 2 km/jam. Dengan kondisi di atas, kapasitas lapang pemanenan dengan alsin ini sekitar 0,12 ha/jam (8jam/ha) – 0,2 ha/jam (5 jam/ha).

➤ Pengembangan Autonomous Tractor

Pengembangan autonomous traktor empat roda (traktor empat roda otonom) untuk pengolahan tanah oleh BBP Mektan ini dirancang dengan kebaruan dibandingkan penelitian sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk membuat traktor otonom yang dapat melakukan pengolahan lahan sesuai dengan peta perencanaan dengan akurasi 5-25 cm. Sistem navigasi yang digunakan berbasis GPS-RTK. Sistem kontrol pada traktor terdiri atas pengendalian stir, gas, persneling maju mundur, gigi 1 dan 1, rem (kanan dan kiri), kopling serta untuk mematikan engine. Sedangkan untuk aplikasi pengolahan lahan digunakan pengendalian implemen dan PTO.

Penelitian Dan Pengembangan Bioteknologi Dan Sumberdaya Genetik Pertanian

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian pada TA 2018. Realisasi fisik output sumber daya genetik yang terkarakterisasi dan terdokumentasi sebesar 100%. Target jumlah SDG yang terkarakterisasi dan terdokumentasi adalah 1.150 akses.

Realisasi fisik output galur harapan unggul tanaman sebesar 100%. Sebanyak 9 kegiatan perakitan VUB melalui pendekatan bioteknologi berhasil merealisasikan sasaran jumlah galur harapan unggul tanaman sebanyak 22 galur atau 100% dari target 22 galur.

Realisasi fisik output teknologi berbasis bioteknologi dan bioprospeksi sebesar 100%. Kegiatan perakitan teknologi berbasis bioteknologi dan bioprospeksi memiliki 5 sasaran utama, yaitu (1) Peta genetik resolusi tinggi (fine mapping) karakter ketahanan terhadap WBC, (2) Peta genetik ketahanan penyakit antraknosa pada cabai, (3) Konstruksi CRISPR/Cas9 untuk pengeditan gen-gen terkait perbaikan sifat produktivitas padi (TGW6, Gn1, dan DEP1) dengan potensi hasil >10 ton/ha, (4) Teknik pengendalian penggerek pucuk dan batang tebu dengan feromon seks, dan (5) Teknologi kultur in vitro untuk peningkatan toleransi terhadap cekaman abiotik pada batang bawah jeruk.

➤ Peta Genetik Resolusi Tinggi (fine mapping) Karakter Ketahanan terhadap WBC

Peta genetik lokasi gen ketahanan terhadap WBC (Gambar 1) diidentifikasi pada varietas padi lokal Untup Rajab yang bersifat tahan WBC populasi hama. Padi Untup Rajab diketahui tahan terhadap dua populasi wereng yang berasal dari dua daerah yang berbeda. Pembuatan peta genetik dilakukan dengan pendekatan menganalisis genotipe individu F2 hasil persilangan Untup Rajab dengan varietas TN1 menggunakan marka SNP yang tersebar di kromosom tanaman padi dan uji fenotipe ketahanan dari individu-individu tanaman tersebut terhadap WBC populasi lapang. Jumlah individu F2 yang digunakan untuk penelitian genotiping sebanyak 115 individu dengan menggunakan 7.098 marka SNP yang tersebar pada 12 kromosom padi. Peta yang sudah diperoleh menunjukkan lokasi gen ketahanan terhadap wereng cokelat terdapat pada kromosom 8, dengan LOD sekitar 5,24.

➤ Peta Genetik Ketahanan Penyakit Antraknosa pada Cabai

Cabai merupakan salah satu komoditas penting di Indonesia. Salah satu penyakit penting cabai adalah antraknosa yang bisa menyerang sejak fase bibit. Untuk cabai, populasi F6 dan F7 hasil persilangan tetua peka (Kencana) dan tahan (0207) penyakit antraknosa. Penyebab penyakit antraknosa adalah cendawan *Colletotrichum* spp. Kendala tersebut dapat diatasi dengan galur-galur yang tahan terhadap penyakit tersebut. Pemetaan genetik lokus yang terkait dengan gen ketahanan terhadap penyakit antraknosa penting dilakukan

untuk dipakai sebagai alat seleksi pada saat perakitan tanaman cabai tahan antraknosa. Pada kegiatan pembuatan peta genetik ketahanan penyakit digunakan populasi F6 dan F7 hasil persilangan Kencana × 0207. Peta genetik cabai berdasarkan SNP hasil mass array pada 180 nomor populasi F2 hasil persilangan Kencana dan 0207. Analisis data menunjukkan beberapa marka ada yang terpaut dengan sifat ketahanan cabai terhadap penyakit antraknosa.

➤ **Konstruksi CRISPR/Cas9 untuk Pengeditan Gen-gen Terkait Perbaikan Sifat Produktivitas Padi (TGW6, Gn1, dan DEP1) dengan Potensi Hasil >10 Ton/Ha**

Teknik pengeditan genom tanaman (genome editing) saat ini telah mulai banyak digunakan untuk memperbaiki tanaman. Tanaman padi juga telah menjadi objek penelitian menggunakan metode pengeditan genom tersebut. Salah satu sifat yang bisa diperbaiki pada padi adalah sifat produktivitas padi. Padi yang memiliki produktivitas rendah bisa ditingkatkan dengan cara memperbanyak jumlah anakan produktif dengan cara menurunkan tinggi tanaman padi, sehingga hasil fotosintesis yang biasanya untuk menghasilkan batang bisa dialihkan untuk menghasilkan anakan yang lebih banyak. Pada tahun 2018 telah dilakukan penelitian dengan teknik ini menggunakan target gen seperti pada Tabel 3. Contoh hasil mengedit genom pada tanaman padi disajikan pada Gambar 3.

Tabel 61. Target gen pada padi untuk mutasi menggunakan teknik CRISPR.

Nama gen	Produk gen	Fungsi	Keterangan
Sd1	Protein GA20ox-2	Enzim kunci dalam biosintesis hormon pertumbuhan tanaman giberelin	Mutasi delesi pada gen GA20ox-2 menghasilkan adanya kodon stop prematur, yang menyebabkan penurunan jumlah hormon GA20, dan menyebabkan postur tanaman padi menjadi pendek
Gn1a	cytokinin oxidase/dehydrogenase2 (OsCKX2)	Regulates grain number per panicle	The nonfunctional allele of Gn1a increased grain number per panicle, resulting in increased yield (Ashikari et al. 2005)

➤ **Teknik Pengendalian Penggerek Pucuk dan Batang Tebu dengan Feromon Seks**
Alat perangkap feromon seks pada tanaman tebu

Hama penggerek pucuk tebu (*Scirpophaga excerptalis*) dan penggerek batang tebu (*Chilo sacchariphagus*) merupakan hama utama pada pertanaman tebu. Penggunaan insektisida biasanya tidak efektif karena hama masuk ke dalam batang tanaman. Oleh karena itu, pengendalian dengan teknologi feromon seks diharapkan bisa mengatasi masalah tersebut. Penelitian pemasangan perangkap feromon seks yang dilakukan di PT PG Subang, di Desa Pasirbungu, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Subang, Jawa Barat menunjukkan adanya variasi jumlah hama yang terperangkap dengan variasi komposisi dan variasi jumlah perangkap. Hal ini menunjukkan feromon seks untuk hama penggerek pucuk dan penggerek batang tebu ini sangat efektif menekan populasi serangga hama tersebut.

➤ **Teknologi Kultur In Vitro untuk Peningkatan Toleransi terhadap Cekaman Abiotik pada Batang Bawah Jeruk**

Teknologi kultur in vitro pada jeruk telah dimanfaatkan untuk mendapatkan galur yang toleran terhadap cekaman abiotik. Batang bawah yang digunakan adalah jeruk Japanese

Citroen (JC). Bahan yang digunakan adalah embrio nuselar globular jeruk JC yang diradiasi dengan sinar gamma.

Pada tahun 2018 ada tiga rekomendasi yang dihasilkan BB Biogen. Satu rekomendasi terkait dengan analisis kebijakan yang dilaksanakan oleh BB Biogen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian dan dua rekomendasi terkait dengan keanekaragaman hayati.

- **Kebijakan Pengembangan Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian**
Analisis kebijakan ini diperlukan untuk mengantisipasi isu di bidang bioteknologi, khususnya produk rekayasa genetik pertanian yang telah beredar dan dimanfaatkan di wilayah Indonesia. Hal ini harus dilakukan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik yang berisi perlunya mengatur pengawasan dan pengendalian tanaman PRG pertanian yang beredar dan dimanfaatkan di wilayah Republik Indonesia dengan Peraturan Menteri Pertanian. Pada tahun 2018 telah dihasilkan draft Peraturan Menteri Pertanian tentang Pengawasan dan Pengendalian Varietas Tanaman Produk Rekayasa Genetik Pertanian yang Beredar dan Dimanfaatkan di Wilayah Republik Indonesia.
- **Kebijakan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati**
Di dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Dari pasal tersebut maka diketahui bahwa semua keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia sepenuhnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi berupa keanekaragaman sumber daya genetik, spesies, dan ekosistem. Sumber daya genetik atau dikenal dengan plasma nutfah yang berupa materi genetik yang berasal dari tanaman, hewan, dan mikroorganisme yang mengandung unit fungsional pewarisan sifat yang bernilai nyata atau potensial. Saat ini perkembangan teknologi dan minat internasional terhadap produk-produk alami (natural products) meningkat cukup tinggi menjadikan keanekaragaman hayati memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Pada tahun 2018, BB Biogen selaku sekretariat Komisi Nasional Sumber Daya Genetik berkontribusi aktif dalam memberikan rekomendasi terhadap dua Rancangan Undang-Undang, yaitu Rancangan Undang-Undang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan dan Rancangan Undang-Undang Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik. Rancangan Undang-Undang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan masuk ke dalam Prolegnas 2018 dan nantinya merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman yang masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan zaman dan kebutuhan hukum di masyarakat saat ini. Dalam penyusunannya, Kementerian Pertanian bersama dengan Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melakukan rapat kerja di Komisi IV DPR RI. Di dalam Rancangan Undang-Undang ini terdapat beberapa substansi baru antara lain berkaitan dengan pertanian konservasi, pemanfaatan air, SDGP, dan pemuliaan oleh petani kecil dalam negeri. Rancangan Undang-Undang Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik merupakan target kerja Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan masuk ke dalam Prolegnas tahun 2015–2019.

Penelitian Dan Pengembangan Pasca Panen Pertanian

Penelitian Dan Pengembangan Pasca Panen Pertanian tahun 2018 melaksanakan 14 kegiatan penelitian dan pengembangan pascapanen tahun 2018, dengan rincian hasil kegiatan sebagai berikut:

- a) Peningkatan Nilai Tambah Produk Olahan Susu di Sentra Produksi melalui Penerapan Inovasi Starter dan Rennet Indigenous.
- b) Implementasi Teknologi Pengemasan dan Penanganan Transportasi Buah Tropis untuk Ekspor.
- c) Teknologi Produk Intermediate Kentang.
- d) Model Teknologi Ripening untuk Meningkatkan Mutu dan Nilai Tambah Komoditas Buah Tropis.
- e) Pengembangan Model Kawasan Akselerasi Diversifikasi Pangan Lokal.
- f) Teknologi Penyimpanan dan Pengemasan Beras dan Perangkat Uji Mutu Beras Portable.
- g) Pengembangan Teknologi Produk Cepat Saji dari Komoditas Pangan Lokal.
- h) Teknologi Produksi Biopestisida, Biopreservatif dan Penggumpal Lateks dari Asap Cair Limbah Sekam Skala Pilot.
- i) Teknologi Pembuatan Biokalium dari Limbah Pertanian dan Aplikasinya untuk Substitusi Bahan Kalium Impor.
- j) Pengembangan Perangkat Uji Teknologi Deteksi Aflatoksin pada Jagung dan Pala di Tingkat Petani.
- k) Model Teknologi Penanganan Cabai Segar Melalui Penyimpanan Controlled Atmosphere di Tingkat Petani/Pengumpul.
- l) Pemantapan Bioindustri Cabai dan Bawang Merah.
- m) Pengembangan Model Bioindustri Padi di Wilayah Lahan Sawah Pasang Surut.
- n) Pengembangan Model Produksi Nanobiosilika dari Sekam Padi untuk Industri.

Model Bioindustri Padi Terpadu

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian-Kementerian Pertanian melalui Balai Besar Litbang Pascapanen Pertanian, telah mengembangkan kawasan bioindustri padi di beberapa daerah, salah satunya pada tahun 2018 di Desa Telang Rejo, Kecamatan Muara Telang, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. BB Pascapanen bekerja sama dengan industri produsen mesin penggilingan padi produksi dalam negeri (PT. Cimoni) dan Pemerintah Kabupaten Banyuasin menyediakan bantuan satu set konfigurasi Auto-Pneumatic System Rice Milling Unit (AP-RMU) berkapasitas 1,5 ton/jam. Dua unit mesin pengering gabah berbahan bakar pemanas sekam masing-masing berkapasitas 6 ton/muat, satu set proses produksi pupuk biosilika cair, satu set proses produksi asap cair dari pembakaran sekam, dan satu set proses pengolahan bekatul.

Bioindustri padi terpadu ini dikembangkan untuk meningkatkan penjualan beras melalui peningkatan rendemen giling dan kualitas beras. Hasil samping dari penggilingan padi seperti

sekam padi digunakan sebagai energi pemanas pengeringan gabah, abu sekam diolah menjadi pupuk biosilika cair. Silika dari abu sekam digunakan oleh industri berbasis karet karena memiliki kelebihan yaitu tidak berwarna hitam, partikelnya sangat halus, khususnya kekuatan tensil, ketahanan robek, ketahanan abrasi dan kekerasan. Nanobiosilika dari sekam padi diberi perlakuan aditif Si-69 untuk memperbaiki sifat vulkanisat yang digunakan untuk barang jadi karet, antara lain sol sepatu karet.

Aplikasi nanobiosilika serbuk pada bahan baku karet

Asap pembakaran sekam dapat ditangkap menjadi asap cair yang dapat digunakan sebagai bahan penggumpal (koagulan) latek, bahan pengawet makanan (biopreservatif) untuk pengawetan ikan di pengguna, dan biopestisida untuk menanggulangi hama pada tanaman padi di lahan petani. Bekatul dapat diolah menjadi aneka olahan produk pangan sehat berserat tinggi, seperti cookies dan geplak bekatul.

Deteksi Kit Aflatoksin Berbasis Android

Metode penentuan deteksi cepat cemaran aflatoksin pada bahan pangan sangat diperlukan terutama di tingkat petani dan pabrik pakan yang memerlukan keputusan dalam waktu cepat terkait kesesuaian spesifikasi bahan baku pakan dalam proses pembelian bahan. Dalam kondisi tersebut deteksi cemaran aflatoksin tidak memungkinkan untuk dilakukan analisa secara detail di laboratorium yang membutuhkan waktu cukup lama. Pada tahun 2018, BB Pascapanen melakukan pengembangan perangkat uji deteksi cemaran aflatoksin generasi 2 untuk jagung dan pala skala petani. Perangkat generasi 2 yang telah dikembangkan menggunakan pendekatan image processing dan artificial neural network, sehingga dapat meningkatkan konsistensi hasil pengukuran, meningkatkan kecepatan pengukuran, dan meningkatkan kemudahan analisis dan preparasinya. Kit ini berfungsi dengan baik dan memiliki kemampuan dalam mengenali pendaran aflatoksin sebesar 100% dan validasinya 99%. Uji aplikasi deteksi cepat aflatoksin ini dapat dioperasikan menggunakan komputer yang dilengkapi dengan kotak pengambilan citra. Teknologi ini telah disosialisasikan ke Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, secara rutin melakukan pengawasan terhadap keamanan pangan segar. Uji coba juga dilakukan di lapang pada kualitas jagung di sentra produksi jagung diantaranya di Tuban Jatim, bersama Gabungan Pengusaha Pakan Ternak (GPMT), PT Greenfield, Direktorat Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Perdagangan, Kemenko Perekonomian, Dinas Pertanian Propinsi Jawa Timur, dan Dinas Pertanian Kabupaten Tuban, serta Kelompok Tani di Desa Merak Urak dan Desa Monthong, Kabupaten Tuban. Selain sosialisasi di lapang, Deteksi Kit Aflatoksin juga telah dideseminasikan pada pameran Soropadan Expo di Temanggung Jawa Tengah, seminar Internasional ICAPHP di Bali, pameran di Banten, dll.

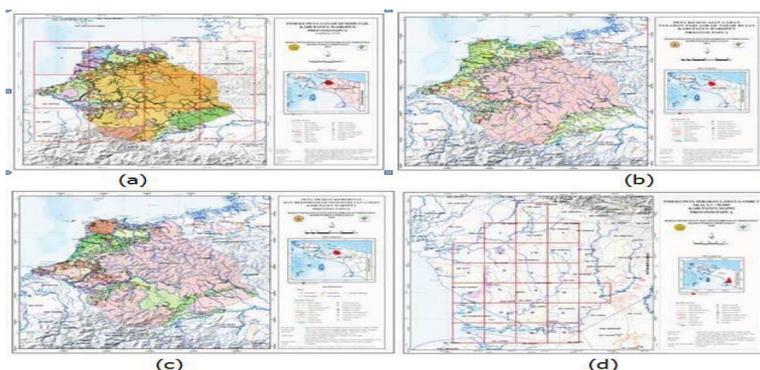
Bentuk lain dari pengembangan perangkat deteksi cepat aflatoksin adalah dengan memanfaatkan teknologi smartphone berbasis pada pemrograman android dengan nama aplikasi ASD (Afla-Smart Detector) yang merupakan paket program pengambilan keputusan.

Penelitian Dan Pengembangan Sumber Daya Lahan Pertanian

Pada Tahun Anggaran 2018, Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian (BBSDLP) bersama Balai-Balai yang dikoordinasikannya (Balittanah, Balitklimat, Balingtan, dan Balittra) melakukan berbagai kegiatan penelitian dalam aspek sumberdaya lahan pertanian untuk menghasilkan keluaran yang mendukung Program Penciptaan Teknologi

dan Varietas Unggul Berdaya Saing yang merupakan program utama Badan Litbang Pertanian. Sampai akhir Desember 2018 (TW IV) capaian realisasi fisik adalah sebagai berikut :

- Peta/informasi Geospasial Sumber Daya Lahan Pertanian, telah menyelesaikan seluruh kegiatannya dan telah menghasilkan 94 Peta (100%), yang terdiri dari : Peta tanah terkorelasi; Peta Kesesuaian Lahan; dan Peta Rekomendasi Penggunaan Lahan. Contoh peta yang dihasilkan di Kab. Waropen dan Kab. Mappi, Provinsi Papua.sebagai berikut :



Gambar 16. Berbagai peta yang dihasilkan oleh BBSDLP

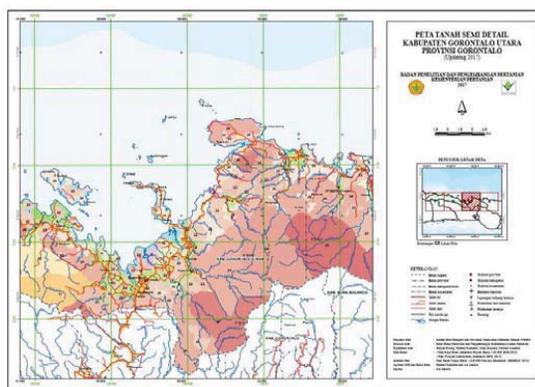
- (a) Peta Tanah Semidetil Terkorelasi skala 1:50.000 Kab. Waropen, Prov. Papua;
- (b) Peta Kesesuaian Lahan Komoditas Sawah Tadah Hujan skala 1:50.000 Kab. Waropen, Prov. Papua;
- (c) Peta Rekomendasi Pengelolaan Lahan skala 1:50.000 Kab. Waropen, Prov. Papua; dan
- (d) Peta Lahan Gambut skala 1:50.000 Kab. Mappi, Prov. Papua.

- Teknologi pengelolaan lahan, air, iklim, dan lingkungan pertanian mendukung Sistem Pertanian Bioindustri Berkelanjutan, telah menyelesaikan seluruh kegiatannya, dan telah dihasilkan sebanyak 16 teknologi (100%). Contoh teknologi yang dihasilkan:
- Sistem informasi pertanian, seluruh kegiatan telah diselesaikan dan telah menghasilkan 9 sistem informasi (100%).
- Formula (pupuk anorganik, pupuk organik, pupuk hayati, pembenah tanah, dan pestisida) dan produk pertanian (perangkat uji dan instrumen lainnya) yang ramah lingkungan; telah menyelesaikan seluruh kegiatannya, dan telah menghasilkan 5 formula.
- Rekomendasi kebijakan pengelolaan SDLP, seluruh kegiatan telah selesai dilaksanakan dan telah menghasilkan 2 Rekomendasi/kebijakan (100%). Rekomendasi yang dihasilkan antara lain mengenai : 1. Pemanfaatan Lahan Potensial Tersedia Untuk Perluasan Areal Pertanian Menuju Tahun 2045, 2. Strategi dan Kebijakan Optimalisasi Lahan Rawa Pasang Surut Mendukung Swasembada Kedelai.
- Teknologi untuk Lahan Eks Pertambangan dan Pemetaan, seluruh kegiatan telah selesai dilaksanakan dan telah menghasilkan 3 teknologi: 1) Teknologi pengembangan pemanfaatan tanaman penutup tanah dan pengelolaan bahan organik insitu pada LBT timah dan batubara, 2) Teknologi pengelolaan dan pengembangan pakan ternak pada LBT timah dan batubara, 3) Teknologi pemupukan dan ameliorasi tanah untuk peningkatan produksi tanaman dan perbaikan sifat tanah pada lahan bekas batubara.

- Teknologi Adaptasi Perubahan Iklim, seluruh kegiatan telah selesai dilaksanakan dan telah menghasilkan 3 Teknologi : 1) Teknologi Peningkatan Produktivitas Padi di Lahan
- Sulfat Masam melalui paket teknologi “Panca Kelola Lahan Rawa”, 2) Teknologi pengelolaan lahan dan tanaman terpadu di Lahan Lebak Tengahan, 3) Teknologi pengelolaan sumberdaya iklim dan air untuk antisipasi dan adaptasi perubahan iklim.
- Teknologi Mitigasi Perubahan Iklim, kegiatan telah selesai dilaksanakan dan telah menghasilkan 2 Teknologi : 1) Teknologi penataan lahan dan pengendalian OPT pada budidaya bawang merah di lahan gambut untuk peningkatan produksi dan mitigasi emisi CO₂, 2) Penelitian Inovasi dan Teknologi Sumberdaya Lahan Pertanian Mendukung Mitigasi Perubahan Iklim.
- Diseminasi Inovasi Teknologi Pengelolaan SDLP seluruh kegiatannya telah dilaksanakan.

Informasi Geospasial Sumberdaya Lahan Pertanian

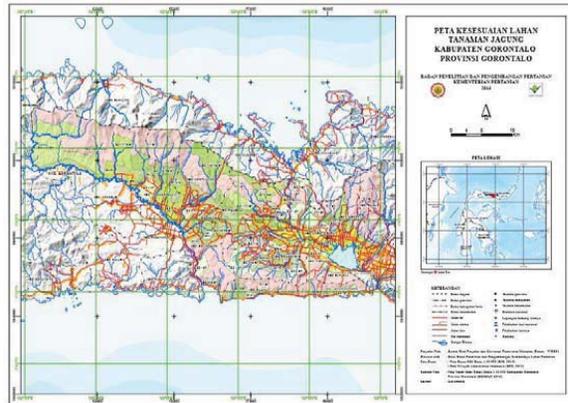
Pada tahun 2018, penyusunan peta sumberdaya lahan/tanah semi detail skala 1:50.000 dilakukan di 129 kabupaten/kota lainnya. Dari peta tanah tersebut, selanjutnya diturunkan peta kesesuaian lahan dan arahan komoditas pertanian, serta rekomendasi pengelolaannya. Dengan demikian, akhir 2018 telah dihasilkan informasi sumberdaya lahan/tanah semi detail skala 1:50.000 di seluruh kabupaten/kota di Indonesia, diantaranya di Kabupaten Gorontalo Utara, salah satu contoh output kegiatan tahun 2018.



Gambar 17. Peta tanah semi detail skala 1:50.000 Kabupaten Gorontalo Utara

Selanjutnya dari peta tanah tersebut diturunkan menjadi peta kesesuaian lahan 9 komoditas pertanian strategis, yaitu padi (padi sawah irigasi, padi sawah tadah hujan, padi lebak, padi pasang surut, dan padi gogo), jagung, kedelai (pajale), bawang merah, cabai, kakao, kelapa sawit, dan hijauan pakan ternak mendukung pengembangan sapi potong. Evaluasi lahan dilakukan dengan cara membandingkan (matching) kriteria kesesuaian lahan dengan persyaratan tumbuh tanaman (FAO, 1976).

Hasil penilaian kesesuaian lahan menunjukkan bahwa lahan sesuai untuk jagung di Kabupaten Gorontalo Utara sekitar 128.794 ha, terdiri atas lahan cukup sesuai (S₂) sekitar 62.858 ha dan lahan sesuai marginal (S₃) sekitar 65.936 ha.



Gambar 18. Peta kesesuaian lahan komoditas jagung di Kabupaten Gorontalo Utara

Demfarm Rehabilitasi dan Pengembangan Usahatani Integrasi Tanaman dan Ternak pada Lahan Bekas Tambang

Dengan kondisi tekstur pasir yang masih tinggi pada LBT Timah menyebabkan rata-rata permeabilitas tanah berjalan sangat tinggi, begitu juga pori aerasinya, menyebabkan air cepat hilang, maka dilakukan penggunaan pupuk kandang secara periodik. Pupuk kandang dicampur dengan tandan kosong kelapa sawit (1:2) sehingga total kebutuhan 30 t/ha setiap 6 bulan.

Pada koleksi pakan, rumput protein kasar tertinggi pada *P. purpureum* cv Mott (5,93%) kemudian diikuti *P. purpureum* cv Taiwan (4,21%), *P. maximum* cv Riversdale (4,08%), *V. zizanioides* (4,73), dan terendah *P. maximum* cv Purpleguinea (3,98%). Sedangkan pada legume, protein kasarnya lebih tinggi dari rumput. Kandungan tertinggi pada *I. zollingeriana* (29,31%) kemudian diikuti *C. ternatea* (25%), *C. pascuorum* cv Bunday (24,94%), *Stylosanthes* (18,37%), dan terendah *A. pintoi* (15,74%).

Pemanfaatan bahan organik secara in situ seperti pemanfaatan sisa tanaman, penanaman tanaman legume, dan sistem pertanaman lorong adalah kunci dari rehabilitasi lahan bekas tambang.

Superimposed Teknologi Rehabilitasi Lahan Bekas Tambang

Hasil penelitian pada LBT Batubara menunjukkan bahwa pemberian fosfat alam yang dikombinasikan dengan pupuk kandang, kapur dan pupuk anorganik berpengaruh terhadap parameter pertumbuhan tanaman jagung, dan dapat meningkatkan hasil tanaman jagung. Pengaruh pemberian amelioran terhadap komponen hasil tanaman jagung pada lahan bekas penambangan batubara di Embalut, Kutai Kartanegara, Kaltim 2018.

Tabel 62. Pengaruh Pemberian Amelioran Terhadap Tanaman Jagung

Perlakuan	Berat brangkasan kering (t/ha)	Berat 1000 butir biji (gram)	Berat pipilan kering (t/ha)
P1	10,76 a	282 a	7,85 a
P2	12,35 ab	292 a	8,75 ab
P3	11,65 ab	287 a	8,87 ab
P4	13,25 b	950 a	9,92 b

- P1 = Praktik petani: Urea 200 kg/ha + NPK 200 15:15:15 kg/ha
 P2 = Rekomendasi berdasarkan uji tanah (PUTK) dengan pupuk tunggal: Dolomit 1.000 kg/ha + Pukan 2.000 kg/ha + Urea 400 kg/ha + SP-36 250 kg/ha + KCl 100 kg/ha + Biochar 10.000 kg/ha
 P3 = Rekomendasi berdasarkan uji tanah (PUTK) dengan pupuk majemuk: Dolomit 1.000 kg/ha + Pukan 2.000 kg/ha + Urea 267 kg/ha + SP-36 84 kg/ha + NPK 400 kg/ha
 P4 = Rekomendasi pupuk introduksi: Fosfat alam 1.000 kg/ha + Dolomit 1.000 kg/ha + Pukan 2.000 kg/ha + Urea 400 kg/ha + KCl 100 kg/ha + Biochar 10.000 kg/ha

Pengkajian Dan Percepatan Diseminasi Inovasi Teknologi Pertanian

Progres kegiatan Balai Besar Pengkajian tahun anggaran 2018 telah tercapai dengan realisasi fisik 100 %. Capaian Output utama Program Pengkajian dan Percepatan Diseminasi Inovasi Pertanian, Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian yaitu :

- Jumlah teknologi spesifik lokasi ditargetkan sebanyak 115 teknologi, fisik 100% terlaksana;
- Jumlah Teknologi yang Didiseminasikan ke Pengguna ditargetkan sebanyak 164 teknologi, fisik 100% terlaksana;
- Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Pertanian sebanyak 34 rekomendasi dengan realisasi fisik 100% terlaksana;
- Produksi benih sumber ditargetkan sebanyak 400 ton benih terlaksana dengan realisasi fisik sebesar 100%;
- Taman Teknologi Pertanian (TTP) dilaksanakan di 12 BPTP dan 14 kabupaten, dengan jumlah TTP sebanyak 16 TTP dengan realisasi fisik 100%.
- Kegiatan Model Pengembangan Inovasi Teknologi Pertanian Bioindustri di Daerah Perbatasan dilaksanakan di 12 BPTP dan 1 BB Pengkajian dengan fisik sebesar 100%;
- Dukungan pengkajian dan percepatan diseminasi inovasi teknologi pertanian sebagian telah dilaksanakan seperti :
 - ✓ Sekolah Lapang Kedaulatan Pangan Mendukung Swasembada Pangan terintegrasi Desa Mandiri Benih, oleh 15 BPTP lingkup BB Pengkajian, yaitu BPTP Sumatera Utara, Jambi, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Kalsel, Sulteng, Sulsel, Sultra, dan Papua. Realisasi fisik sebesar 100%;
 - ✓ Dukungan inovasi teknologi untuk peningkatan IP kawasan pertanian, di semua BPTP lingkup BB Pengkajian, fokus pada komoditas padi, jagung, dan kedelai, realisasi fisik sebesar 100%;
 - ✓ Inovasi Perbenihan dan Perbibitan, untuk komoditas padi, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, kentang, jeruk, pepaya, manggis, durian, salak, pisang, mangga, apel, jambu mete, ayam KUB, kambing, sapi, kelapa, kelapa dalam, jengkol, petai, karet, kakao, tebu, lada, cengkeh, pala, sukun. Benih yang diproduksi dalam kegiatan perbenihan ini terdiri dari 2 kelas benih, yaitu kelas benih sumber (FS dan SS) dan kelas benih sebar (ES);
 - ✓ Transfer Inovasi Teknologi, dengan capaian fisik sebesar 100%;

- ✓ Unit Perbenihan Unggulan Komoditas Pertanian Strategis, dengan capaian fisik sebesar 100
- ✓ Inovasi Perbenihan dan Perbibitan komoditas unggulan (Non Strategis) tidak terealisasi sempurna, tiga BPTP dengan alokasi dana program "BEKERJA" (BPTP Lampung, Jawa Barat, dan NTB) tidak dapat mencapai target output yang telah ditetapkan;
- ✓ Produksi Benih Bawang, dengan target output tersedianya 73.016 kg di 11 BPTP, yakni BPTP Sumut (120 kg), Sumbar (10 kg), Jambi (10.020 kg), Jabar (25 kg), Jateng (6 kg), Jatim (25.050 kg), NTB (37.575 kg), NTT (50 kg), Sulteng (40 kg), Sulut (40 kg), dan Sulsel (80 kg).
- ✓ Produksi Benih Kentang, dengan target output adalah tersedianya benih kentang sebanyak 195.600 G0 di empat BPTP, yakni BPTP Sumbar (20.000 G0), Jambi (50.000 G0), Jabar (80.000 G0) dan Jateng (45.600 G0);
- ✓ Produksi Benih Sayuran Lainnya, dengan target output tersedianya benih sayuran sebanyak 62.500 batang di enam BPTP, yakni BPTP Banten (20.000 batang), Jabar (20.000 batang), Sumut (5.000 batang), Sumbar (10.600 batang), Bengkulu (2.000 batang) dan Kalsel (4.900 batang);
- ✓ Produksi Benih Buah Tropika dan Sub Tropika, target output tersedianya benih buah tropika dan sub tropika sebanyak 359.653 batang di 22 BPTP;
- ✓ Produksi Benih Tanaman Industri Perkebunan, dengan target output tersedianya benih tanaman industri perkebunan sebanyak 622.585 pohon di 20 BPTP;
- ✓ Layanan Internal (Overhead), dengan target output adalah terlaksananya 34 layanan internal di BB Pengkajian dan 33 BPTP, dengan realisasi fisik sebesar 100% ;
- ✓ Layanan Perkantoran, Layanan Perkantoran, dengan target output adalah terlaksananya kegiatan layanan perkantoran lingkup BB Pengkajian selama 12 bulan layanan, dengan realisasi fisik sebesar 100%;

Dukungan Manajemen, Fasilitas Dan Instrumen, Teknis Dalam Pelaksanaan Kegiatan Litbang Pertanian

Keluaran dan realisasi kegiatan sampai dengan triwulan 4, diuraikan sebagai berikut :

- Kegiatan Kemitraan, sinergi Penelitian Pertanian, dan Pemanfaatan Hasil dengan Perguruan Tinggi sampai dengan 31 Desember 2018 terealisasi 99% kerjasama dari target 100 kerja sama;
- Pengembangan Sumber Daya Manusia; total S3,S2,S1, training dan Scientific dan Exchange sampai dengan 31 Desember 2018 terealisasi 1.461 Pegawai dari target 1.410 (103,62%);
- Alih Teknologi Pertanian;
- Inovasi Balitbangtan yang bernilai kekayaan intelektual (KI) sangat penting untuk diberi perlindungan HKI. Manfaat perlindungan KI di antaranya adalah untuk melindungi dari tindak kecurangan oleh pihak yang tidak berkepentingan, besaran angka kredit bagi inventor, serta imbalan royalti bagi inventor yang invensinya telah dilisensikan dan komersial sebagaimana tertuang dalam PMK 72/2015 dan PMK 06/2016. Pendaftaran 100 inovasi (222,22 %).KI Balitbangtan pada tahun 2018 melebihi target 45 inovasi per tahun (Renstra Balitbangtan 2015-2019).

I. Pelaksanaan Program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian

Realisasi kegiatan merupakan capaian fisik dari masing-masing kegiatan kinerja kegiatan/output utama Badan PPSDMP selama tahun 2018 dengan cara membandingkan antara realisasi dengan rencana atau target.

Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian

Capaian Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian didukung oleh kegiatan-kegiatan yang antara lain:

- **Fasilitasi kelembagaan penyuluhan pertanian**
Pelaksanaan fasilitasi kelembagaan penyuluhan pertanian (penumbuhan dan pengembangan KEP, sekolah lapang mendukung UPSUS di tingkat Kecamatan).
- **Fasilitasi dan pengembangan kelembagaan petani**
Capaian fasilitasi dan pengembangan kelembagaan petani didukung oleh kegiatan: (a) Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani; serta (b) Pemberdayaan Petani di Sentra Produksi Pangan.
- **Fasilitasi ketenagaan penyuluhan pertanian**
Fasilitasi bagi penyuluh pertanian didukung dengan kegiatan: (a) Biaya Operasional Penyuluh Pertanian PNS; (b) Honorarium dan Biaya Operasional THL-TB Penyuluh Pertanian selama 11 bulan; dan (c) Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Swadaya.
- **Penyusunan dan perbanyak materi penyuluhan**
Fasilitasi bagi materi penyuluh dalam bentuk kegiatan: (a) Langganan Tabloid Pertanian bagi Penyuluh Pertanian (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan); (b) Langganan Majalah Pertanian bagi kelembagaan penyuluhan provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan; (c) Penyusunan dan Penyebarluasan Materi Penyuluhan tingkat provinsi dan kabupaten/kota; (e) Penyusunan dan Penyebaran Media Informasi Spesifik Lokasi.

Realisasi kegiatan dengan target sasaran kegiatan utama Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian Tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 11.

Tabel 63. Target dan Realisasi Kegiatan Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian Tahun 2018

NO	RENCANA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%	
1	Fasilitasi Honor dan Biaya Operasional Penyuluh (BOP)	PNS	12 bulan	12 bulan	100,00
		THL-TBPP	12 bulan	12 bulan	100,00
2	Layanan Program dan Evaluasi, Kelembagaan dan Ketenagaan, serta Penyelenggaraan Penyuluhan	12 bulan	12 bulan	100,00	

Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian

Capaian kegiatan utama Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian didukung oleh beberapa kegiatan, yaitu:

- Pelatihan Mendukung Komoditas Strategi Pertanian, terdiri dari pelatihan bagi aparatur dan non aparatur.
 - ✓ Pelatihan bagi aparatur pertanian melalui pelatihan:
 - a) Pelatihan dalam Jabatan (Pelatihan Kepemimpinan, Pelatihan Prajabatan, Pelatihan Administrasi dan Manajemen, Pelatihan Fungsional Rumpun Ilmu Hayat Pertanian);
 - b) Pelatihan Teknis Pertanian mendukung komoditas prioritas (Teknis Tanaman Pangan; Teknis Perkebunan; Teknis Hortikultura; Teknis Mendukung Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian).
 - ✓ Pelatighani bagi non aparatur pertanian meliputi pelatihan:
 - a) Pelatihan Kewirausahaan;
 - b) Pelatihan Teknis Pertanian mendukung komoditas prioritas;
 - c) Pelatihan Manajemen dan Kewirausahaan (Agri Training Camp).
- Penguatan P4S sebagai Pusat Pembelajaran Petani
Fasilitasi kelembagaan pelatihan petani (P4S) didukung oleh kegiatan:
 - ✓ Penghargaan P4S Berprestasi;
 - ✓ Penguatan Kelembagaan;
 - ✓ Pemberdayaan SDM melalui Pelatihan bagi Petani di P4S.
- Pemberdayaan Masyarakat melalui Program READSI untuk meningkatkan Kapasitas Petani
Pertanian merupakan proses pemberian sertifikat yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia (SKKNI) standar Internasional dan standar. Sertifikasi kompetensi dimaksudkan untuk memberikan pengakuan dan penghargaan kompetensi, serta jaminan dan pemeliharaan kompetensi, untuk mewujudkan sistem sertifikasi kompetensi yang berkualitas.
- Layanan Dukungan Manajemen Pelatihan
Layanan Internal (Overhead) merupakan Fasilitasi prasarana dan sarana pembelajaran kelembagaan pelatihan ditujukan pada UPT Pelatihan Pertanian Pusat, yang ditujukan untuk pengembangan laboratorium, Pusat Inkubator Agribisnis (PIA), dan rehabilitasi gudang.
- Layanan Internal/ Overhead
Layanan Pendidikan dan Pelatihan merupakan Fasilitasi kegiatan operasional pada Kegiatan Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian (PSPP), yang ditujukan untuk mendukung dan memperlancar operasional.
- Layanan Perkantoran
Program READ-SI bertujuan untuk memperbaiki mata pencarian kaum miskin perdesaan

secara berkelanjutan, adapun tujuan yang hendak di capai adalah pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan perbaikan pengelolaan sumber daya alam di 30 (tiga puluh) desa sasaran di provinsi Kalimantan Barat dan provinsi NTT.

Perbandingan realisasi dengan target sasaran kegiatan utama Pemantapan Sistem Pelatihan Tahun 2018, disajikan pada Tabel ...

Tabel 64. Target dan Realisasi Kegiatan Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian Tahun 2018

NO	RENCANA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
1.	Pelatihan Mendukung Komoditas Strategi Pertanian	20.330 orang	20.346orang	100,00
2.	Penguatan P4S sebagai Pusat Pembelajaran Petani	92 unit	92 unit	100,00
3.	Pemberdayaan Masyarakat melalui Program READ-SI untuk Peningkatan Kapasitas Petani	1 tahun	6 bulan	50,00
4.	Layanan Dukungan Manajemen Pelatihan	12 bulan	12 bulan	100,00
5.	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	12 bulan	12 bulan	100,00
6	Layanan Perkantoran	12 bulan	12 bulan	100,00

Pelaksanaan Program Pendidikan Pertanian

Capaian kegiatan Pendidikan Pertanian didukung oleh kegiatan:

- Fasilitasi pendidikan formal S2 dan S3 bagi Dosen, Guru dan calon tenaga pendidik melalui tugas belajar.
Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung kegiatan Fasilitasi Pendidikan Formal S2 dan S3 Bagi Aparatur Pertanian Melalui Tugas Belajar, meliputi : a) Penyusunan RIPTB; (b) Seleksi Calon Peserta Tugas Belajar; (c) Penetapan Peserta Tugas Belajar; (d) Bantuan Beasiswa Program Tugas Belajar S2; (e) Bantuan Beasiswa Program Tugas Belajar S3; (f) Koordinasi dan Evaluasi Tugas Belajar dengan 10 Perguruan Tinggi; (g) Pembekalan, Pengawasan dan Pendampingan Tugas Belajar Dalam Negeri.
- Mahasiswa dari Perguruan Tinggi Negeri yang Melakukan Pendampingan dalam Kegiatan Peningkatan Produksi Komoditas Strategis Pertanian.
Untuk mendukung kegiatan Pendampingan Mahasiswa STPP dan Perguruan Tinggi Mitra Mencapai Swasembada Pangan dilakukan kegiatan sebagai berikut : (a) Honorarium Pengawasan Pendampingan; (b) Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi; (c) Pendampingan dan Pengawasan ; (d) Seminar Hasil pengawasan; (e) Dukungan Pusdik Dalam program Prioritas Kementan; (f) Pengadaan Ayam program Bekerja di Kabupaten Cirebon.
- Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian dalam Rangka Regenerasi Petani.

Untuk mendukung kegiatan Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian dilakukan kegiatan sebagai berikut : (a) Pertemuan Koordinasi – Penumbuhan Wirausahawan muda Pertanian Tahap Penyadaran dan Penumbuhan; (b) Workshop Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian- Penumbuhan Wirausahawan muda Pertanian Tahap Penyadaran dan Penumbuhan; (c) Pendampingan Wirausahawan Muda Pertanian- Penumbuhan Wirausahawan muda Pertanian Tahap Penyadaran dan Penumbuhan; (d) Evaluasi Wirausahawan Muda Pertanian;

Penumbuhan Wirausahawan muda Pertanian Tahap Penyadaran dan Penumbuhan; (e) Pertemuan Koordinasi- Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian Tahap Pengembangan; (f) Workshop Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian- Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian Tahap Pengembangan; (g) Pendampingan Wirausahawan Muda Pertanian- Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian Tahap Pengembangan; (h) Temu Inovasi Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian- Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian Tahap Pengembangan; (i) Evaluasi Wirausahawan Muda Pertanian- Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian Tahap Pengembangan; (j) Pertemuan Koordinasi Wirausahawan Muda Pertanian - Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian Tahap Kemandirian; (k) Pendampingan Wirausahawan Muda Pertanian - Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian Tahap Kemandirian; (l) Penganugerahaan Penghargaan Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian Berprestasi - Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian Tahap Kemandirian; (m) Pelaksanaan Launching Program Bekerja, Agricamp dan UPSUS Mendukung PWMP; (n) Launching POLBANGTAN Dalam Rangka Penguatan PWMP.

- **Siswa Pendidikan Menengah Pertanian di SMK-PP Bantuan praktek Siswa**
Untuk mendukung kegiatan Siswa yang mengikuti Pendidikan menengah Pertanian di SMK-PP dilakukan kegiatan Fasilitasi Bantuan Praktek Siswa SMK.
- **Uji Kompetensi Sertifikasi Profesi Bidang Pertanian.**
Untuk mendukung kegiatan Uji Kompetensi Sertifikasi Profesi Bidang Pertanian dilakukan kegiatan sebagai berikut : (a) Uji Kompetensi Sertifikasi Profesi Bidang Pertanian; (b) Pelaksanaan Sertifikasi; (c) Uji Kompetensi Sertifikasi profesi SDM Bidang Pertanian; (d) Pertemuan Evaluasi ; (e) Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Dosen Bidang Penyuluh.
- **Peningkatan Kualitas pembelajaran pendidikan vokasi melalui pengabdian masyarakat di wilayah perbatasan**
Untuk mendukung kegiatan Peningkatan Kualitas pembelajaran Pendidikan Vokasi Melalui Pengabdian Masyarakat di Wilayah perbatasan dilakukan kegiatan sebagai berikut : (a) Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Kegiatan; (b) Sinkronisasi dan Supervisi Kegiatan; (c) Monitoring dan Evaluasi; (d) Workshop Hasil Kegiatan dan Pelaporan; (e) Rapat Koordinasi Praktik Kerja Lapang Taruna STPP di Daerah Perbatasan
- **Layanan Dukungan Manajemen Pendidikan**

Perencanaan, Penyusunan, Penetapan dan pemantauan Kebijakan Terkait Transformasi pendidikan pertanian dan Dukungan Pendidikan Pada program Penyuluhan

Untuk mendukung kegiatan Layanan Dukungan Manajemen Pendidikan dilakukan kegiatan sebagai berikut : (1) Koordinasi Teknis Pendidikan Pertanian; (2) Profesionalisme Staff; (3) Persiapan dan Perumusan Program dan Anggaran 2019; (4) Evaluasi Program Pendidikan Pertanian; (5) Penyusunan LAKIP dan LAPTAH; (6) Administrasi Pendidikan dan Fasilitasi Pengelolaan Administrasi Kepegawaian; (7) Penyusunan Jurnal Teknologi dan

penyempurnaan Dokumen Profil UPT menuju Politeknik; (8) Koordinasi Pimpinan; (9) Pembinaan dan Pengawasan Program, Anggaran dan Kegiatan 2018; (10) Pengembangan Sistem Informasi Pendidikan Pertanian; (11) Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Kegiatan Pendidikan Pertanian Tahun 2018; (12) Penyusunan SBK Pendidikan 2019; (13) Pertukaran Pendidik dan Tenaga kependidikan ke luar negeri; (14) Retooling (Permagangan) di perkebunan Kelapa sawit; (15) Pengembangan Kerjasama Dalam Negeri; (16) Pengembangan Kerjasama luar negeri; (17) Pertukaran Guru dan Dosen ke Luar Negeri; (18) Peningkatan Kompetensi Generasi Muda Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura; (19) Peningkatan Kompetensi Generasi Muda Bidang Peternakan dan Kesehatan hewan; (20) Peningkatan Kompetensi Generasi Muda Bidang Perkebunan; (21) Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Pertanian; (22) Penyusunan Bahan Ajar Pendidikan Tinggi Pertanian; (23) Penyusunan Pedoman Pendidikan Tinggi Pertanian (24) Pengembangan Kurikulum Politeknik Pembangunan Pertanian; (25) Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan, Pengawasan Ujian dan Wisuda; (26) Dukungan Pendidikan Pertanian Dalam Rangka Peningkatan Produksi Pangan Strategis; (27) Penerimaan Mahasiswa Baru; (28) Pembinaan Kehidupan Kampus; (28) Pembinaan Generasi Muda Melalui Sakatarunabumi; (29) Transformasi Kelembagaan Pendidikan Tinggi dan Menengah Pertanian; (30) Penjaminan Mutu Pendidikan; (31) Pembinaan Penerapan Teaching Factory; (32) Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Guru, Dosen dan PLP; (33) Magang Bagi Tenaga Pendidik Pertanian; (34) Fasilitasi Tenaga Kependidikan Dalam memperkuat Dosen Vokasi Pertanian; (35) Penguatan Penelitian Terapan Dosen Vokasi ke Arah Transformasi; (36) Fasilitasi Penguatan Dosen Vokasi se Indonesia; (37) Magang Bagi Tenaga Kependidikan; (38) Persiapan Progran YESS-IFAd; (39) Pelatihan Alsintan Wilayah Korem 074 dan Korem lainnya.

Perbandingan realisasi kegiatan dengan target sasaran Revitalisasi Pendidikan Pertanian secara ringkas ditampilkan pada Tabel 13.

Tabel 65. Target dan Realisasi Kegiatan Pendidikan Pertanian Tahun 2018

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI	%
1	Fasilitasi pendidkan formal S2 dan S3 bagi Dosen, Guru dan calon tenaga pendidk melalui tugas belajar (orang)	300 Orang	300 Orang	100,00
2	Mahasiswa dari Perguruan Tinggi Negeri yang Melakukan Pendampingan dalam Kegiatan Peningkatan Produksi Komoditas Strategis Pertanian (orang)	1.500 Orang	1.500 Orang	100,00
3	Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian dalam Rangka Regenerasi Petani (Kelompok)	250 Kelompok	250 Kelompok	100,00
4	Siswa yang mengikuti Pendidikan Menengah Pertanian di SMK-PP (siswa)	19.192 Siswa	21.941 Siswa	115,00
5	Uji Kompetensi Sertifikasi Profesi Bidang Pertanian (Orang)	774 Orang	774 Orang	100,00
6	Meningkatnya Kualitas Pembelajaran Pendidikan Vokasi melalui Pengabdian Masyarakat di Wilayah Perbatasan (provinsi)	3 Provinsi	3 Provinsi	100,00
7	Layanan Dukungan Manajemen Pendidikan (Bulan)	12 Bulan	12 Buln	100,00

➤ Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya

Capaian kegiatan utama Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya didukung oleh beberapa kegiatan, yaitu:

- ✓ Bagian Perencanaan Bagian Perencanaan bertugas melaksanakan penyusunan rencana dan program peningkatan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan pertanian. Dalam melaksanakan tugas, Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi: (a) penyiapan penyusunan rencana dan program, (b) program kerjasama; dan (b) penyiapan penyusunan anggaran.
- ✓ Bagian Keuangan dan Perlengkapan Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan dan perlengkapan. Dalam 3 Renstra Sekretariat Badan PPSDMP 2015 - 2019 melaksanakan tugas, Bagian Keuangan dan Perlengkapan menyelenggarakan fungsi: (a) pelaksanaan urusan perbendaharaan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan penyiapan pengujian dan penerbitan surat perintah membayar (SPM); (b) pelaksanaan urusan akuntansi dan verifikasi anggaran; dan (c) pelaksanaan urusan perlengkapan.
- ✓ Bagian Umum Bagian Umum mempunyai tugas penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, evaluasi dan penyempurnaan organisasi dan tata laksana, serta pengelolaan urusan kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga. Dalam melaksanakan tugas, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi: (a) penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, evaluasi dan penyempurnaan organisasi dan tata laksana; (b) pelaksanaan urusan kepegawaian; dan (c) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.
- ✓ Bagian Evaluasi dan Pelaporan Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data-informasi sumber daya manusia dan ketenagakerjaan pertanian, penyiapan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik. Dalam melaksanakan tugas, Bagian Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi: (a) penyiapan data, penyiapan analisis, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program; (b) penyiapan laporan pelaksanaan kegiatan dan tindak lanjut hasil pengawasan di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian; dan (c) penyiapan pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, serta urusan perpustakaan.
- ✓ Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara rinci realisasi pelaksanaan kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan PPSDMP selama Tahun 2018 tersaji pada Tabel 10.

Tabel 67. Target dan Realisasi Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya
Badan PPSDMP Tahun 2018

No.	Rencana Kegiatan	Target	Realisasi	%
1.	Perencanaan Program, Kegiatan, Anggaran, dan Kerjasama Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian	12	12	100,00
2.	Dokumen Keuangan dan Perlengkapan Yang Dihasilkan	12	12	100,00
3.	Dokumen Perundang-undangan, Kepegawaian dan Rumah Tangga yang dihasilkan	12	12	100,00
4.	Dokumen Data dan Evaluasi, Pelaporan, Kehumasan dan Perpustakaan yang dihasilkan	12	12	100,00
Total (dokumen)		12	12	100,00

Berdasarkan capaian realisasi fisik dan keuangan kegiatan Badan PPSDMP pada tahun 2018, maka dapat diketahui capaian tingkat efisiensi (rasio output yang dicapai dengan input/anggaran yang digunakan), baik secara global maupun secara parsial menurut masing-masing eselon II lingkup Badan PPSDMP. Tingkat efisiensi tersebut disajikan pada Tabel 15. berikut ini.

Tabel 68. Tingkat Efisiensi Kegiatan Badan PPSDMP Tahun 2018

No.	Keterangan	Realisasi Keuangan (%)	Rata-rata Realisasi Fisik (%)	Tingkat Efisiensi (O/I)
1	Pusat Penyuluhan	97,49	100,00	1,03
2	Pusat Pelatihan	67,49	100,00	1,48
3	Pusat Pendidikan	94,35	100,00	1,06
4	Sekretariat Badan PPSDMP	67,01	100,00	1,49

Berdasarkan Tabel 15. diatas, dapat dijelaskan bahwa secara keseluruhan capaian tingkat efisiensi kegiatan Badan PPSDMP pada tahun 2018, maka capaian tingkat efisiensi pada keempat eselon II lingkup BPPSDMP pada tahun 2018 juga termasuk pada kategori efisien, karena seluruhnya mencapai nilai rasio lebih dari 1, yaitu

- a) 1,03 pada kegiatan Pusat Penyuluhan Pertanian;
- b) 1,48 pada kegiatan Pusat Pelatihan Pertanian;
- c) 1,06 pada kegiatan Pusat Pendidikan Pertanian;
- d) 1,49 pada kegiatan Sekretariat Badan PPSDMP.

J. Pelaksanaan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Ketersediaan Dan Kerawanan Pangan

1) Sistem Kewaspadaan Pangan Dan Gizi

- Bimbingan Teknis SKPG, bertujuan : 1) Membangun kesamaan persepsi dan sinergi aparat daerah sehingga mampu meningkatkan pemahaman dan kemampuan pejabat/aparat dalam menganalisis situasi pangan dan gizi.
- FGD Prevalence of Undernourishment (PoU)
- Penyusunan Angka Rawan Pangan Sementara (ARP Sementara) Tahun 2018

Berdasarkan pemaparan, diskusi, dan praktik perhitungan yang dilaksanakan pada saat Penyusunan Angka PoU Tahun 2018 Sementara, dapat diperoleh sebagai berikut:

- ✓ Perhitungan angka PoU Tahun 2018 Sementara menggunakan data pendukung Rasio populasi/proporsi penduduk menurut umur dan jenis kelamin, Crude Birth Ratio (CBR), Dietary Energy Consumption (DEC), Standar Deviasi (STDEV) dan Koefisien Varian (CV).
- ✓ Prosedur perhitungan PoU dengan menggunakan data Susenas– BPS,
- ✓ Perhitungan PoU dilakukan dengan bantuan template PoU dalam bentuk excell,
- ✓ Hasil perhitungan angka PoU Tahun 2018 sementara berdasarkan data Susenas bulan Maret 2018 adalah 7,95 persen atau menurun 0,31 persen jika dibandingkan angka PoU tahun 2017 sebesar 8,26 persen.
- Penyusunan Buku ARP Tahunan, bertujuan 1) Membahas hasil perhitungan ARP Tahun 2017 dan 2018 sementara oleh BPS; 2) Membahas konsep penulisan buku Angka Rawan Pangan (ARP). Hasil perhitungan ARP Nasional Tahun 2017 adalah 9,84 persen sedangkan pada tahun 2018 menjadi 8,23 persen.

Tabel 69. Perkembangan jumlah penduduk rawan pangan tahun 2014 – 2018 per provinsi

Provinsi	Angka Rawan Pangan (Konsumsi Kalori/Kapita/Hari < 1.400 Kkal)				
	2014	2015	2016	2017	2018
ACEH	21,66	12,83	13,42	12,81	9,38
SUMATERA UTARA	17,79	14,32	13,82	9,81	6,87
SUMATERA BARAT	15,02	9,80	7,34	8,22	6,93
RIAU	16,97	12,32	13,22	12,18	10,19
JAMBI	21,56	15,86	14,64	10,76	8,93
SUMATERA SELATAN	14,28	11,47	10,62	5,61	6,81
BENGKULU	16,68	11,69	9,56	10,80	6,31
LAMPUNG	22,33	17,51	14,74	10,46	8,89
KEP. BANGKA BELITUNG	16,25	9,06	9,99	8,22	8,23
KEPULAUAN RIAU	21,22	9,12	10,07	10,69	11,32
DKI JAKARTA	13,34	16,07	14,53	9,66	7,05
JAWA BARAT	16,79	12,58	11,26	8,18	7,04
JAWA TENGAH	16,97	16,73	15,00	11,10	8,51
D I YOGYAKARTA	6,10	14,16	9,43	2,68	2,34
JAWA TIMUR	13,94	13,06	10,14	8,30	6,83
BANTEN	14,05	11,04	8,70	6,58	4,74
BALI	6,56	6,79	5,28	4,91	3,14
NUSA TENGGARA BARAT	10,39	12,10	8,69	6,97	3,60
NUSA TENGGARA TIMUR	28,30	30,41	20,42	11,11	14,84
KALIMANTAN BARAT	20,00	18,88	16,00	16,96	13,84
KALIMANTAN TENGAH	16,67	13,34	11,79	11,93	9,07
KALIMANTAN SELATAN	15,22	10,41	8,86	5,49	6,07
KALIMANTAN TIMUR	32,08	22,20	19,16	18,22	15,94
KALIMANTAN UTARA		33,22	22,74	22,65	15,97
SULAWESI UTARA	15,36	14,50	13,18	7,37	7,56
SULAWESI TENGAH	17,55	16,82	13,76	10,31	10,44
SULAWESI SELATAN	15,87	15,71	14,34	10,10	9,44
SULAWESI TENGGARA	18,43	15,53	12,93	8,95	6,99
GORONTALO	18,27	9,87	12,19	6,57	8,31
SULAWESI BARAT	15,06	16,02	10,92	13,99	13,38
MALUKU	33,69	30,88	25,78	26,13	25,86
MALUKU UTARA	38,15	36,99	31,39	30,64	25,82
PAPUA BARAT	36,31	33,76	28,18	28,97	18,68
PAPUA	33,77	31,68	29,31	30,86	27,48
INDONESIA	16,94	14,71	12,69	9,84	8,23

➤ Penyusunan SKPG Nasional

Penyusunan bertujuan untuk: 1) Mengumpulkan data SKPG tingkat provinsi; 2) Melakukan analisis situasi pangan dan gizi tingkat provinsi; 3) Membuat rekomendasi berdasarkan hasil informasi situasi pangan dan gizi.

Beberapa masukan dalam rangka penyempurnaan penyusunan SKPG nasional Tahun 2018 sebagai berikut:

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan tersebut, selanjutnya Tim melakukan analisis SKPG berdasarkan Panduan SKPG 2018. Data diolah pada setiap aspek (ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan) per bulan sehingga

2) Mitigasi Kerawanan Pangan Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan (Kmp)

Pada tahun 2018 kegiatan Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan di tingkat Pusat yaitu: Sosialisasi Kawasan Mandiri Pangan, Apresiasi Kawasan Mandiri Pangan, Focus Group Discussion (FGD) Mitigasi Kerawanan Pangan dan Workshop Evaluasi Kawasan Mandiri Pangan 2018.

➤ Sosialisasi Kawasan Mandiri Pangan, rumusan yang dihasilkan sebagai berikut:

- ✓ Kawasan Mandiri Pangan (KMP) tahun 2018 dilaksanakan pada 1 (satu) desa yang terdiri dari dua kelompok afinitas. Setiap kelompok mempunyai jenis usaha yang sama atau berbeda jenis usaha antar kelompok.
- ✓ Penanggungjawab kegiatan KMP, diminta untuk berperan aktif dalam melakukan pembinaan, monitoring, melakukan pencatatan cashflow, melaporkan perkembangan usaha sampai ditingkat kelompok yang dilampirkan dokumentasi kegiatan dengan titik koordinat. Laporan dikirimkan secara berjenjang dari Kabupaten, Provinsi dan Pusat.
- ✓ Aparat penanggungjawab kegiatan KMP, segera melengkapi berkas administrasi Kawasan Mandiri Pangan tahun 2018 (Surat Keputusan (SK) Penetapan Tim Calon Penerima/Calon Lokasi Kabupaten, SK Lembaga Keuangan Kawasan/LKK, SK Forum Komunikasi Kawasan/FKK, SK Pendamping, SK Penerima Manfaat, SK Tim Verifikasi, Rencana Pengeluaran Dana/RPD dan Rencana Usaha Kelompok/RUK).
- ✓ Dana bantuan pemerintah segera dicairkan paling lambat akhir bulan 30 April 2018 dengan memperhatikan rambu-rambu yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis KMP 2018. Apabila tidak segera dimanfaatkan akan direalokasikan dananya ke wilayah lain.
- ✓ Daerah dapat menindaklanjuti operasional pelaksanaan KMP dengan menyusun juklak.
- ✓ Penanggungjawab kegiatan KMP di Provinsi dan Kabupaten perlu melakukan koordinasi

- dan sinergi dengan lintas sektor terkait (Dinas/Instansi dan swasta) serta dukungan anggaran APBD Provinsi dan APBD Kabupaten.
- ✓ Penanggungjawab secara berjenjang dan secara berkala (setiap 3 bulan) melapor perkembangan kegiatan KMP.
 - ✓ Setiap akhir tahun kegiatan, penanggungjawab KMP di Provinsi dan Kabupaten melakukan evaluasi outcome kegiatan KMP terhadap penurunan rawan pangan dan kemiskinan (sebelum dan sesudah pemberian bantuan), membuat profil KMP, serta membuat tulisan success story masing-masing kawasan.
- Apresiasi Kawasan Mandiri Pangan, sasaran di 2018 adalah pejabat/pengelola teknis KMP di 17 provinsi dan pendamping yang menangani KMP di 20 kabupaten. Rencana Tindak Lanjut apresiasi sebagai berikut:
- ✓ Penanggungjawab kegiatan KMP, diminta untuk berperan aktif dalam melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi serta melaporkan perkembangan usaha sampai ditingkat kelompok yang dilampirkan dokumentasi kegiatan dengan titik koordinat. Laporan dikirimkan secara berjenjang dari Kabupaten, Provinsi dan Pusat.
 - ✓ Penanggungjawab kegiatan KMP di Provinsi dan Kabupaten perlu melakukan koordinasi dan sinergi dengan lintas sektor terkait (Dinas/Instansi dan swasta) serta mendapat dukungan anggaran APBD Provinsi dan APBD Kabupaten.
 - ✓ Meneruskan hasil pertemuan dan materi yang diberikan dari narasumber selama apresiasi berlangsung kepada kelompok penerima manfaat KMP.
 - ✓ Melaksanakan pertemuan secara rutin terkait pelaksanaan KMP dalam rangka mengetahui perkembangan dan dinamika yang terjadi dalam kelompok.
 - ✓ Penanggungjawab Provinsi/kabupaten agar segera membina dan mempersiapkan lokasi KMP, jika suatu waktu akan dikunjungi oleh Bapak Menteri/Kabupaten BKP.
 - ✓ Untuk mengingatkan kembali, bahwa dana Banper harus segera di cairkan paling lambat tanggal 30 April 2018, apabila tidak segera dicairkan akan di realokasi ke wilayah lain.
 - ✓ Melakukan analisis perhitungan penduduk rawan pangan (VPA) di lokasi KMP dan menyampaikan hasil analisis VPA secara triwulan kepada Badan Ketahanan Pangan Pusat cq. Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan yang dapat dilakukan melalui email vpakmp@gmail.com.
- Workshop Evaluasi Kawasan Mandiri Pangan, sasarannya adalah pelaksana kegiatan Kawasan Mandiri Pangan tahun 2018 di 20 kawasan, 20 kabupaten pada 17 provinsi dan

Pengembangan Korporasi Usahatani (PKU) tahun 2019 di 13 PKU, 13 kab.di 12 provinsi.

➤ Pelaksanaan Kegiatan Kawasan Mandiri Pangan Tahun 2018

Kawasan Mandiri Pangan (KMP) tahap pengembangan tahun 2018 dilaksanakan di 17 Provinsi, 20 Kabupaten, 20 Kawasan dengan dana bantuan diberikan sebesar Rp. 100.000.000 untuk 1 desa 2 kelompok.

Tabel 70. Pelaksanaan Kawasan Mandiri Pangan 2018

No	Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Nama Kelompok	Kegiatan Usaha
1	Aceh	Aceh Tengah	Linge	Linge	Kel. Uten Datu	Sereh Wangi
					Kel. Genting Daling	Sereh Wangi
2	Sumbar	Pasaman	Panti	Nagari Panti	Kel. Panti Batuah	Budidaya Jagung
3	Bengkulu	Kaur	Tetap	Babat	Kel. Nabung	Ternak Itik
					Kel. Tebat Jelantang	Ternak Itik
4	Sumsel	OKI	Teluk Gelam	Benawan	Kel. Bina Keluarga	Ternak Kambing
					Kel. Mufakat	Ternak Kambing
5	Lampung	Lampung Selatan	Ketapang	Kemukus	Kel. Sahabat	Ternak kambing
					Kel. Makmur Jaya	Ternak Kambing
		Lampung Tengah	Bumi Ratu Nuban	Tulung Kakan	Kel. Sri Makmur	Budidaya Nenas
					Kel. Tani Makmur	Budidaya Nenas
6	Banten	Pandeglang	Cipeucang	Kondang	Kel. Cahaya Mekar 2	Budidaya Padi
					Kel. Cahaya Mekar 4	Ternak Kambing
7	Jabar	Cirebon	Babakan	Kudukeras	Kel. Afinitas Tani Mulya I	Budidaya Jagung
					Kel. Tani Mulya III	Budidaya Jagung
	Garut	Malangbong	Sukarasa	Kel. Tani Budidaya	Ternak Domba	
					Kel. Tani Surya II	Ternak Domba
8	DIY	Kulon Progo	Pengasih	Karangsari	KWT. Lestari	Ternak Kambing
					KWT Handayani	Ternak Kambing
9	Jateng	Kebumen	Ambal	Plempukan Kembaran	Kel. Sidomulyo	Ternak Kambing
					Kel. Mekarsari	Budidaya Jagung
10	Jatim	Probolinggo	Paiton	Randutatah	Kel. Tani Rahayu	Budidaya Cabe
					Kel. Randu Asri	Budidaya Cabe
11	Kalbar	Ketapang	Benua Kayong	Sungai Kinjil	Kel. Sejahtera I	Ternak Ayam buras
					Kel. Sejahtera II	Ternak Ayam buras
12	Kalsel	HSU	Haur Gading	Jingah Bujur	Kel. Harapan baru	Budidaya Padi
					Kel. Doa bersama	Budidaya Padi

No	Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Nama Kelompok	Kegiatan Usaha
13	Sulteng	Banggai	Luwuk Timur	Lontos	Kel. Tani Makmur	Budidaya Jagung
					Kel. Damak Jaya	Budidaya Jagung
14	Sulsel	Enrekang	Baraka	Parinding	Kel. Buntu Kecu	Ternak Kambing
					Kel. Tigaruk	Ternak Kambing
15	Bali	Gianyar	Tegallalang	Taro	Pokdakan Gunung Mekar	Budidaya sayur-sayuran dan bunga gemitir
					KWT Prameswari	Budidaya sayur-sayuran
16	NTB	Lombok Timur	Aikmel	Lenek Duren	Kel. Lintas Rinjani II	Budidaya jagung
					Kel. Pada Maju	Ternak Kambing
		Sumbawa	Moya Hulu	Berang Sea	Kel. Berang Belo	Budidaya sayuran
					Kel. Berang Sea	Budidaya sayuran
17	NTT	Alor	Alor Barat Daya	Pintu Mas	Kel. Tani Edo Kang	Sayuran dan ternak babi
					Kel. Tani He Aminang	Sayuran dan ternak babi

3) Neraca Bahan Makanan (NBM) Nasional

Tingkat ketersediaan pangan suatu daerah, baik yang berasal dari produksi domestik, cadangan/stok maupun impor adalah suatu ukuran yang mencerminkan cukup tidaknya pangan di suatu daerah. Penyusunan neraca bahan makanan dilakukan setiap tahun guna melihat dan mengukur tingkat ketersediaan pangan di suatu wilayah. Data ini dapat digunakan sebagai bahan perumusan kebijakan ketersediaan pangan nasional.

Ketersediaan zat gizi per kapita tahun 2018 (angka sangat sementara) dalam bentuk energi sebesar 3.306 Kalori/hari, protein 83,92 gram/hari yang terdiri dari protein nabati 60,01 gram/hari dan protein hewani 23,91 gram/hari, serta lemak 78,19 gram/hari. Kontribusi bahan pangan nabati terhadap ketersediaan energi, protein dan lemak total pada tahun 2018 masing-masing sebesar 93,73%, 71,51% dan 85,79%. Ketersediaan lemak per kapita per hari 6,26 gram (Th. 2018). Kelompok Makanan berpati diprediksikan terus meningkat, salah satunya disebabkan produksi sagu diperkirakan mencapai 390 ribu ton pada tahun 2018 (angka sangat sementara). Ketersediaan energi per kapita per hari dari kelompok gula pada tahun 2018 perkiraan sebesar 281 Kalori/kapita/hari. Trend terus meningkat terlihat pada perkiraan ketersediaan energi, protein dan lemak pada NBM tahun 2018. Peningkatan secara umum disebabkan oleh meningkatnya ketersediaan Kelompok buah/biji berminyak mencakup komoditas kacang tanah, kedelai, kacang hijau dan kelapa.

Tabel 71. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Tahun 2015 – 2018

No	Kelompok Bahan Makanan	2015		2016		2017*		2018**	
		Energi	Skor PPH						
1	Padi-padian	1.652	25,00	1.490	25,00	1.496	25,00	1.406	25,00
2	Umbi-umbian	262	2,50	291	2,50	238	2,50	229	2,50
3	Pangan Hewani	166	13,84	178	14,85	180	15,03	194	16,18
4	Minyak dan Lemak	299	5,00	456	5,00	505	5,00	785	5,00
5	Buah/biji berminyak	76	1,00	75	1,00	71	1,00	70	1,00
6	Kacang-kacangan	163	10,00	154	10,00	169	10,0	215	10,00
7	Gula	256	2,50	265	2,50	266	2,50	281	2,50
8	Sayuran dan buah	104	21,75	108	22,43	106	22,07	125	25,95
9	Lain-lain	-	-	-	0,00	-	0,0	-	0,00
Total		2.978	81,59	3.016	83,27	3.031	83,10	3.306	88,13

Keterangan : *) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

4) Food Security And Vulnerability Atlas (FSVA)

Hasil analisis FSVA tahun 2018 menunjukkan bahwa kabupaten rentan pangan Prioritas 1-3 sebanyak 81 kabupaten dari 416 kabupaten (19%) yang terdiri dari 26 kabupaten (6%) Prioritas 1; 21 kabupaten (5%) Prioritas 2; dan 34 kabupaten (8%) Prioritas 3. Kabupaten prioritas 1 tersebar di 17 kabupaten di Provinsi Papua, 6 Kabupaten di Provinsi Papua Barat, 2 kabupaten di Provinsi Maluku, dan 1 kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Karakteristik kabupaten rentan pangan ditandai dengan rasio konsumsi terhadap ketersediaan pangan tinggi, persentase balita stunting tinggi, serta angka kemiskinan yang tinggi.

Sementara itu, Kota Rentan Pangan Prioritas 1-3 sebanyak 7 Kota dari 98 kota di Indonesia (7,14%). Pada wilayah perkotaan, terdapat 2 kota (2%) Prioritas 1, yaitu Kota Subulussalam di Aceh dan Kota Tual di Maluku; 2 kota (2%) Prioritas 2, yaitu Kota Gunung Sitoli di Sumatera Utara dan Kota Pagar Alam di Sumatera Selatan; serta 3 kota (3%) Prioritas 3, yaitu Kota Tanjung Balai di Sumatera Utara, Lubuk Linggau di Sumatera Selatan, dan Tidore Kepulauan (Maluku Utara).

Program-program penanganan kerentanan pangan yaitu peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat; sosialisasi pola konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman; peningkatan akses rumah tangga terhadap air bersih; penanganan balita stunting; peningkatan sanitasi lingkungan dan perilaku hidup bersih dan sehat.

5) Indeks Ketahanan Pangan (IKP)

Hasil perhitungan IKP 2018 berdasarkan 9 indikator untuk wilayah kabupaten dan 8 indikator untuk wilayah kota yang mencerminkan 3 aspek ketahanan pangan memberikan gambaran peringkat (ranking) pencapaian ketahanan pangan wilayah (kabupaten dan kota) dibandingkan dengan wilayah lainnya. Secara umum wilayah Indonesia bagian barat memiliki nilai IKP lebih baik dibandingkan dengan Indonesia bagian timur (Lampiran).

6) Monitoring Penggilingan

Sampai saat ini data dan informasi stok gabah dan beras di penggilingan belum tersedia secara periodik, akurat, dan terkini sebagai bahan kebijakan ketersediaan pangan. Untuk itu

dilakukan monitoring jumlah stok gabah dan beras di penggilingan setiap minggu secara nasional, yang dilaksanakan di 1.000 unit penggilingan pada 64 kabupaten di 22 provinsi. Pelaksanaan Monitoring Stok gabah/beras di penggilingan meliputi :

- Pelatihan Koordinator Enumerator Monitoring Stok Gabah dan Beras di Penggilingan dilaksanakan untuk membangun kesamaan persepsi dan meningkatkan pemahaman bagi aparat daerah dalam pengumpulan data dan penyampaian laporan.
- Pengumpulan Data
Data Pendataan Penggilingan Padi (PIPA) BPS tahun 2012 diverifikasi ulang oleh enumerator dan petugas dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten, bila ditemukan perbedaan/perubahan, maka diganti dengan penggilingan yang lain serta dilaporkan ke pusat. Pengumpulan data bulanan dilakukan mulai dari data bulan Maret sampai dengan Desember setiap minggu.
- Supervisi Lapangan, dilakukan untuk mendukung kegiatan pengumpulan data, memperkuat koordinasi antara pusat dan daerah, memverifikasi data penggilingan yang masih aktif, data di Prov/Kab/Kota oleh enumerator dan petugas dari kabupaten, serta sebagai uji petik untuk mengkoscek data stok gabah/beras yang telah diterima dari enumerator.
- Pertemuan Evaluasi Monitoring Stok Gabah dan Beras di Penggilingan, diselenggarakan dalam rangka melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan monitoring stok gabah dan beras di penggilingan pada tahun 2018, khususnya dalam pengumpulan data dan penyampaian laporan dari kabupaten ke pusat (Badan Ketahanan Pangan Kementan).
- Pengolahan Data dilakukan setiap hari Jum'at untuk dilaporkan kepada Kepala Badan Ketahanan Pangan, sedangkan laporan kepada Menteri Pertanian pada setiap akhir bulan.
- Hasil dan Pembahasan
 - ✓ Jumlah sampel per provinsi, 1.000 penggilingan yang tersebar di 64 Kabupaten di 22 Provinsi;

Tabel 72. Jumlah sampel per provinsi berdasarkan kapasitas penggilingan

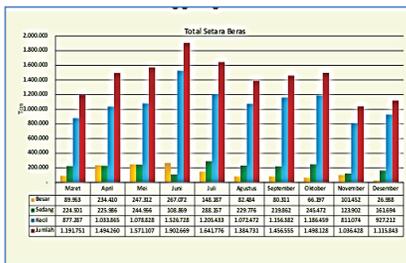
No	Provinsi	Jumlah Sampel			Total
		Besar	Sedang	Kecil	
1	Bali		1	10	11
2	Aceh	1	1	12	14
3	DI Yogyakarta		1	10	11
4	Jambi			7	7
5	Jawa Barat	10	32	217	259
6	Jawa Tengah		4	121	125
7	Jawa Timur		8	100	108
8	Kalimantan Barat		1	39	40
9	Kalimantan Selatan			21	21
10	Kalimantan Tengah			11	11
11	Kalimantan Timur		1	8	9
12	Lampung		1	58	59
13	Nusa Tenggara Barat			10	10
14	Riau			4	4
15	Sulawesi Barat			7	7
16	Sulawesi Selatan	5	12	109	126
17	Sulawesi Tengah			9	9
18	Sulawesi Tenggara		1	10	11
19	Sulawesi Utara			11	11
20	Sumatera Barat		1	17	18
21	Sumatera Selatan	2	6	93	101
22	Sumatera Utara		1	27	28
	Total	17	71	912	1000

- ✓ Presentase Jumlah Laporan yang Masuk Selama Bulan Maret sampai Desember 2018.

Tabel 73. Persentase jumlah laporan masuk per provinsi bulan Maret–Desember 2018

No	Provinsi	Persentase Jumlah Laporan Masuk										Rata-rata
		Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des	
1	Aceh	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,0
2	Sumatera Utara	87,5	87,5	85	93,75	100	100	100	100	100	100	95,4
3	Sumatera Barat	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,0
4	Riau	75	100	80	100	100	100	100	80	75	75	88,5
5	Jambi	100	100	100	100	100	100	100	100	50	100	95,0
6	Sumatera Selatan	100	100	88,9	100	86,7	100	94,4	77,8	83,3	83,3	91,4
7	Lampung	100	75	86,7	75	86,7	100	100	100	100	100	92,3
8	Jawa Barat	100	100	93,6	80	87,2	100	100	95,2	100	100	95,6
9	Jawa Tengah	88,5	95,8	93,3	87,5	93,3	97,9	91,7	100	100	100	94,8
10	Jawa Timur	100	100	100	93,2	100	100	100	100	100	100	99,3
11	DI Yogyakarta	50	100	60	100	40	100	100	100	100	50	80,0
12	Kalimantan Barat	87,5	100	50	50	50	37,5	50	15	75	12,5	52,8
13	Kalimantan Selatan	100	87,5	100	75	90	100	100	80	87,5	50	87,0
14	Kalimantan Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
15	Kalimantan Timur	100	75	80	100	100	100	100	80	75	0	81,0
16	Bali	100	100	80	50	40	100	100	80	100	25	77,5
17	Nusa Tenggara Barat	100	100	100	100	100	50	0	80	100	50	78,0
18	Sulawesi Selatan	91,7	100	100	100	80	100	100	100	95,83	93,75	96,1
19	Sulawesi Barat	50	100	100	100	20	100	100	100	100	100	87,0
20	Sulawesi Tengah	100	75	20	0	20	25	25	0	0	0	26,5
21	Sulawesi Utara	100	75	60	100	60	100	100	100	100	100	89,5
22	Sulawesi Tenggara	100	100	100	50	100	100	100	100	75	0	82,5
	Rata-rata	87,7	89,6	80,8	79,7	75,2	86,8	84,6	81,3	82,6	65,4	81,4

✓ Total Stok Setara Beras di Penggilingan Pada Bulan Maret – Desember 2018 adalah 1.902.669 ton.

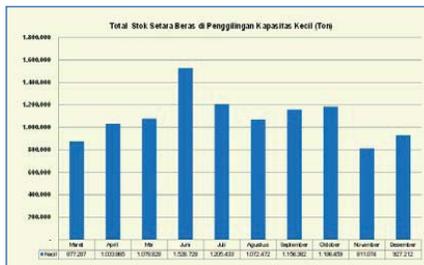


Gambar 18. Stok Setara Beras di Penggilingan Pada Bulan Maret – Desember 2018

Gambar 19. Stok setara beras di penggilingan kapasitas besar bulan Maret-Desember 2018



Gambar 20. Stok setara beras di penggilingan kapasitas sedang pada bulan Maret – Desember 2018



Gambar 21. Stok gabah dan beras di penggilingan kapasitas kecil bulan Maret – Desember 2018

- ✓ Presentase Stok Setara Beras di Penggilingan Terhadap Produksi Beras di Indonesia Bulan Maret-Desember 2018, berkisar antara 1.036.428 ton hingga 1.902.669 ton.



Gambar 22. Presentase stok setara beras di penggilingan terhadap produksi beras bulan Maret Desember 2018

7) Smallholder Livelihood Development In Eastern Indonesia (SOLID)

Berdasarkan hasil survey tahun 2018, tingkat kesejahteraan penerima manfaat SOLID lebih baik dibandingkan dengan tingkat kesejahteraan bukan penerima. Hal tersebut sejalan dengan hasil annual outcome survey 2018 dimana penerima manfaat program mempunyai tingkat kesejahteraan yang lebih baik (57 persen) dibandingkan rumah tangga non penerima (25 persen). Hasil survey akhir kegiatan diketahui bahwa penerima manfaat mengalami peningkatan pendapatan per kapita per bulan dari Rp. 242.101 (2012) menjadi Rp. 285.148 (2014) dan Rp. 438.975 (2018). Selain itu penerima manfaat juga mengalami peningkatan indeks kepemilikan aset dari 0,37 (2012) menjadi 0,54 (2018).

Distribusi Dan Cadangan Pangan

1) Koefisien Variasi Harga Komoditas Pertanian Statis di Tingkat Produsen

- Koefisien Variasi Harga Gabah Kering Panen (GKP) tingkat petani selama Tahun 2018 sebesar 3,24 persen. Data Panel Harga BKP 2018, rerata harga GKP tingkat petani selama Tahun 2018 adalah Rp4.675/Kg. Tingkat harga ini di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp3.700/kg, sehingga dapat disimpulkan jika petani dalam kondisi diuntungkan.
- Koefisien Variasi Harga Jagung Pipilan Kering tingkat petani sebesar 7,66%. Angka ini sesuai dengan target karena dibawah angka maksimal yang ditetapkan yaitu < 10 persen. Data panel harga pangan BKP tahun 2018, rerata harga jagung pipilan kering tingkat petani

selama Tahun 2018 adalah Rp 3.451/Kg. Maka capaian tahun 2018 telah mencapai target, artinya harga jagung pipilan kering tingkat petani stabil.

- Koefisien Variasi Harga Kedelai Biji Kering, tingkat petani sebesar 1,51%. Angka ini sesuai dengan target karena dibawah angka maksimal yang ditetapkan yaitu ≤ 10 persen.
- Koefisien Variasi Harga Bawang Merah tingkat petanisebesar 16,99%. Angka ini sesuai dengan target karena dibawah angka maksimal yang ditetapkan yaitu ≤ 25 persen. Data panel harga pangan BKP tahun 2018, rerata harga bawang merah tingkat petani selama Tahun 2018 adalah Rp 18.727/kg, capaian tahun 2018 telah mencapai target, harga bawang merah tingkat petani stabil.
- Koefisien Variasi Harga Cabai Merah Keriting tingkat petani sebesar 20,93%. Angka ini sesuai dengan target karena dibawah angka maksimal yang ditetapkan yaitu < 30 persen. Data panel harga pangan BKP tahun 2018, rata-rata harga cabai merah keriting tingkat petani selama Tahun 2018 adalah Rp 23.676/kg, capaian tahun 2018 telah mencapai target, artinya harga cabai merah keriting tingkat petani stabil.

Tabel 74. Perkembangan Harga dan Nilai Koefisien Variasi Harga Pangan Tingkat Produsen Th. 2018

No	Komoditas	Rata-rata Jan'18	Rata-rata Feb'18	Rata-rata Mar'18	Rata-rata Apr'18	Rata-rata Mei'18	Rata-rata Jun'18	Rata-rata Jul'18	Rata-rata Agust'18	Rata-rata Sept'18	Rata-rata Okt'18	Rata-rata Nov'18	Rata-rata Des'18	Rata-rata	Maks	Min	CV (%)
1	GKP Tk Petani	4,879	4,911	4,663	4,495	4,472	4,504	4,552	4,622	4,687	4,709	4,781	4,822	4,675	4,911	4,472	3,24
2	Beras Medium Tk Penggilingan	9,643	9,822	9,424	9,133	9,060	9,052	9,068	9,144	9,166	9,240	9,304	9,377	9,286	9,822	9,052	2,63
3	Jagung	3,538	3,366	3,227	3,204	3,251	3,256	3,320	3,424	3,543	3,791	3,396	4,098	3,451	4,098	3,204	7,66
4	Kedelai	7,037	6,895	6,877	6,683	6,734	6,800	6,821	6,860	6,914	7,007	6,790	6,798	6,851	7,037	6,683	1,51
5	Bawang Merah	16,742	15,890	18,674	22,551	23,669	23,376	20,699	18,354	15,498	14,467	16,266	18,534	18,727	23,669	14,467	16,99
6	Cabai Merah Keriting	32,692	28,821	28,615	28,767	24,257	21,967	22,972	21,202	17,226	19,589	19,192	18,809	23,676	32,692	17,226	20,93
7	Cabai Rawit Merah	28,659	33,573	36,694	32,172	25,375	21,722	32,924	28,083	21,660	23,482	23,169	22,716	27,519	36,694	21,660	19,11
8	Sapi Hidup	57,777	55,896	47,182	47,970	47,890	49,005	48,631	49,344	49,316	48,951	48,880	48,647	49,957	57,777	47,182	6,60

Sumber: Panel Harga BKP

2) Koefisien Variasi Harga Pangan di Tingkat Konsumen

Target nilai koefisien variasi harga komoditas pangan strategis nasional di tingkat konsumen untuk Tahun 2018 ditetapkan dibawah 10-30 persen (Untuk komoditas beras, jagung, kedelai, gula pasir dan daging sapi maksimal 10%; bawang merah maksimal 25% dan cabai maksimal 30%).

- Koefisien Variasi Harga Beras Medium
Berdasarkan hasil analisa data panel harga pangan BKP tahun 2018, rata-rata harga beras medium di tingkat eceran selama Tahun 2018 adalah Rp 11.080/Kg dan capaian kinerja koefisien variasi harga beras medium sebesar 1,95%. Angka ini sesuai dengan target karena dibawah angka maksimal yang ditetapkan yaitu ≤ 10 persen.
- Koefisien Variasi Harga Jagung Pipilan Kering
Berdasarkan hasil analisa data panel harga pangan BKP tahun 2018, rata-rata harga jagung pipilan kering tingkat eceran selama Tahun 2018 adalah Rp 6.407/Kg dan capaian kinerja koefisien variasi harga jagung pipilan kering tingkat eceran sebesar 2,79%. Angka ini sesuai dengan target karena dibawah angka maksimal yang ditetapkan yaitu ≤ 10 persen.
- Koefisien Variasi Harga Kedelai Biji Kering
Berdasarkan hasil analisa data panel harga pangan BKP tahun 2018, rata-rata harga kedelai biji kering tingkat eceran selama Tahun 2018 adalah Rp 9.981/kg dan capaian

kinerja koefisien variasi harga kedelai biji kering tingkat eceran sebesar 1,75%. Angka ini sesuai dengan target karena dibawah angka maksimal yang ditetapkan yaitu ≤ 10 persen.

➤ Koefisien Variasi Harga Gula Pasir

Berdasarkan hasil analisa data panel harga pangan BKP tahun 2018, rata-rata harga gula pasir di tingkat konsumen selama Tahun 2018 adalah Rp 12.565/kg dan capaian kinerja koefisien variasi harga bawang merah tingkat eceran sebesar 1.17%. Angka ini sesuai dengan target karena dibawah angka maksimal yang ditetapkan yaitu ≤ 10 persen.

➤ Koefisien Variasi Harga Bawang Merah

Berdasarkan hasil analisa data panel harga pangan BKP tahun 2018, rata-rata harga bawang merah tingkat eceran selama Tahun 2018 adalah Rp 27.727/kg dan capaian kinerja koefisien variasi harga bawang merah tingkat eceran sebesar 16,39%. Angka ini sesuai dengan target karena dibawah angka maksimal yang ditetapkan yaitu ≤ 25 persen.

➤ Koefisien Variasi Harga Cabai Merah Keriting

Berdasarkan hasil analisa data panel harga pangan BKP tahun 2018, rata-rata harga cabai merah keriting tingkat eceran selama Tahun 2018 adalah Rp 35.636/kg dan capaian kinerja koefisien variasi harga cabai merah keriting tingkat eceran sebesar 10,43%. Angka ini sesuai dengan target karena dibawah angka maksimal yang ditetapkan yaitu ≤ 30 persen.

➤ Koefisien Variasi Harga Daging Sapi

Berdasarkan hasil analisa data panel harga pangan BKP tahun 2018, rata-rata harga daging sapi selama Tahun 2018 adalah Rp 118.337/kg dan capaian kinerja koefisien variasi harga daging sapi sebesar 1,17%. Angka ini sesuai dengan target karena dibawah angka maksimal yang ditetapkan yaitu ≤ 10 persen.

Tabel 75. Perkembangan Harga dan Nilai Koefisien Variasi Harga Pangan Tingkat Konsumen Tahun 2018

No	Komoditas	Rata-rata Jan'18	Rata-rata Feb'18	Rata-rata Mar'18	Rata-rata Apr'18	Rata-rata Mei'18	Rata-rata Jun'18	Rata-rata Jul'18	Rata-rata Agust'18	Rata-rata Sept'18	Rata-rata Okt'18	Rata-rata Nov'18	Rata-rata Des'18	Rata-rata	Maks	Min	CV (%)
1.	Beras Premium	12,890	12,981	12,685	12,516	12,346	12,346	12,291	12,288	12,311	12,346	12,412	12,466	12,454	13,045	12,210	1,88
2.	Beras Medium	11,478	11,565	11,272	11,131	10,982	10,974	10,909	10,919	10,956	10,981	11,083	11,123	11,080	11,621	10,834	1,95
4.	Jagung Pipilan Kering	6,500	6,330	6,299	6,295	6,295	6,226	6,270	6,351	6,404	6,513	6,672	6,815	6,407	6,882	6,210	2,79
5.	Kedelai Biji Kering	9,793	9,630	9,889	9,852	9,978	10,027	9,969	10,117	10,096	10,102	10,044	10,078	9,981	10,242	9,521	1,76
6.	Bawang Merah	22,982	23,078	26,596	33,798	34,451	33,511	29,648	26,650	23,957	22,034	24,312	27,924	27,727	35,345	21,504	16,39
9.	Cabai Merah Keriting	38,948	38,763	42,081	40,764	36,639	36,469	35,793	34,792	30,180	32,808	31,807	31,774	35,636	42,937	29,618	10,43
10.	Cabai Rawit Merah	42,588	45,747	51,061	46,164	38,434	41,224	49,377	43,234	34,101	34,933	35,520	37,903	41,486	53,622	32,789	13,92
11.	Daging Sapi Murni	117,464	116,344	117,213	117,498	118,415	120,824	118,527	118,776	118,474	118,306	118,470	118,823	118,337	124,789	115,386	1,17
14.	Gula Pasir	12,614	12,537	12,651	12,699	12,727	12,719	12,659	12,589	12,549	12,435	12,364	12,262	12,565	12,769	12,208	1,17

Sumber: Panel Harga BKP

3) Dukungan Instansi Lain Penunjang Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian pencapaian stabilitas harga pangan pokok dan strategis tidak lepas dari hasil sinergitas dan langkah koordinatif Badan Ketahanan Pangan khususnya Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan dengan seluruh instansi dan Lembaga terkait, yaitu:

- Badan Pusat Statistik (BPS)
- Kementerian Perdagangan
- BULOG

- Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Pasar Induk Kramat Jati (PIKJ) dan PD. Pasar Jaya
- Direktorat Jenderal Teknis di Lingkup Kementerian Pertanian

4) Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat melalui Toko Tani Indonesia

Dana Bantuan Pemerintah bersumber APBN Tahun 2018 untuk Tahap Penumbuhan dialokasikan untuk Kegiatan PUPM kepada 500 (lima ratus) di 16 provinsi yaitu Aceh, Sumut, Sumbar, Sumsel, Lampung, Banten, Jabar, Jateng, DI.Yogyakarta, Jatim, Kalbar, Kalsel, Bali, NTB, Sulsel, dan Gorontalo. Tahap Pengembangan dialokasikan kepada 406 (empat ratus enam) Gapoktan/LUPM di 7 provinsi yaitu Sumsel, Lampung, Banten, Jabar, Jateng, Jatim, dan NTB. Tahap Pembinaan dialokasikan kepada 250 LUPM di 20 provinsi yaitu Sumut, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu, Lampung, Banten, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Bali, NTB, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Sulsel, Sulut, Gorontalo dan Maluku Utara.

Tabel 76. Target dan Realisasi Banper Kegiatan PUPM/TTI tahun 2018

No	Provinsi	Jumlah LUPM											
		Penumbuhan 2018				Pengembangan 2017				Pembinaan 2016			
		LUPM		pagu Rp.(000)	%	LUPM		pagu Rp.(000)	%	LUPM		pagu Rp.(000)	%
		alokasi	realisasi			alokasi	realisasi			alokasi	realisasi		
1	Sumatera Selatan	51	51	8,160	100	20	19	1,140	95	12	12	720	100
2	Sumatera Utara	26	26	4,160	100	-	-	-	-	20	20	1,200	100
3	DI. Yogyakarta	10	10	1,600	100	-	-	-	-	10	10	600	100
4	Jawa Tengah	76	76	12,160	100	70	70	4,200	100	34	34	2,040	100
5	Aceh	8	8	1,280	100	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Bali	8	8	1,280	100	-	-	-	-	4	4	240	100
7	Lampung	43	43	6,880	100	35	35	2,100	100	17	17	1,020	100
8	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	240	100
9	Kalimantan Selatan	10	10	1,600	100	-	-	-	-	4	4	240	100
10	Nusa Tenggara Barat	13	13	2,080	100	10	10	600	100	6	6	360	100
11	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	120	100
12	Sulawesi Selatan	68	68	10,880	100	-	-	-	-	22	22	1,320	100
13	Jawa Barat	80	80	12,800	100	123	123	7,380	100	40	40	2,400	100
14	Sumatera Barat	8	8	1,280	100	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Jawa Timur	55	55	8,800	100	50	50	3,000	100	30	29	1,740	96.67
16	Gorontalo	8	8	1,280	100	-	-	-	-	2	2	120	100
17	Banten	26	26	4,160	100	98	98	5,880	100	20	20	1,200	100
18	Riau	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	360	100
19	Jambi	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	240	100
20	Kalimantan Barat	10	10	1,600	100	-	-	-	-	5	5	300	100
21	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	240	100
22	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	240	100
Total		500	500	80,000	100	406	405	24,300	99.75	250	249	14,940	99.60

Sumber: Bidang Distribusi, BKP

Pasokan/pengadaankomoditas pangan dari Gapoktan/LUPM tertinggi terjadi pada bulan April, Mei dan Juni bertepatan dengan menjelang dan awal bulan Ramadhan dan menjelang hari raya Idul Fitri. Tingginya jumlah pasokan ini disesuaikan dengan jumlah permintaan yang melonjak terhadap komoditas tersebut.

Gambar 23. Pengadaan Beras, Bawang Merah Per Bulan 2018



5) Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah (CBP) Pusat

Berdasarkan data CBP bahwa rata-rata stok cadangan beras pemerintah selama 4 tahun terakhir mengalami peningkatan signifikan, dengan total yang dikuasai pemerintah pada tahun 2018 sebesar 2.038.385 ton.

Tabel 77. Perkembangan Cadangan Beras Pemerintah Tahun 2015 - 2018

URAIAN	Tahun (ton)			
	2015	2016	2017	2018
Stok Awal (Ton)	173.206	103.814	17.872	232.826
Tambahan CBP (Ton)	180.309	225.606	286.664	2.356,636
Pemanfaatan CBP				
- Bantuan darurat/bencana	9.271	8.507	13.713	6.953
- Pengendalian Harga Beras (OPM)	138.139	303.042	58.156	544.124
- OPK - CBP Raskin	102.291	-	-	-
Total Pemanfaatan	249.701	311.549	71.868	551.077
Stok Akhir	103.814	17.872	232.804	2.038.385

Sumber: Laporan Perum BULOG, 31 Desember 2018

6) Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD)

Berdasarkan laporan dari Dinas Ketahanan Pangan provinsi, jumlah cadangan pangan yang dimiliki provinsi di 26 provinsi sebesar 4.123,62 ton.

Tabel 78. Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Provinsi Tahun 2016 – 2018

No	Provinsi	Tahun						
		2016		2017		2018		
		Stok	Penyaluran	Stok	Penyaluran	Stok	Penyaluran	Stok Akhir
1	Aceh	255,50	108,33	247,07	12,51	284,56	31,5	253,06
2	Sumatera Utara	-	-	-	-	67,00	67	-
3	Sumatera Barat	367,00	35,00	332,00	30,00	402,00	59,842	342,16
4	Riau	457,78	109,93	347,84	42,11	305,74	70	235,74
5	Kepulauan Riau	-	-	51,92	14,73	38,93	18,576	20,35
6	Jambi	90,00	-	97,00	41,74	67,26	5,402	61,86
7	Bengkulu	47,08	-	36,61	6,10	45,97	0	45,97
8	Sumatera Selatan	262,31	128,71	13,50	2,50	20,73	2,00	18,73
9	Bangka Belitung	-	-	48,00	27,00	20,99	0	20,99
10	Lampung	356,25	63,40	156,57	54,86	250,96	0	250,96
11	Banten	130,49	54,14	108,25	(357,75)	466,00	259	207,00
12	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	0	-
13	Jawa Barat	1.038,38	555,81	1.110,22	208,01	941,14	148,899	792,24
14	Jawa Tengah	-	-	276,12	175,62	286,88	105,44	181,45
15	DI Yogyakarta	283,50	95,39	188,11	4,49	198,11	4,491	193,62
16	Jawa Timur	203,78	-	84,61	26,65	171,23	140,03	31,20
17	Kalimantan Barat	285,85	109,65	269,16	22,29	246,83	0	246,83
18	Kalimantan Tengah	65,30	1,00	79,05	-	79,05	0	79,05

19	Kalimantan Selatan	127,32	-	135,00	12,25	122,75	0	122,75
20	Kalimantan Timur	221,49	-	212,00	49,90	162,10	20,60	141,50
21	Sulawesi Utara	116,80	3,37	125,92	1,00	66,94	0	66,94
22	Gorontalo	-	-	-	-	-	0	-
23	Sulawesi Tengah	124,43	120,71	164,96	99,15	65,80	29,36	36,44
24	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	0	-
25	Sulawesi Selatan	250,08	3,56	140,00	-	140,00	0	140,00
26	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	0	-
27	N T B	156,22	14,01	164,77	27,59	137,18	31,42	105,76
28	N T T	80,44	-	184,44	100,00	330,84	0	330,84
29	Bali	-	-	-	-	-	0	-
30	Maluku Utara	-	-	-	-	-	0	-
31	Maluku	8,93	6,00	39,00	4,00	2,93	0	2,93
32	Papua Barat	-	-	-	-	-	0	-
33	Papua	64,91	-	147,80	19,53	128,27	0	128,27
34	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	4.993,82	1.409,01	4.759,91	624,27	5.050,17	993,56	4.056,62

Sumber: Laporan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi (diolah BKP)

7) Penyusunan Permentan tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah

Pengelolaan CBP tidak hanya menyangkut kewenangan yang ada di Kementerian Pertanian, namun juga mencakup kementerian/lembaga terkait sektor keuangan, perdagangan, dan sosial, serta di bawah payung koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, untuk itu diatur pula mengenai mekanisme pelepasannya. Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah tertuang dalam Permentan Nomor 38/Permentan/KN.130/8/2018 tanggal 28 Agustus 2018.

8) Penyusunan Peraturan Presiden tentang Ratifikasi Amandemen Perjanjian ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve (APTERR)

Penyusunan Peraturan Presiden tentang Ratifikasi ini diperlukan untuk pengganti Perpres Nomor 62 Tahun 2012 tentang Pengesahan APTERR Agreement. Pengesahan Perpres pengganti ini akan menjadi dasar bagi perpanjangan iuran kontribusi APTERR Fase-2 (2018 – 2022). Untuk penyusunan Perpres ini Menteri Pertanian perlu mengajukan ijin prakarsa kepada Presiden RI untuk proses Ratifikasi Amendemen Perjanjian ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve (APTERR) melalui Menteri Luar Negeri.

9) Identifikasi Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)

Pengembangan cadangan pangan masyarakat tahun 2018 difokuskan pada kegiatan Identifikasi Lumbung Pangan Masyarakat (LPM). Identifikasi dilakukan guna mendapatkan data terbaru dari LPM yang menjadi calon penerima Bantuan Pemerintah (Banper) berupa pemberian fasilitas melalui APBN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pengisian cadangan pangan pada lumbung pangan yang sudah masuk maupun yang akan masuk tahap pengembangan. Hasil identifikasi LPM ini menjadi dasar pelaksanaan pemberian Bantuan Pemerintah tahun 2019.

10) Laporan Hasil Data dan Informasi Pasokan dan Harga Pangan Strategis

Kegiatan panel harga tahun 2018, dilaksanakan di tingkat produsen dan konsumen (grosir dan eceran) di 34 provinsi dan 500 kabupaten/kota dengan jumlah enumerator sebanyak 866 orang. Selain itu pelaksanaan panel dilakukan juga di konsumen (eceran) di pasar Jabodetabekkarpur dengan jumlah enumerator 50 orang. Dari target tersebut, terealisasi 100 persen sebagaimana tahun 2017. Rincian pelaksanaan kegiatan Laporan Data/Informasi Pasokan dan Harga Pangan Provinsi Tahun 2015-2018 seperti pada tabel berikut.

Tabel 79. Pelaksanaan Kegiatan Laporan Data/Informasi Pasokan dan Harga Pangan Provinsi Tahun 2015-2018

Tahun	Jumlah Provinsi Pelaksana			Jumlah Kab/Kota Pelaksana		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
2015	34	34	100,00	270	514	190,37
2016	34	34	100,00	514	514	100,00
2017	34	34	100,00	514	514	100,00
2018	34	34	100,00	500	500	100,00

11) Penyusunan Prognosa Neraca Pangan

Prognosa kebutuhan dan ketersediaan pangan tahun 2018 mencakup 12 komoditas pangan pokok, yaitu beras, jagung, kedelai, kacang tanah, gula pasir, minyak goreng, bawang merah, cabai besar, cabai rawit, daging sapi, daging unggas, dan telur unggas. Berdasarkan hasil perhitungan prognosa produksi dan kebutuhan pangan pada tahun 2018, dari 12 komoditas bahan pangan yang dipantau, terdapat 3 (tiga) komoditas yang defisit, yaitu kedelai 25,37%, kacang tanah 7,87%, serta daging sapi/kerbau 35,19%.

Penganekaragaman Konsumsi Dan Keamanan Pangan

1) Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)

Pada tahun 2018 jumlah KRPL yang diberdayakan sebanyak 2300 kelompok wanita/kelompok masyarakat lainnya Tahap Penumbuhan pada 442 kabupaten di 33 provinsi. Untuk setiap desa baru tahun 2018 mendapatkan bantuan pemerintah (banper) sebesar Rp.50.000.000 dengan rincian:

- ✓ Rp15.000.000 pengembangan pekarangan anggota
- ✓ Rp20.000.000 kebun bibit
- ✓ Rp7.000.000 demplot
- ✓ Rp5.000.000 pengembangan kebun sekolah
- ✓ Rp3.000.000 praktek pengembangan menu B2SA di kelompok

2) Pengembangan Pangan Pokok Lokal (P3L)

Pada Tahun 2018, Kegiatan Pengembangan Pangan Pokok Lokal dilaksanakan di 15 kabupaten di 13 provinsi yang memiliki potensi pangan lokal berupa sagu, jagung, dan umbi-umbian. Alokasi anggaran kegiatan P3L diberikan dana bantuan pemerintah sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) per lokasi.

3) Analisis Konsumsi Pangan tahun 2018 melalui kegiatan :

- Bimbingan Teknis
 - ✓ Bimtek peningkatan kapasitas aparat dalam pengembangan konsumsi pangan B2SA dilaksanakan pada tanggal 4-5 April 2018 bertempat di Hotel Onih, Jl. Paledang No. 50-52, Bogor, Jawa Barat.
 - ✓ Bimbingan teknis peningkatan kapasitas aparat dalam analisis konsumsi pangan dilaksanakan selama dua hari pada tanggal 5-6 April 2018, bertempat di Hotel Onih, Jl. Paledang No. 50-52, Bogor, Jawa Barat.
- Penyusunan Direktori Perkembangan Konsumsi Pangan Tahun 2018

Penyusunan Direktori Perkembangan Konsumsi Pangan Tahun 2018

Target penanganan jumlah kasus pangan segar nasional yang membahayakan kesehatan manusia menjadi sasaran strategis terkait dengan upaya penyediaan pangan segar asal tumbuhan (PSAT) yang aman dan bermutu dalam rangka perlindungan terhadap kesehatan masyarakat. Dengan mempertimbangkan kemampuan dan ketersediaan sumber daya yang dimiliki, maka sasaran strategis ini difokuskan pada PSAT yang bernilai strategis secara nasional, seperti beras, jagung, dan kedelai. Berdasarkan monitoring terhadap kasus pangan segar komoditas strategis nasional yang membahayakan manusia pada tahun 2018 maka dicapai nilai penanganan 100%, karena sepanjang tahun 2018 tidak terjadi kasus keamanan pangan segar terkait komoditas strategis tersebut.

Kegiatan sertifikasi PSAT ini merupakan salah satu bentuk pengawasan sebelum peredaran (pre-market) yang dilakukan oleh OKKPP maupun OKKPD. Sertifikasi keamanan PSAT atau Sertifikasi Prima merupakan jaminan pemenuhan persyaratan keamanan pangan di tingkat proses produksi (On Farm). Sertifikasi Prima dibedakan menjadi sertifikasi Prima 1, Prima 2 dan Prima 3.

No	Jenis Sertifikat	Jumlah
1	Prima 1	38
2	Prima 2	4
3	Prima 3	123

Tabel 80. capaian Sertifikasi Prima tahun 2018

K. Pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati

Sekretariat Badan Karantina Pertanian

➤ Perencanaan

Dalam rangka memfasilitasi kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan karantina pertanian serta rencana kerja dan penyusunan anggaran di TA. 2018 telah dilaksanakan beberapa kegiatan yang menghasilkan output dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan karantina pertanian tahun 2018.

Capaian Output Bagian Perencanaan

- ✓ Dokumen Rencana Kerja dan Penyusunan Kegiatan 58 Dokumen
- ✓ Dokumen Penyusunan Anggaran 57 Dokumen
- ✓ Evaluasi dan Pelaporan 19 Laporan

➤ Keuangan dan Perlengkapan

Bagian keuangan dan perlengkapan melaksanakan urusan perbendaharaan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), penyiapan pengujian dan penerbitan surat perintah membayar (SPM), melaksanakan urusan akuntansi dan verifikasi anggaran serta melaksanakan urusan perlengkapan. Selama TA. 2018, output yang dihasilkan bagian keuangan dan perlengkapan sebagai berikut :

- ✓ Laporan Realisasi Anggaran Satker Pusat, 12 Lap
- ✓ Laporan Keuangan Satker Pusat, 3 Lap
- ✓ Laporan Pengelolaan BMN Satker Pusat, 3 Lap
- ✓ Laporan PNBP Satker Pusat, 12 Lap
- ✓ Laporan Pengelolaan BMN Barantan, 3 Lap
- ✓ Laporan Realisasi Anggaran Barantan, 12 Lap
- ✓ Laporan Keuangan Barantan, 3 Lap
- ✓ Laporan Tindak Lanjut LHP, 3 Lap
- ✓ Laporan PNBP Barantan, 4 Lap

➤ Bagian Umum

Bagian umum melaksanakan penyempurnaan organisasi dan tata laksana, melaksanakan urusan kepegawaian serta melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga. Selama TA. 2018, output yang dihasilkan bagian umum sebagai berikut:

- ✓ Organisasi dan tata laksana
 - a) Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) pada TA. 2018 sejumlah 3.690 SKP, Pusat dan UPT,
 - b) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) UPT lingkup Badan Karantina Pertanian Tahun 2018 mendapat kategori A dengan nilai IKM 84,61 (sangat baik)
 - c) Indeks Penilaian dan Nilai Kualitas Budaya Kerja (IPNBK) pegawai Badan Karantina Pertanian, TA. 2018 sebesar 89,04 (sangat baik).
 - d) Sertifikasi SNI diperoleh oleh Badan Karantina sebagai berikut :
 - (1) Akreditasi Lab UPT, jumlah 46 sertifikat SNI ISO 17025: 2008;

- (2) Sertifikasi Pelayanan UPT, jumlah 39 sertifikat SNI ISO 9001 : 2015;
- (3) Sertifikasi Pelayanan UPT jumlah 36 sertifikat SNI ISO 37001: 2016
- (4) Sertifikasi BUTTMKP, jumlah 1 sertifikat SNI ISO 45001: 2016

✓ Kepegawaian

Pengembangan SDM merupakan salah satu terobosan yang dilakukan untuk mengoptimalkan peran Badan Karantina Pertanian melalui peningkatan kompetensi SDM baik melalui pendidikan formal maupun pendidikan dan pelatihan. Potensi SDM di Badan Karantina Pertanian sampai Tahun 2018 berdasarkan data SIMPEG/SIM ASN tercatat sebanyak 3.690 pegawai.

Sedangkan SDM Kewasdakan (PPNS, POLSUS dan Intelijen) tersebar selain di pusat, lima Balai Besar Karantina Pertanian, Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian; Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian; 26 Balai Karantina Pertanian serta 19 Stasiun Karantina Pertanian berjumlah 783 petugas. Dari jumlah SDM Kewasdakan tersebut terdiri dari petugas PPNS berjumlah 358 orang, POLSUS 162 orang dan Intelijen 263 orang.

Pegawai Badan Karantina Pertanian yang sedang Ijin Belajar melanjutkan ke jenjang Pendidikan S-2 dan S-3 sejumlah 30 orang pegawai terdiri dari 16 pegawai pendidikan S2 dan 14 pegawai pada jenjang S3. Sedangkan yang mendapat Tugas Belajar berjumlah 46 orang pegawai, terdiri dari 40 orang pegawai mengikuti program S2 dan enam orang pegawai pada program S3. Tahun 2018 pendidikan dan pelatihan (diklat) reguler bidang karantina berjumlah 163 petugas. Dan jumlah pegawai pada tahun 2018, yang keluar dari Badan Karantina Pertanian sebanyak 112 Orang, serta pegawai yang mendapat sanksi ringan sampai berat berjumlah 25 pegawai (PP No. 53 tahun 2010).

✓ Tata Usaha dan rumah tangga

Kegiatan pengelolaan ketatausahaan dan rumah tangga tahun 2018 menghasilkan output sebagai berikut :

- a) Layanan Umum dan Perlengkapan 12 Laporan
- b) Layanan Perkantoran 12 Laporan

➤ Bagian Hukum dan Humas

Bagian hukum dan humas melaksanakan Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang perkarantina hewan dan keamanan hayati hewani dan perkarantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati, serta pelaksanaan urusan hubungan masyarakat dan informasi publik. Tahun 2018 output yang dihasilkan oleh Bagian hukum dan humas adalah sebagai berikut:

- ✓ Peraturan Perkarantina; tahun 2018 peraturan perkarantina yang telah disahkan sebanyak 4 Permentan, 30 Kepmentan, dan 72 SK Kepala Badan Karantina Pertanian;
- ✓ Layanan Kehumasan; tahun 2018 telah dilaksanakan beberapa layanan kehumasan dalam rangka meningkatkan layanan perkarantina bagi masyarakat dan pengguna jasa. Jenis layanan kehumasan sebagai berikut :
 - a) Isu Perkarantina di Media Massa, 1.688 berita
 - b) SMS Center (PPID = 202, Dumas = 10), 230
 - c) Media Sosial (PPID = 123, Dumas = 20), 143
 - d) Email (PPID = 54, Dumas = 21), 75

- e) WA (PPID = 178, Dumas = 5), 183
- f) Desk PPID (PPID = 540, Dumas = 0), 540

Pusat Karantina Hewan Dan Keamanan Hayati Hewani

➤ Bahan Kebijakan

Pada TA. 2018 Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani telah melakukan penyiapan bahan kebijakan berupa rancangan peraturan perundangan (Keputusan / Peraturan Pemerintah / Menteri) maupun berupa Draft Pedoman / Juklak / Juknis dengan output sebagai berikut:

- ✓ Peraturan Menteri Pertanian TA. 2018
 - a) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15/PERMENTAN/KR.100/2018 Tentang Tindakan Karantina Hewan Di Luar Tempat Pemasukan dan Pengeluaran
 - b) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/PERMENTAN/KR.120/6/2018 tentang Tindakan Karantina Hewan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Kuda Untuk Perlombaan
- ✓ Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian TA. 2018:
 - a) Keputusan Kepala Barantan No. 2732/Kpts/KR.120/K/12/2018 tentang Pedoman Verifikasi Terhadap Pemanasan Sarang Walet Untuk Pengeluaran Ke Negara RRT
 - b) Keputusan Kepala Barantan No. 2464/Kpts/KR.120/K/11/2018 ttg Pedoman Monitoring terhadap Bahan Asal Hewan dan Hasil Bahan Asal Hewan
 - c) Keputusan Kepala Barantan No. 1856/Kpts/KR. 120/K/08/2018 ttg Pedoman Penilaian Layanan Prioritas Karantina Hewan dan Tumbuhan
 - d) Keputusan Kepala Barantan No.2159/kpts/KR.120/K/11/18 tentang Pedoman Tindakan Karantina Hewan Terhadap Vektor
 - e) Keputusan Kepala Barantan No. 2734/KPTS/KR.020/K/12/2018 tentang Pedoman Tindakan Perlakuan dan Pengawasan Pemusnahan Terhadap Media Pembawa Lain yang diturunkan dari Pesawat Udara
 - f) Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor 146/Kpts/KP.120/K/1/2018 Tentang Pedoman Pemantauan Daerah Sebar HPHK Tahun Anggaran 2018
 - g) Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor 1107/KPTS/HK.140/K/05/2018 Tentang Pedoman Tatacara Penetapan Komisi Ahli Karantina Hewan
 - h) Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor 1332/KPTS/KR.120/K/07/2018 tentang Pedoman Tindakan Karantina Untuk Perlombaan Internasional Equestrian Sesuai dengan Ketentuan EDFZ
 - i) Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor 609/KPTS/KR.120/K/9/2018 Tentang Pedoman Analisis Risiko HPHK Tahun 2018
 - j) Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor 1834/KPTS/KR.120/K/08/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Tindakan Karantina Tertentu Oleh Pihak Lain
- ✓ Analisis Risiko tahun 2018

Pelaksanaan Analisis Risiko HPHK dilaksanakan terhadap komoditas yang dilalulintaskan melalui impor sejumlah 24 kategori (Media Pembawa HPHK); enam negara asing dan 11 wilayah dalam negeri (Daerah Asal); dengan tujuan wilayah Indonesia.

✓ Temuan HPHK Hasil Pemantauan HPHK dan Kegiatan Operasional

Berdasarkan kegiatan Pemantauan HPHK yang dilakukan UPT dengan pengumpulan data status dan situasi HPHK pada wilayah regional Sumatra, Jawa – Madura, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua - Papua Barat, Bali dan Nusa Tenggara. Workshop Nasional Pengamatan Hama dan Penyakit Hewan Karantina tahun 2018, 2 November 2018 di Bali, dihasilkan temuan 4 jenis HPHK Golongan I yaitu Swine Influenza, HPAI, Strangles dan PRRS dan 45 jenis HPHK Golongan II.

Temuan HPHK pada kegiatan Pemantauan HPHK tahun 2018 yaitu :

- a) Sumatra, terdapat 33 Jenis HPHK
- b) Jawa dan Madura, terdapat 20 Jenis HPHK
- c) Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua dan Papua Barat, terdapat 39 Jenis HPHK
- d) Bali dan Nusa Tenggara, terdapat 20 Jenis HPHK

✓ Instalasi Karantina Hewan

Pada TA. 2018 telah ditetapkan sejumlah perusahaan sebagai Instalasi Karantina Hewan sebagai tempat pemeriksaan kesehatan hewan, baik untuk IKH Hewan Hidup (21 UPT KP) maupun IKH Produk Hewan (15 UPT KP).

➤ Bimbingan Teknis, Monitoring Evaluasi, Koordinasi dan Workshop

✓ Bimbingan Teknis

Pada TA. 2018, kegiatan Bimbingan Teknis Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani dilaksanakan sebanyak 8 (delapan) kegiatan, yaitu Bimbingan Teknis Karantina Hewan Hidup MP Ruminansia Besar dan unggas (bimtek kebijakan TKH terkait hewan hidup, Bimbingan teknis Karantina Hewan Hidup Instalasi Karantina Hewan, Perjalanan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Produk Hewan, Perjalanan Bimbingan Teknis Registrasi Rumah Walet, Perjalanan Bimtek Pilloting Pemantapan TKH Produk Hewan Antar Area, Kegiatan Silabus Verifikator Sarang Burung Walet, Kegiatan Sertifikasi Verifikator Tempat Pemrosesan Sarang Burung Walet, Perjalanan Bimtek TKH Bahan Pakan dan Pakan.

✓ Monitoring, Evaluasi, Koordinasi dan Workshop

Pada TA. 2018, kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Koordinasi Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani dilaksanakan sebanyak 19 kegiatan,

➤ Akreditasi Laboratorium Karantina Hewan

Pada Tahun 2018 terdapat 4 Laboratorium Karantina Hewan yang melakukan penambahan ruang lingkup sebagai berikut:

- ✓ BKP Kelas II Cilegon, pengujian AI dan ulas darah
- ✓ BKP Kelas I Semarang, pengujian kadar nitrit pada sarang burung walet
- ✓ BBKP Belawan, pengujian koloni bakteri (TPC)
- ✓ BBKP Soetta, pengujian residu pestisida dan antibody spesifik EIA

➤ Capaian Lainnya

✓ Impor

- a) Protokol Karantina untuk lomba Equestrian Asian Games (2018)
- b) Sertifikasi 42 orang Dokter Hewan sebagai penanggung jawab teknis IKH (PJTIKH)

- ✓ Ekspor
 - a) Sertifikasi 25 orang petugas karantina sebagai Auditor Keamanan Pangan (Dukungan Akselerasi Ekspor Sarang Burung Walet)
 - b) Kesepakatan persyaratan kesehatan untuk pengeluaran susu ke Fiji

➤ UPSUS

- ✓ Kegiatan Koordinasi UPSUS Dalam rangka Percepatan Target Tanam Di Kabupaten Minahasa Utara, Kepulauan Sangihe dan Kepulauan Talaud.
- ✓ Koordinasi Percepatan Tanam dan Panen Serentak Upsus Peningkatan Padi, Jagung dan Kedelai Tahun 2018 di Kabupaten Percepatan Tanam dan Panen Serentak Upsus Padi, Jagung dan Kedelai Tahun 2018 di Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara.
- ✓ Koordinasi Percepatan Tanam dan Panen Serentak Upsus Peningkatan Padi, Jagung dan Kedelai Tahun 2018 di Kabupaten Percepatan Tanam dan Panen Serentak Upsus Padi, Jagung dan Kedelai Tahun 2018 di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara.
- ✓ Koordinasi Percepatan Tanam dan Panen Serentak UPSUS Peningkatan Padi, Jagung dan Kedelai Tahun 2018 di Kabupaten Percepatan Tanam dan Panen Serentak Upsus Padi, Jagung dan Kedelai Tahun 2018 di Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara.
- ✓ Rapat Monitoring dan Evaluasi Nasional Luas Tambah Tanam Upsus Tahun 2018 Di Depok.
- ✓ Monitoring Upsus rangka memonitor pelaksanaan Luas Tambah Tanam (LTT) di Kabupaten Minahasa Utara, Kepulauan Sangihe dan Kepulauan Talaud, bertempat di Dinas Pertanian Propinsi Sulawesi Utara.
- ✓ Rapat Koordinasi UPSUS Pajale Propinsi Sulawesi Utara.

Pusat Karantina Tumbuhan Dan Keamanan Hayati Nabati

➤ Bahan Kebijakan

Pada Tahun 2018 Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati telah melakukan penyiapan bahan kebijakan berupa rancangan peraturan perundangan (Keputusan / Peraturan Pemerintah / Menteri) maupun berupa Draft Pedoman / Juklak / Juknis dengan output sebagai berikut:

- ✓ Peraturan/Keputusan Menteri Pertanian

Pada Tahun 2018 diterbitkan Kepmentan terkait perkarantinaaan tumbuhan:

 - a) Keputusan Menteri Pertanian No. 34/Kpts/KR.050/1/2018 tentang Pengakuan Sistem Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Kanada, tanggal 5 Januari 2018
 - b) Keputusan Menteri Pertanian No. 35/Kpts/KR.050/1/2018 tentang Pengakuan Sistem Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Amerika Serikat, tanggal 5 Januari 2018

- c) Keputusan Menteri Pertanian No. 89/Kpts/PP.340/1/2018 tentang Pengakuan Sistem Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Selandia Baru, tanggal 26 Januari 2018
 - d) Keputusan Menteri Pertanian No. 95/Kpts/KR.050/1/2018 tentang Pengakuan Sistem Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Argentina, tanggal 30 Januari 2018
 - e) Keputusan Menteri Pertanian No. 96/Kpts/KR.050/1/2018 tentang Pengakuan Sistem Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Afrika Selatan, tanggal 30 Januari 2018
 - f) Keputusan Menteri Pertanian No. 308/Kpts/KR.050/4/2018 tentang Pengakuan Sistem Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Australia, tanggal 27 April 2018
 - g) Keputusan Menteri Pertanian No. 322/Kpts/KR.050/5/2018 tentang Pengakuan Sistem Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Jepang, tanggal 7 Mei 2018
 - h) Keputusan Menteri Pertanian No. 755/Kpts/KR.040/11/2018 tentang Pengakuan Sistem Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Cile, tanggal 6 Nopember 2018
 - i) Keputusan Menteri Pertanian No. 2315/Kpts/KR.040/10/2018 tentang Registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Philipina, tanggal 24 Oktober 2018
 - j) Keputusan Menteri Pertanian No. 2532/Kpts/KR.040/11/2018 tentang Registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Iran, tanggal 22 Nopember 2018
 - k) Keputusan Menteri Pertanian No.207/Kpts/KR.040/11/2018 tentang Penutupan Pemasukan Rockmelon (Cantaloupe) dari Negara Australia Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, tanggal 6 Maret 2018
 - l) Keputusan Menteri Pertanian No. 855/Kpts/KR.040/12/2018 tentang Penutupan Pemasukan Selada Romaine (*Lactuca sativa*) dari Negara Amerika Serikat Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, tanggal 10 Desember 2018
 - m) Keputusan Menteri Pertanian No. 856/Kpts/KR.040/12/2018 tentang Penutupan Pemasukan Selada Romaine (*Lactuca sativa*) dari Negara Kanada Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, tanggal 10 Desember 2018
- ✓ Pedoman
- Pedoman yang dihasilkan pada Tahun 2018 adalah sebagai berikut:
- a) Pedoman Registrasi Standar Teknis Perlakuan Dingin (Cold Treatment)
 - b) Pedoman Registrasi Penerapan Standar Fumigasi SF oleh Pihak Ketiga
 - c) Pedoman Persyaratan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) Negara Tujuan (seri Pertama: Uni Eropa, Republik Rakyat Tiongkok dan Thailand).
- ✓ Analisis Risiko OPT
- Pada TA. 2018 telah dilakukan pembahasan Analisa Risiko OPT terhadap 86 Komoditas (16 Non Benih dan 70 Benih) yang akan dimasukkan ke dalam wilayah Negara RI.

✓ Temuan OPTK

Berdasarkan rumusan Seminar Hasil Pemantauan OPTK TA. 2018, diperoleh data temuan OPTK A1 sebanyak 13 Jenis dan A2 sebanyak 40 Jenis.

Berdasarkan hasil Intersepsi pada kegiatan operasional karantina tumbuhan tahun 2018 ditemukan 23 jenis OPTK Kategori A1 dan 5 jenis OPTK Kategori A2.

✓ Informasi Teknis Komoditas Ekspor

Pada TA 2018, telah dilakukan penyusunan informasi teknis komoditas ekspor Indonesia sebanyak 4 informasi teknis, dengan rincian sebagai berikut:

- a) Informasi Teknis ekspor Nenas Segar dan Pisang ke China
- b) Informasi Teknis ekspor Manggis ke Taiwan
- c) Protokol ekspor Buah Naga ke China
- d) Protokol ekspor Buah Tropis Segar ke Ukraina

✓ Perusahaan Kemasan Kayu (ISPM 15)

Pada TA. 2018 terdapat sejumlah perusahaan kemasan kayu yang telah diregistrasi dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a) Perusahaan Dalam Masa Pembekuan (suspend) sebanyak 1 Perusahaan
- b) Pencabutan Nomor Registrasi (withdrawn) sebanyak 58 Perusahaan
- c) Perusahaan yang dapat melaksanakan perlakuan dan sertifikasi atas kemasan kayu dan dinyatakan memenuhi persyaratan Sistem Audit dan Penilaian Badan Karantina Pertanian sesuai dengan ketentuan ISPM No.15 sebanyak 73 Perusahaan.

✓ Perusahaan Fumigasi Metil Bromida (MB)

Perusahaan Fumigasi dengan Metilbromida merupakan perusahaan yang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang sesuai dengan pedoman registrasi perusahaan fumigasi metil bromida Badan Karantina Pertanian yang berlaku dengan bidang usaha fumigasi, berdomisili di Indonesia dan merupakan badan usaha/hukum Indonesia. Pada TA. 2018 terdapat sejumlah perusahaan fumigasi yang telah diregistrasi (terlampir), dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a) Perusahaan Dalam Masa Pembekuan (suspend) sebanyak 11 Perusahaan.
- b) Pencabutan Nomor Registrasi (withdrawn) sebanyak 69 Perusahaan.
- c) Perusahaan yang dapat melaksanakan perlakuan fumigasi sesuai dengan standar Badan Karantina Pertanian sebanyak 79 Perusahaan.

✓ Perusahaan Fumigasi Phospin

Perusahaan Fumigasi dengan Phospin merupakan perusahaan yang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang sesuai dengan pedoman registrasi perusahaan fumigasi phospin Badan Karantina Pertanian yang berlaku dengan bidang usaha fumigasi, berdomisili di Indonesia dan merupakan badan usaha/hukum Indonesia. Pada TA. 2018 terdapat sejumlah perusahaan fumigasi yang telah diregistrasi (terlampir), dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a) Perusahaan Dalam Masa Pembekuan (suspend) sebanyak 2 Perusahaan.
- b) Pencabutan Nomor Registrasi (withdrawn) sebanyak 1 Perusahaan.

- c) Perusahaan yang dapat melaksanakan perlakuan fumigasi sesuai dengan standar Badan Karantina Pertanian sebanyak 61 Perusahaan..
- ✓ Instalasi Karantina Tumbuhan (IKT)

Pada TA. 2018 telah ditetapkan 154 perusahaan sebagai Instalasi Karantina Tumbuhan untuk tempat pemeriksaan kesehatan tumbuhan secara visual yang tersebar di UPT Karantina Pertanian.

- ✓ Persyaratan Teknis Pemasukan Benih

Selama TA. 2018 telah diterbitkan Persyaratan Karantina tumbuhan untuk Pemasukan Benih/Bibit Tumbuhan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara RI sejumlah 496 persyaratan teknis pemasukan benih tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, pakan ternak dan sumber daya genetic (SDG).

Tabel 81. Rekapitulasi Persyaratan Teknis Pemasukan Benih

No	Komoditas	Jumlah rekomendasi
1	Tanaman Pangan	9
2	Tanaman Perkebunan	39
3	Tanaman Hortikultura	344
4	Pakan Ternak	6
5	Sumber Daya Genetik (SDG)	98
	Jumlah	496

- ✓ Penetapan Lokasi Pengasinan dan Pengamatan
 - Pada TA. 2018 terdapat 25 Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian untuk penetapan tempat pelaksanaan pengasinan dan pengamatan terhadap pemasukan benih dari luar negeri.
- Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi
 - ✓ Bimbingan Teknis
 - Pada TA. 2018 telah dilaksanakan kegiatan tiga kegiatan Bimbingan Teknis pelaksanaan kebijakan di lingkup Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati yaitu :
 - a) Bimbingan dan Pelaksanaan Kebijakan Karantina Tumbuhan Benih.
 - b) Bimbingan dan Pelaksanaan Kebijakan Karantina Tumbuhan Non Benih.
 - c) Bimbingan Teknis Keamanan Hayati Nabati
 - ✓ Monitoring dan Evaluasi
 - Selain pembinaan juga pada TA. 2018 diselenggarakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kebijakan di lingkup Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati.
- Akreditasi Laboratorium Karantina Tumbuhan
 - Pada Tahun 2018 terdapat 2 Laboratorium Karantina Tumbuhan yang melakukan penambahan ruang lingkup sebagai berikut:
 - ✓ BKP Kelas II Cilegon, pengujian *Tilletia laevis*, *Tilletia tritici*, *Perenospora mansurica*
 - ✓ BKP Kelas I Semarang, pengujian *Tilletia indica* dan *Perenospora mansurica*
- Upaya Khusus (UPSUS)
 - Koordinasi UPSUS Peningkatan Produksi PJK Untuk Propinsi Jawa Barat yang telah dilaksanakan selama tahun 2018 bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan konsolidasi

antara Badan Karantina Pertanian dengan Instansi terkait di daerah baik dari Dinas Pertanian / Badan Penyuluh Pertanian/ Kelompok Tani dan TNI (Babinsa) serta untuk memperkuat dukungan dalam pelaksanaan Upaya Khusus Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai di Jawa Barat. Kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan UPSUS Peningkatan Produksi PJK Untuk Propinsi Jawa Barat dilakukan dengan kunjungan ke kecamatan - kecamatan yang ada di wilayah Kab Karawang dan Kab Bekasi. Selain itu, kami juga melakukan pengambilan dan pengamatan dari Dinas/ Instansi terkait perkembangan UPSUS PJK di Jawa Barat dengan melibatkan koordinasi dengan TNI AD. Penyusunan Laporan UPSUS Peningkatan Produksi PJK Untuk Propinsi Jawa Barat pada tahun 2018 dilaksanakan di Bogor, dengan mengundang seluruh Penanggung Jawab UPSUS PJK Propinsi Jawa Barat dan tim UPSUS PJK Propinsi Jawa Barat pada setiap instansi terkait. Pada kegiatan penyusunan ini, setiap peserta yang hadir kami meminta data – data UPSUS PJK, inovasi – inovasi pertanian yang telah dilakukan dan permasalahan serta solusi dari setiap wilayah Kab/Kota se Propinsi Jawa Barat.

➤ Notification of Non Compliance (NNC)

Selama TA.2018 diterima 45 NNC terhadap komoditas impor dan 66 NNC terhadap komoditas ekspor tumbuhan.

Pusat Kepatuhan, Kerjasama Dan Informasi Perkarantinaaan

➤ Bahan Kebijakan

Pada Tahun 2018 Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaaan telah melakukan penyiapan bahan kebijakan berupa rancangan peraturan perundangan berupa Pedoman / Juklak / Juknis dengan output sebagai berikut:

- ✓ Pedoman Tatacara Pengawasan Operasional di Bidang Karantina Hewan dan Tumbuhan
- ✓ Pedoman Tatacara Penanganan Barang Bukti di Bidang Karantina Hewan dan Tumbuhan

➤ Pengawasan dan Penindakan

Pada Tahun 2018 kegiatan Pengawasan dan Penindakan dilaksanakan dalam bentuk penanganan kasus pelanggaran perkarantinaaan sebanyak 39 kasus dan yang berhasil mencapai P-21 sebanyak 17 Kasus.

Tabel 82. Kasus pelanggaran perkarantinaaan

No	Uraian	Jumlah Kasus	P-21
1.	Karantina Hewan	21	11
2.	Karantina Tumbuhan	15	6
	Total	39	17

Dalam kurun waktu Januari – Desember 2018, Bidang Kepatuhan Perkarantinaaan telah berperan serta dalam penegakkan hukum terhadap dugaan pelanggaran perkarantinaaan yang terjadi di UPT Karantina Pertanian diantaranya sebagai berikut:

- ✓ Melakukan pendampingan hukum dalam penyelesaian kasus dugaan pemasukan cornet beef dan susu kemasan tanpa disertai dokumen persyaratan karantina di BBKP Tanjung Priok;
- ✓ Melakukan pendampingan hukum dalam penyelesaian kasus dugaan pemasukan daging tanpa disertai dokumen persyaratan karantina di SKP I Tanjung Balai Asahan;
- ✓ Saksi Ahli dalam proses hukum dugaan pelanggaran pemasukan daging celeng tanpa disertai dokumen persyaratan karantina di BKP kelas I Lampung;
- ✓ Saksi Ahli dalam proses hukum dugaan pelanggaran pemasukan daging tanpa disertai dokumen persyaratan karantina di BKP kelas I Batam;
- ✓ Saksi Ahli dalam proses hukum dugaan pelanggaran pemasukan daging celeng tanpa disertai dokumen persyaratan karantina di BKP kelas II Cilegon;
- ✓ Saksi Ahli dalam proses hukum dugaan pelanggaran pemasukan telur tanpa disertai dokumen persyaratan karantina di SKP Kelas I Entikong;
- ✓ Melaksanakan gelar perkara dalam proses penegakkan hukum dibidang perkarantinaan di BBKP Tanjung Priok, BBKP Belawan, BBKP Surabaya, BBKP Soekarno Hatta, BKP Kelas I Banjarmasin, BKP Kelas I Manado, BKP Kelas I Batam, BKP Kelas I Lampung, dan BKP Kelas I Cilegon.
- ✓ Melakukan rekapitulasi kegiatan penegakan hukum di bidang karantina hewan, karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati yang telah dilaksanakan oleh UPT Karantina Pertanian sebagaimana tercantum pada Lampiran 1.
- ✓ Melakukan rekapitulasi kegiatan penanganan pengaduan masyarakat di bidang operasional di bidang karantina hewan, karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati sebagaimana tercantum pada Lampiran 2.
- ✓ Menyiapkan pemberian penghargaan kepada PPNS dan Pelaksana Fungsi Intelijen lingkup Badan Karantina Pertanian, UPT Karantina Pertanian dan POLRI sebagaimana tercantum pada Lampiran3.
- ✓ Menyiapkan pemberian penghargaan kepada pengguna jasa/importir/eksportir yang memenuhi predikat kepatuhan dalam mematuhi perundang-undangan dibidang perkarantinaan dalam bentuk sertifikat kepatuhan (certificate of compliance) Tahun 2018 (terlampir)
- ✓ Menyiapkan pemberian penghargaan kepada pengguna jasa/importir/eksportir yang memenuhi predikat sebagai perusahaan berprestasi yang mendapatkan fasilitas sebagai Penerima Layanan Impor Prioritas Karantina Pertanian untuk Media Pembawa kategori Low Risk di Pelabuhan Tanjung Priok, DKI Jakarta. (terlampir).
- Bimbingan Teknis dan Monitoring Evaluasi
Pada Tahun 2018 Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan telah melaksanakan kegiatan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi serta koordinasi sebanyak 13 jenis. Secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 17.
- Harmonisasi Kerjasama Perkarantinaan
Pada TA. 2018 telah dilaksanakan harmonisasi kerjasama perkarantinaan dengan beberapa Negara mitra dagang dan pihak terkait. Kegiatan harmonisasi dilakukan dalam bentuk Penyusunan Nota Kesepahaman (MoU) maupun penyusunan Perjanjian Kerjasama (PKS) sebagaimana Tabel 33 dan Tabel 34.

Tabel 83. Nota Kesepahaman/MoU Badan Karantina Pertanian TA. 2018

No	MoU / Pihak Terkait	Ruang Lingkup
1	Barantan – Ukraine	Mengembangkan hubungan ekonomi dan perdagangan kedua negara
2	Barantan - PNG	Pengembangan kegiatan kesehatan hewan, tumbuhan dan karantina (biosekuriti)
3	Barantan - BATAN	Pemanfaatan iradiasi sebagai perlakuan karantina pengganti fumigasi
4	Barantan - Universitas Pajajaran	Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat

Tabel 84. Perjanjian Kerjasama Badan Karantina Pertanian TA. 2018

No	MoU / Pihak Terkait	Ruang Lingkup
1	Barantan – POLRI	Pengawasan, Pengamanan dan Penegakan Hukum di Bidang Karantina Hewan, Tumbuhan dan Keamanan Hayati
2	Pusat KH dan KHH - Fakultas Kedokteran UNPAD	Kerjasama pendidikan dan penelitian di bidang karantina hewan dan keamanan hayati hewani antar kedua belah pihak
3	Pusat KT dan KHN - Fakultas Pertanian UNPAD	Kerjasama pendidikan dan penelitian di bidang karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati antar kedua belah pihak
4	Pusat KT dan KHN – Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi (PAIR)	Kerjasama dalam pemanfaatan iradiasi sebagai perlakuan karantina pengganti fumigasi

Tabel 85. Draft Nota Kesepahaman/ MoU Badan Karantina Pertanian TA. 2018

No	MoU / Pihak Terkait	Ruang Lingkup
1	Barantan – PT. Garuda Indonesia	Kerjasama pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kedua belah pihak, khususnya menyangkut media pembawa HPHK dan OPTK serta sosialisasi informasi kepada masyarakat yang menjadi pengguna jasa (penumpang) PT. Garuda Indonesia.
2	Barantan - BKSDA	Kerjasama dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kedua belah pihak, khususnya menyangkut media pembawa HPHK dan OPTK yang juga merupakan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi

➤ Perundingan / Pertemuan Internasional

Pada TA. 2018, Badan Karantina Pertanian berpartisipasi dalam kegiatan perundingan / pertemuan internasional sebagai berikut:

- ✓ Sidang Komite Sanitary and Phytosanitary ke-71, 1-3 Februari 2018 di Jenewa.
- ✓ The 10th Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-The Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) Strategic Planning Meeting (SPM) di Brunei Darussalam, 11-14 Februari 2018
- ✓ The 21st Working Group on Agriculture, Food, and Forestry Cooperation (WGAFFC), RI-Australia di Melbourne, Australia, 14-16 Februari 2018

- ✓ The 11thIndonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) Strategic Planning Meeting (SPM) and Related Meetings di Bengkulu, 20-23 Februari 2018
- ✓ Perundingan Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA CEPA), Sub Negotiating Group on Sanitary and Phythosanitary (SPS) di Canberra, Australia, 20-24 Februari 2018.
- ✓ Pertemuan 4th ASEAN China FTA SPS Sub-Committee (SC-SPS Ke-4) di Beijing, China, 13-15 Maret 2018
- ✓ Pertemuan Special SOM AMAF ke-39, AMAF +3 ke-17 dan the 3rd ARSOMA di Thailand, 27-30 Agustus 2018
- ✓ Pertemuan the 13th Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-The Philippines East ASEAN Growth Area Customs, Immigration, Quarantine and Security Working Group (the 13th BIMP-EAGA CIQS WG) di Davao City, Filipina, 30 Juli-3 Agustus 2018
- ✓ Rangkaian Pertemuan AMAF ke-40, AMAF+3 ke-18 dan ASEAN-China Ministerial Meeting on SPS ke-6 di Hanoi, Vietnam, 8-13 Oktober 2018
- ✓ Pertemuan The 6th Round of NegotiationsIndonesia - European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) di Palembang, 15-18 Oktober 2018
- ✓ The 3rd Joint Agriculture Working Group (JAWG) Indonesia-Denmarkdi Malang, 24-25 Oktober 2018
- ✓ 27th Senior Official Meeting (SOM) BIMP EAGA, Brunei Darussalam, 24-25 November 2018
- National Notification Authority dan Enquiry Point SPS
 - ✓ Notifikasi Body SPS
Sekretariat Notificaton Body SPS yang berada di Badan Karantina Pertanian selama tahun 2018 tidak melakukan notifikasi Peraturan SPS ke Sekretariat SPS-WTO di Jenewa dikarenakan Sekretariat Notificaton Body SPS tidak menerima permintaan notifikasi regulasi terkait SPS dari Instansi pemrakarsa.
 - ✓ National Enquiry Point SPS
Selama tahun 2018, Sekretariat National Enquiry SPS yang berada di Badan Karantina Pertanian telah menyampaikan kepada Instansi terkait dan asosiasi pengguna jasa terkait Peraturan SPS Negara anggota WTO yang diterima dari Sekretariat WTO di Jenewa, dengan rincian penyampaian notifikasi bulanan sebagaimana tertera pada tabel berikut:

Tabel 86. Notifikasi Peraturan SPS

No.	Bulan	Jumlah Notifikasi Peraturan SPS
1.	Januari	124
2.	Februari	86
3.	Maret	73
4.	April	82
5.	Mei	106
6.	Juni	170
7.	Juli	99
8.	Agustus	88
9.	September	73
10.	Oktober	98
11.	Nopember	86
12.	Desember	102
	Jumlah	1187

➤ Sistem Aplikasi Perkarantinaan

Pada TA. 2018, disempurnakan dan dihasilkan beberapa sistem aplikasi sebagai berikut:

- ✓ Aplikasi OSS (One Stop Service) Barantan
- ✓ Aplikasi Layanan Prioritas Karantina Pertanian
- ✓ Update E-SPS (Sertifikat Elektronik) Barantan
- ✓ Updating Inhouse Barantan

➤ Kerjasama TI

✓ ISRM

Salah satu kebijakan pemerintah dalam mempercepat pergerakan arus barang dipelabuhan utama adalah mengintegrasikan seluruh manajemen resiko yang dimiliki oleh seluruh kementerian/lembaga ke dalam satu sitem tunggal yang dikenal dengan Indonesia Single Risk Management (ISRM). Badan Karantina Pertanian merupakan salah satu instansi yang sangat berperan dalam pergerakan arus barang dipelabuhan khususnya untuk komoditi-komoditi pertanian baik dalam bentuk segar maupun olahan. Sejak Oktober 2018 telah menerbitkan 4 (empat) Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian yang mendorong akselerasi mekanisme tersebut. Ketiga Keputusan dimaksud adalah:

- a) Nomor: 1831/Kpts/Kr.020/08/2018 Tentang Layanan Prioritas Karantina Pertanian Dalam Kerangka Indonesia Single Risk Management
- b) Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor 1856/Kpts/Kr.120/K/08/2018 Tentang Pedoman Penilaian Layanan Prioritas Karantina Hewan dan Tumbuhan
- c) Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor 1857/Kpts/Kr.120/K/08/2018 Tentang Sekretariat Layanan Prioritas Karantina Pertanian
- d) Surat Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian No.19456/HK.160/K1/12/2018 tentang Pemberlakuan Sistem Elektronik Layanan Prioritas Karantina Pertanian

✓ E-Cert

Sebagai salah satu upaya Badan Karantina Pertanian dalam melakukan mitigasi resiko masuk dan tersebarnya hama penyakit kedalam wilayah RI, disamping melakukan kajian-kajian dan analisa teknis, telah dibangun pula kerjasama berupa pertukaran sertifikat karantina dengan negara mitra. Pada tahun 2018, kerjasama difokuskan dengan memperkuat pemanfaatan dari hasil pertukaran sertifikat karantina. Tiga Negara yang telah melakukan pertukaran sertifikat karantina dengan Badan Karantina Pertanian adalah Belanda, Australia dan New Zealand.

✓ Kerjasama dengan Bank Mandiri

Bentuk kerjasama yang dilakukan adalah mengupayakan agar pengguna jasa karantina dapat menggunakan e-money dalam bentuk tap cash untuk pembayaran PNPB pada wilayah kerja, baik di pelabuhan penyeberangan penyeberangan laut maupun sungai.

Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian

➤ Pengembangan Teknik dan Metode Pengujian Laboratorium

Pada TA. 2018, telah dilaksanakan pengembangan teknik dan metode pengujian laboratorium karantina tumbuhan, laboratorium kehati nabati, laboratorium karantina hewan dan laboratorium kehani hewani (Lampiran).

Tabel 87. Pengembangan Metode Pengujian Laboratorium

Kegiatan pengembangan	Hasil	Rekomendasi
Laboratorium Karantina Tumbuhan		
"Identifikasi <i>Bactrocera occipitalis</i> menggunakan Teknik Molekuler"	Dari 17 spesimen yang diuji, ditemukan 1 spesimen yang teridentifikasi sebagai <i>Bactrocera occipitalis</i>	Perlu dilakukan pengujian lebih lanjut menggunakan marka genetik dari lokus yang berbeda
"Deteksi dan Identifikasi OPTK Terbawa Umbi Bawang Putih dengan Metode Morfologi-Morfometri dan Molekuler dalam upaya mendukung PAJALE BABE"	Dari uji morfologi belum memperoleh hasil yang pasti karena beberapa karakter morfologi tidak dapat diamati dengan jelas	
Laboratorium Kehati Nabati		
"Analisis Residu Pestisida pada Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dengan metode standar Adisi menggunakan Gas Chromatography Mass Spectrometry (GCMS)"	Setelah dilakukan uji perbandingan menggunakan uji T, diperoleh hasil baik metode pengujian dengan Adisi Prosedural maupun Standar Adisi, keduanya tidak memberikan perbedaan yang nyata dalam hasil pengujian.	
Laboratorium Karantina Hewan		
"Deteksi Equine Influenza Virus (EIV) dengan metode Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)".	Keseluruhan sampel yang diuji negative untuk EIV walaupun terdapat 1 sampel yang seropositif EI.	Metode uji PCR mampu mendeteksi EIV pada suhu annealing 49-55C, baik dengan primer influenza A maupun primer H3N8
"Deteksi Glanders pada Kuda dengan metode Complement Fixation Test"	Data akurasi diperoleh dari validitas terhadap control positif dan negatif. Dari hasil pengujian dapat terlihat bahwa hasil pengujian CFT tersebut valid	Uji CFT dapat digunakan untuk screening deteksi antibody penyakit Glanders pada Kuda
Laboratorium Kehati Hewani		
"Deteksi Peptida pada BAH/HBAH dan Bahan Baku Asal Hewan (Gelatin Based) dengan LCMSMS	Hasil pengujian menunjukkan bahwa 3 batch sampel gelatin yang diuji hanya mengandung gelatin bovine dan tidak mengandung porcine	Metode deteksi peptide bovine dan porcine dengan LCMSMS dapat diterapkan di BBUSKP

Sasaran Mutu BBUSKP Tahun 2018, terdapat 6 (enam) parameter uji yang diajukan dan telah terakreditasi pada Kegiatan Penambahan Ruang Lingkup Akreditasi Laboratorium Tahun 2018.

Tabel 88. Parameter Uji pada penambahan ruang lingkup Akreditasi Laboratorium oleh KAN yang menjadi Sasaran Mutu tahun 2018

No.	Parameter Uji	Metode Uji	Laboratorium
1.	Deteksi Bean Pod Mottle Como Virus (BPMV)	DAS-ELISA (IKMV. 002)	Karantina Tumbuhan
2.	Identifikasi <i>Raoiella indica</i>	Karakter Morfologi (IKME.003)	Karantina Tumbuhan
3.	Identifikasi <i>Phyllocoptruta oleivora</i>	Karakter Morfologi (IKME.003)	Karantina Tumbuhan
4.	Deteksi Bovine Viral Diarrhoea Virus (BVDV)	Nested RT-PCR (IKMBmH. 003)	Karantina Hewan
5.	Deteksi Titer Antibodi Rabies	Kit ELISA Rabies Pusvetma (IKMVH. 005)	Karantina Hewan
6.	Pengujian Multi Residu Pestisida Pada Matriks PSAT (Anggur)	QueCheRs (IKMKHT-N. 004)	Keamanan Hayati

➤ Validasi Metode Pengujian Laboratorium

Validasi metode pengujian laboratorium dilakukan terhadap metode uji laboratorium karantina hewan, metode uji laboratorium karantina tumbuhan, metode uji laboratorium kehati nabati dan metode uji laboratorium kehani hewani. Secara rinci, hasil validasi metode uji dapat dilihat pada (Lampiran).

➤ Penyelenggaraan Peningkatan kompetensi SDM BBUSKP

Dalam rangka peningkatan kompetensi SDM di BBUSKP, pada TA. 2018 dilaksanakan pelatihan in house SMM sebanyak 2 kegiatan sebagaimana Tabel di bawah.

Tabel 89. Pelatihan In house SMM di BBUSKP

No.	Judul Materi	Narasumber	Waktu Pelaksanaan	Peserta
1.	Pemahaman ISO/IEC 17025:2017	BSN	14 – 15 Februari 2018	Personel Lab. KH, KT dan Kehati
2.	Penggunaan Tools SPSS dalam pengolahan data hasil uji laboratorium	IPB	23 Februari 2018	Personel Lab. KH, KT dan Kehati

➤ Penyelenggaraan Uji Banding

Selama TA. 2018 Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian telah melaksanakan uji banding pada Laboratorium Karantina Hewan, Laboratorium Karantina Tumbuhan, Laboratorium Keamanan Hayani Hewani dan Laboratorium Keamanan Hayati Nabati.

Tabel 90. Hasil Uji Banding Laboratorium Karantina Hewan BBUSKP

Parameter Uji	Waktu Pelaksanaan	Laboratorium Peserta	Hasil
Total Cemar Mikroba Pada Sarang Burung Walet (SNI 4833:2015)	14 – 17 Mei 2018	BBUSKP, BBKP Surabaya, BKP Kls II Yogyakarta, BKP Kls II Medan, BKP Kls I Palembang, BBIA, BPMSPH-Bogor, PT. Saraswanti Indo Genetech	Sesuai

Tabel 91. Hasil Uji Banding Laboratorium Karantina Tumbuhan BBUSKP

Parameter Uji	Waktu Pelaksanaan	Laboratorium Peserta	Hasil
Deteksi <i>Pectobacterium atrosepticum</i> dengan Metode PCR	14 – 17 Mei 2018	BBUSKP, BBKP Tj. Priok, BBKP Soekarno-Hatta, BBKP Surabaya, BKP Kls I Palembang, BKP Kls I Jambi, IPB, UNBRAW, UGM, BKP Kls II Palangkaraya, PT. Bisi Internasional, Tbk.	Sesuai
Deteksi Alfalfa Mosaic Virus (AMV) dengan Metode DAS-ELISA	14 – 17 Mei 2018	BBUSKP, BBKP Tj. Priok, BBKP Soekarno-Hatta, BBKP Surabaya, BKP Kls I Palembang, BKP Kls I Jambi, BKP Kls I Pontianak, BKP Kls II Yogyakarta, UNBRAW, UGM, IPB, PT. Bisi Internasional Tbk.	Sesuai

Tabel 92. Hasil Uji Banding Laboratorium Keamanan Hayati Hewani BBUSKP

Parameter Uji	Waktu Pelaksanaan	Laboratorium Peserta	Hasil
Penetapan kadar nitrit pada sarang burung walet menggunakan spektrofotometer Uv-Vis	28 Mei 2018	BBUSKP, BBKP Surabaya, BBKP Soekarno-Hatta, BKP Kls II Medan, BKP Kls I Semarang, BBIA, Lab. Terpadu- IPB	Sesuai

Tabel 93. Hasil Uji Banding Laboratorium Kemanan Hayati Nabati BBUSKP

Parameter Uji	Waktu Pelaksanaan	Laboratorium Peserta	Hasil
Deteksi Escherichia coli Pada PSAT dengan Metode Uji Most Probable Number (MPN) dan Kultur	1 Oktober 2018	BBUSKP, BBIA, BBLITVET-Bogor, PT. Saraswanti Indo Genetech, Pusat Pengujian Mutu dan Promosi Hasil Pertanian, Balai Penelitian Tanaman Sayuran (Balitsa), BBKP Surabaya, PT. Sucofindo	Sesuai

➤ Partisipasi Uji Banding dan Uji Profisiensi

Selama TA. 2018, Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian berpartisipasi dalam kegiatan uji banding dan uji profisiensi yang dilaksanakan oleh BBKP Surabaya, BKP Kelas I Banjarmasin, BBLITVet Bogor, BBVet Bogor, BVet Banjarbaru, ISTA dan BBUSKP.

Tabel 94. Partisipasi Uji Banding Laboratorium KH

No	Parameter Uji	Waktu Pelaksanaan	Penyelenggara	Hasil
1	RBT	Maret 2018	BBKP Surabaya	Sesuai
2	Deteksi Nitrit	Maret 2018	BBKP Surabaya	Sesuai
3	HI AI dan ND	Maret 2018	BBKP Surabaya	Sesuai
4	PCR DNA Spesies	Maret 2018	BBKP Surabaya	Belum sesuai (positif palsu, spesifitas 50%)
5	HI AI dan ND	Agustus 2018	BKP Kelas I Banjarmasin	Sesuai

Tabel 95. Partisipasi Uji Profisiensi Laboratorium Karantina Hewan

No	Parameter Uji	Waktu Pelaksanaan	Penyelenggara	Hasil
1	Penyakit Dourine	Mei 2018	ANSES EU Reference Laboratory France	Inliers
2	ALT Pada biakan kering beku	Juli 2018	BBLITVET, Bogor	Memuaskan
3	HI AI	Juli 2018	BBLITVET, Bogor	Diperingatkan
4	PCR AI	Mei 2018	BBVET Wates	Outliers
5	HI AI	Sep-18	BBVET Wates	Masih dalam proses
6	ELISA penyakit surra	Agustus 2018	BVET Banjarbaru	Memuaskan
7	Deteksi Titer Antibodi Brucella abortus	5 – 6 Juni 2018	BBUSKP	Memuaskan

Tabel 96. Partisipasi Uji Profisiensi Laboratorium Karantina Tumbuhan

No.	Parameter Uji	Waktu Pelaksanaan	Penyelenggara	Hasil
1	<i>Aphelenchoides besseyi</i>	September 2018	ISTA	Belum ada
2	Deteksi dan Identifikasi <i>Peronospora manshurica</i>	26 – 27 Juni 2018	BBUSKP	Memuaskan

Tabel 97. Partisipasi Uji Profisiensi Laboratorium Karantina Hewan

Kode Contoh	Parameter Uji	Waktu Pelaksanaan	Penyelenggara	Hasil
SLDSPM 18A dan SLDSPM 18B	Residu pestisida pada selada (Dimethoate, Imidacloprid, Malathion, Methomyl, Profenofos)	28 Mei – 7 Juni 2018	Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu, Kemendag	<ul style="list-style-type: none"> • Utk Dimethoate, Methomyl dan Profenofos memuaskan. • Utk Malathion tdk diuji km tdk tersedia bahan standarnya. • Utk Imidachlorpid tdk dibahas oleh PUPnya.

➤ Fasilitas Akreditasi Laboratorium Lingkup Badan Karantina Pertanian

Laboratorium Lingkup Badan Karantina Pertanian yang sudah terakreditasi sampai tahun 2018 sebanyak 46 UPT, dalam proses akreditasi sebanyak 2 UPT dan persiapan akreditasi sebanyak 3 UPT.

➤ Pelayanan uji rujukan, uji konfirmasi, uji banding dan uji profisiensi

Pada TA. 2018 telah dilaksanakan layanan pemeriksaan sampel uji laboratorium sebanyak 10.783 pengujian, baik untuk uji rujukan, uji konfirmasi, uji banding, uji profisiensi dan uji internal sebagaimana Tabel berikut.

Tabel 98. Frekuensi Layanan Pemeriksaan Sampel Uji Laboratorium

Uraian Kegiatan Pengujian	Frekuensi Pelayanan				Jumlah
	Lab KT	Lab Kehati Nabati	Lab KH	Lab Kehani Hewani	
Uji Internal	1.004	347	1.702	9	3.062
Uji konfirmasi	755	0	0	0	755
Uji Profisiensi	122	8	84	0	214
Uji Rujukan	511	634	2.472	2.838	6.455
Uji Banding	132	26	137	2	297
Jumlah	2.524	1.015	4.395	2.847	10.783

➤ Koleksi Standar HPH/HPHK dan Koleksi Standar OPT/OPTK

Pada TA.2018 telah dilaksanakan kegiatan pembuatan koleksi standar HPH/HPHK dan OPT/OPTK.

➤ Capaian lainnya

Standar pengujian karantina hewan dan keamanan hayati hewani sesuai kebutuhan (Dok Rekomendasi):

- ✓ Akselerasi Eksport Sarang Burung Walet

- ✓ Uji Coba Karantina Hewan: "Deteksi Penyakit Glanders pada Kuda menggunakan metode Complement Fixation Test (CFT)" dan "Deteksi Equine Influenza Virus dengan Metode RT-PCR"
- ✓ Pengembangan Metode
- ✓ Verifikasi dan Koleksi Emerging dan Re-emerging disease
- ✓ Uji Coba Keamanan Hayati Hewani
- ✓ Verifikasi Keamanan Hayati Hewani

Standar pengujian karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati sesuai kebutuhan (Dok Rekomendasi):

- ✓ Validasi metode PCR untuk deteksi *Clavibacter michiganensis* subsp. *michiganensis* dan *Burkholderia glumae*
- ✓ Deteksi dan identifikasi *Stenocarpella maydis* dengan uji morfologi dan PCR
- ✓ Deteksi dan identifikasi *Peronospora mashurica* pada biji kedelai
- ✓ Deteksi *Pectobacterium atrosepticum* dengan metode PCR
- ✓ Deteksi Alfalfa mosaic virus (AMV) dengan metode DAS ELISA
- ✓ Deteksi Bakteri *Escherichia coli* pada PSAT dengan metode MPN dan kultur
- ✓ Deteksi dan identifikasi *Bactrocera musae* dan *B. occipitalis* pada cabe dengan metode morfologi dan beberapa primer PCR
- ✓ Deteksi dan identifikasi *Dyctilencus dipsaci* dan *D. destructor* pada bawang putih dengan metode morfologi dan PCR
- ✓ Pengujian residu pestisida dengan metode standar adisi

➤ Layanan Internal

Pada TA. 2018, telah dilaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa di Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian.

Tabel 99. Daftar Pengadaan Barang di BBUS KP TA. 2018

No	Kegiatan	Ouput
1	Pengadaan Perangkat Pengolah Data	27 Unit
2	Partisi Ruang Pengendali Mutu Laboratorium	1 Paket

➤ Layanan Perkantoran

Layanan perkantoran di Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian terdiri atas:

- ✓ Tingkat Dukungan Internal Administrasi
- ✓ Kegiatan yang memfasilitasi perjalanan dinas terkait kegiatan ketatausahaan dan administrasi
- ✓ Tingkat Dukungan Aparatur Pegawai dan Layanan Perkantoran
- ✓ Kegiatan yang memfasilitasi pelaksanaan pembayaran gaji, tunjangan, operasional dan pemeliharaan kantor sebagaimana Tabel 51.

Tabel 100. Dukungan Aparatur Pegawai dan Layanan Perkantoran

No	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)
	Layanan Perkantoran		
1	Tingkat Dukungan Internal Administrasi	920.652.000	918.079.573
2	Tingkat Dukungan Aparatur Pegawai dan Layanan Perkantoran	10.464.697.000	10.398.268.146

Balai Uji Terap Teknik Dan Metode Karantina Pertanian

➤ Metoda Uji Terap Karantina Pertanian dan Keamanan Hayati (Uji Terap)

- ✓ Pengembangan teknik dan metode uji terap yang dihasilkan tahun 2018 adalah:
 - a) Pengaruh Irradiasi Sinar Gamma (60 Co) terhadap Lalat Buah *Bactrocera* spp. pada Buah Naga (*Hylocereus costaricensis*)
 - b) Perlakuan Perendaman Air Panas (Hot Water Treatment) untuk Mengeliminasi Nematoda *Radopholus similis* pada Tanaman *Polyscias* sp. dan *Agave* sp.
 - c) Perlakuan Perendaman Air Panas (Hot Water Treatment) untuk Mengeliminasi Nematoda *Radopholus similis* pada Tanaman Rimpang Jahe Segar
 - d) Perlakuan Fumigasi Methyl Bromide (MB) terhadap Mortalitas Tungau pada Buah Kelapa Kupas
 - e) Keefektifan Kombinasi Perlakuan Kimiawi dan Udara Panas Tingkat Lapang untuk Eliminasi *Acidovorax citrullii* pada Benih Melon
 - f) Desain Alat dan Verifikasi Proses Pemanasan Sarang Burung Walet untuk Dekontaminasi Virus Avian Influenza
 - g) Verifikasi Alat Pemanas Sarang Burung Walet untuk Menginaktivasi Virus Avian Influenza
- ✓ Hasil uji terap yang telah dipublikasikan adalah Pengaruh Perlakuan Perendaman Air Panas dan Kitosan Terhadap *Colletotrichum musae* pada Pisang Mas Kirana pada Jurnal *ASIAN Journal of Agriculture and Biology* (*Asian J Agri & Biol.* 2018;6(4):576-586) dengan judul: *The role of hot water treatment and chitosan coating in controlling a latent infection of Colletotrichum musae on banana var. Mas Kirana.*
- ✓ Desiminasi dan bimbingan teknis yang dilaksanakan tahun 2018 adalah:
 - a) Pemantauan HPHK dan TKH Unggas dilaksanakan tanggal 5 - 10 Februari 2018
 - b) Pengujian Kesehatan Benih dilaksanakan tanggal 19 - 24 Februari 2018
 - c) Pengujian Kesehatan Benih dilaksanakan tanggal 5 - 10 Maret 2018
 - d) Tindakan Karantina terhadap Bahan Biologi dilaksanakan tanggal 5 - 10 Maret 2018
 - e) Perlakuan Iradiasi dilaksanakan tanggal 19 - 24 Maret 2018
 - f) Sistem Keamanan Pangan (HACCP) SBW dilaksanakan tanggal 2 - 7 April 2018
 - g) Diseminasi Penyusunan Analisa Risiko Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (AROPT) dilaksanakan tanggal 16 - 21 April 2018
 - h) Pemeriksaan dan Penanganan Kuda dilaksanakan tanggal 23 - 28 April 2018
 - i) Bimbingan Teknis Sistem Manajemen Mutu Perlakuan Fumigasi dilaksanakan tanggal 27 September - 1 Oktober 2018
 - j) One Day Dissemination "Inovasi Pendukung Akselerasi Ekspor" (KT) dilaksanakan tanggal 4 Desember 2018

- k) One Day Dissemination "Inovasi Pendukung Akselerasi Ekspor" (KH) dilaksanakan tanggal 4 Desember 2018
- ✓ Kerjasama uji terap teknik dan metode perkarantinaan tahun 2018 adalah:
- Perjanjian Kerjasama Peningkatan Mutu Pendidikan Program Pendidikan Sistem Ganda (PSG)/ Praktek Kerja Industri/Instansi (PRAKERIN) dengan SMK Insan Nasional
 - Perjanjian Kerjasama Pengembangan Teknik dan Metode Karantina Pertanian dan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia melalui Magang Mahasiswa dan Pengabdian Masyarakat dengan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya
 - Draft PKS Pengembangan Teknik dan Metode Karantina Pertanian dan Peningkatan Mutu Pendidikan melalui Praktek Kerja Lapang Mahasiswa dengan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya
 - MoU Fasilitasi Pelaksanaan Uji Coba Hasil Uji Terap Irradiasi dengan Badan Tenaga Atom Nasional
 - Perjanjian Kerja Sama Fasilitasi kegiatan Uji Terap dan peningkatan SDM dengan PT Alamanda, Bandung
 - Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Diklat Dasar Calon Fungsional Medik Veteriner dengan BBPKH Cinagara
 - Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Diklat Dasar Calon Fungsional POPT Ahli dengan BBPP Lembang

➤ Layanan Internal

Pada TA. 2018, telah dilaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa di Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian sebagaimana Tabel 52.

Tabel 101. Daftar Pengadaan Barang di BUTTMKP TA. 2018

No	Kegiatan	Ouput (unit/ m2/ set)
1	Alat Laboratorium	9 Unit
2	Alat Pengolah Data	13 Unit
3	Gedung dan Bangunan	
	a. Pembangunan Tempat Pembuangan Sampah	70 M2
	b. Pengadaan Kaca Penutup Ruang lift	55 M2
	c. Pembangunan Kolam Resapan	98 M2
	d. Perbaikan Jalan/Pengaspalan	2.272 M2
4	Pengadaan Kendaraan R-2	1 Unit
5	Fasilitas Perkantoran Lainnya	
	a. Pengadaan Sistem Informasi BUTTMKP	4 Unit
	b. Pengadaan TV 32 Inch	18 Unit
	c. Pengadaan Gong Tabuh	1 Unit
	d. Pengadaan AC 1 PK	7 Unit
	e. Pengadaan Vertical Blind	25 M2
	f. Pengadaan Kasur Busa	22 Unit
	g. Pengadaan Mixer Digital	1 Set
	h. Pengadaan Kandang	4 Unit

➤ Layanan Perkantoran

Layanan perkantoran di Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian :

- ✓ Tingkat Dukungan Internal Administrasi
- ✓ Kegiatan yang memfasilitasi perjalanan dinas terkait kegiatan ketatausahaan dan administrasi.
- ✓ Tingkat Dukungan Aparatur Pegawai dan Layanan Perkantoran
- ✓ Kegiatan yang memfasilitasi pelaksanaan pembayaran gaji, tunjangan, operasional dan pemeliharaan kantor sebagaimana Tabel berikut.

Tabel 102. Layanan Perkantoran di BUT TMKP TA. 2018

No	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)
	Layanan Perkantoran		
1	Tingkat Dukungan Internal Administrasi	6.167.472.000	6.167.432.539
2	Tingkat Dukungan Aparatur Pegawai dan Layanan Perkantoran	8.944.296.000	8.944.202.885

Unit Pelayanan Teknis

➤ Layanan Sertifikasi Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati

Layanan sertifikasi yang dilakukan oleh UPT Karantina Pertanian merupakan sertifikasi terhadap pelaksanaan tindak karantina (8P) yang meliputi layanan sertifikasi untuk komoditas yang di impor, ekspor maupun antar area (domestik masuk dan domestik keluar). Secara rinci, frekuensi layanan sertifikasi dan tindakan karantina sebagaimana Lampiran.

➤ Layanan Internal

Pada TA. 2018, telah dilaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa di lingkup UPT Karantina Pertanian, yang terdiri dari pengadaan tanah, pembangunan gedung, kendaraan bermotor R-4, kendaraan bermotor R-2, alat pengolah data, alat laboratorium dan peralatan lainnya, sebagaimana Tabel 59.

Tabel 103. Pengadaan Barang di UPT KP

No	Kegiatan	Ouput
1	Pengadaan Tanah	30.519 M2
2	Pembangunan/ Rehab Gedung/Lab/IKH	84 Unit
3	Kendaraan Bermotor R-4	65 Unit
4	Kendaraan Bermotor R-2	161 Unit
5	Alat Pengolah Data	1.053 Unit
6	Alat Laboratorium	278 Unit

➤ Layanan Perkantoran

Layanan perkantoran di lingkup UPT Karantina Pertanian terdiri atas:

- ✓ Tingkat Dukungan Internal Administrasi
- ✓ Kegiatan yang memfasilitasi perjalanan dinas satker operasional terkait kegiatan ketatausahaan dan administrasi
- ✓ Tingkat Dukungan Aparatur Pegawai dan Layanan Perkantoran
- ✓ Kegiatan yang memfasilitasi pelaksanaan pembayaran gaji, tunjangan, operasional dan pemeliharaan kantor.

BAB IV. PENGELOLAAN ANGGARAN DAN SUMBERDAYA MANUSIA

A. Realisasi Anggaran Kementerian Pertanian Tahun 2018

Kementerian Pertanian tahun 2018 mendapat alokasi anggaran APBN sejumlah Rp.24.038.510.833.000 dan realisasi anggaran Rp. 21.836.607.837.694 (90,84). Sebagian besar anggaran diperuntukan untuk belanja barang pembangunan pertanian di daerah (+85%). Anggaran tahun 2018 dialokasikan untuk membiayai program-program strategis pembangunan pertanian yaitu:

- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian, tahun 2018 mendapat alokasi anggaran Rp. 1.730.087.799.000.00 dan realisasi Rp. 1.657.130.061.432,00 (95,78%).

Akun 2 Digit	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase
51 Belanja Pegawai	1.241.256.472.000	1.209.081.550.015	97.41 %
52 Belanja Barang	429.125.677.000	398.206.747.065	92.79 %
53 Belanja Modal	59.705.650.000	49.841.764.352	83.48 %
57 Belanja Bantuan Sosial	0	0	0.00 %
Total	1.730.087.799.000	1.657.130.061.432	95,7830038

- Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian, tahun 2018 mendapat alokasi anggaran Rp.97.134.000.000.00 dan realisasi Rp.91.872.402.577,00 (94,58%).

Akun 2 Digit	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase
51 Belanja Pegawai	23.727.000.000	21.819.083.325	91.96 %
52 Belanja Barang	70.556.110.000	67.239.511.661	95.30 %
53 Belanja Modal	2.850.890.000	2.813.807.591	98.70 %
57 Belanja Bantuan Sosial	0	0	0.00 %
Total	97.134.000.000	91.872.402.577	94,5831558

- Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan, tahun 2018 mendapat alokasi anggaran Rp.6.675.409.495.000.00 dan realisasi Rp. 6.100.524.309.795,00 (91,38%).

Akun 2 Digit	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase
51 Belanja Pegawai	49.516.144.000	43.496.315.489	87.84 %
52 Belanja Barang	6.582.781.439.000	6.040.259.393.560	91.76 %
53 Belanja Modal	43.111.912.000	16.768.600.746	38.90 %
57 Belanja Bantuan Sosial	0	0	0.00 %
Total	6.675.409.495.000	6.100.524.309.795	91,3880162

- Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura, tahun 2018 mendapat alokasi anggaran Rp.1.242.629.794.000.00 dan realisasi Rp.1.126.096.453.970,00 (90,62%).

Akun 2 Digit	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase
51 Belanja Pegawai	24.459.908.000	23.146.385.019	94.63 %
52 Belanja Barang	1.213.826.726.000	1.100.549.082.351	90.67 %
53 Belanja Modal	4.343.160.000	2.400.986.600	55.28 %
57 Belanja Bantuan Sosial	0	0	0.00 %
Total	1.242.629.794.000	1.126.096.453.970	90,6220388

- Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan, tahun 2018 mendapat alokasi anggaran Rp.1.636.354.054.000.00 dan realisasi Rp.1.415.083.088.139,00 (86,48%).

Akun 2 Digit	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase
51 Belanja Pegawai	78.000.000.000	69.516.520.886	89.12 %
52 Belanja Barang	1.507.080.045.000	1.298.193.704.257	86.14 %
53 Belanja Modal	51.274.009.000	47.372.862.996	92.39 %
57 Belanja Bantuan Sosial	0	0	0.00 %
Total	1.636.354.054.000	1.415.083.088.139	86,4778062

- Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat, tahun 2018 mendapat alokasi anggaran Rp.2.028.956.742.000.00 dan realisasi Rp.1.849.460.121.476,00 (91,15%).

Akun 2 Digit	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase
51 Belanja Pegawai	145.584.209.000	138.441.915.217	95.09 %
52 Belanja Barang	1.713.666.559.000	1.544.572.193.950	90.13 %
53 Belanja Modal	169.705.974.000	166.446.012.309	98.08 %
57 Belanja Bantuan Sosial	0	0	0.00 %
Total	2.028.956.742.000	1.849.460.121.476	91,1532554

- Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian, tahun 2018 mendapat alokasi anggaran Rp.5.834.734.749.000.00 dan realisasi Rp.5.119.394.098.169,00 (87,74%).

Akun 2 Digit	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase
51 Belanja Pegawai	26.000.501.000	22.462.394.880	86.39 %
52 Belanja Barang	5.797.735.357.000	5.087.481.562.851	87.75 %
53 Belanja Modal	10.998.891.000	9.450.140.438	85.92 %
57 Belanja Bantuan Sosial	0	0	0.00 %
Total	5.834.734.749.000	5.119.394.098.169	87,7399628

- Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-Industri Berkelanjutan, tahun 2018 mendapat alokasi anggaran Rp.2.092.710.111.000.00 dan realisasi Rp.1.884.401.372.999,00 (90,05%).

Akun 2 Digit	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase
51 Belanja Pegawai	501.269.866.000	475.648.882.471	94.89 %
52 Belanja Barang	1.286.544.813.000	1.122.723.547.000	87.27 %
53 Belanja Modal	304.895.432.000	286.028.943.528	93.81 %
57 Belanja Bantuan Sosial	0	0	0.00 %
Total	2.092.710.111.000	1.884.401.372.999	90,0459821

- Program Peningkatan Penyuluhan, Pelatihan dan Pendidikan Pertanian, tahun 2018 mendapat alokasi anggaran Rp.1.264.588.172.000,00 dan realisasi Rp.1.175.659.720.328,00 (92,97%).

Akun 2 Digit	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase
51 Belanja Pegawai	148.469.193.000	141.187.512.983	95.10 %
52 Belanja Barang	998.716.895.000	919.908.882.126	92.11 %
53 Belanja Modal	117.402.084.000	114.563.325.219	97.58 %
57 Belanja Bantuan Sosial	0	0	0.00 %
Total	1.264.588.172.000	1.175.659.720.328	92,9677935

- Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, tahun 2018 mendapat alokasi anggaran Rp.600.286.783.000,00 dan realisasi Rp.586.276.591.831,00 (97,67%).

Akun 2 Digit	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase
51 Belanja Pegawai	23.695.850.000	19.509.140.476	82.33 %
52 Belanja Barang	572.832.083.000	563.071.477.006	98.30 %
53 Belanja Modal	3.758.850.000	3.695.974.349	98.33 %
57 Belanja Bantuan Sosial	0	0	0.00 %
Total	600.286.783.000	586.276.591.831	97,6660837

- Program Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati, tahun 2018 mendapat alokasi anggaran Rp.835.619.134.000,00 dan realisasi Rp.830.709.616.978,00 (99,41%).

Akun 2 Digit	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase
51 Belanja Pegawai	268.347.980.000	266.587.600.574	99.34 %
52 Belanja Barang	397.136.832.000	394.520.119.625	99.34 %
53 Belanja Modal	170.134.322.000	169.601.896.779	99.69 %
57 Belanja Bantuan Sosial	0	0	0.00 %
Total	835.619.134.000	830.709.616.978	99,4124695

Alokasi Anggaran Kementerian Pertanian Tahun 2018

No.	Nama Unit	Total Pagu (Rp)	Pagu Anggaran (Rp)			
			B. Pegawai	B. Barang	B. Modal	B. Bansos
1	Sekretariat Jenderal	1.730.087.799.000	1.241.256.472.000	429.125.677.000	59.705.650.000	0
2	Inspektorat Jenderal	97.134.000.000	23.727.000.000	70.556.110.000	2.850.890.000	0
3	Dijjen Tanaman Pangan	6.675.409.495.000	49.516.144.000	6.582.781.439.000	43.111.912.000	0
4	Dijjen Hortikultura	1.242.629.794.000	24.459.908.000	1.213.826.726.000	4.343.160.000	0
5	Dijjen Perkebunan	1.636.354.054.000	78.000.000.000	1.507.080.045.000	51.274.009.000	0
6	Dijjen Peternakan Dan Kesehatan Hewan	2.028.956.742.000	145.584.209.000	1.713.666.559.000	169.705.974.000	0
7	Dijjen Prasarana Dan Sarana Pertanian	5.834.734.749.000	26.000.501.000	5.797.735.357.000	10.998.891.000	0
8	Badan Penelitian Dan Pengembangan Pertanian	2.092.710.111.000	501.269.866.000	1.286.544.813.000	304.895.432.000	0
9	Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian	1.264.588.172.000	148.469.193.000	998.716.895.000	117.402.084.000	0
10	Badan Ketahanan Pangan	600.286.783.000	23.695.850.000	572.832.083.000	3.758.850.000	0
11	Badan Karantina Pertanian	835.619.134.000	268.347.980.000	397.136.832.000	170.134.322.000	0
Total		24.038.510.833.000	2.530.327.123.000	20.570.002.536.000	938.181.174.000	0

Sumber : Kementerian Keuangan

Serapan Anggaran Kementerian Pertanian Tahun 2018

No.	Nama Unit	Total Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)				Total Realisasi	Persen Realisasi
			B. Pegawai	B. Barang	B. Modal	B. BanSos		
1	Sekretariat Jenderal	1.730.087.799.000	1.209.081.550.015	398.206.747.065	49.841.784.352	0	1.657.130.061.432	95,78
2	Inspektorat Jenderal	97.134.000.000	21.819.083.325	67.239.511.661	2.813.807.591	0	91.872.402.577	94,58
3	Dijjen Tanaman Pangan	6.675.409.495.000	43.496.315.489	6.040.259.393.560	16.768.600.746	0	6.100.524.309.795	91,39
4	Dijjen Hortikultura	1.242.629.794.000	23.146.385.019	1.100.549.082.351	2.400.986.600	0	1.126.096.453.970	90,62
5	Dijjen Perkebunan	1.636.354.054.000	69.516.520.886	1.298.193.704.257	47.372.862.996	0	1.415.083.088.139	86,48
6	Dijjen Peternakan Dan Kesehatan Hewan	2.028.956.742.000	138.441.915.217	1.544.572.193.950	166.446.012.309	0	1.849.460.121.476	91,15
7	Dijjen Prasarana Dan Sarana Pertanian	5.834.734.749.000	22.462.394.880	5.087.481.562.851	9.450.140.438	0	5.119.394.098.169	87,74
8	Badan Penelitian Dan Pengembangan Pertanian	2.092.710.111.000	475.648.882.471	1.122.723.547.000	286.028.943.528	0	1.884.401.372.999	90,05
9	Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian	1.264.588.172.000	141.187.512.983	919.908.882.126	114.563.325.219	0	1.175.659.720.328	92,97
10	Badan Ketahanan Pangan	600.286.783.000	19.509.140.476	563.071.477.006	3.695.974.349	0	586.276.591.831	97,67
11	Badan Karantina Pertanian	835.619.134.000	266.587.600.574	394.520.119.625	169.601.896.779	0	830.709.616.978	99,41
Total		24.038.510.833.000	2.430.897.301.335	18.536.726.221.452	868.984.314.907	0	21.836.607.837.694	90,84

Sumber :Kementerian Keuangan

B. Keragaan SDM Kementerian Pertanian Tahun 2018

Jumlah pegawai Kementerian Pertanian pada tahun 2018 yang tersebar di 11 Unit Kerja Eselon I termasuk 161 Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebanyak 18.131 orang pegawai. Dirinci berdasar golongan terdiri dari Gol. I sebanyak 362 orang pegawai; Gol. II sebanyak 4.043 orang pegawai; Gol. III sebanyak 11.265 orang pegawai, dan Gol. IV sebanyak 2.461 orang pegawai. Dirinci berdasar jenjang pendidikan terdiri dari S3 (691 orang pegawai); S2 (3.957 orang pegawai), S1/D4 (5.627 orang pegawai); Sarjana Muda/D3/D2/D1 (1.726 orang pegawai); SMA (5.325 orang pegawai); serta SMP/SD (805 orang pegawai). Terjadi penurunan jumlah pegawai Kementerian Pertanian tahun 2018 dibanding tahun 2017 yaitu 18.760 (3,35%) orang pegawai, disebabkan adanya pegawai pensiun.

Selain didukung oleh pegawai PNS, keberhasilan program pembangunan pertanian juga didukung oleh peran pegawai non PNS di lapangan, yaitu Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL TB-PP) sebanyak 12.135 orang, penyuluh swadaya sebanyak 25.852, penyuluh swasta sebanyak 100 orang, THL Pengamat Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) sebanyak 1.730 orang, dan vaksinator IB sebanyak 7.968 orang. Jumlah pegawai Kementerian Pertanian tahun 2018 secara rinci dapat dilihat pada Lampiran

No	Eselon 1	Jumlah Pegawai
1	Sekretariat Jenderal	1.278
2	Direktorat Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian	307
3	Direktorat Jenderal Tanaman Pangan	637
4	Direktorat Jenderal Hortikultura	353
5	Direktorat Jenderal Perkebunan	968
6	Direktorat Jenderal Peternakan Dan Kesehatan Hewan	2.042
7	Inspektorat Jenderal	334
8	Badan Penelitian Dan Pengembangan Pertanian	6.170
9	Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Sdm Pertanian	2.064
10	Badan Ketahanan Pangan	287
11	Badan Karantina Pertanian	3.691
TOTAL		18.131

BAB V. PERMASALAHAN, TANTANGAN DAN SOLUSI TINDAKLANJUT

A. Masalah

Permasalahan Program Tanaman Pangan

Permasalahan kegiatan budidaya kedelai diantaranya :

- 1) Beberapa daerah tidak dapat memenuhi CPCL sesuai target yang telah ditetapkan karena persaingan lahan dengan komoditas lain yang lebih menguntungkan yaitu padi dan jagung, yang sudah relokasi CPCL,
- 2) Permasalahan pada harga dan ketersediaan benih di beberapa daerah pelaksana sehingga menghambat pencairan anggaran, dan
- 3) Waktu tanam telah lewat.

Permasalahan kegiatan fasilitasi penerapan budidaya jagung antara lain:

- 1) Adanya perubahan struktur organisasi di daerah yang berakibat pada keterlambatan pelaksanaan kegiatan utama yang mendukung peningkatan produksi jagung;
- 2) Kekeringan yang hampir merata di seluruh provinsi;
- 3) Revisi DIPA ke-VI dan perubahan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Utama;
- 4) Benih tidak berkualitas dan keterlambatan distribusi.

Permasalahan Klasik dan Faktor Alam yang sering terjadi di daerah antara lain :

- 1) Adanya perubahan struktur organisasi di daerah yang berakibat pada keterlambatan pelaksanaan kegiatan utama yang mendukung peningkatan produksi padi;
- 2) Kekeringan yang hampir merata di seluruh provinsi;
- 3) Revisi DIPA ke-V dan perubahan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Utama,
- 4) Penyediaan benih tidak sesuai varietas dan waktu tanam.

Permasalahan Program Perkebunan

Permasalahan di subsektor perkebunan secara umum adalah sebagai berikut :

- 1) Keraguan dalam pelaksanaan kontrak karena waktu yang sangat terbatas;
- 2) Perubahan pola tanam menyesuaikan anomali iklim, menyebabkan pelaksanaan kegiatan harus dilakukan secara hati-hati karena di khawatirkan gagal tanam;
- 3) CP/CL yang telah dipersiapkan telah menggunakan lahannya untuk kegiatan tanam semusim lainnya disebabkan petani membutuhkan pekerjaan dan pendapatan dari lahan pertanian yang diwilikinya;
- 4) Pengadaan alat pertanian melalui e-katalog kekurangan stok di tingkat produsen;
- 5) Ketersedian benih tidak sesuai dengan spesifikasi kegiatan misalnya umur benih yang masih kurang atau lewat umur;
- 6) Pihak ketiga mengajukan MOU penyediaan benih yang sama dengan pihak ketiga lainnya sehingga disaat pelaksanaan kekurangan benih siap salur;
- 7) Keterbatasan pihak ketiga yang memiliki keahlian teknis sesuai spesifikasi yang di minta;

- 8) Beberapa Regulasi yang menjadi penghambat percepatan pelaksanaan kegiatan khususnya dalam kegiatan perbenihan perkebunan atau kegiatan yang membutuhkan benih dalam spesifikasinya;
- 9) Kegiatan swakelola khususnya penyediaan benih siap salur masih terdapat beberapa kendala antara lain pedomannya terlambat diterima, ketersediaan sumber benih, waktu sangat terbatas khususnya APBN-P, kesiapan penangkar dll;
- 10) Keterbatasan dan perubahan SDM di Satker;
- 11) Koordinasi antar lini lingkup satker masih belum solid dan kurang akomodatif, sehingga persiapan pelaksanaan kegiatan sering terlambat;
- 12) Belum adanya sinergi yang baik antara Dinas dengan Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan antara pusat dengan pelaksana di Satker daerah/antara Dinas Provinsi dengan Dinas Kabupaten atau Kota (khususnya TP Provinsi);
- 13) Pelelangan yang terpusat di ULP Pemprov/Pemkab/Pemkot masih memprioritaskan kegiatan bersumber dari APBD dan infrastruktur sehingga pelaksanaan kegiatan Dinas yang membidangi perkebunan mengantri dalam waktu yang lama;
- 14) Pelaksana kegiatan atau penggunaan anggaran yang tidak mengikuti ROPAK;
- 15) Terjadinya reorganisasi dalam tubuh dinas yang membidangi perkebunan Provinsi/Kabupaten/Kota, yang berdampak pada kurang optimalnya manajemen pelaksanaan kegiatan;
- 16) Sebagian besar kegiatan pengembangan perkebunan tergantung pada musim tanam/iiklim. Perubahan iklim global mengakibatkan ketidakjelasan rencana penanaman (menunggu musim);
- 17) Penentuan kegiatan dalam usulan proposal belum sepenuhnya memperhatikan arus bawah secara berjenjang dan koordinasi dalam penentuan kegiatan kurang optimal;
- 18) Unit cost yang terlalu kecil dan terlalu besar untuk daerah-daerah tertentu;
- 19) Pimpinan, penanggungjawab dan petugas/pelaksana kegiatan belum sepenuhnya memahami Pedoman Teknis dan Pedoman-Pedoman lainnya;
- 20) Rencana kegiatan belum didukung oleh kebun induk sebagai sumber bahan untuk benih sebar/siap tanam;
- 21) Sistem Informasi dan Dokumentasi belum baik;
- 22) Terjadinya alih fungsi pemanfaatan lahan;
- 23) Kurangnya pendampingan pada petani yang telah mendapatkan pelatihan Pemberdayaan;
- 24) Implementasi Teknologi belum sepenuhnya diterapkan dan belum tersosialisasi dengan baik;
- 25) Pengetahuan dan keterampilan sebagian besar petani belum memadai;
- 26) Tim SPI belum optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan perkebunan

Permasalahan Program Peternakan dan Kesehatan Hewan

Permasalahan kegiatan Penanaman dan Pengembangan Tanaman Pakan Ternak Berkualitas:

- 1) Penanaman HPT sangat dipengaruhi dengan kondisi musim sehingga pada saat musim kemarau, pelaksanaan kegiatan akan terhambat. Sebagian besar daerah yang melaksanakan baru dapat melaksanakan setelah hujan mulai turun atau sekitar bulan Oktober, sehingga realisasi keuangan tidak optimal;
- 2) Pelaksanaan pekerjaan Gerbang Patas yang tertunda karena adanya penyesuaian anggaran pada detail kegiatan Gerbang Patas yang disebabkan oleh refocusing anggaran, sehingga pelaksanaan kegiatan harus menunggu proses revisi anggaran selesai.

Permasalahan kegiatan pakan konsentrat di UPT:

- 1) Pengadaan pakan konsentrat dilaksanakan melalui lelang atau e-katalog dengan mempertimbangkan laporan hasil pengujian laboratorium, hal tersebut untuk menjamin agar kualitas pakan sesuai dengan standar. Namun karena terbatasnya laboratorium pemerintah yang terakreditasi untuk pengujian mutu pakan menyebabkan dropping pakan terlambat.
- 2) Dropping pakan dilaksanakan secara bertahap mengingat lama penyimpanan pakan sangat terbatas, dan pembayaran dilaksanakan satu bulan setelah barang (pakan konsentrat) diterima, sehingga realisasi keuangan belum update, disarankan sebaiknya pembayaran diproses secara langsung pada bulan pakan tersebut diterima.

Permasalahan pengawasan mutu dan keamanan pakan adalah:

- 1) Kurangnya sumber daya manusia fungsional pengawas mutu pakan di Provinsi dan Kabupaten/Kota dan petugas pengambil contoh (PPC) yang melakukan pengambilan sampel ke lapangan;
- 2) Belum semua pabrik pakan mendaftarkan pakan yang beredar serta masih banyak pabrik yang belum memahami peraturan mengenai pendaftaran pakan

Permasalahan pada obat hewan :

- a) Maraknya peredaran obat hewan ilegal
- b) Kurangnya tenaga pengawas obat hewan
- c) Belum semua produsen obat hewan bersertifikasi CPOHB
- d) Penggunaan antimikrobia yang tidak bijaksana dan tidak bertanggungjawab

Permasalahan program pengendalian pemotongan sapi betina produktif adalah :

- 1) Tidak adanya dana talangan untuk menampung sapi bunting/betina produktif serta penyediaan sapi jantan pengganti
- 2) Harga sapi betina lebih murah daripada ternak jantan
- 3) Kebutuhan ekonomi masyarakat yang sangat mendesak sehingga peternak terpaksa menjual sapi betina produktif
- 4) Kebutuhan daging sapi di pasaran sangat tinggi, dan pelaku usaha hanya ingin mendapatkan keuntungan, sehingga jagal tidak dapat menolak pemotongan betina produktif.
- 5) Masih adanya pemotongan ternak di TPH sehingga pengawasan menjadi kurang optimal

- 6) Tingkat kesadaran peternak masih rendah tentang pentingnya keberlangsungan reproduksi sapi betina produktif
- 7) Beberapa RPH merupakan Perusahaan Daerah sehingga Dinas Peternakan tidak memiliki kewenangan dalam pengaturannya
- 8) Kurangnya keterampilan petugas RPH dalam mendeteksi kebuntingan
- 9) Kurangnya kepedulian pemangku kebijakan terhadap pengendalian pemotongan betina produktif maupun pentingnya keberadaan RPH sebagai penyedia pangan asal hewan yang ASUH
- 10) Kondisi RPH yang kurang representatif menyebabkan pelaksanaan SOP di RPH belum dapat diterapkan secara optimal
- 11) Adanya refocusing anggaran di tahun 2018 sehingga pelaksanaan pengendalian pemotongan betina produktif di lapangan kurang optimal.

Permasalahan Program PSP

Permasalahan kegiatan RJIT :

- 1) Calon lokasi yang diusulkan tidak sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan dalam pedoman teknis sehingga dalam perjalanannya Dinas Pertanian Kabupaten/Kota merelokasi ke lokasi yang sesuai dengan yang dipersyaratkan.
- 2) Pelaksanaan kegiatan di lapangan terlambat pelaksanaannya dari jadwal yang direncanakan karena dipengaruhi kondisi iklim, waktu penanaman yang terlambat serta kekurangan SDM pelaksana di tingkat Kabupaten/Kota/Provinsi.
- 3) Adanya perubahan struktur organisasi/SOTK dan mutasi petugas daerah berdasarkan PP 41, sehingga memerlukan perubahan SK Pengelola dan pengadministrasian lainnya yang mengakibatkan pelaksanaan kegiatan mengalami keterlambatan.
- 4) Perbedaan Pemahaman pedoman teknis kegiatan pada beberapa daerah memperlambat jadwal kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya.
- 5) Laporan yang disampaikan oleh daerah masih bersifat umum belum menyajikan data teknis spesifik lokasi masing-masing.
- 6) Belum semua petugas Kabupaten/Kota pelaksana kegiatan melaporkan hasil kegiatan melalui Model Pelaporan Online (MPO) Ditjen PSP.

Permasalahan Pengembangan Embung/Dam Parit/Long Storage

- 1) Kesulitan dalam mendapatkan lokasi yang ideal (daerah cekungan, terdapat sumber air, dekat dengan lahan usaha tani, tanahnya kedap air, dll) sehingga terpaksa dibuat embung gali yang membutuhkan biaya tinggi.
- 2) Adanya kekurangan dalam teknis konstruksi sehingga hasilnya kurang optimal. Kekurangan tersebut salah satunya diakibatkan oleh masih lemahnya kemampuan petugas dalam hal teknis pelaksanaan kegiatan, misalnya bangunan tidak dilengkapi dengan limpasan dan pintu penguras, konstruksi bangunan embung tidak digali melainkan dibuat seperti bak penampung.
- 3) Sebagian daerah tidak menyediakan dana untuk membuat desain.
- 4) Terjadinya perbedaan data rencana jumlah bangunan di pusat dan daerah karena proses revisi sebagian tidak dilaporkan daerah.

- 5) Faktor cuaca (musim hujan) kadang – kadang yang sedikit mengganggu dalam pelaksanaan pembangunan bangunan konservasi air
- 6) Kemampuan SDM dalam melaksanakan kegiatan masih kurang, baik petugas teknis maupun petani penerima manfaat (terutama dalam melakukan SID) seperti pemilihan lokasi dan petani penerima manfaat yang kurang tepat (tidak ada sumber air untuk ditampung) sehingga hasil bangunan yang telah dilaksanakan di beberapa lokasi kurang optimal bahkan terbengkalai dan kegiatan tidak dilaksanakan.

Permasalahan Perluasan Sawah

- 1) Adanya lahan yang tidak sesuai jika digunakan sebagai sawah terutama pada musim kemarau. karena sawah yang dicetak merupakan sawah tadah hujan
- 2) Kurangnya jumlah alat berat di beberapa daerah untuk mencetak sawah.
- 3) Adanya sengketa lahan dengan penduduknya yang tanahnya menjadi sasaran cetak sawah
- 4) Adanya lahan sasaran cetak sawah yang memiliki vegetasi yang cukup berat/ lebat.

Permasalahan Pembiayaan Pertanian

- 1) Pendaftaran dan pembayaran premi masih ada yang belum sesuai prosedur.
- 2) Penerbitan polis dan pembayaran klaim banyak mengalami keterlambatan. Perijinan LKM-A untuk memiliki Badan Hukum Koperasi agak lambat.
- 3) Tenaga FPPS sebagian belum aktif menjalankan tugasnya.
- 4) Jumlah notaris pembuat akta koperasi terbatas.
- 5) Jumlah SDM PT Jasindo di tingkat lapangan masih terbatas padahal sebaran dan jangkauan wilayah asuransi pertanian sangat luas.

Permasalahan Program Perkarantinaan Pertanian

Permasalahan Operasional yang ditemukan antara lain:

- 1) Perlunya dilakukan revisi Permentan No.70/Permentan/KR.100/12/2015 tentang Instalasi Karantina Hewan, terkait masih terdapat media pembawa berupa benda lain yang belum ditetapkan dalam Permentan tersebut.
- 2) Implementasi Surat Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian No 87 Tahun 2016 tentang Juknis TKH terhadap HPR belum sepenuhnya terlaksana karena tidak semua UPT dapat melakukan Pengujian Titer Antibodi Rabies yang terkendala dalam ketersediaan Kit Elisa Rabies dan sarana prasarana pengujian.
- 3) Belum semua UPTKP mempunyai sarana dan prasarana untuk pemeriksaan Hewan, BAH, HBAH dan Benda Lain di tempat pemasukan dan pengeluaran.
- 4) Kesulitan dalam identifikasi dan penetapan MP HPHK Pakan dan Bahan Pakan yang tergolong pakan hewan kesayangan, pakan ternak, karena kurangnya informasi pada dokumen yang menyertai serta bervariasinya penamaan bahan pakan dimaksud.
- 5) Belum semua UPTKP menerapkan kelengkapan safety dalam melakukan pemeriksaan MP HPHK (PPE: Sarung Tangan, Masker, Wearpak, dll).
- 6) Belum seragmnya pelaksanaan Tindakan Karantina terhadap Satwa Liar dan produknya terkait pengawasan SATS-DN (Surat Angkut Tanaman Satwa Dalam Negeri) dan SATS-LN (Surat Angkut Tanaman Satwa Luar Negeri).

Permasalahan pengembangan sistem sertifikasi ekspor komoditas pertanian antara lain :

- (1) Kurangnya dukungan dari instansi terkait dalam penyiapan tempat produksi yang telah mengembangkan kesisteman produksi dan pengelolaan produk, situasi OPT dan penanganan pasca panen serta pengembangan perlakuan yang dapat diterima oleh negara tujuan ekspor.
- (2) Masih kurangnya kesadaran eksportir dan pelaku usaha mengenai pentingnya jaminan kesehatan karantina terhadap komoditas yang akan diekspor.
- (3) Inkonsistensi Petugas Karantina Tumbuhan dalam pelaksanaan Sistem Sertifikasi Fitosanitari, karena masih beranggapan bahwa pelayanan sertifikasi untuk komoditas ekspor semata-mata hanya untuk kelancaran perdagangan

Permasalahan Pelaksanaan Sistem Audit dan Penilaian

- 1) Pelaksanaan fumigasi serta perlakuan dan sertifikasi kemasan kayu oleh pihak ketiga MASIH terjadi penyimpangan dan tidak konsisten dalam penerapan ketentuan/standar, sehingga banyak negara tujuan ekspor menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian (notification of non-compliance) berupa perlakuan kembali (re-treatment) atau penolakan terhadap komoditas Indonesia di negara tujuan ekspor. Kondisi ini sangat berpotensi menurunkan daya saing komoditas ekspor Indonesia dalam perdagangan global.
- 2) Ketidak-konsistenan penerapan standar Badan Karantina Pertanian mengindikasikan bahwa pihak ke-3 kurang memiliki komitmen dalam penerapan standar dan lebih mengutamakan kepentingan bisnis semata (business oriented).
- 3) Beberapa perusahaan yang telah diregistrasi menunjukkan ketidak-patuhan terhadap Pernyataan Kesanggupan yang telah dibuat dan ditandatanganinya di atas materai, sehingga pengenaan sanksi seperti pembekuan (suspended) terhadap nomor registrasi, tidak dimaknai sebagai salah satu instrument pembinaan Badan Karantina Pertanian bahkan berkomplik dan melakukan upaya-upaya/perlawanan hukum.
- 4) Pengelolaan program SAP Barantan sebagai mekanisme pemberian kewenangan pelaksanaan tindakan karantina kepada pihak lain memerlukan penataan kembali dengan penguatan Peraturan Perundang-undangan (Peraturan Menteri Pertanian), Pedoman, Prosedur dan dokumen-dokumen relevan lainnya, serta penataan kembali sumberdaya manusia pelaksana program SAP Barantan

Permasalahan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Pusat KKIP diantaranya:

- 1) Sebaran SDM Kewasdakan (PPNS, Intelijen dan Polsus) yang tidak merata disetiap UPT Karantina Pertanian;
- 2) Masih dukungan fasilitasi sarana operasional dalam penyelenggaraan kewasdakan di Kantor Pusat dan UPT Karantina Pertanian;
- 3) Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Badan Karantina Pertanian dalam melakukan tehnik bernegosiasi dengan negara mitra dagang sehingga Indonesia sering mendapatkan posisi yang selalu kurang diuntungkan dalam pertemuan internasional. Untuk itu Bidang Kerjasama agar dapat memantau SDM yang kompeten khususnya hasil pelatihan teknik negosiasi internasional untuk dapat dilibatkan dalam pertemuan-pertemuan internasional dengan negara-negara mitra dagang;

- 4) Masih kurangnya SDM di Badan Karantina Pertanian yang memiliki penguasaan bahasa asing, khususnya Bahasa Inggris, sehingga pemahaman SDM Badan Karantina Pertanian akan agenda dan isu perundingan masih kurang. Untuk itu perlu adanya pelatihan Bahasa Inggris untuk meningkatkan kompetensi dalam perundingan/pertemuan internasional sehingga perlu dialokasikan anggarannya setiap tahun untuk pelatihan bahasa Inggris;
- 5) Kurangnya SDM di sub bidang pelayanan informasi sehingga waktu rangkaian proses penyajian dan pengolahan data yang diajikan masih kurang efektif ;
- 6) Adanya beberapa penggantian petugas administrator di UPT Karantina serta kurangnya sosialisasi system IQFAST ini dari petugas administrator yang lama ke petugas administrator juga merupakan kendala yang terjadi dalam implementasi system ini;
- 7) Aplikasi IQFAST merupakan system informasi layanan operasional perkarantinaan yang baru diterapkan pada awal tahun 2018. Sistem ini mengintegrasikan system operasional yang telah ada sebelumnya (Eplaq dan Eqvet). Selain itu system ini juga mengintegrasikan beberapa system informasi yang berkaitan dengan instansi lain seperti TPK dan simponi Kementerian Keuangan. Beberapa kendala diawal penerapan system ini telah disampaikan oleh para administrator system di upt-upt karantina antara lain. Kendala-kendala yang disampaikan oleh petugas telah dilakukan penyesuaian dalam system IQFAST. Hal ini ditandai dengan beberapa update pada Aplikasi IQFAST yang dilakukan selama tahun 2018. Hal tersebut dilakukan karena masih banyak petugas karantina di UPT yang memerlukan waktu penyesuaian terhadap aplikasi ini;
- 8) Jaringan internet di UPT karantina yang tidak stabil berdampak pada sinkronisasi data operasional UPT dan Kantor Pusat menyebabkan keterlambatan data pengiriman operasional karantina;

Permasalahan Implementasi Regulasi Impor

- (1) Kebijakan penguatan pre-border melalui pengelolaan manajemen risiko belum berlangsung efektif. Beberapa Negara yang mengajukan permintaan untuk dilaksanakan verifikasi tidak dapat difasilitasi oleh Pusat Karantina Tumbuhan dan Kemanana Hayati Nabati. Hal ini karena keterbatasan anggaran perjalanan dinas untuk keperluan kegiatan verifikasi ke Luar Negeri serta adanya kebijakan yang tidak memperkenankan pihak lain, termasuk Negara pengimpor membiayai kegiatan verifikasi penerapan. Kedua hal tersebut menyebabkan kegiatan surveilen terhadap Negara yang telah mendapatkan pengakuan dan ditetapkan sebagai daerah bebas OPT tertentu (Pest Free Area) tidak berjalan dengan baik.
- (2) Pelaksanaan tindakan karantina di border belum optimal dan efektif. Hal ini disebabkan regulasi terkait pengaturan pemasukan media pembawa OPTK ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia masih terdapat banyak kelemahan sehingga memerlukan penyempurnaan. Sejauh ini, hasil kajian berupa Naskah Akademis untuk ditindaklanjuti menjadi Permentan sebagai pengganti/revisi.
- (3) Pemusnahan terhadap komoditas merupakan hasil tangkapan operasi yang dilakukan oleh pihak Kepolisian, Bea Cukai atau TNI. Kondisi ini membawa implikasi terhadap besarnya sumberdaya yang harus disiapkan oleh UPT-KP yang bersangkutan seperti biaya pemusnahan, SDM dan pengawasan terhadap keamanan komoditas yang akan dimusnahkan.

Permasalahan kinerja BUTTMKP Tahun Anggaran 2018 diantaranya :

- 1) Hasil uji terap belum ditetapkan sebagai regulasi oleh Barantan
- 2) Topik diseminasi belum mengakomodir keseluruhan kebutuhan UPT operasional
- 3) Peningkatan SDM belum terpenuhi dengan maksimal
- 4) Jumlah pegawai kurang mengakomodir jumlah tugas pokok dan fungsi organisasi
- 5) Sosialisasi tentang BUTTMKP sebagai ASEAN Training Center kurang dilaksanakan

B. Rekomendasi

Rekomendasi umum untuk peningkatan perbaikan kegiatan tahun 2019 perlu dilakukan :

- 1) melakukan evaluasi terhadap daerah-daerah yang tidak dapat mencapai target sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian bantuan tahun 2019;
- 2) mengupayakan adanya aturan di juknis bantuan pemerintah untuk harga benih sesuai spesifik lokasi atau sesuai harga survei setempat;
- 3) pelaksanaan kegiatan dilakukan di awal tahun.

Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan sub sektor Hortikultura untuk komoditas strategis:

- 1) Harga acuan bawang putih yang dikeluarkan agar dapat ditinjau kembali dengan dasar biaya produksi, produktivitas, kondisi pasar yang ada pada saat ini, dan keuntungan layak yang diperoleh petani. Di luar kabupaten penghasil utama bawang putih, produktivitas bawang putih secara nasional hanya sekitar 8,3 ton/ha.
- 2) Keuntungan layak untuk petani sebaiknya setara dengan keuntungan berusahatani komoditas lain atau lebih tinggi dari upah minimum regional (UMR) setempat. Untuk mengamankan harga benih guna mendukung swasembada bawang putih nasional maka perlu ditetapkan harga acuan maksimal untuk benih bawang putih.
- 3) Berdasarkan analisis sensitivitas yang telah dilakukan terhadap harga benih, maka dapat direkomendasikan harga acuan bawang putih dalam bentuk konde basah antara Rp15.000,00–17.000,00/kg dan harga acuan benih bawang putih antara Rp49.000,00–53.000,00/kg.
- 4) Jaminan terhadap kepastian harga juga perlu diberikan kepada petani agar petani bergairah untuk menanam bawang putih. Terdapat komoditas lain sebagai pesaing bawang putih, seperti kentang di Lombok Timur serta cabai di Magelang dan Temanggung yang ditanam pada musim yang sama. Apabila jaminan harga yang layak tidak dapat diberikan kepada petani maka dikhawatirkan petani akan beralih kepada komoditas lain yang lebih menjanjikan.

Rekomendasi Solusi Akar Permasalahan Produksi Gula Tebu

- 1) Pengembangan Tebu 90% di lahan Kering/marginal Rekomendasi adalah Penyediaan sumur dalam, embung, sumur dangkal, permukaan
- 2) Sistem Budidaya belum Optimal Rekomendasi adalah Meningkatkan pembinaan, pendampingan dan penyuluhan Rehabilitasi Tanaman melalui bongkar ratoon dan rawat ratoon Adopsi inovasi terbaru dari studi banding, penelitian dan percontohan atau demplot.

- 3) Sulitnya memperoleh benih unggul tepat waktu (sesuai pola tanam) Rekomendasi adalah Koordinasi dan kerjasama dengan lembaga penelitian dan sumber benih Pembangunan benih unggul secara berjenjang dan terencana
- 4) Rendemen tidak Optimal Rekomendasi adalah Revitalisasi PG Penataan varietas Sistem budidaya sesuai rekomendasi teknis Memperbaiki manajemen tebang muat angkut
- 5) Transparansi rendemen Rekomendasi adalah Fasilitasi pengawas rendemen Membentuk Tim Transparansi Rendemen Pengawasan rendemen melibatkan petani, dinas terkait, Perguruan tinggi dan PG Pengukuran rendemen individu menggunakan Core Sampler
- 6) Sulit melakukan perluasan areal tebu Rekomendasi adalah Meningkatkan Koordinasi dengan K/L terkait dengan pembebasan lahan Meningkatkan animo masyarakat untuk mengembangkan tanaman tebu Perluasan di lahan pengembangan
- 7) Lahan sempit dan terpecah Rekomendasi adalah Melakukan regrouping lahan minimal 10 ha, bekerja sama dengan pemda dan BPN
- 8) Harga ditingkat petani relative tidak stabil Rekomendasi adalah Menekan biaya produksi dengan full mekanisasi, regrouping lahan, manajemen tebang muat angkut, subsidi pupuk, insentif produksi gula tebu dan profesionalitas petani tebu Membentuk Tim pengawasan pasar gula Penguatan lembaga pemasaran bentukkan petani/klp tani tebu
- 9) Minimnya kuantitas dan kualitas SDM pertebuan Rekomendasi adalah Melatih tenaga kerja pertebuan Meningkatkan kapabilitas SDM petugas teknis dan penyuluh dan petani tebu melalui pelatihan/traning Profesionalisasi kelembagaan petani melalui pelatihan dan training Asosiasi tebu Indonesia di optimalkan
- 10) Terbatasnya SDA Rekomendasi adalah Optimalisasi lahan Optimalisasi penggunaan sumber daya air Memanfaatkan iklim sebagai sumberdaya yang efisien Menggunakan sarana dan prasarana yang mendukung
- 11) Dukungan lembaga riset pengembangan tebu kurang Rekomendasi adalah Pemberdayaan lembaga riset tebu yang sudah ada secara optimal
- 12) Minimnya investasi Rekomendasi adalah Sosialisasi dan koordinasi dengan investor Meningkatkan koordinasi sinergi dengan pihak-pihak terkait Memfasilitasi investor baik secara administrasi maupun infrastruktur
- 13) Menyatukan persepsi yang sama terhadap kemajuan pembangunan pergulaan Nasional Rekomendasi adalah Sosialisasi kepada seluruh stakeholders pergulaan dalam menyatukan persepsi. Meningkatkan kebersamaan lembaga/instansi/organisasi terkait Meningkatkan pemberdayaan petani/kelompoktani/koperasi/asosiasi pertebuan Indonesia

C. Solusi dan Tindaklanjut

Tindak lanjut Permasalahan Program Tanaman Pangan

Upaya tindak lanjut permasalahan klasik dan faktor alam yang sering terjadi diantaranya :

- 1) Koordinasi dengan Dinas terkait untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan utama yang mendukung peningkatan produksi padi,
- 2) Koordinasi dengan Dinas terkait untuk melakukan identifikasi dan penanganan masalah kekeringan, 3) Mereviu kembali desain perencanaan dan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Utama agar lebih operasional dilaksanakan di lapangan,
- 4) Memperkuat kelembagaan mandiri benih.

Upaya tindak lanjut faktor yang menjadi kendala kegiatan fasilitasi penerapan budidaya jagung yang dilakukan antara lain:

- 1) Koordinasi dengan Dinas terkait untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan utama yang mendukung peningkatan produksi padi;
- 2) Koordinasi dengan Dinas terkait untuk melakukan identifikasi dan penanganan masalah kekeringan;
- 3) Mereviu kembali desain perencanaan dan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Utama agar lebih operasional dilaksanakan di lapangan;
- 4) Meningkatkan pengawalan dan pengawasan penangkar benih dan meningkatkan kemandirian penyedia benih lokal.

Tindak lanjut Permasalahan Program Peternakan dan Kesehatan Hewan

Solusi Tindak Lanjut Permasalahan dalam Pelaksanaan kegiatan Penanaman dan Pengembangan Tanaman Pakan Ternak Berkualitas

- 1) Dinas Provinsi membuat jadwal palang pelaksanaan pengadaan HPT dan sarana pendukungnya, yang meliputi jadwal pengadaan barang dan jasa, pengolahan lahan, dropping HPT, penanaman, perawatan/pemeliharaan, dan jadwal pembinaan oleh dinas setempat.
- 2) Dinas Provinsi memiliki data perkiraan musim hujan dari BMKG atau instansi yang menangani iklim di daerah. Sehingga penanaman HPT tidak terlewat musim hujan.
- 3) Dinas Provinsi mengupayakan proses pengadaan barang dan jasa dilaksanakan di awal tahun. Apabila ada refocusing anggaran, maka kegiatan Gerbang Patas tidak menjadi target untuk dialihkan menjadi kegiatan lain.

Tindak Lanjut Permasalahan pada obat hewan

- 1) Finalisasi Permentan bidang obat hewan
- 2) Setiap Provinsi/Kab/Kota menerbitkan SK Pengawas Obat Hewan
- 3) Pengawasan dan pembinaan penggunaan antimikrobia
- 4) Peningkatan kerjasama pengawasan obat hewan lintas sector
- 5) Penyempurnaan aplikasi obat hewan

Upaya tindak lanjut permasalahan Pemotongan Sapi Betina Produktif, Upaya pengendalian pemotongan betina produktif :

- 1) Telah dilakukan kegiatan pengendalian pemotongan betina produktif bekerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui perjanjian kerjasama (MoU) antara Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Baharkam Polri) sejak tanggal 9 Mei 2017;
- 2) Ditatatangannya Pedoman bersama Kerja antara Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Baharkam Polri) pada tanggal 8 April 2018. Dilakukan Pengendalian Pemotongan Betina Produktif tahun 2018 di 41 Kabupaten/Kota di 17 Provinsi (Provinsi Target) dalam bentuk sosialisasi, pengawasan dan pembinaan dan di 16 Provinsi (Provinsi Non Target) dalam bentuk sosialisasi.

Tindak Lanjut Permasalahan Program PSP

Tindak lanjut RJIT :

- 1) Tim teknis Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap CPCL yang sesuai dengan dengan kriteria yang dipersyaratkan dalam pedoman teknis.
- 2) Melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan di lapangan melalui pendampingan petugas lapangan dan tim teknis, serta upaya peningkatan kemampuan SDM Pelaksana di tingkat Kabupaten/Kota/Provinsi.
- 3) Petugas Pusat melakukan koordinasi secara intensif dengan dinas Kabupaten/Kota/Provinsi melalui upaya kesepakatan penyusunan jadwal percepatan kegiatan.
- 4) Sosialisasi Pedoman Teknis yang meliputi kriteria teknis kegiatan, tahapan pelaksanaan kegiatan, mekanisme pelaporan dan pendampingan kegiatan oleh petugas Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota

Tindak lanjut Pengembangan Embung/Dam Parit/Long Storage

- 1) Maksimalkan swadaya anggota kelompok baik berupa tenaga kerja atau material agar fisik bangunan cepat selesai dan bangunan dapat segera dimanfaatkan.
- 2) Komponen-komponen bangunan dapat disederhanakan asalkan fungsi masing-masing komponen masih ada. Sesuai dengan pedoman umum, setiap embung perlu dilengkapi dengan bangunan pelengkap dan prasasti, sehingga untuk embung yang belum sesuai dengan pednis untuk segera menyesuaikan
- 3) Embung dapat dimanfaatkan juga untuk budidaya ikan, namun dalam pelaksanaannya jangan sampai mengganggu fungsi utamanya sebagai suplesi air bagi kegiatan pertanian
- 4) Perlu dibedakan antara embung dengan bak penampung air, sehingga hasil yang terjadi tidak rancu. Untuk itu pedoman umumnya perlu dicermati lagi oleh petugas di daerah.
- 5) Pemeliharaan lokasi embung harus berdasakan usulan petani ke petugas, sehingga benar - benar dibutuhkan oleh petani.
- 6) Sebelum kegiatan dilaksanakan oleh petani maka petugas kabupaten perlu mengadakan sosialisasi terlebih dahulu mengenai teknis dan administrasi. Selain itu juga perlu ditumbuhkan semangat partisipasi dari petani.
- 7) Diperlukan sosialisasi kepada kelompok tani penerima manfaat agar tidak minta ganti rugi tanah.
- 8) Masih diperlukan pelatihan teknis melakukan Survey, Investigasi dan Desain kepada para petugas di Kabupaten.
- 9) Pemeliharaan terhadap bangunan embung yang telah dibangun oleh pemerintah tersebut diharapkan agar para kelompok tani dapat memelihara dan mengoperasikan dengan baik serta, diharapkan pula agar para petani dapat melakukan pembuatan embung tersendiri tidak tergantung kepada pemerintah dengan cara melalui swakelola, hal ini agar para petani merasa memiliki akan pentingnya ketersediaan air untuk pertanian.

- 10) Perlu meminimalisir terjadinya revisi, apabila memang sangat diperlukan adanya revisi, maka sebaiknya revisi yang dilaksanakan adalah revisi POK. Revisi bangunan harus dilaporkan ke Instansi teknis di pusat agar dapat dimonitor perkembangannya.
- 11) Pedoman teknis kegiatan agar benar-benar dipahami oleh petugas, dan segera mungkin membuat petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan yang nantinya akan menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan.
- 12) Belum semua petugas Kabupaten/Kota pelaksana kegiatan melaporkan hasil kegiatan melalui Model Pelaporan Online (MPO) Ditjen PSP.

Tindak lanjut Perluasan Sawah

- 1) Mengajukan kegiatan embung pada lokasi sawah tadah hujan.
- 2) Menanam palawija pada musim kemarau pada sawah tadah hujan.
- 3) Mendatangkan alat berat baru dengan kondisi baik dan bisa berkerja yang jumlahnya disesuaikan dengan kapasitas kerja, alat berat dan jumlah luasan cetak sawah yang harus diselesaikan.
- 4) Melaksanakan koordinasi dengan Pemda dan tokoh masyarakat setempat untuk menyelesaikan masalah sengketa lahan.
- 5) Melaksanakan percepatan penyelesaian pekerjaan dengan penambahan alat berat/waktu operasi diatas 8 jam (12 s/d 18 jam) serta penambahan jumlah operator alat berat pada lahan sasaran cetak sawah yang memiliki vegetasi yang cukup berat/lebat.

Tindak lanjut Pembiayaan Pertanian

- 1) Mengkoordinasikan dengan Jasindo agar penerbitan polis dan pembayaran klaim banyak mengalami keterlambatan.
- 2) Mengupayakan agar penetapan DPD AUTP dan AUTS tingkat kabupaten dan pengirimannya ke tingkat lebih tinggi dilakukan secara periodik.
- 3) Mengevaluasi kinerja FPPS agar dapat melaksanakan peran dengan baik
- 4) Meminta PT Jasindo untuk menambah SDM yang menangani asuransi pertanian di tingkat lapangan, mengingat sebaran dan jangkauan lokasi AUTP dan AUTS sangat luas.
- 5) Mendorong Dinas Pertanian Propinsi maupun kabupaten untuk menambah petugas pelaksana program AUTP.

Tindak lanjut Permasalahan Program Perkarantinaan Pertanian

Tindak lanjut yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan dan kendala di lingkup Pusat KKIP, diantaranya yaitu:

- 1) SDM:
 - a) Peningkatan kemampuan SDM dibidang kewasdakan melalui pendidikan, pelatihan, dan workshop dibidang penyidikan, intelijen dan polsus;

- b) Mengirimkan SDM pusat/UPT dalam koordinasi dan konsultasi dengan instansi/lembaga terkait untuk meningkatkan kecakapan dan kemampuan dalam negosiasi dan koordinasi dengan pihak lain;
 - c) Pelatihan SDM karantina dalam pengelolaan IQFAST di Pusat dan UPT Karantina Pertanian;
 - d) Pendelegasian IQFAST kepada SDM melalui Surat Keputusan Kepala Pusat KKIP untuk mempercepat layanan data/informasi terkait IQFAST.
- 2) Sarana dan Prasarana:
- a) Koordinasi dengan Pusdatin untuk optimalisasi layanan internet di tingkat pusat;
 - b) Koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk penambahan titik/jaringan internet;
 - c) Koordinasi dengan Pihak Ketiga untuk peningkatan bandwidth/internet dalam rangka peningkatan kapasitas dalam pelayanan dan operasional IQFAST.
- 3) Anggaran
- Optimalisasi anggaran di masing-masing bidang dilingkup Pusat KKIP dalam penyelenggaraan tuisi dan kegiatan strategis lainnya.

Tindak lanjut atas permasalahan yang dihadapi BBUSKP selama Tahun 2018 sebagai berikut:

- 1) Dengan adanya instruksi Kepala Badan Karantina Pertanian agar UPT Karantina Pertanian lingkup Badan Karantina Pertanian meningkatkan pelaksanaan tindakan karantinanya dengan memberdayakan laboratorium UPT tersebut dimana hasil pengujiannya akan menjadi dasar ilmiah dalam menindaklanjuti keputusan tindakan karantina selanjutnya dan instruksi mengenai perlunya laboratorium mendapatkan akreditasi sistim manajemen mutu ISO/IEC 17025:2017, maka pada tahun 2018 banyak UPT KP mengikuti uji profisiensi yang diselenggarakan mandiri oleh BBUSKP maupun oleh KAN. Selain itu juga BBUSKP memberikan bimbingan teknis eksternal pengujian, bimbingan teknis internal dan pemberian magang pengujian kepada personel laboratorium UPT KP lingkup Barantan dengan materi sesuai dengan kebutuhan kompetensi laboratorium dimaksud dan jumlah UPT yang diberikan bimtek disesuaikan dengan besaran anggaran yang ada;
- 2) Pada tahun ini juga, kompetensi pejabat fungsional terkait pengembangan SDM belum optimal dilaksanakan, karena terbatasnya bahkan tidak adanya anggaran tersedia untuk magang tetapi kegiatan in house training laboratorium Karantina Hewan, tumbuhan dan keamanan hayati tetap dapat dilaksanakan dengan baik.
- 3) Barantan sebagai organisasi induk mendukung operasionalisasi cegah tangkal salah satunya melalui kegiatan pelayanan pengujian pemeriksaan laboratorium. Saat ini UPT dalam melaksanakan pengujian laboratorium belum sesuai dengan kompetensi dan klasifikasi laboratorium yang ditetapkan oleh Barantan (Pusat Teknis). BBUSKP sebagai laboratorium rujukan lingkup Barantan melaksanakan uji standar, uji rujukan dan uji konfirmasi, sehingga perlu adanya Alur Tata Hubungan Kerja Pemeriksaan dan Pengujian Laboratorium terhadap Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK);

- 4) Persiapan yang dilakukan UPTKP untuk mewujudkan akreditasi laboratorium memerlukan komitmen manajemen dan komitmen seluruh personil yang terlibat di dalam penerapan SMM laboratorium. Selain itu, dibutuhkan personil kompeten, kondisi akomodasi dan lingkungan yang memadai, peralatan yang terkalibrasi serta metode uji yang tervalidasi/verifikasi yang merupakan faktor-faktor yang harus diperhatikan untuk memperoleh hasil uji yang handal. Untuk mewujudkan faktor penentu kehandalan hasil uji tersebut, fasilitasi pendanaan sangat penting dan tidak hanya untuk proses persiapan pengajuan akreditasi akan tetapi untuk pemeliharaan status akreditasi selama masa berlakunya akreditasi.
- 5) Untuk mendukung upaya UPT KP lingkup Barantan melakukan pengajuan akreditasi SNI ISO/IEC 17025:2008 maupun sertifikasi SNI ISO 9001:2008, perlu ketersediaan anggaran yang besar agar UPT KP dengan jarak yang jauh dapat terjangkau untuk diberikan bimbingan teknis pengujian dan penerapan SMM sekaligus memverifikasi kondisi laboratorium beserta fasilitasnya dan kompetensi SDM laboratoriumnya.
- 6) Dalam memenuhi data dan sampel kegiatan verifikasi/konfirmasi OPTK/HPHK eksotik (emerging/re-emerging diseases) yang memerlukan cakupan wilayah lebih luas, diperlukan koordinasi dan kerjasama antara BBUSKP - kantor Pusat - UPT KP yang membawahi wilayah dimaksud. Sehingga tujuan kegiatan verifikasi/konfirmasi mengenai kemungkinan adanya sebaran OPTK/HPHK eksotik (emerging/re-emerging diseases) di sejumlah luasan wilayah dapat diperoleh.
- 7) Untuk mendukung upaya UPT KP lingkup Badan Karantina Pertanian dalam proses pengajuan akreditasi laboratorium ke Komite Akreditasi Nasional (KAN), BBUSKP melakukan pemberian bimbingan teknis dan pengawasan penerapan SMM ISO/IEC 17025:2017 sesuai prioritas UPTKP berdasarkan data yang terdokumentasi di BBUSKP. Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi, dilakukan beberapa solusi antara lain sebagai berikut:
 - a) Pengajuan usulan SDM terutama fungsional umum kepada Bagian Umum Badan Karantina Pertanian untuk memenuhi kebutuhan SDM di BBUSKP;
 - b) Perencanaan dan pembuatan program yang baik dalam menentukan jadwal renovasi gedung laboratorium sesuai dengan target yang ditetapkan;
 - c) Fasilitasi dalam pengusulan anggaran setiap kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Bidang Pengendalian Mutu Laboratorium agar kegiatan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Tindak Lanjut Permasalahan kinerja BUTTMKP Tahun Anggaran 2018

- 1) Penyusunan Regulasi yang mendorong penggunaan hasil uji terap yang berskala luas di UPT lingkup Barantan dan stakeholder pengguna hasil uji terap dalam mendukung akselerasi ekspor yang lebih inovatif, waktu tindaklanjut Januari 2019;
- 2) Topik diseminasi disesuaikan dengan skala prioritas yang paling dibutuhkan sebagian besar UPT operasional, waktu tindaklanjut Februari 2019;
- 3) Menambah kegiatan peningkatan SDM sesuai anggaran yang dibutuhkan, waktu tindaklanjut Februari 2019;
- 4) Meninjau kembali peta jabatan BUTTMKP, setelah disesuaikan dengan penambahan tusi baru dibidang peningkatan SDM Karantina, Januari 2019;
- 5) Menindaklanjuti kembali langkah strategis yang telah disusun Tim pada tahun 2015, waktu tindaklanjut Januari 2019.



BAB VI. PENUTUP

LAMPIRAN

Lampiran 1. Distribusi Menurut Golongan/Ruang, Jenis Kelamin Dan Pendidikan Berdasarkan Eselon I Kementerian Pertanian

NO.	UNIT KERJA	GOLONGAN										JENIS KELAMIN										JUMLAH															
		Gd I					Gd II					Gd III					Gd IV						L					P									
		IA	IB	IC	ID	IE	IIA	IIB	IIC	IID	IIIE	IIIA	IIIB	IIIC	IIID	IIIE	IIIA	IIB	IIC	IIV	IIV		III	IIII	IIII	IIIV	IIIV	III	IIII	IIII	IIIV	IIIV	III	IIII	IIII	IIIV	IIIV
1	SEKRETARIAT ENDEBAL	0	0	1	1	2	54	1	56	35	124	137	374	130	244	185	204	64	18	13	15	217	1278	765	518	48	238	328	1	6	71	3	3	318	9	9	1278
2	DIREKTORAT ENDEBAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN	0	0	0	0	0	1	0	9	23	33	38	64	69	79	120	32	14	1	3	1	31	334	192	142	3	91	189	0	1	10	0	0	38	1	1	334
3	DIREKTORAT ENDEBAL TANAMAN PANGAN	0	0	1	0	1	17	14	61	42	134	72	137	112	118	439	32	21	6	2	2	63	637	334	287	7	130	266	1	0	43	0	0	180	9	9	637
4	DIREKTORAT ENDEBAL HORTIKULTURA	0	0	1	2	3	7	3	22	16	35	45	71	64	66	148	32	14	4	2	0	32	333	184	150	6	86	164	0	0	7	0	0	77	7	6	333
5	DIREKTORAT ENDEBAL PERKELOMPOKAN	1	0	1	2	4	14	6	28	136	214	64	219	184	161	839	89	29	10	3	0	111	988	538	450	5	181	428	21	3	48	0	33	208	7	12	988
6	DIREKTORAT ENDEBAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	0	6	13	8	31	96	74	198	115	483	207	405	245	420	1305	180	44	13	3	0	234	2042	1271	771	18	300	471	33	3	105	2	0	677	39	33	2042
7	INSPEKTORAT ENDEBAL	0	0	0	0	0	2	1	6	9	18	31	63	33	31	182	40	16	18	6	6	106	307	179	128	2	116	132	0	0	3	0	0	38	2	1	307
8	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN	8	29	111	100	248	270	241	239	443	1213	821	1337	718	772	3322	383	196	121	88	119	887	6170	3901	2169	201	1092	1633	109	29	225	23	9	2113	136	237	6170
9	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SDA PERTANIAN	0	0	41	20	61	66	61	173	82	187	263	373	323	327	1392	132	80	36	27	9	324	2084	1323	739	73	168	336	168	3	79	3	0	430	77	86	2084
10	BADAN KETAHANAN PANGAN	1	1	1	1	2	1	3	4	13	21	31	79	42	60	112	34	12	3	2	1	32	287	143	144	13	87	196	0	2	7	0	0	69	2	1	287
11	BADAN GARANTAMA PERTANIAN	0	1	4	3	8	99	211	983	391	1080	311	603	498	612	2344	234	108	27	4	1	174	1681	2136	1333	13	822	1373	4	2	406	43	7	1148	14	7	1681
TOTAL		10	36	179	137	362	587	618	1311	1327	4048	2104	3783	2499	2896	11385	1234	598	290	132	136	2461	18131	11023	7108	691	3957	5627	337	49	1188	78	74	5325	383	422	18131

Sumber: Biro Organisasi dan Kepegawaian, 2018

Lampiran 2. Ringkasan hasil monitoring SOP dan hasil Evaluasi SOP
Sebaran jumlah SOP per eselon I

No.	Unit Kerja dan Jumlah SOP	Mampu mendorong peningkatan kinerja	Mampu Sudah dipahami	Mudah dilaksanakan	Semua orang dapat menjalankan perannya masing-masing	Mampu mengatasi permasalahan berkaitan dengan proses	Mampu menjawab kebutuhan peningkatan kinerja organisasi	Sinergi satu dengan lainnya
1	Sekretariat Jenderal							
1.1	Biro Perencanaan	115	115	115	115	115	115	61
1.2	Biro Hukum	43	43	43	43	43	43	32
1.3	Biro Organisasi dan Kepegawaian	185	185	185	185	185	185	166
1.4	Biro Keuangan dan Perencanaan	122	122	122	122	122	122	90
1.5	Biro Umum dan Pengadaan	76	76	76	76	76	76	35
1.6	Biro Kerjasama Luar Negeri	61	61	61	61	61	61	14
1.7	Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik	24	24	24	24	24	24	20
1.8	Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian	169	169	169	169	169	169	114
1.9	Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian	120	120	120	120	120	120	63
1.10	Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian	151	151	151	151	151	151	63
1.11	Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	68	68	68	68	68	68	9
2	Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	808	808	808	808	808	808	194
3	Direktorat Jenderal Tanaman Pangan	1754	1754	1754	1754	1754	1754	316
4	Direktorat Jenderal Hortikultura	111	111	111	111	111	111	3
5	Direktorat Jenderal Perkebunan	917	917	917	917	917	917	127
6	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	3255	3255	3255	3255	3255	3255	436
7	Inspektorat Jenderal	753	753	753	753	753	753	94
8	Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian	3325	3325	3325	3325	3325	3325	256
9	BPPSDMP	2240	2240	2240	2240	2240	2240	266
10	Badan Kelelahan Pangan	250	250	250	250	250	250	127
11	Badan Karantina Pertanian	296	296	296	296	296	296	41
	Jumlah Total	4843	4843	4843	4843	4843	4843	527

No.	Unit Kerja	Jumlah SOP	
		Generik	Spesifik
1	Sekretariat Jenderal		
1.1	Biro Perencanaan	54	61
1.2	Biro Hukum	11	32
1.3	Biro Organisasi dan Kepegawaian	19	166
1.4	Biro Keuangan dan Perlengkapan	32	90
1.5	Biro Umum dan Pengadaan	41	35
1.6	Biro Kerjasama Luar Negeri	47	14
1.7	Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik	4	20
1.8	Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian	55	114
1.9	Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian	57	63
1.10	Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian	88	63
1.11	Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	59	9
	Jumlah SOP Setjen	467	667
2	Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	614	194
3	Direktorat Jenderal Tanaman Pangan	1.142	316
4	Direktorat Jenderal Hortikultura	108	3
5	Direktorat Jenderal Perkebunan	790	127
6	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	2.819	436
7	Inspektorat Jenderal	659	94
8	Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian	3.069	256
9	BPPSDMP	1.974	266
10	Badan Ketahanan Pangan	123	127
11	Badan Karantina Pertanian	255	41
	Jumlah Total SOP	12.020	2.527
		14.547	

Lampiran 3. Capaian Hasil PMPRB Kementan Tahun 2018

No	Komponen Penilaian	Nilai Maksimal	PMPRB 2018		Nilai 2017		% Kenaikan (Penurunan)
			Nilai Capaian	% Capaian	Nilai Capaian	% Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8
A	PENGUNGKIT						
1	Manajemen Perubahan	5	4,86	97,2	3,54	70,8	37,29%
2	Penataan Peraturan Perundang-Undangan	5	5	100	3,13	62,6	59,74%
3	Penataan dan Penguatan Kelembagaan	6	6	100	4,18	69,67	43,54%
4	Penataan Tata Laksana	5	4,88	97,6	4,13	82,6	18,16%
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	15	14,81	98,73	12,68	84,53	16,80%
6	Penguatan Akuntabilitas	6	5,78	96,33	3,38	56,33	71,01%
7	Penguatan Pengawasan	12	11,17	93,08	10,02	83,5	11,48%
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6	5,9	98,33	5,21	86,83	13,24%
	Sub Total Komponen Pengungkit	60	58,39	97,31	46,27	77,1	26,19%
B	HASIL						
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	14	10,15	72,5	9,96	71,14%	1,91%
2	Survei Internal Integritas Organisasi	6	5,4	90	4,08	68,00%	32,35%
3	Survei Eksternal Persepsi Korupsi	7	5,46	78	5,46	78,00%	0,00%
4	Opini BPK	3	3	100	3	100,00%	0,00%
5	Survei Eksternal Pelayanan Publik	10	8,31	83,1	8,02	80,20%	3,62%
	Sub Total Komponen Hasil	40	32,32	80,8	30,52	76,30%	5,90%
	Indeks Reformasi Birokrasi		90,71		76,79		

Data di atas menunjukkan bahwa Hasil Capaian PMPRB Kementerian Pertanian Tahun 2018 sebesar 90,71. Jika dibandingkan dengan Capaian Nilai Reformasi Birokrasi Tahun 2017 sebesar 76,79, terdapat kenaikan sebesar 18,13%.

Lampiran 4. Untuk Partisipasi dalam Kegiatan Pameran Tahun 2018

1.	Tanggal 10 s.d. 13 Mei 2018 di Jakarta Convention Center (JCC)	Pameran Indonesia Agrofood Expo 2018 ke-18
2.	Tanggal 4 s.d. 6 Juli 2018 di Jakarta Convention Center (JCC)	Indo Livestock Expo 2018
3.	Tanggal 27 s.d. 30 Juli 2018 di Kartika Expo, Balai Kartini	Gelar Pangan Nusantara 2018
4.	Tanggal 8 s.d. 13 Agustus 2018 di Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian, Bogor	Agro Inovasi Fair 2018
5.	Tanggal 16 s.d. 25 Agustus di Dekranasda Jakabaring, Palembang	Sumsel Expo 2018
6.	Tanggal 3 s.d. 6 September 2018 di Hotel Anvaya, Bali	Rapat Pimpinan (Rapim) Terpadu Kementerian Pertanian
7.	Tanggal 12-16 September 2018 di Jakarta Convention Center (JCC)	Indonesia International Book Fair (IIBF) 2018
8.	Tanggal 20 September 2018 di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan	Rapat Kerja Nasional (Rakemas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2018
9.	Tanggal 20 s.d. 23 September 2018 di Balai Penelitian Tanaman Sayuran (Balitsa) Lembang, Bandung Barat.	Pameran Spektra Horti 2018
10.	Tanggal 21 s.d. 24 September 2018 di Provinsi Bangka Belitung	KTNA Expo-Pameran Pembangunan Pertanian, Perikanan dan Kelautan Indonesia
11.	Tanggal 18 s.d. 21 Oktober 2018 di Desa Jejangkit Muara, Kecamatan Jejangkit, Kab	Peringatan Hari Pangan Sedunia ke 38 Tahun 2018
12.	Tanggal 2 s.d. 4 Desember 2018 di Hotel Novotel, Tangerang.	Pameran Sinergi Aksi Informasi dan Komunikasi Publik (SAIK)
13.	Tanggal 5 Desember 2018 di Mabes ABRI Cilangkap	Pameran Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD)

Lampiran 5. Lampiran Biro Keuangan dan Perlengkapan Rekapitulasi SK Penetapan Kantor Pusat dan Kantor Daerah tahun 2018

No.	Eselon I	Usulan	Pejabat Yg Di Usulan		
			KPA	BPG	BPN
1	Setjen	7	7		
2	Itjen				
3	Dit.T.Pangan	1	1		
4	Dit.Hort	2	2		
5	Dit.Bun	1			1
6	Dit.Pkh	13	8	3	2
7	Dit.Psp				
8	Badan Litbang	28	27	1	
9	Badan Sdm	18	17		1
10	Bkp	1	1		
11	Barantan	19	16	2	1
	Jumlah	90	75	6	5

LAMPIRAN BIRO HUMAS

Lampiran 6. Kategori Eselon I

No	Nama Unit Kerja	Nilai	Peringkat
1	Badan Karantina Pertanian	90,49	1
2	Direktorat Jenderal Tanaman Pangan	83,27	2
3	Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian	82,41	3
4	Inspektorat Jenderal	79,84	4
5	Direktorat Jenderal Perkebunan	71,65	5

Lampiran 7. Kategori Eselon II

No	Nama Unit Kerja	Nilai	Peringkat
1	Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian Bogor	87,28	1
2	Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian Ciawi	86,71	2
3	Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang	84,05	3
4	Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian Serpong	82,27	4
5	Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan Bogor	74,08	5

Lampiran 8. Kategori Eselon III

No	Nama Unit Kerja	Nilai	Peringkat
1	Balai Embrio Ternak Cipelang	89,79	1
2	Balai Karantina Pertanian Kelas II Yogyakarta	75,25	2
3	Balai Karantina Pertanian Kelas I Denpasar	74,83	3
4	Balai Karantina Pertanian Kelas I Mataram	70,91	4
5	Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Bangkalan	69,71	5

LAMPIRAN PUSDATIN

Lampiran 9. Atlas sebaran fase pertanaman padi sawah di Indonesia

(1) Periode 24 desember 2017 – 8 Januari 2018, edisi 46	(12) Periode 17 Juni – 2 Juli 2018, edisi 57
(2) Periode 8 - 24 Januari 2018, edisi 47	(13) Periode 4-19 Juli 2018, edisi 58
(3) Periode 25 Januari – 9 Februari, edisi 48	(14) Periode 20 Juli – 4 Agustus 2018, edisi 59
(4) Periode 10 Februari – 25 Februari 2018, edisi 49	(15) Periode 5 – 20 Agustus 2018 , edisi 60
(5) Periode 26 Februari – 13 Maret, edisi 50	(16) Periode 21 Agustus – 5 September 2018, edisi 61
(6) Periode 14 – 29 Maret, edisi 51	(17) Periode 6 – 21 September 2018, edisi 62
(7) Periode 30 Maret - 14 April 2018, edisi 52	(18) Periode 21September – 7 Oktober 2018, edisi 63
(8) Periode 15 - 30 April 2018, edisi 53	(19) Periode 8 – 23 Oktober 2018, edisi 64
(9) Periode 1 - 16 Mei 2018, edisi 54	(20) Periode 24 Oktober – 8 November 2018, edisi 65
(10) Periode 17 Mei - 1 Juni 2018, edisi 55	(21) Periode 9 – 24 November 2018, edisi 66
(11) Periode 2 – 17 Juni 2018, edisi 56	(22) Periode 25 November – 10 Desember 2018, edisi 67
(12) Periode 17 Juni – 2 Juli 2018, edisi 57	(23) Periode 11 – 16 Desember 2018, edisi 68
	Edisi 46 – 68

Lampiran 10. Hibah BMN berupa Kendaraan Roda Dua / Sepeda Motor

NO	PROVINSI	UNIT	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	NUP	KETERANGAN
1	RIAU	6	13.410.000	80.460.000	240 - 245	Selesai
2	KALIMANTAN TIMUR	3	13.410.000	40.230.000	223 - 225	Selesai
3	SULAWESI TENGAH	6	13.410.000	80.460.000	226 - 229	Selesai
4	SUMATERA UTARA	25	13.410.000	335.250.000	121 - 145	Proses Hibah
5	KALIMANTAN BARAT	10	13.410.000	134.100.000	202 - 211	Proses Hibah
TOTAL		50		670.500.000		

Penghapusan BMN

Lampiran 11. Hibah BMN berupa Alat Ukur GPS

NO	PROVINSI	UNIT	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	NUP	KETERANGAN
1	KALIMANTAN BARAT					
	- Triple Juno ST	15	6,303,000	94,545,000	1379-1393	TA. 2008
	- Triple Juno SB	15	10,640,000	159,600,000	1901-1915	TA. 2009
TOTAL		30		254,145,000		

No	Terlaksana proses Usulan Persetujuan	Jumlah	Nilai
1.	Lelang BMN berupa Barang Inventaris Kantor	536 Unit	780.605.000
2.	Penjualan BMN berupa Kendaraan Roda 4 / Mobil	1 unit	43.000.000
3	Alih Status BMN berupa Alat ukur Ubinan pada BPS	1.520 unit/set	2.427.386.800
4.	Hibah BMN berupa Kendaraan Roda 2 / Sepeda Motor pada Provinsi Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara dan Kepulauan Riau	22 unit	295.020.000,-
5.	Hibah BMN berupa Alat Ukur Global Positioning System (GPS) pada Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara	57 unit	511.066.000,-

LAMPIRAN PPVT

Lampiran 12. Target dan Realisasi Permohonan Hak PVT Tahun 2018

No.	Komoditas	Permohonan Hak PVT Tahun 2017	Permohonan Hak PVT Tahun 2018	
			Target	Realisasi
1.	Tan. Pangan	29	15	11
2.	Tan. Sayuran	8	12	16
3.	Tan. Hias	6	10	13
4.	Tan. Buah	7	5	3
5.	Tan. Perkebunan/ Industri/Kehutanan	5	2	3
6.	Tan. Pakan Ternak	1	1	2
TOTAL		56	45	48

Lampiran 13. Capaian Kinerja Pelayanan Pendaftaran Varietas Lokal dan Hasil Pemuliaan Tahun 2018 dan 2017

No	Jenis Tanaman	Target 2018	2018		2017	
			Pemohonan	Penerbitan TDV	Pemohonan	Penerbitan TDV
1	Tan. Pangan	30	259	262	126	127
2	Tan. Sayuran	8	83	81	40	38
3	Tan. Buah	45	152	153	94	99
4	Tan. Hias	45	36	36	20	20
5	Tan. Obat/Rempah	50	9	9	4	4
6	Tan. Bun/Industri	2	109	111	48	51
7	Tan. Rumput Hijauan pakan ternak	-	5	7	8	2
Jumlah		180	653	659	340	343
Peningkatan Pemohonan			192%			
Peningkatan Penerbitan TDV			192%			

Lampiran 14. Target dan Realisasi Pemohonan Pendaftaran Varietas Lokal Melalui Kerjasama Percepatan Pendaftaran Varietas Lokal Tahun 2018

No	Provinsi	Target	Realisasi	Prosentase (%)
1.	Aceh	16	16	100
2.	Sumatera Utara	5	3	60
3.	Sumatera Barat	5	9	180
4.	Jambi	8	7	88
5.	Riau	4	6	150
6.	Bengkulu	16	5	31
7.	Bangka Belitung	10	12	120
8.	Sumatera Selatan	10	6	60
9.	Lampung	6	6	100
10.	Kepulauan Riau	4	3	75
11.	DKI Jakarta	5	5	100
12.	Jawa Barat	10	9	90
13.	Banten	10	20	200
14.	Jawa Tengah	10	10	100
15.	Yogyakarta	10	11	110
16.	Jawa Timur	16	17	106
17.	Bali	10	10	100
18.	Nusa Tenggara Barat	10	10	100
19.	Nusa Tenggara Timur	11	22	200
20.	Kalimantan Selatan	10	10	100
21.	Kalimantan Timur	10	7	70
22.	Kalimantan Barat	5	6	120
23.	Kalimantan Tengah	10	10	100
24.	Sulawesi Selatan	10	15	150
25.	Sulawesi Tengah	5	6	120
26.	Sulawesi Utara	6	6	100
27.	Sulawesi Tenggara	10	10	100
28.	Sulawesi Barat	10	15	150
29.	Maluku	11	15	136
30.	Maluku Utara	20	27	135
31.	Gorontalo	6	5	83
32.	Papua	6	6	100
33.	Papua Barat	5	5	100
Total		300	330	110%

Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian

Lampiran 15. Capaian Kinerja Pelayanan Perizinan Pestisida Tahun 2018 dan 2017

NO	JENIS PERMOHONAN	TARGET 2018	2.018		2.017	
			PERMOHONAN	PENERBITAN	PERMOHONAN	PENERBITAN
A	PENDAFTARAN PESTISIDA					
1	Pendaftaran Izin Tetap Baru	150	305	216	272	290
2	Pendaftaran Izin Tetap Ulang	400	614	611	635	659
3	Pendaftaran Izin Tetap Ekspor	20	51	52	54	46
4	Pendaftaran Izin Tetap Bahan Teknis	100	190	117	148	123
5	Pendaftaran Izin Percobaan	230	491	427	375	391
	JUMLAH A	900	1.651	1.423	1.484	1.509
B	LAYANAN PESTISIDA LAINNYA					
1	Perluasan Penggunaan	100	169	82	148	114
2	Perubahan Nama Pestisida	50	82	74	89	90
3	Perubahan Pemegang Pendaftaran	80	219	137	105	122
4	Perubahan Nomor Pendaftaran	-	17	17	9	7
5	Perubahan Dosis/Konsentrasi	5	34	7	24	20
6	Perubahan Kode/Bentuk	-	11	5	5	3
7	Perubahan Bid. Penggunaan/Jenis/Komoditi/OPT Terdaftar	5	41	34	32	20
8	Perubahan Cara Kerja	-	11	2	8	5
9	Penambahan/Perubahan Asal Bahan Aktif/Bahan Teknis	10	78	87	29	37
10	Perpanjangan Izin Percobaan	80	111	134	125	175
11	Pengesahan Label	300	592	710	626	691
12	Pembuatan Sertifikat	600	1.431	1.549	1.234	1.245
13	Pengambilan Sampel Pestisida dan Segel	600	1.462	1.565	1.327	1.339
14	Uji Mutu Non Parakuat	600	1.085	1.085	1.110	1.171
15	Uji Mutu Parakuat	10	59	37	34	34
16	Uji Mutu Bahan Teknis	50	255	258	140	146
17	Uji Toksisitas	50	332	294	194	192
18	Pengesahan Protokol Uji Efikasi	600	1.273	1.484	1.147	1.252
19	Keterangan Lain-lain	100	158	110	179	106
20	Keterangan Impor Sampel Penelitian	100	324	324	283	283
21	Keterangan Impor Pestisida Terintegrasi INSW	200	888	888	685	685
22	Keterangan Impor Sampel Pendaftaran Terintegrasi INSW	50	57	57	153	153
23	Keterangan Impor Pestisida Alih Kuasa Terintegrasi INSW	10	7	7	58	58
	JUMLAH B	3.600	8.696	8.947	7.744	7.948
	TOTAL A + B	4.500	10.347	10.370	9.228	9.457
	% Naik/Turun Permohonan					
	% Naik/Turun Penerbitan Surat Izin					

*) Data per 15 Desember 2018

Lampiran 16. Capaian Kinerja Pelayanan Perizinan Peternakan Tahun 2018 dan 2017

No	Jenis Perizinan	Target 2018	2018		2017	
			Permohonan	Penerbitan	Permohonan	Penerbitan
1	Pemasukan dan pengeluaran bibit/benih					
	- Pemasukan bibit sapi	5	11	8	5	5
	- Pemasukan bibit kerbau	1	-	-	-	-
	- Pemasukan bibit kambing	4	14	7	8	4
	- Pemasukan bibit kuda	1	-	-	-	-
	- Pemasukan bibit babi	0	1	1	-	-
	- Pemasukan bibit DOC	35	65	38	47	47
	- Pemasukan bibit DOD	1	3	4	-	-
	- Pemasukan bibit kelinci	1	-	-	-	-
	- Pemasukan benih (semen)	15	17	10	12	11
	- Pemasukan benih (telur tetas)	15	5	5	13	12
	- Pengeluaran bibit (DOC)	0	11	10	-	-
	- Pengeluaran benih (semen)	1	1	1	-	-
	- Pengeluaran benih (telur tetas)	10	5	5	16	15
	- Pengeluaran benih kambing/domba	0	1	1	-	-
2	Pendaftaran Pakan Ternak	230	702	161	1137	156
3	Izin Usaha Obat Hewan	20	209	35	27	26
4	Pendaftaran/Registrasi Obat Hewan	25	-	-	-	-
5	Pemasukan dan Pengeluaran Obat Hewan	125	-	-	-	-
6	Pemasukan karkas, daging, dan olahannya	575	875	507	599	216
7	Pemasukan ternak ruminansia besar	100	106	74	127	80
8	Pemasukan/pengeluaran bahan pakan asal hewan					
	- Pemasukan bahan pakan asal hewan	2000	4009	3358	4303	2661
	- Pengeluaran bahan pakan asal hewan	10	-	-	-	-
9	Pemasukan/pengeluaran bahan pakan asal tumbuhan					
	- Pemasukan bahan pakan asal tumbuhan	1216	-	-	-	-
	- Pengeluaran bahan pakan asal tumbuhan	10	-	-	-	-
10	Pengeluaran ruminansia kecil dan babi	0	3	3	-	-
	JUMLAH	4400	6038	4228	6294	3233
	% Naik/Turun Permohonan RPP					
	% Naik/Turun Penerbitan RPP					

Lampiran Inspektorat Jenderal Pertanian

Lampiran 17. Penilaian Maturitas SPI Unit Eselon I Kementerian Pertanian Tahun 2017 – 2018

NO	UNIT KERJA	2017		2018	
		NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI
1.	Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	2,93	Berkembang	3,074	Terdefinisi
2.	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	3	Terdefinisi	3,149	Terdefinisi
3.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian	2,93	Berkembang	3,082	Terdefinisi
4.	Direktorat Jenderal Hortikultura*)	3,5	Terdefinisi	3,074	Terdefinisi
5.	Inspektorat Jenderal	3	Terdefinisi	3,159	Terdefinisi
6.	Sekretariat Jenderal	2,93	Berkembang	3,112	Terdefinisi
7.	Direktorat Jenderal Tanaman Pangan*)	3,32	Terdefinisi	3,112	Terdefinisi
8.	Direktorat Jenderal Perkebunan*)	3,18	Terdefinisi	3,037	Terdefinisi
9.	Badan Ketahanan Pangan*	3,07	Terdefinisi	3,037	Terdefinisi
10.	Badan Litbang Pertanian	2,93	Berkembang	3,172	Terdefinisi
11.	Badan Karantina Pertanian*	2,87	Berkembang	3,147	Terdefinisi

Sumber data : Hasil Penilaian BPKP, 2018

Ket : *) Penilaian Mandiri Inspektorat Jenderal

Lampiran Ditjen Peternakan Dan Kesehatan Hewan

Lampiran 18. Perkembangan Populasi Ternak Sapi Lokal Tahun 2018

NO	PELAKSANA PENGADAAN/PROVINSI	EKOR		PERSENTASE (%)
		TARGET	REALISASI	
1	Dinas Bali	300	300	100
2	BPTU-HPT Denpasar	440	180	41
3	Dinas Riau	40	40	100
4	Dinas Sulawesi Utara	40	40	100
5	Dinas Maluku Utara	350	350	100
6	Dinas Sulawesi Tenggara	350	350	100
7	Dinas Papua	75	75	100
8	Dinas Papua Barat	175	175	100
9	Dinas Jawa Tengah	40	40	100
10	Dinas Jawa Timur	50	50	100
TOTAL		1.860	1.600	86

Lampiran 19. Perkembangan Populasi Ternak Kerbau Lokal Tahun 2018

NO	PELAKSANA PENGADAAN/PROVINSI	EKOR		PERSENTASE (%)
		TARGET	REALISASI	
1	Dinas Sumut	240	0	0
2	Dinas Maluku	80	80	100
3	Dinas Banten	42	42	100
4	Dinas NTB	16	16	100
5	Dinas Kaltara	80	80	100
6	BBVet Maros	200	0	0
TOTAL		738	218	30

Lampiran 20. Perkembangan Populasi Ternak Kambing Lokal Tahun 2018

NO	PELAKSANA PENGADAAN/PROVINSI	EKOR		PERSENTASE (%)
		TARGET	REALISASI	
1	Dinas Sultra	150	150	100
2	Dinas Bali	10	7	70
3	BBVET Maros	2250	2228	99
4	BBPTU-HPT Baturraden	2000	2020	101
TOTAL		4410	4405	99

Lampiran 21. Wilayah Bebas Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) Sampai Tahun 2018

No.	Nama penyakit	Daerah bebas	Dasar hukum
1.	Rabies	Jawa Timur, DI Yogyakarta, Jawa Tengah	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 892/Kpts/TN.560/9/1997 tanggal 15 September 1997
		DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat*	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 566/Kpts/PD.640/10/2004 tanggal 6 Oktober 2004
		Kepulauan Bangka Belitung	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4435/kpts/Pd/620/7/2013 tanggal 1 Juli 2013
		Kalimantan Barat*	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 885/Kpts/PD.620/8/2014 tanggal 14 Agustus 2014
		Kepulauan Mentawai (Sumatera Barat)	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 238/Kpts/PD.650/4/2015 tanggal 7 April 2015
		Kepulauan Meranti (Riau)	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/PD.650/4/2015 tanggal 7 April 2015
		Kepulauan Riau	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 240/Kpts/PD.650/4/2015 tanggal 7 April 2015
		Pulau Enggano (Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu)	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 241/Kpts/PD.650/4/2015 tanggal 7 April 2015
		P. Weh, Kota Sabang Prov Aceh	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 363/Kpts/PK.320/5/2016 tanggal 10 Juni 2016
		Pulau Pisang (Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung)	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 368/Kpts/PK.320/6/2016 tanggal 31 Mei 2016
		Provinsi NTB	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 316/Kpts/PK.320/5/2017 tanggal 12 Mei 2017
		Pulau Tarakan, Nunukan dan Sebatik Provinsi Kalimantan Utara	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 776/Kpts/PK.320/11/2018 tanggal 6 November 2018
		Pulau Tabuan Lampung	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 783/Kpts/PK.320/11/2018 tanggal 12 November 2018
		Jumlah wilayah bebas rabies : 9 provinsi, 4 kabupaten dan 4 pulau (159 kabupaten/kota/pulau)	
*Banten dan Jawa Barat telah tertular kembali (**Kalimantan Barat tertular kembali pada 2015)			
2.	Avian Influenza	Maluku Utara	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 87/Kpts/PK.320/1/2016 tanggal 29 Januari 2016
		Maluku	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 262/Kpts/PK.320/5/2016 Tanggal 31 Mei 2016
		Papua	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 600/Kpts/PK.320/9/2017 tanggal 26 September 2017
		Kompartemen	165 unit yang ditetapkan oleh Keputusan Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan
Jumlah wilayah bebas avian influenza : 3 provinsi (50 kabupaten/kota) dan 165 unit kompartemen			
3.	Brucellosis	Bali	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 443/Kpts/TN.540/7/2002 tanggal 15 Juli 2002
		Pulau Lombok (Provinsi Nusa Tenggara Barat)	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 444/Kpts/TN.540/7/2002 tanggal 15 Juli 2002
		Pulau Sumbawa (Provinsi Nusa Tenggara Barat)	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 97/Kpts/PO.660/2/2006 tanggal 27 Februari 2006
		Pulau Kalimantan	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2540/Kpts/PD.610/6/2009 tanggal 15 Juni 2009
		Sumatera Barat, Riau, Jambi dan Kepulauan Riau	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2541/Kpts/PD.610/6/2009 tanggal 15 Juni 2009
		Lampung, Bengkulu, Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 568/Kpts/PD.620/12/2011 tanggal 31 Desember 2011
		Pulau Sumba (Provinsi Nusa Tenggara Timur)	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 52/Kpts/PD.630/1/2015 tanggal 19 Januari 2015
		Pulau Madura (Provinsi Jawa Timur)	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/PD.650/4/2015 tanggal 7 April 2015
		Sumatera Utara	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 86/Kpts/PK.320/1/2016 tanggal 29 Januari 2016
		BBPTU-HPT Baturraden	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 311/Kpts/PK.400/4/2018 tanggal 27 April 2018
Jumlah wilayah bebas brucellosis 16 Provinsi, 8 kabupaten/kota dan 1 unit kompartemen (214 kabupaten/kota/pulau/unit)			
4.	Anthraks	Papua	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 367/Kpts/PD.640/7/2003 tanggal 15 Juli 2003
Jumlah wilayah bebas anthrax: 1 provinsi (29 kabupaten/kota)			
5.	Hog cholera	Sumatera Barat	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 181/Kpts/PD.620/1/2014 tanggal 7 Februari 2014
Jumlah wilayah bebas hog cholera: 1 provinsi (19 kabupaten/kota)			
6.	Septicaemia epizootica	P. Nusa Penida, Nusa Ceningan, Pulau Nusa Lembongan Kabupaten	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 167/Kpts/PK.320/3/2017 tanggal 3 Maret 2017
Jumlah wilayah bebas Septicaemia epizootica: 3 pulau			

Lampiran 22. Wilayah Bebas Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) Sampai Tahun 2018

NO.	PROVINSI	DOKTER HEWAN	PARAMEDIK VET	TOTAL
1	ACEH	35	6	41
2	SUMATERA BARAT	24	15	39
3	SUMATERA SELATAN	3	9	12
4	SUMATERA UTARA	18	12	30
5	BENGKULU	6	13	19
6	RIAU	31	5	36
7	JAMBI	12	10	22
8	KEPRI	1	3	4
9	LAMPUNG	33	23	56
10	BABEL	1	2	3
11	BANTEN	6	8	14
12	DKI	12	12	24
13	JAWA BARAT	41	79	120
14	JAWA TENGAH	64	41	105
15	JAWA TIMUR	109	28	137
16	DIY	47	17	64
17	BALI	39	0	39
18	NTB	34	68	102
19	NTT	21	42	63
20	GORONTALO	6	0	6
21	KALBAR	4	4	8
22	KALSEL	8	11	19
23	KALTIM	14	22	36
24	KALTENG	2	0	2
25	KALTARA	1	0	1
26	MALUKU UTARA	2	0	2
27	MALUKU	0	1	1
28	PAPUA	8	8	16
29	PAPUA BARAT	2	14	16
30	SULAWESI SELATAN	14	28	42
31	SULAWESI BARAT	3	0	3
32	SULAWESI UTARA	2	3	5
33	SULAWESI TENGAH	2	1	3
34	SULAWESI TENGGARA	7	1	8
		612	486	1098

Lampiran 23. Data Ekspor Obat Hewan

JENIS SEDIAAN		TAHUN	
		2017	2018
Biologik	Jumlah (1.000 dosis)	1.554.005,5	2.513.159.100
	Nilai Ekspor (dalam 1.000 USD)	11.666,548	6.408,01
	Nilai Ekspor (dalam 1.000 IDR)	151.956.787,7	96.120.161,11
Farmasetik	Jumlah (Ton)	8,1	29.687
	Nilai Ekspor (dalam 1.000 USD)	146,956	1.845,53
	Nilai Ekspor (dalam 1.000 IDR)	1.914.101,9	27.682.892,41
Premiks	Jumlah (Ton)	624,235	208,421
	Nilai Ekspor (dalam 1.000 USD)	116.773,647	263.834,23
	Nilai Ekspor (dalam 1.000 IDR)	1.520.976,752	3.957.513.421,67

Lampiran 24. Negara Tujuan ekspor Obat Hewan

Benua	Negara Tujuan
Eropa	Albania, Austria, Belanda, Belarus, Belgia, Britania Raya, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Denmark, Finlandia, Georgia, Hungaria, Inggris, Irlandia, Italia, Jerman, Kroasia, Lithuania, Norwegia, Perancis, Polandia, Rumania, Rusia, Serbia, Slovenia, Spanyol, Swedia, Ukraina dan Yunani
Amerika	Amerika Serikat, Argentina, Brazil, Chile, Ekuador, Guatemala, Kolombia, Maroko, Meksiko, Peru dan Portugal
Afrika	Algeria, Bhutan, Ethiopia, Ghana, Kenya, Maroko, Mesir, Montenegro, Nigeria, Tunisia, Tanzania, Uganda, Yaman, Zambia dan Zimbabwe
Asia	Arab Saudi, Bangladesh, Brunei Darussalam, China, Filipina, Hongkong, India, Irak, Iran, Jepang, Kamboja, Korea Selatan, Kuwait, Libanon, Libya, Malaysia, Myanmar, Nepal, Oman, Pakistan, Singapura, Siria, Sri Lanka Taiwan, Thailand, Timor Leste, Turki, Vietnam, Yaman, dan Yordania
Australia	Australia dan New Zealand

Lampiran 25. Perusahaan eksportir Obat Hewan

...

No.	Perusahaan	No.	Perusahaan
1.	PT. Agrinusa Jaya Santosa	18.	PT. Medion Ardhika Bhakti
2.	PT. Alitech Biotechnology Indonesia	19.	PT. Medion Farma Jaya
3.	PT. Bahana Sinar Gemilang	20.	PT. Megasetia Agung Kimia
4.	PT. BEC Feed Solutions Indonesia	21.	PT. Meiji Indonesia Pharmaceutical Industries
5.	PT. Behn Meyer Chemicals	22.	PT. Mitravet
6.	PT. Bioplagen Indonesia	23.	PT. Monrad Lumban Holbung
7.	PT. Biotek Indonesia	24.	PT. Nugen Bioscience Indonesia
8.	PT. Biotics Prima Agrisindo	25.	PT. Pfizer Indonesia Tbk
9.	PT. Bright International	26.	PT. Romindo Primavetcom
10.	PT. Caprifarmindo Laboratories	27.	PT. Sanbe Farma
11.	PT. Cheil Jedang Indonesia	28.	PT. Sanbio
12.	PT. Ecomec	29.	PT. Satwa Jawa Jaya
13.	PT. Farmadika Sejahtera Indonesia	30.	PT. Shs International
14.	PT. Fenzana Putra Perkasa	31.	PT. Trouw Nutrition Indonesia
15.	PT. Intervet Indonesia	32.	PT. Univetama Dinamika
16.	PT. Itpsa Nutritional Solution	33.	PT. Vaksindo Satwa Nusantara
17.	PT. Kalbe Farma Tbk		

No.	Nama Produsen Obat Hewan	Sertifikasi/Resertifikasi	Ruang Lingkup
1.	PT. Romindo Primavetcom	Resertifikasi	1. Antibiotik Non β-laktam (Serbuk Oral) 2. Antibakteri (Serbuk Oral dan Cairan Oral) 3. Anti parasit, Anthelmentika (Serbuk Oral dan Cairan Oral) 4. Anti parasit, Antiprotozoa (Serbuk Oral dan Cairan Oral) 5. Vitamin dan Mineral (Serbuk Oral dan Cairan Oral) 6. Desinfektan (Cairan) 7. Premiks
2.	PT. Olsindo Prima Satwa	Resertifikasi	1. Antibiotik Non β-laktam (serbuk oral dan cairan oral) 2. Antibakteri (serbuk oral) 3. Anti parasit, Anthelmentika (cairan oral) 4. Vitamin dan Mineral (serbuk oral) 5. Desinfektan (cairan) 6. Premiks (serbuk)
3.	PT. Agro Makmur Senbsa	Resertifikasi	1. Antibiotik Non β-laktam (Serbuk Oral) 2. Antibakteri (Serbuk Oral) 3. Anthelmentika (Serbuk Oral) 4. Antiparasit (Serbuk Oral dan Cairan Oral) 5. Vitamin dan Mineral (Serbuk Oral)
4.	PT. Sanbio Laboratories	Resertifikasi	1. Vaksin Virus Akif untuk Unggas
5.	PT. Agrinusa Jaya Santosa	Resertifikasi	2. Vaksin Virus Inaktif untuk Unggas 1. Antibiotik β-laktam (Serbuk Oral) 2. Antibiotik Non β-laktam (Serbuk Oral dan Cairan Liquid) 3. Vitamin dan Mineral (Serbuk Oral) 4. Premiks 5. Obat Alami (Serbuk Oral dan Cairan Oral)
6.	PT. Eka Farma	Resertifikasi	1. Antibiotik Non β-laktam (Serbuk Oral, cairan oral dan kapsul) 2. Antibakteri (Serbuk oral, cairan oral dan kapsul) 3. Anti parasit, Anthelmentika (Serbuk oral, cairan oral, kapsul, kaplet dan bolus) 4. Anti parasit, Antiprotozoa (Serbuk topikal, cairan oral dan cairan topikal) 5. Anti parasit, Antifungi (Serbuk topikal, cairan oral, cairan topikal dan semi padat) 6. Vitamin dan Mineral (Serbuk oral, cairan oral, kapsul dan blok) 7. Roboransia (Serbuk oral dan kapsul) 8. Obat Herbal (Serbuk oral, cairan oral, kapsul, pil dan bolus)
7.	PT. Kymmoshi Global Indonesia	Sertifikasi	Desinfektan – Cairan
8.	PT. Bina Citra Agrofarma	Sertifikasi	1. Farmasetik Non Steril, Non Antibiotik, Non Belaktam (serbuk oral dan cairan oral) 2. Premiks (serbuk oral)
9.	CV. Multi Meditas Pratama	Sertifikasi	Farmasetik Non Steril (Serbuk Oral dan Cairan Oral)
10.	PT. Romindo Primavetcom	Sertifikasi	Farmasetik Steril (Injeksi)
11	PT. Satwa Medika Utama	Sertifikasi	1. Farmasetik Non Steril (serbuk oral dan cairan) 2. Premiks (serbuk oral dan cairan oral)
12	PT. Biotis Prima Agrisindo	Sertifikasi	1. Vaksin virus akif untuk unggas (kering beku dan cairan injeksi) 2. Vaksin virus inaktif untuk unggas (emulsi injeksi) 3. Vaksin virus Akif untuk hewan besar (cairan injeksi) 4. Vaksin virus inaktif untuk hewan besar (emulsi injeksi)
13	PT. Vadco Prosper Mega	Sertifikasi	Farmasetik steril (cairan injeksi)

Lampiran 26. Data Pemotongan Betina Produktif Nasional Bulan Januari-November Tahun 2017 dan 2018

No	Provinsi	Pemotongan sd November		%Penurunan Pemotongan Betina Produktif
		2017	2018	
1	Bali	1.269	1.000	21,2
2	Bengkulu	136	29	78,68
3	Di Yogyakarta	1.384	276	80,06
4	Jambi	1.397	608	56,48
5	Jawa Barat		- 230	-23.000,00
6	Jawa Tengah	4.492	2.303	48,73
7	Jawa Timur	262	212	19,08
8	Kalimantan Barat	303	61	79,87
9	Kalimantan Timur	396	23	94,19

10	Nusa Tenggara Barat	19	56	-194,74
11	Nusa Tenggara Timur	272	17	93,75
12	Riau	932	426	54,29
13	Sulawesi Selatan	1.310	740	43,51
14	Sulawesi Tenggara	5.462	1.731	68,31
15	Sulawesi Utara	1.070	338	68,41
16	Sumatera Barat	387	390	-0,78
17	Sumatera Selatan	763	74	90,3
	Total di Lokasi Target	19.854	8.514	57,12
1	Aceh	540	262	51,48
2	Bangka Belitung	0	1	-100
3	Banten	0	0	
4	Dki Jakarta	0	0	
5	Gorontalo	0	22	-22.000,00
6	Kalimantan Selatan	9	46	-411,11
7	Kalimantan Tengah	98	40	59,18
8	Kalimantan Utara	9	12	-33,33
9	Kepulauan Riau	46	1	97,83
10	Lampung	1	0	100
11	Maluku	0	567	-56.700,00
12	Maluku Utara	68	18	73,53
13	Papua	53	23	56,6
14	Papua Barat	6	40	-566,67
15	Sulawesi Barat	411	666	-62,04
16	Sulawesi Tengah	431	737	-71
17	Sumatera Utara	193	94	51,3
	Total di Lokasi Non Target	1.865	2.529	-35,6
	Total	21.719	11.043	49,16

LAMPIRAN BARANTAN

Lampiran 27. Status Akreditasi Laboratorium UPT Lingkup Badan Karantina Pertanian S/D Desember 2018

No	Nama Laboratorium	Status Terakreditasi	Dalam Proses Pengajuan Akreditasi di KAN	Persiapan Pengajuan Akreditasi ke KAN	Keterangan
1.	Laboratorium BBUSKP	✓			
2.	Laboratorium BBKP Makassar	✓			
3.	Laboratorium BBKP Surabaya	✓			
4.	Laboratorium BBKP TanjungPriok	✓			
5.	Laboratorium BBKP SoekarnoHatta	✓			
6.	Laboratorium BBKP Belawan	✓			
7.	Laboratorium BKP Kelas I Denpasar	✓			
8.	Laboratorium BKP Kelas I Balikpapan	✓			
9.	Laboratorium BKP Kelas I Palembang	✓			
10.	Laboratorium BKP Kelas II Medan	✓			
11.	Laboratorium BKP Kelas I Jambi	✓			
12.	Laboratorium BKP Kelas I Mataram	✓			
13.	Laboratorium BKP Kelas I Banjarmasin	✓			
14.	Laboratorium BKP Kelas I Bandar Lampung	✓			
15.	Laboratorium BKP Kelas II Cilegon	✓			
16.	Laboratorium BKP Kelas II Kendari	✓			
17.	Laboratorium BKP Kelas II Pangkal Pinang	✓			
18.	Laboratorium BKP Kelas II Yogyakarta	✓			
19.	Laboratorium SKP Kelas I Banda Aceh	✓			
20.	Laboratorium BKP Kelas I Kupang		✓		<ul style="list-style-type: none"> • Sudah di assessment, dalam proses tindakan perbaikan dan verifikasi • Tindakan perbaikan oleh tim assessor KAN
21.	Laboratorium BKP Kelas II Tanjung Pinang	✓			
22.	Laboratorium SKP Kelas I Biak	✓			
23.	Laboratorium SKP Kelas I Samarinda	✓			
24.	Laboratorium SKP Kelas I Sumbawa Besar	✓			
25.	Laboratorium BKP Kelas II Palangkaraya	✓			
26.	Laboratorium BKP Kelas I Padang	✓			
27.	Laboratorium BKP Kelas I Batam	✓			
28.	Laboratorium SKP Kelas I Bengkulu	✓			
29.	Laboratorium BKP Kelas I Manado	✓			
30.	Laboratorium BKP Kelas I Pekanbaru	✓			
31.	Laboratorium BKP Kelas II Tarakan	✓			

32.	Laboratorium BKP Kelas II Gorontalo	✓			
33.	Laboratorium SKP Kelas I Tanjung Balai Asahan	✓			
34.	Laboratorium SKP Kelas I Bandung	✓			
35.	Laboratorium BKP Kelas I Semarang	✓			
36.	Laboratorium SKP Kelas I Cilacap	✓			
37.	Laboratorium SKP Kelas II Bangkalan	✓			
38.	Laboratorium BKP Kelas I Pontianak	✓			
39.	Laboratorium SKP Kelas I Entikong			✓	<ul style="list-style-type: none"> • Belum mengajukan akreditasi ke KAN, • Lab sedang renovasi, tidak ada sampel yang diuji di lab
40.	Laboratorium BKP Kelas II Palu		✓		<ul style="list-style-type: none"> • Sudah diassessment, dalam poses tindakan perbaikan oleh laboratorium • Verifikasi tindakan perbaikan oleh assessor KAN
41.	Laboratorium SKP Kelas I Pare-pare	✓			
42.	Laboratorium BKP Kelas I Jayapura	✓			
43.	Laboratorium BKP Kelas II Ternate	✓			
44.	Laboratorium SKP Kelas II Tanjung Balai Karimun	✓			
45.	Laboratorium SKP Kelas II Mamuju	✓			
46.	Laboratorium SKP Kelas I Ambon	✓			
47.	Laboratorium SKP Kelas I Timika	✓			
48.	Laboratorium SKP Kelas I Sorong	✓			
49.	Laboratorium SKP Kelas II Ende			✓	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam proses pengajuan akreditasi ke KAN (upload dokumen ke KAN)
50.	Laboratorium SKP Kelas II Manokwari			✓	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam proses pengajuan akreditasi ke KAN (upload dokumen ke KAN)
51.	Laboratorium SKP Kelas I Merauke	✓			
	Jumlah	46	2	3	

Lampiran 28. Frekuensi layanan sertifikasi Karantina Hewan per UPT Karantina Pertanian

No	UPT	Pemeriksaan				Pembebasan			
		Impor	Ekspor	DM	DK	Impor	Ekspor	DM	DK
1	BBKP Belawan	827	52	292	1129	827	52	292	1119
2	BBKP Makasar	96	39	8875	11929	87	38	8852	11910
3	BBKP Soekarno-Hatta	6603	7925	15693	27941	6570	7914	15690	27940
4	BBKP Surabaya	7292	5998	7061	85028	7285	5998	7033	85017
5	BBKP Tanjung Priok	20218	439	223	5859	20209	439	223	5848
6	BKP Kelas I Balikpapan	2	30	10240	12168	0	30	10216	12168
7	BKP Kelas I B. Lampung	511	5	4446	31337	511	5	4432	31261
8	BKP Kelas I Banjarmasin	0	2	10510	9384	0	2	10484	9383
9	BKP Kelas I Batam	124	807	7502	9428	124	807	7502	9428
10	BKP Kelas I Denpasar	251	820	6965	11844	162	814	6798	11796
11	BKP Kelas I Jambi	0	7	863	3952	0	7	863	3952
12	BKP Kelas I Jayapura	0	0	3299	6673	0	0	3278	6673
13	BKP Kelas I Kupang	0	1	2719	6215	0	1	2678	6215
14	BKP Kelas I Manado	0	0	3037	4993	0	0	3037	4993
15	BKP Kelas I Mataram	1	12	9412	5879	1	12	9412	5879
16	BKP Kelas I Padang	32	4	582	2381	0	4	581	2381
17	BKP Kelas I Palembang	12	15	1538	9717	7	15	1538	9716
18	BKP Kelas I Pekanbaru	38	177	2534	9764	33	177	2534	9763
19	BKP Kelas I Pontianak	1	63	2643	11480	0	63	2641	11479
20	BKP Kelas I Semarang	1328	1842	3825	7056	1296	1842	3795	7056
21	BKP Kelas II Cilegon	13	0	13487	11399	13	0	13472	11247
22	BKP Kelas II Gorontalo	0	0	1552	885	0	0	1521	880
23	BKP Kelas II Kendari	0	44	5236	1653	0	44	5236	1653
24	BKP Kelas II Medan	39	2728	5092	6439	26	2728	5086	6438
25	BKP Kelas II Palangkaraya	3	0	3561	12080	3	0	3556	12078
26	BKP Kelas II Palu	0	2	2742	3065	0	2	2740	3063
27	BKP Kelas II Pangkal Pinang	2	0	8778	3629	0	0	8761	3628
28	BKP Kelas II Tanjung Pinang	263	371	3646	3524	249	367	3643	3523
29	BKP Kelas II Tarakan	0	7	2733	9834	0	7	2733	9834
30	BKP Kelas II Ternate	0	0	2068	501	0	0	1943	501
31	BKP Kelas II Yogyakarta	110	707	4512	6574	39	707	4505	6574
32	SKP Kelas I Ambon	0	0	538	336	0	0	534	336
33	SKP Kelas I Banda Aceh	1	7	1346	1610	0	7	1346	1610
34	SKP Kelas I Bandung	19	190	2965	1907	7	190	2965	1907
35	SKP Kelas I Bengkulu	0	0	1535	823	0	0	1533	823
36	SKP Kelas I Biak	0	0	2299	792	0	0	2255	792
37	SKP Kelas I Cilacap	6	0	0	0	6	0	0	0
38	SKP Kelas I Entikong	53	1	0	0	0	1	0	0
39	SKP Kelas I Merauke	0	0	884	3037	0	0	859	3037
40	SKP Kelas I Pare-Pare	0	0	5759	9088	0	0	5758	9087
41	SKP Kelas I Samarinda	0	5	4519	5776	0	5	4518	5776
42	SKP Kelas I Sorong	0	0	2753	612	0	0	2686	611
43	SKP Kelas I Sumbawa Besar	0	0	2679	11035	0	0	2678	11028
44	SKP Kelas I TB Asahan	1	18	0	680	0	18	0	680
45	SKP Kelas I Timika	19	0	2109	80	19	0	2109	78
46	SKP Kelas II Bangkalan	0	0	7298	3136	0	0	7284	3134
47	SKP Kelas II Mamuju	0	0	433	2473	0	0	433	2473
48	SKP Kelas II Manokwari	0	0	1942	861	0	0	1912	861
49	SKP Kelas II TB Karimun	87	69	2021	2133	3	69	2015	2133
50	SKP Kelas II Ende	0	0	1	662	0	0	0	662
	TOTAL	37952	22387	194747	378781	37477	22365	193960	378424

Sumber: Aplikasi IQ FAST tahun 2018.

Lampiran 29. Frekuensi Kegiatan Tindakan Karantina Impor, Ekspor Domestik Masuk dan Domestik Keluar (Karantina Hewan)

No	Tindakan Karantina Hewan	Frekuensi (kali)			
		Impor	Ekspor	DM	DK
1.	Hewan Hidup				
	a. Pemeriksaan	3.296	3.646	125.143	222.043
	b. Pelepasan	2.821	3.624	124.356	221.686
2.	Bahan Asal Hewan				
	a. Pemeriksaan	38.351	14.939	73.566	177.253
	b. Pelepasan	37.876	14.917	72.779	176.896
3.	Hasil Bahan Asal Hewan				
	a. Pemeriksaan	680	138	7.286	1.592
	b. Pelepasan	205	116	6.481	1.235
4.	Media Pembawa/ BendaLain				
	a. Pemeriksaan	7.919	1.989	20.365	43.904
	b. Pelepasan	7.444	1.967	19.578	43.547

Sumber: Aplikasi IQ FAST tahun 2018.

Lampiran 30. Frekuensi layanan sertifikasi Karantina Tumbuhan per UPT Karantina Pertanian

No	UPT	Pemeriksaan				Pembebasan			
		Impor	Ekspor	DM	DK	Impor	Ekspor	DM	DK
1	BBKP Belawan	7219	13232	205	1371	7161	12770	205	1337
2	BBKP Makasar	359	2765	8229	19853	295	2763	8226	19847
3	BBKP Soekarno-Hatta	7347	13683	9739	33071	7284	13521	9738	33070
4	BBKP Surabaya	30097	37021	208	92351	30086	34798	206	92225
5	BBKP Tanjung Priok	33264	12316	1615	17618	33182	12304	1613	17603
6	BKP Kelas I Balikpapan	3886	139	17201	2006	3885	139	17196	2005
7	BKP Kelas I B. Lampung	727	10041	3637	10550	726	9990	3636	10542
8	BKP Kelas I Banjarmasin	72	1632	10971	1227	72	1631	10970	1227
9	BKP Kelas I Batam	4155	2082	7656	3682	4136	2082	7656	3682
10	BKP Kelas I Denpasar	335	5218	2303	3878	315	4808	2302	3870
11	BKP Kelas I Jambi	29	2200	1355	2271	29	2200	1355	2270
12	BKP Kelas I Jayapura	818	48	2997	9162	817	47	2997	9162
13	BKP Kelas I Kupang	1	28	3214	3354	1	28	3213	3354
14	BKP Kelas I Manado	4	1343	4548	4397	4	1318	4548	4395
15	BKP Kelas I Mataram	7	71	2786	12619	6	71	2784	12619
16	BKP Kelas I Padang	8	2106	239	7066	8	2070	239	7066
17	BKP Kelas I Palembang	188	4564	1312	7251	170	4535	1312	7251
18	BKP Kelas I Pekanbaru	499	8122	728	2762	496	8121	728	2761
19	BKP Kelas I Pontianak	361	3041	11262	8159	361	3032	11259	8156
20	BKP Kelas I Semarang	7584	10287	944	11269	7578	10242	944	11268
21	BKP Kelas II Cilegon	1183	694	87	29056	1160	694	87	28747
22	BKP Kelas II Gorontalo	0	5	2068	1697	0	5	2068	1697
23	BKP Kelas II Kendari	5	3	4673	5017	5	3	4673	5016
24	BKP Kelas II Medan	409	3884	1100	13689	385	3883	1091	13667
25	BKP Kelas II Palangkaraya	0	568	5628	1583	0	567	5624	1583
26	BKP Kelas II Palu	0	225	3501	7526	0	188	3500	7524
27	BKP Kelas II Pangkal Pinang	3	349	9742	3129	0	349	9739	3118
28	BKP Kelas II Tanjung Pinang	264	148	3812	787	263	148	3812	787

29	BKP Kelas II Tarakan	0	130	4218	836	0	130	4217	835
30	BKP Kelas II Ternate	0	4	6346	1849	0	4	6345	1848
31	BKP Kelas II Yogyakarta	100	4824	539	22725	34	4808	539	22725
32	SKP Kelas I Ambon	0	11	1966	2318	0	11	1966	2318
33	SKP Kelas I Banda Aceh	96	236	1374	2690	4	236	1374	2690
34	SKP Kelas I Bandung	12	8943	355	20121	12	8341	355	20120
35	SKP Kelas I Bengkulu	0	105	1079	1006	0	105	1079	1006
36	SKP Kelas I Biak	0	112	4316	461	0	112	4313	461
37	SKP Kelas I Cilacap	113	616	0	26	75	616	0	26
38	SKP Kelas I Entikong	0	336	0	0	0	336	0	0
39	SKP Kelas I Merauke	0	33	148	3609	0	33	148	3609
40	SKP Kelas I Pare-Pare	0	226	388	7551	0	226	388	7549
41	SKP Kelas I Samarinda	14	267	7213	1142	13	267	7213	1142
42	SKP Kelas I Sorong	0	10	4928	963	0	7	4928	963
43	SKP Kelas I Sumbawa Besar	13	2	689	3066	13	2	689	3066
44	SKP Kelas I TB Asahan	1	3153	34	661	1	3126	33	661
45	SKP Kelas I Timika	289	14	9014	223	289	0	9013	223
46	SKP Kelas II Bangkalan	0	0	2	105	0	0	2	105
47	SKP Kelas II Mamuju	16	165	4684	0	15	165	4684	0
48	SKP Kelas II Manokwari	0	0	3986	1779	0	0	3985	1779
49	SKP Kelas II TB Karimun	5	214	2867	660	0	214	2867	660
50	SKP Kelas II Ende	0	0	955	2915	0	0	955	2915
	TOTAL	99483	155216	176861	391107	98881	151046	176814	390550

Sumber: Aplikasi IQ FAST tahun 2018.

Lampiran 31. Frekuensi Kegiatan Tindakan Karantina Impor, Ekspor, Domestik Masuk dan Domestik Keluar (Karantina Tumbuhan)

No	Tindakan Karantina Tumbuhan	Frekuensi (kali)			
		Impor	Ekspor	DM	DK
1.	Benih/ Bibit				
	a. Pemeriksaan	2.568	5.246	25.859	110.555
	b. Pelepasan	1.996	5.092	25.812	109.998
2.	Hasil Tumbuhan Hidup (Bukan Benih)				
	a. Pemeriksaan	93.239	150.432	157.539	343.422
	b. Pelepasan	92.637	150.278	157.492	342.865

Sumber: Aplikasi IQ FAST tahun 2018.

Konsumsi per Kapita Buah dan Sayur dalam Rumah Tangga Tahun 2017

Buah	2017	Sayur	2017
Jeruk		Bayam	
- Kuantitas (Kg)	3,49	- Kuantitas (Kg)	3,55
- Nilai (Rp)	50.474,29	- Nilai (Rp)	20.805,00
		Kangkung	
		- Kuantitas (Kg)	4,17
Mangga		- Nilai (Rp)	22.786,43
- Kuantitas (Kg)	0,57	Kol/kubis	
- Nilai (Rp)	8.447,14	- Kuantitas (Kg)	1,41
Apel		- Nilai (Rp)	8.603,57
- Kuantitas (Kg)	1,04	Sawi Putih(Petsai)	
- Nilai (Rp)	26.280,00	- Kuantitas (Kg)	1,04
		- Nilai (Rp)	6.726,43

Buah	2017	Sayur	2017
Alpokot		Sawi Hijau	
- Kuantitas (Kg)	0,73	- Kuantitas (Kg)	1,51
- Nilai (Rp)	8.603,57	- Nilai (Rp)	9.959,29
Rambutan		Buncis	
- Kuantitas (Kg)	0,78	- Kuantitas (Kg)	0,89
- Nilai (Rp)	7.091,43	- Nilai (Rp)	7.195,71
		Kacang Panjang	
Duku		- Kuantitas (Kg)	2,56
- Kuantitas (Kg)	0,31	- Nilai (Rp)	16.477,14
- Nilai (Rp)	4.223,57	Tomat sayur	
Durian		- Kuantitas (Ons)	2,92
- Kuantitas (Kg)	0,42	- Nilai (Rp)	17.467,86
- Nilai (Rp)	7.612,86	Wortel	
		- Kuantitas (Kg)	1,30
Salak		- Nilai (Rp)	11.471,43
- Kuantitas (Kg)	2,35	Mentimun	
- Nilai (Rp)	19.084,29	- Kuantitas (Kg)	1,93
Nanas		- Nilai (Rp)	10.220,00
- Kuantitas (Kg)	0,47	Daun Ketela Pohon	
- Nilai (Rp)	3.232,86	- Kuantitas (Kg)	2,97
		- Nilai (Rp)	12.305,71
Tomat buah		Cabe hijau	
- Kuantitas (Kg)	0,63	- Kuantitas (Ons)	0,37
- Nilai (Rp)	4.484,29	- Nilai (Rp)	9.020,71
		Cabe rawit	
Buah dalam kaleng		- Kuantitas (Ons)	1,51
- Kuantitas (Kg)	-	- Nilai (Rp)	81,34
- Nilai (Rp)	208,57	Sayur dalam kaleng	
		- Kuantitas (Kg)	-
		- Nilai (Rp)	469,29
lainnya buah-buahan		Lainnya sayur-sayuran	
- Kuantitas (Kg)	1,15	- Kuantitas (Kg)	1,72
- Nilai (Rp)	18.510,71	- Nilai (Rp)	10.063,57

Sumber : BPS

Tabel ... menunjukkan bahwa konsumsi per kapita rumah tangga dalam setahun untuk buah seperti jeruk (3,49 kg), mangga (0,57 kg), salak (2,35 kg), nenas (0,47 kg) sedangkan konsumsi per kapita rumah tangga dalam setahun untuk sayur seperti bawang merah (25,71 ons), bawang putih (16,32 ons), cabe merah (1,77 ons), cabai hijau (0,37 ons) dan cabai rawit (1,51 ons).

